



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA TAHUN 2022





KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat terus menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2022 berikut penyampaian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya dalam Rapat Paripurna dilakukan secara tepat waktu.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dilakukan sebagai pemenuhan atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2022 memuat garis besar pelaksanaan, realisasi dan capaian tugas-tugas Pemerintah Daerah yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2022, yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2022. Melalui LKPJ Walikota Surabaya ini, diharapkan DPRD Kota Surabaya memiliki informasi secara lengkap sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan dan kinerja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

Pada tahun 2022, kita berusaha pulih setelah terpaan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek mulai dari kesehatan, sosial dan ekonomi, oleh sebab itu program kegiatan serta inovasi yang dijalankan di tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan dan sosial. Dengan upaya gotong royong oleh berbagai pihak mulai dari Pemerintah Kota, DPRD, Masyarakat dan para pemangku kepentingan baik dari sektor Pemerintah maupun Swasta, yang terwujudkan dalam sinergi kuat untuk Surabaya hebat. Hasil dari sinergi tersebut tampak dalam capaian-capaian yang berhasil kita raih di tahun 2022. Pada sektor ekonomi, ekonomi



terus bertumbuh hingga mencapai pertumbuhan ekonomi 6,51% selain itu tingkat pengangguran terbuka yang berhasil kita turunkan menjadi 7,62%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan pengangguran terbuka berimplikasi pada sektor sosial dengan turunnya persentase kemiskinan menjadi 4,72%. Keberhasilan pembangunan yang tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia juga mengalami peningkatan menjadi 82,74. Seiring dengan perbaikan pada sektor ekonomi dan sosial, pengelolaan lingkungan juga mengalami peningkatan dengan meningkatnya capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan menjadi 70,82. Perbaikan pelayanan publik terus dibenahi sehingga pada tahun 2022 kita memperoleh hasil penilaian atas SAKIP dan Reformasi Birokrasi di kategori A.

Pencapaian-pencapaian tersebut tidak dapat diraih oleh kerja Pemerintah Kota Surabaya saja, namun juga kerja bersama DPRD Kota Surabaya, Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat hal-hal yang memerlukan upaya peningkatan pada masa mendatang. Oleh karena itu, catatan-catatan strategis, saran dan masukan dari DPRD Kota Surabaya merupakan rekomendasi penting bagi penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya di masa mendatang.

Demikian LKPJ Walikota Tahun 2022 disampaikan. Terima kasih disampaikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKPJ ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan melalui gotong royong dan sinergi kuat untuk Surabaya hebat. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Salam sejahtera

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya

Surabaya, Maret 2023
Walikota Surabaya

ERI CAHYADI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 DASAR HUKUM	I-2
1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	I-6
1.3 DATA UMUM DAERAH	I-9
1.3.1 Kondisi Geografis Daerah.....	I-9
1.3.2 Gambaran Umum Demografis	I-9
1.3.4 Kondisi Ekonomi.....	I-15
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-26
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-37
1.3.7 Realisasi Pembiayaan	I-38
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II-1
2.1. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	II-2
2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	II-5
2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	II-7
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III-1
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1.1 CAPAIAN KINERJA PROGRAM SESUAI DENGAN TARGET KINERJA.....	III-1
3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	III-24
3.1.2 CAPAIAN KINERJA MASING-MASING KEGIATAN PADA SETIAP URUSAN.....	III-35
3.1.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	III-35
3.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	III-347
3.1.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	III-425
3.1.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	III-441
3.1.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	III-462
3.1.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	III-488
3.1.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan.....	III-494
3.1.2.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum.....	III-728
3.1.3 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA.....	III-735
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	III-740
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	III-751
3.4 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	III-821
3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2022	III-833
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	IV-1



4.1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN	IV-1
4.1.1	Identifikasi Tugas Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya	IV-1
4.1.2	Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkat Pemerintahan Di Bawahnya.....	IV-1
4.2	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	IV-2
BAB V PENUTUP.....		V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perumusan Penjelasan Visi – Misi	I-8
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2022	I-12
Tabel 1.3	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin	I-14
Tabel 1.4	Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin	I-14
Tabel 1.5	Jumlah PNS berdasarkan Golongan	I-15
Tabel 1.6	Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	I-15
Tabel 1.7	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2022* (dalam Juta Rupiah)	I-19
Tabel 1.8	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2021-2022* (dalam Juta Rupiah)	I-20
Tabel 1.9	Komoditas Ekspor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2021 dan 2022	I-21
Tabel 1.10	Komoditas Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2021 dan 2022	I-22
Tabel 1.11	10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi di Kota Surabaya Selama Tahun 2022	I-26
Tabel 1.12	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2022	I-27
Tabel 1.13	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	I-28
Tabel 1.14	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2022	I-29
Tabel 1.15	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kota Surabaya Tahun 2022	I-31
Tabel 1.16	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022	I-32
Tabel 1.17	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022	I-34
Tabel 1.18	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer	I-34
Tabel 1.19	Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2022	I-37
Tabel 1.20	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022	I-39
Tabel 2.1	Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022	II-4
Tabel 2.2	Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2022	II-6
Tabel 2.3	Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022	II-8
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2022	III-1
Tabel 3.2	Indeks Gini Tahun 2018 – 2022	III-5
Tabel 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 – 2022	III-7
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022	III-8
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022	III-10
Tabel 3.6	Indeks Budaya Lokal Tahun 2018 – 2022	III-12
Tabel 3.7	Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2022*	III-13
Tabel 3.8	Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2018 – 2021	III-15
Tabel 3.9	Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2022	III-15
Tabel 3.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2018 – 2022	III-16
Tabel 3.11	Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2018 – 2022	III-17
Tabel 3.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2018 – 2022	III-18
Tabel 3.13	Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2022	III-19
Tabel 3.14	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2018 – 2021	III-22
Tabel 3.15	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2022*	III-22
Tabel 3.16	Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022	III-25
Tabel 3.17	Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022	III-36



Tabel 3.18 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022.....	III-349
Tabel 3.19 Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2022	III-426
Tabel 3.20 Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2022	III-442
Tabel 3.21 Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2022	III-463
Tabel 3.22 Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2022.....	III-489
Tabel 3.23 Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2022.....	III-495
Tabel 3.24 Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022	III-729
Tabel 3.26 Kebijakan Strategis Tahun 2022	III-741
Tabel 3.27 Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021	III-752
Tabel 3.28 Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022.....	III-821
Tabel 3.29 Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022	III-833



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2022.....	I-10
Gambar 1.2	Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia ..	I-11
Gambar 1.3	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 ..	I-12
Gambar 1.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022.....	I-16
Gambar 1.5	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2022*	I-17
Gambar 1.6	Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022 ..	I-23
Gambar 1.7	Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi Kota Surabaya Tahun 2022.....	I-24
Gambar 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2022	III-2
Gambar 3.2	Indeks Gini Tahun 2018 – 2022	III-5
Gambar 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 – 2022.....	III-6
Gambar 3.4	Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022.....	III-8
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 – 2022.....	III-10
Gambar 3.6	Indeks Budaya Lokal Tahun 2018 – 2022.....	III-12
Gambar 3.7	Indeks Harmoni Sosial 2022	III-14
Gambar 3.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2018 – 2022	III-18
Gambar 3.9	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Tahun 2018 – 2021	III-21
Gambar 3.10	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota Tahun 2022*.....	III-23
Gambar 3.11	Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya	III-735
Gambar 3.12	Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	III-736
Gambar 3.13	Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	III-738
Gambar 3.14	Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan	III-739
Gambar 3.15	Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	III-739
Gambar 3.16	Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	III-740



BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 masih berada dalam situasi covid-19, walaupun sepanjang tahun 2022 kondisi Covid-19 cenderung menurun, namun dampak terjadinya pandemi Covid-19 masih terus dirasakan utamanya pada sektor sosial dan ekonomi, oleh karenanya kebijakan pembangunan di tahun 2022 masih difokuskan pada pemulihan ekonomi serta reformasi struktural yang ditekankan pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Penyusunan kebijakan pada tahun 2022 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sedangkan penyusunan penganggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, memuat capaian kinerja hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berupa program dan kegiatan, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari



Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya Tahun 2022 didasarkan atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);



12. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034; (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 5);



31. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 40);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 67).

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

***“Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang
Maju, Humanis Dan Berkelanjutan”***

Makna dalam visi tersebut adalah:

- 1. Gotong Royong** Gotong royong merupakan pengerahan tenaga tambahan terhadap kekurangan tenaga dalam menjalankan berbagai aktivitas. Gotong royong juga diyakini sebagai potensi sosial yang dapat dijadikan sebagai bagian yang signifikan dalam pemecahan berbagai masalah yang kemasyarakatan termasuk dalam upaya pembangunan daerah. Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur yang memiliki dinamika pembangunan yang sangat kompleks. Guna mencapai upaya pembangunan Kota Surabaya menjadi kota dengan tatanan yang dinamis kelas dunia maka dibutuhkan kerjasama dan semangat gotong royong dari berbagai elemen masyarakat. Peran aktif serta gotong royong berbagai elemen tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pembangunan, mendukung program pembangunan sampai melestarikan hasil pembangunan.
- 2. Maju** yaitu Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tentu menjadi barometer perkembangan ekonomi bukan hanya di tingkat Jawa Timur namun juga di tingkat Nasional. Perwujudan pada Visi menjadikan Kota Surabaya sebagai wilayah dengan tingkat Maju perekonomiannya adalah sebagai wujud upaya pembangunan daerah yang mengoptimalkan segala bentuk potensi ekonomi daerah sebagai



penopang perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi yang dituju bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata namun bagaimana upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya mampu dirasakan oleh masyarakat Kota Surabaya.

3. Humanis dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya menciptakan Kota Surabaya sebagai tempat yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Aman yang berarti kesiagaan perlindungan atas resiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup, dengan melakukan penataan ruang publik yang hijau sehingga nyaman dan ramah untuk anak, lansia serta difabel. Kemudian rasa nyaman, yang berarti menggambarkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, rekreasi dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

4. Kota Dunia Berkelanjutan Pembangunan Kota Surabaya harus mengedepankan model pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainability Development*) yaitu bagaimana pembangunan yang menedepankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial serta budaya. Pembangunan Kota Surabaya mengintegrasikan upaya pertumbuhan ekonomi dengan upaya perwujudan keadilan sosial, kelestarian lingkungan, partisipasi masyarakat serta keragaman budaya-.

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional;
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya;
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan;
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;



5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Tabel 1.1
Perumusan Penjelasan Visi – Misi

Visi	Pokok-pokok Visi	Misi
Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis Dan Berkelanjutan	Maju	Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
		Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya
	Humanis	Misi 5 : Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan
		Misi 3 : Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
		Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Berkelanjutan	



1.3 DATA UMUM DAERAH

Gambaran umum daerah Kota Surabaya disajikan berdasarkan kondisi geografis dan demografis serta kondisi ekonomi, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

Kota Surabaya secara geografis terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77% dan sebelah selatan sebesar 6,52%. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 %.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas $\pm$ 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
3. Sebelah Timur : Selat Madura;
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

1.3.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki penduduk yang memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 2.987.863 jiwa di 31 wilayah kecamatan. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

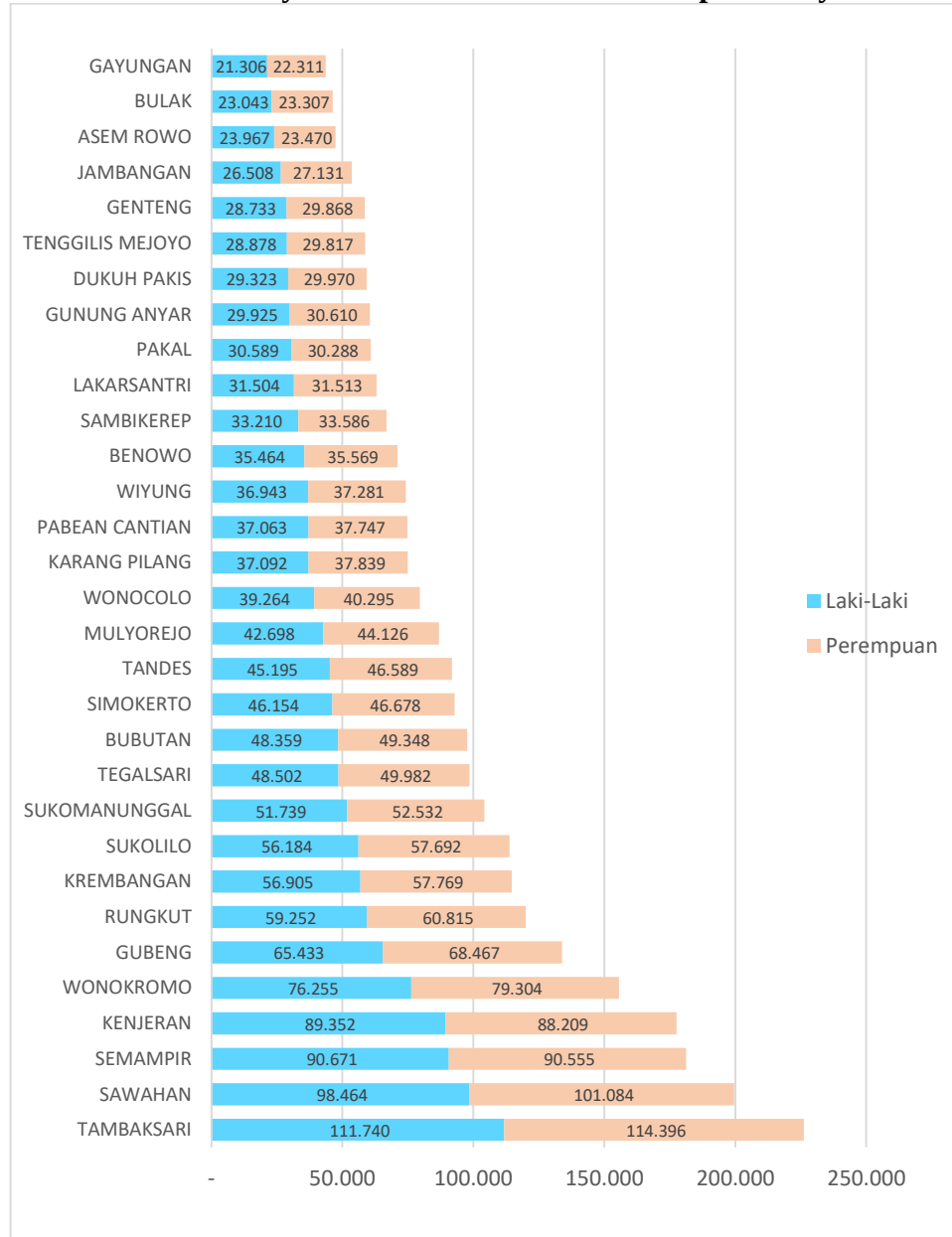
a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.508.148 jiwa atau 50,48% penduduk perempuan dan 1.479.715 jiwa atau 49,52% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap



kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 226.136 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Gayungan yaitu 43.617 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

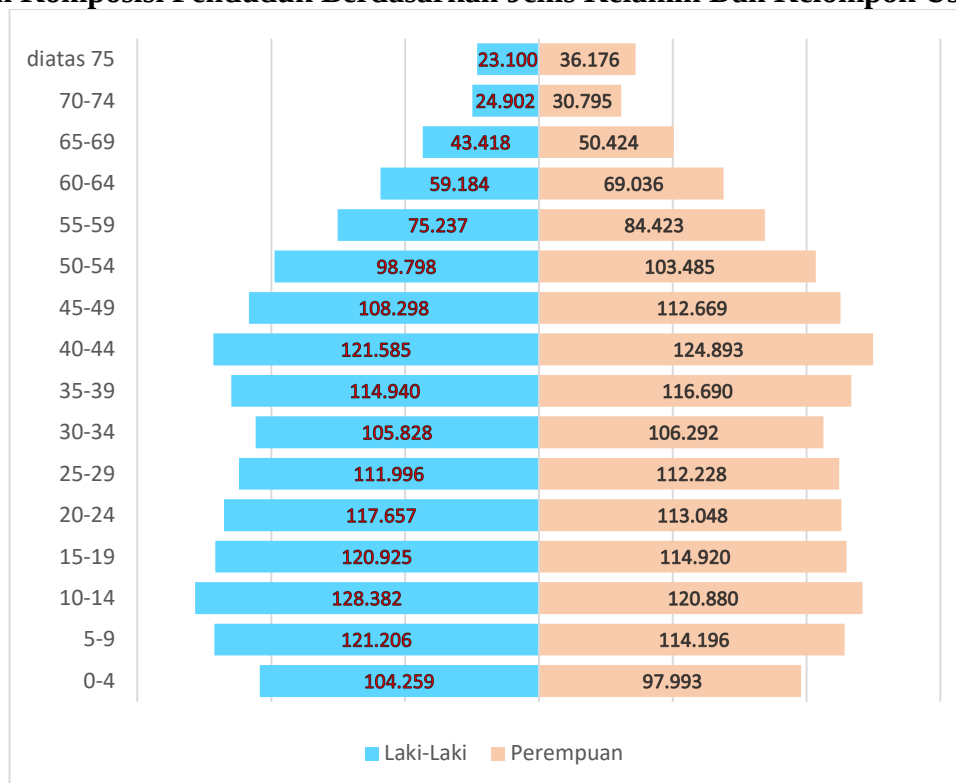
b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2022 berdasarkan kelompok usia didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.092.132 jiwa atau 70,02%, sedangkan



kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 686.916 jiwa atau 22,99% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 208.815 jiwa atau 6,99%. Bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (*stasioner*). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Surabaya memiliki pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif tetap atau stabil.

Gambar 1.2
Rincian Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kelompok Usia



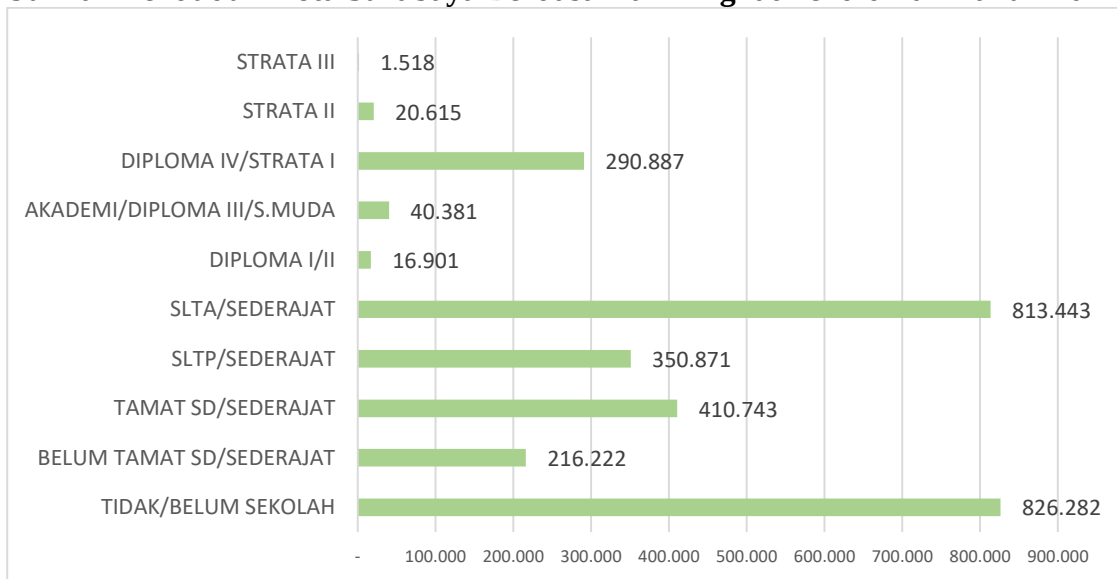
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (Diploma dan Strata), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I sebanyak 290.887 jiwa. Sedangkan untuk tingkat Pendidikan Menengah dan Dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 813.443 orang dan untuk yang tidak/belum sekolah sebanyak 826.282 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan ditunjukkan oleh gambar berikut.



Gambar 1.3
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diolah, 2022

d. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya pada tahun 2018-2022 relatif stabil. Pergerakan jumlah penduduk, selain karena faktor pertumbuhan penduduk alami (kelahiran dan kematian), mutasi penduduk (pindah masuk dan pindah keluar) juga karena adanya proses pemutakhiran data kependudukan yang terpusat dalam Satu Data Kementerian Dalam Negeri. Secara detail gambaran persebaran dan perkembangan jumlah penduduk kecamatan pada tahun 2018 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kota Surabaya Tahun 2018 dan 2022

No.	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Karang Pilang	72.044	77.557	74.281	74.341	74.931
2	Wonocolo	78.546	85.284	79.361	79.260	79.559
3	Rungkut	111.987	121.247	117.287	117.983	120.067
4	Wonokromo	158.235	169.994	159.138	157.126	155.559
5	Tegalsari	99.866	108.097	98.904	98.288	98.484
6	Sawahan	203.011	216.414	201.743	200.341	199.548
7	Genteng	58.303	63.165	58.450	58.114	58.601
8	Gubeng	135.727	143.874	135.817	134.467	133.900
9	Sukolilo	107.957	116.915	110.705	111.762	113.876
10	Tambaksari	221.986	239.272	225.507	225.180	226.136



No.	KECAMATAN	2018	2019	2020	2021	2022
11	Simokerto	94.642	104.143	94.619	93.793	92.832
12	Pabean Cantian	76.800	85.856	75.346	74.820	74.810
13	Bubutan	99.619	107.835	98.762	97.573	97.707
14	Tandes	90.744	96.590	91.827	91.462	91.784
15	Krembangan	114.818	126.743	114.807	114.618	114.674
16	Semampir	182.245	206.449	183.158	183.344	181.226
17	Kenjeran	162.274	179.198	172.452	174.180	177.561
18	Lakarsantri	57.637	61.907	60.770	61.422	63.017
19	Benowo	63.199	68.351	67.828	68.643	71.033
20	Wiyung	69.332	74.024	72.522	73.223	74.224
21	Dukuh Pakis	59.028	62.846	59.740	59.564	59.293
22	Gayungan	42.907	47.827	43.553	43.336	43.617
23	Jambangan	49.892	54.105	52.249	52.851	53.639
24	Tenggilis Mejoyo	56.794	60.274	58.239	58.329	58.695
25	Gunung Anyar	56.135	60.505	59.048	59.673	60.535
26	Mulyorejo	84.328	91.339	86.407	86.469	86.824
27	Sukomanunggal	101.195	108.264	103.814	103.831	104.271
28	Asemrowo	44.899	49.808	46.563	47.036	47.437
29	Bulak	43.401	46.166	44.975	45.420	46.350
30	Pakal	54.102	58.599	57.805	58.865	60.877
31	Sambikerep	62.278	66.833	65.053	65.638	66.796
JUMLAH		2.913.931	3.159.481	2.970.730	2.970.952	2.987.863

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Pada Tahun 2019, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya sebesar 8,43 % terhadap jumlah penduduk Tahun 2018. Sedangkan pada Tahun 2020, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya -5,97 %, mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 dikarenakan penyesuaian data dengan Satu Data Kementerian Dalam Negeri dan pada tahun 2022, pertumbuhan penduduk Kota Surabaya sebesar 0,57%.

1.3.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menggerakkan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan SDM non PNS agar dapat mewujudkan pelayanan prima. Jumlah PNS berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki sebagaimana tabel berikut ini.



Tabel 1.3
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Jumlah PNS Laki-laki	4.650
2.	Jumlah PNS Perempuan	7.046
Jumlah seluruh PNS		11.696

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pendidikan, 2023

Komposisi PNS berdasarkan jenis kelamin berbeda jika dikaitkan dengan pemegang jabatan struktural karena komposisi pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki yang lebih besar daripada perempuan dengan selisih yang kecil sebagaimana Tabel 1.4. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya telah mengakomodasi konsep kesetaraan gender dalam karir dan jabatan selain mempertimbangkan aspek yang utama yaitu kompetensi, disiplin, integritas dan pendidikan melalui penerapan manajemen talenta sehingga baik PNS Laki-laki maupun Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural.

Tabel 1.4
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Jumlah PNS Pejabat Struktural	1.204
	Laki-laki	638
	Perempuan	566
2.	Jumlah PNS Staf	10.492
	Laki-laki	4.012
	Perempuan	6.480
Total		11.696

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Jika dikelompokkan berdasarkan golongan, maka dapat diketahui bahwa jumlah PNS terbanyak pada golongan III dan paling sedikit pada golongan I sebagaimana yang disampaikan dalam Tabel 1.5. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja masih mendominasi jumlah PNS di Kota Surabaya.



Tabel 1.5
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	Jumlah PNS Golongan I	222
2.	Jumlah PNS Golongan II	2.433
3.	Jumlah PNS Golongan III	6.976
4.	Jumlah PNS Golongan IV	2.065
Jumlah seluruh PNS		11.696

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Jumlah PNS dengan tingkat golongan golongan III dan IV, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 1.6. menunjukkan bahwa golongan III dan IV tersebut banyak dipenuhi oleh PNS berpendidikan diploma III dan strata I.

Tabel 1.6
Jumlah PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No.	Uraian	Tahun 2022
1.	SD	114
2.	SMP	223
3.	SLTA	1.777
4.	Diploma I	11
5.	Diploma II	57
6.	Diploma III	1.010
7.	Diploma IV	102
8.	Strata I	6.847
9.	Strata II	1.545
10.	Strata III	10
Jumlah seluruh PNS		11.696

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

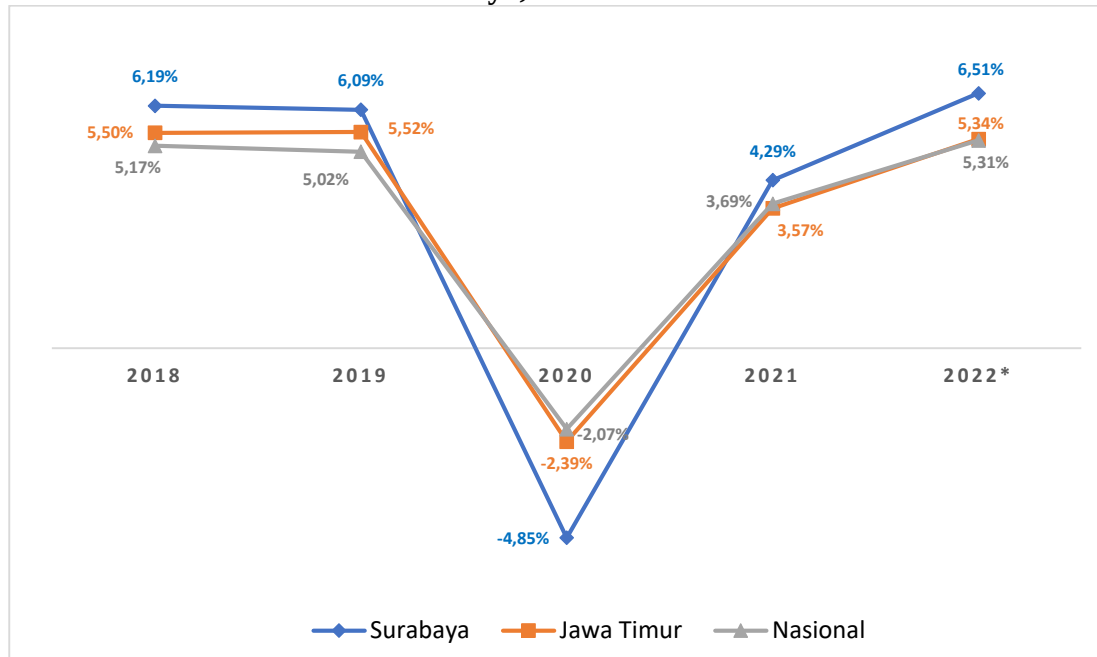
1.3.4 Kondisi Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kota Surabaya terus menunjukkan perbaikan positif. Keberlanjutan pemulihan ekonomi Kota Surabaya dibuktikan dengan performa indikator makro ekonomi yang tumbuh makin tinggi melanjutkan pertumbuhan sebelumnya. Pada tahun 2021 perekonomian Kota Surabaya tumbuh sebesar 4,29% dan selanjutnya meningkat menjadi 6,51% di akhir tahun 2022. Perekonomian Kota Surabaya tersebut juga lebih tinggi dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional masing-masing sebesar 5,31% dan 5,34%. Capaian pertumbuhan ekonomi yang

lebih tinggi merefleksikan peningkatan produktivitas pelaku usaha di Kota Surabaya yang mengindikasikan percepatan pemulihan perekonomian Kota Surabaya jauh lebih pesat dibanding wilayah yang lainnya.

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023, diolah

Catatan :*)Data sementara

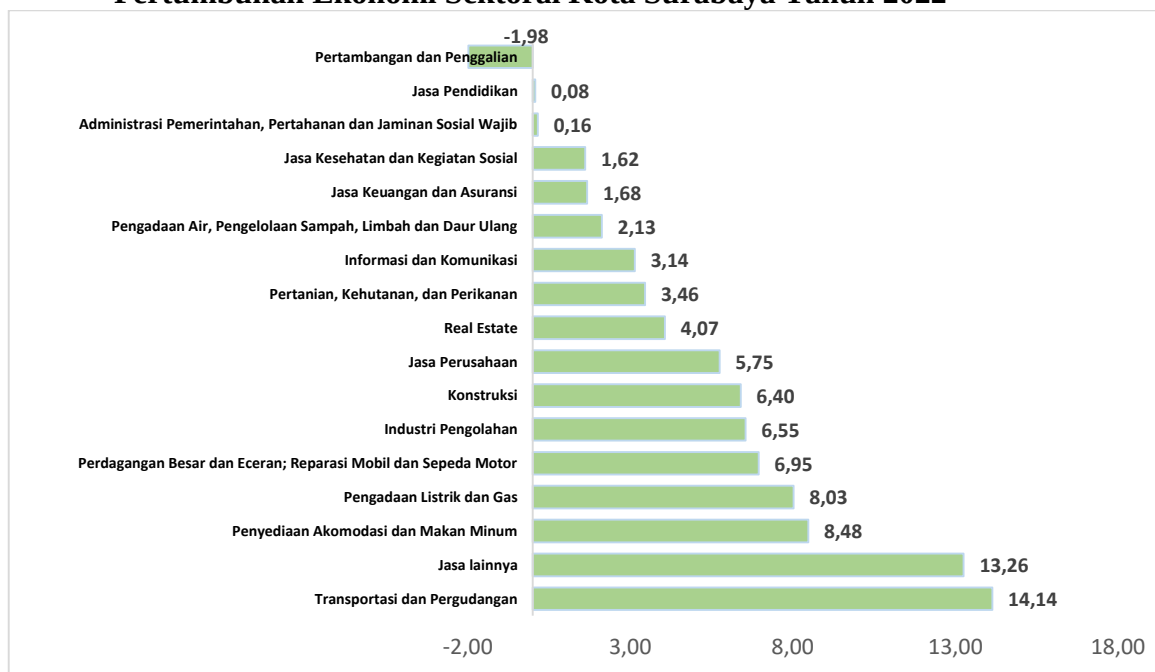
Capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya merupakan gambaran keberhasilan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam sinergi pemulihan ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya menyusun program percepatan pergerakan ekonomi untuk menaikkan kembali kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya yang sempat terpuruk akibat dampak Covid-19. Intervensi diwujudkan melalui pemberdayaan usaha padat karya, perbaikan iklim investasi, penyediaan akses lowongan pekerjaan, serta pemberdayaan UMKM

Selama proses pemulihan ekonomi, kecepatan laju pertumbuhan lapangan usaha berbeda antar lapangan usaha satu dengan yang lainnya. Kecepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar peranan lapangan usaha berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan serta kendala dari masing-masing lapangan usaha untuk kembali produktif dengan semestinya. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran, pada tahun 2022 terbentuk dari 17



(tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih berkontraksi yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Pertumbuhan tertinggi dikontribusi oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,14 % dan Jasa Lainnya sebesar 13,26 %. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 8 % yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,48 %), Pengadaan Listrik dan Gas (8,03 %), diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (6,95 %), Industri Pengolahan (6,55 %), diikuti Kontruksi (6,40 %), dan Jasa Perusahaan (5,75 %) dimana lapangan usaha tersebut tumbuh pada kisaran 6 % selama tahun 2022. Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5 %. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2022 yakni Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar -1,98 %. Sebagaimana yang telah diuraikan terperinci sebelumnya, lapangan usaha yang tidak berkaitan erat dengan situasi pandemi mengalami laju pertumbuhan yang lebih rendah dibanding ketika masa pandemi. Sementara lapangan usaha yang termasuk sektor-sektor produktif kembali tumbuh menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi seperti sedia kala.

Gambar 1.5
Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kota Surabaya Tahun 2022*



Sumber data: BPS Pusat, BPS Jawa Timur dan BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023, diolah
Catatan :*)Data sementara



Aktivitas ekonomi merupakan fungsi dari mobilitas dan aktivitas konsumsi, dimana tingkat mobilitas yang tinggi dan meningkatnya konsumsi masyarakat mengindikasikan semakin produktif suatu perekonomian. Kembali produktifnya ekonomi Surabaya ditunjukkan oleh capaian kinerja lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menjadi lapangan usaha yang menghasilkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan kemampuan pemulihan sektor transportasi selama tahun 2023 lebih cepat akibat meningkatnya mobilitas masyarakat seiring pembukaan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Lapangan usaha yang memiliki kemampuan lebih cepat tumbuh kembali selanjutnya yakni Jasa Lainnya. Jasa lainnya yang dimaksud salah satunya dikontribusi oleh komponen jasa hiburan. Situasi pandemi yang terus terkendali selama tahun 2022 mendorong pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat termasuk dibukanya kembali tempat wisata dan *event-event* hiburan mendorong kinerja lapangan usaha ini menghasilkan nilai tambah yang cukup besar pada tahun 2022. Pergerakan sektor pariwisata ini juga berdampak terhadap kinerja sektor kinerja sektor penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum yang tumbuh tinggi ketiga yang mencapai 8,48 % di tahun 2022.

Sektor-sektor produktif dominan Kota Surabaya seperti Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Industri Pengolahan selama tahun 2022 menghasilkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 %. Pertumbuhan ekonomi sektor ini ditopang oleh perbaikan konsumsi masyarakat seiring semakin tingginya kepercayaan masyarakat akan kondisi ekonomi kedepan mendorong daya beli masyarakat Kota Surabaya kembali tinggi. Hal ini menandakan aktivitas ekonomi terus berkinerja optimal seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi.

Sementara sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 selama tahun 2022 memberikan nilai tambah yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Seperti yang diketahui, lapangan usaha ini tumbuh signifikan selama terjadinya pandemi karena berkontribusi secara langsung dalam penanggulangan Covid-19. Sama halnya dengan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, meskipun pada tahun 2022 masih tumbuh cukup baik disebabkan permintaan masih tinggi untuk menunjang aktivitas masyarakat namun kinerjanya pada tahun 2022 tidak setinggi ketika terjadi adanya



pandemi Covid-19. Lapangan usaha ini tumbuh signifikan ketika pandemi karena tingginya permintaan teknologi virtual untuk mendukung program WFH/SFH yang digalakkan ketika pembatasan aktivitas masyarakat untuk menurunkan penyebaran Covid-19.

Perbaikan kinerja ekonomi Kota Surabaya dari sisi permintaan selama tahun 2022 berkontribusi oleh perbaikan seluruh komponen pembentuk PDRB dari sisi permintaan. Tiingkat konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen yang berkontribusi tertinggi, pada tahun 2022 memberikan kontribusi hampir mencapai 60 % dari total perekonomian Kota Surabaya. Semakin kembali normalnya perekonomian Kota Surabaya sebagai dampak pelonggaran kebijakan pembatasan masyarakat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat disertai dengan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi yang tercermin dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan ekonomi melalui intervensi program yang telah dilakukan. Perbaikan ekonomi mitra dagang Kota Surabaya turut mendorong kinerja perdagangan sehingga mampu menstimulus ekonomi dari sisi ekspor impor. Lebih lanjut lagi, kenaikan investasi juga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi yang ditunjukkan oleh capaian realisasi investasi yang mengalami peningkatan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

b. Potensi Unggulan Daerah

Perekonomian Kota Surabaya pada tahun 2022 juga ditunjukkan oleh peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dibandingkan tahun sebelumnya, yang terlihat pada nilai tambah PDRB Kota Surabaya baik PDRB Atas Dasar Berlaku maupun PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Berdasarkan tabel 1.7 dan tabel 1.8 nilai tambah dari seluruh lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Surabaya pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan namun dengan variasi peningkatan yang berbeda-beda.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2022* (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun 2021	2022*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	939.465,1	982.815,39
B	Pertambangan dan Penggalian	32.761,30	33.392,98
C	Industri Pengolahan	113.544.581,10	126.030.898,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.417.167,30	2.742.046,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	872.320,90	932.750,33
F	Konstruksi	55.273.538,9	61.408.502,94



Kategori	Uraian	Tahun 2021	2022*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	163.509.913,20	184.610.467,40
H	Transportasi dan Pergudangan	30.520.260,60	36.260.418,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91.418.079,70	102.248.698,97
J	Informasi dan Komunikasi	35.273.340,80	36.541.720,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	30.560.741,60	33.950.422,52
L	Real Estate	15.790.323,10	16.599.139,83
M,N	Jasa Perusahaan	14.543.158,00	15.772.593,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.310.975,30	8.486.026,22
P	Jasa Pendidikan	14.682.371,70	14.866.084,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.220.638,20	5.508.115,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.340.199,70	8.642.127,81
	PDRB	590.227.966,80	655.616.221,58

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Catatan : *) Data Sementara

Tabel 1.8
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2021-2022* (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	Tahun 2021	2022*
		Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	554.054,70	573.236,82
B	Pertambangan dan Penggalian	19.479,80	19.094,55
C	Industri Pengolahan	79.366.597,60	84.567.579,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.538.145,90	1.661.665,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	665.833,70	680.003,79
F	Konstruksi	40.070.071,60	42.633.575,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	114.183.332,30	122.122.627,45
H	Transportasi dan Pergudangan	19.875.912,40	22.684.941,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57.221.633,10	62.076.385,35
J	Informasi dan Komunikasi	31.281.790,20	32.264.418,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.324.709,70	19.648.801,34
L	Real Estate	11.179.684,10	11.634.820,68
M,N	Jasa Perusahaan	8.974.255,50	9.490.093,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.748.920,20	4.756.347,15
P	Jasa Pendidikan	9.993.043,00	10.001.195,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.722.145,30	3.782.452,79
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.007.190,10	5.671.102,07
	PDRB	407.726.799,20	434.268.341,12

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Catatan : *) Data Sementara



c. Ekspor Impor Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia dengan didukung beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar negara. Beragam infrastruktur tersedia di Kota Surabaya seperti kemudahan aksesibilitas, transportasi, ketersediaan energi, dan kawasan industri. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Teluk Lamong turut menjadikan faktor pendorong Kota Surabaya sebagai kota penghubung (*city hub*) aktivitas perdagangan, baik untuk daerah lain maupun daerah sekitar Kota Surabaya.

Data kinerja ekspor impor kota Surabaya yang selama ini tersaji bukan sepenuhnya mencerminkan kondisi ekspor impor Kota Surabaya yang sebenarnya, melainkan juga mencerminkan arus perdagangan dari dan ke wilayah sekitar Kota Surabaya dan wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut disebabkan karena letak Kota Surabaya yang strategis sebagai kota pelabuhan menjadikan Kota Surabaya menjadi penghubung untuk Kota Surabaya sendiri dan wilayah Indonesia bagian timur.

Tabel 1.9
Komoditas Ekspor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2021 dan 2022

Ekspor Non Migas 2021		Ekspor Non Migas 2022	
Komoditas	Nilai (US\$)	Komoditas	Nilai (US\$)
Lemak dan Minyak Hewan/Nabati	2.130.680.020	Perhiasan/Permata	1.910.211.837
Tembaga	1.899.255.165	Tembaga	1.740.084.367
Kayu, Barang dari Kayu	1.822.750.608	Kayu dan barang dari kayu	1.739.556.844
Perhiasan/Permata	1.579.696.859	Lemak dan Minyak Hewan/Nabati	1.594.122.045
Bahan Bakar Mineral	1.479.327.935	Ikan, Krustasea dan Moluska	1.314.204.634
Ikan dan Udang	1.171.659.590	Kertas dan Karton	938.451.596
Bahan Kimia Organik	1.062.381.595	Bahan Kimia Organik	905.738.077
Kertas/Karton	914.775.732	Perabot, Lampu dan alat penerangan	866.030.375
Berbagai Produk Kimia	901.402.479	Tembakau dan Rokok	816.200.826
Daging dan Ikan Olahan	898.637.281	Besi dan Baja	700.269.781
Jumlah 10 Komoditas	13.860.567.263	Jumlah 10 Komoditas	12.524.870.382
Jumlah Komoditas Lainnya	8.920.110.688	Jumlah Komoditas Lainnya	8.211.021.555
Total Ekspor Non Migas	22.780.677.951	Total Ekspor Non Migas	20.735.891.937

Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023 diolah

Kinerja ekspor non migas Kota Surabaya selama tahun 2022 menunjukkan kinerja positif, namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2022 nilai realiasi ekspor non migas Kota Surabaya sebesar US\$20.735.891.937 atau menurun sebesar 8,98



persen. Lebih rendahnya realisasi ekspor non migas Kota Surabaya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja ekonomi mitra dagang Kota Surabaya akibat ancaman resesi global. Disamping itu, adanya kebijakan untuk tarif ekspor maupun bea keluar untuk komoditas-komoditas tertentu turut menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya kinerja ekspor Kota Surabaya pada tahun 2022.

Ditinjau dari komoditasnya, komoditas perhiasan/permata menjadi komoditas tertinggi yang diminati selama tahun 2021. Hal tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya ekspor perhiasan/permata, yang mulanya sebesar US\$1.579.696.859 di tahun 2021 menjadi sebesar US\$1.910.211.837 di tahun 2022. Kondisi Komoditas ekspor non migas tertinggi yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja perdagangan Kota Surabaya, berdasarkan komposisi, jenis komoditas ekspor non migas Kota Surabaya yang pada tahun 2021 hampir sama dengan jenis komoditas di tahun 2020 namun variasi besaran nilainya yang berbeda.

Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh kinerja impor non migas Kota Surabaya. Realisasi kinerja impor non migas Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar US\$21.466.323.294 sementara realiasi pada tahun 2021 menunjukkan angka yang lebih rendah yakni US\$19.568.405.393. Artinya, sepanjang tahun 2022 kinerja impor Kota Surabaya mengalami peningkatan sebesar 8,84 persen dibanding tahun 2021. Jika dilihat dari komposisinya, komoditas tertinggi masih sama dengan tahun sebelumnya, dimana komoditas impor non migas Kota Surabaya mayoritas merupakan barang modal maupun inventori bahan baku serta barang konsumsi yang dipenuhi dari luar daerah maupun luar negeri. Adanya peningkatan nilai realisasi impor Kota Surabaya tahun 2022 dapat merefleksikan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Surabaya pada tahun 2022 lebih produktif dibanding pada tahun 2022 yang ditunjukkan dari permintaan para pelaku usaha akan input produksi yang menunjang kebutuhan produksi selama tahun 2022.

Tabel 1.10
Komoditas Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2021 dan 2022

Impor Non Migas 2021		Impor Non Migas 2022	
Komoditas	Nilai (USD)	Komoditas	Nilai (USD)
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	1.878.758.513	Mesin dan Peralatan Mekanis	2.199.226.954
Besi dan Baja	1.793.452.311	Ampas/Sisa Industri Makanan	1.800.736.430
Ampas/Sisa Industri Makanan	1.473.608.658	Besi dan Baja	1.792.945.130
Plastik dan Barang dari Plastik	1.406.342.145	Plastik dan Barang dari Plastik	1.599.672.251
Perhiasan/Permata	1.046.572.397	Perhiasan/Permata	1.140.373.729



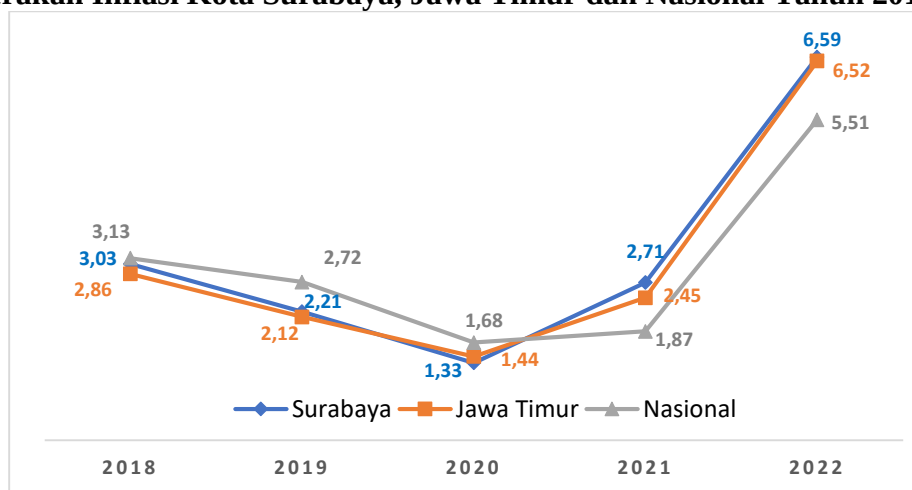
Impor Non Migas 2021		Impor Non Migas 2022	
Komoditas	Nilai	Komoditas	Nilai
	(USD)		(USD)
Buah-buahan	941.545.168	Sereal	1.105.324.921
Gandum-gandum	880.837.604	Buah-buahan	921.056.278
Mesin/Peralatan Plastik	778.563.827	Mesin dan Perlengkapan Listrik	818.973.906
Bahan Kimia Organik	599.530.381	Bahan Kimia Organik	749.418.193
Biji-bijian Berminyak	570.173.189	Biji dan Buah Mengandung Minyak	635.398.526
Jumlah 10 Komoditas	11.369.384.193	Jumlah 10 Komoditas	12.763.126.318
Jumlah Komoditas Lainnya	8.199.021.200	Jumlah Komoditas Lainnya	8.703.196.976
Jumlah Impor Non Migas	19.568.405.393	Jumlah Impor Non Migas	21.466.323.294

Sumber data: BPS Jawa Timur dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023, diolah

d. Inflasi Kota Surabaya

Inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 6,59 %, yang lebih tinggi dibanding inflasi tahun sebelumnya yakni 2,71 %. Peningkatan inflasi tahun 2022 salah satunya dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa peningkatan inflasi global akibat meningkatnya harga komoditas global yang selanjutnya kemudian berdampak terhadap harga-harga produk dalam negeri. Disamping itu, meningkatnya inflasi juga merefleksikan meningkatnya harga akibat meningkatnya permintaan. Semakin tinggi permintaan mencerminkan semakin bertambah pula aktivitas ekonomi yang berjalan. Artinya, meningkatnya Inflasi Kota Surabaya merefleksikan kembali normalnya aktivitas ekonomi masyarakat.

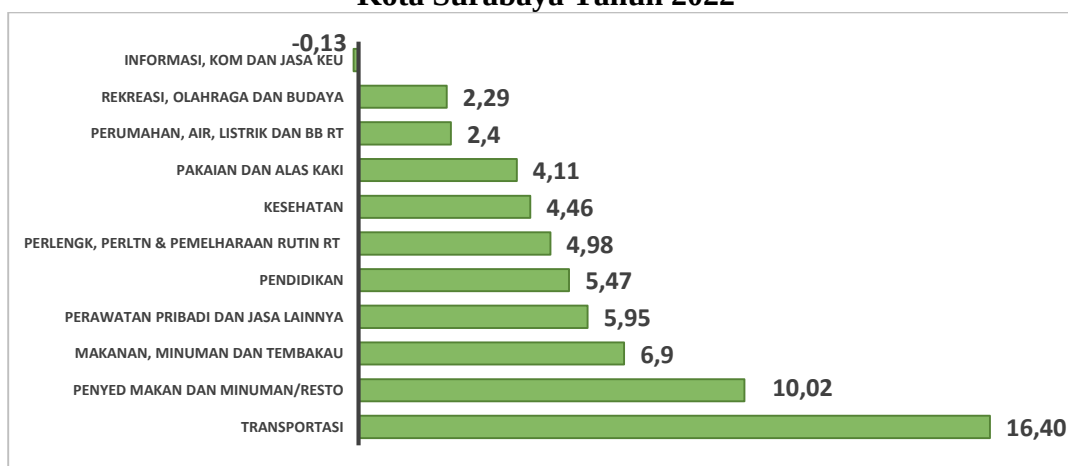
Gambar 1.6
Pergerakan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023, diolah

Berdasarkan kelompok jenis barang dan jasa pembentuk inflasi, pada tahun 2022 dari sebelas kelompok pengeluaran, 10 (sepuluh) kelompok mengalami inflasi dan 1 (satu) kelompok mengalami deflasi. Kelompok jenis barang dan jasa yang mengalami inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Transportasi, serta Penyediaan Makan dan Minuman/restoran. Terdapat 6 (enam) kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi pada kisaran 5 %. Sisanya satu kelompok jenis barang dan jasa pembentuk inflasi yang mengalami deflasi yakni Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan yakni sebesar -0,13%.

Gambar 1.7
Grafik Kelompok Jenis Barang dan Jasa Pembentuk Inflasi
Kota Surabaya Tahun 2022



Sumber: BPS Pusat, Provinsi Jawa Timur, BPS Kota Surabaya dan Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023, diolah

Subkelompok transportasi mengalami inflasi cukup tinggi sehingga menjadi penyumbang terbesar inflasi tahun ini yakni sebesar 16,40 %. Dari 4 kelompok pembentuknya, 3 (tinggi) komponen subkelompok transportasi mengalami inflasi, yakni pengoperasian peralatan transportasi pribadi (21,42 %), jasa angkutan penumpang (12,66 %) dan pembelian kendaraan (5,63 %). Inflasi pada sub pengoperasian peratan pribadi dikontribusi peningkatan harga bahan bakar (BBM) baik BBM subsidi serta BBM non subsidi secara bertahap selama beberapa periode di tahun 2022 sebagai dampak penyesuaian harga minyak dunia yang mengalami kenaikan akibat konflik yang membuat krisis pangan dan energi

Kenaikan BBM juga menimbulkan dampak rambatan yang menyebabkan meningkatnya tarif angkut logistic yang turut mendorong peningkatan inflasi pada subkelompok lain khususnya kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran; serta kelompok makanan, minuman dan tembakau. Subkelompok penyediaan makanan dan



minuman/restoran pada tahun 2022 mengalami inflasi sebesar 10,2 %. Peningkatan kembali inflasi kelompok ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan seiring kembali beroperasinya layanan *dine in* untuk rumah makan dan restoran sebagai dampak pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat.

Kelompok yang berperan tinggi selanjutnya yakni Makanan, Minuman dan Tembakau yakni 6,90%. Dari ketiga sub kelompok pembentuknya, subkelompok rokok dan tembakau menjadi penyumbang terbesar yakni sebesar 12,27 % diikuti sub kelompok makanan dan minuman tidak beralkohol masing-masing sebesar 6,85 % dan 4,05 %. Kenaikan sub kelompok rokok dan tembakau dipengaruhi oleh seiring dengan adanya kebijakan Kementerian Keuangan yang meningkatkan cukai rokok. Sementara kelompok makanan dan minuman dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa bahan makanan yang disebabkan selain karna periode musiman yang menyebabkan ketersediaan stok di pasaran surplus atau terbatas, juga dikarenakan naiknya kenaikan harga BBM.

Sama seperti sebelum-sebelumnya, kelompok Pendidikan masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kota Surabaya pada tahun 2022. Dari 4 pembentuk Subkelompok Pendidikan, pendidikan dasar dan anak usia dini memberikan kontribusi terbesar yakni 11,18 %, selanjutnya pendidikan tinggi sebesar 7,78 % diikuti pendidikan lainnya sebesar 6,02 %. Sementara subkelompok pendidikan menengah mengalami deflasi sebesar - 3,87. Pendidikan menjadi komponen tahunan penyumbang inflasi dipengaruhi oleh tingginya permintaan akan jasa pendidikan khususnya permintaan akan pendidikan swasta. Hal itu disebabkan oleh minat akan pendidikan swasta cukup tinggi di Kota Surabaya serta dampak dari penerapan kebijakan zonasi. Oleh karena itu, adanya kebijakan kenaikan tarif pendidikan setiap tahunnya ketika memasuki pendaftaran tahun ajaran baru khususnya lembaga pendidikan swasta secara otomatis akan membuat kelompok ini sebagai pendorong inflasi setiap tahunnya.

Dilihat dari kelompok disagregasinya, inflasi Kota Surabaya pada tahun 2022 dikontribusi oleh ketiga pembentuk inflasi, yakni inflasi kelompok harga diatur pemerintah (*administered price*), inflasi inti (*core inflation*) serta inflasi barang pangan bergejolak (*volatile food*). Inflasi kelompok harga diatur pemerintah disumbang oleh komoditas bensin, angkutan udara, dan rokok kretek filter. Bensin menjadi komoditas terbesar dalam memicu inflasi di Kota Surabaya dipengaruhi oleh nilai bobot yang tinggi serta besarnya permintaan bahan bakar dalam mendukung aktivitas masyarakat di Kota Surabaya. Oleh karena itu, adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar bensin secara otomatis akan berpengaruh besar meningkatkan inflasi Kota Surabaya. Untuk komoditi



angkutan udara mengalami inflasi sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat terhadap jasa transportasi sebagai dampak relaksasi kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Lebih lanjut komoditas rokok kretek filter menjadi kontributor inflasi seiring kebijakan pemerintah pusat menaikkan cukai rokok yang selanjutnya direspon oleh pelaku usaha dengan penyesuaian harga secara bertahap.

Kelompok *volatile food* juga berkontribusi mendorong inflasi Kota Surabaya tahun 2022 untuk beberapa komoditas seperti beras dan telur ayam ras. Kelompok *volatile food* tahun ini mendominasi menjadi penahan laju inflasi Kota Surabaya. Hal itu ditunjukkan dari 10 (sepuluh) komoditas penyumbang tertinggi inflasi Kota Surabaya selama tahun 2022, 7 (tujuh) komoditas merupakan kelompok barang *volatile food*. Komoditas tersebut yakni cabai rawit, cabai merah, tisu, jeruk, minyak goreng dan lada/merica. Deflasi yang terjadi disebabkan oleh melimpahnya stok disertai dengan stabilnya permintaan selama tahun 2022. Penurunan inflasi pada kelompok bumbu-bumbuan yang terjadi pada komoditas sejalan dengan penurunan harga yang didorong oleh melimpahnya stok pasca panen raya pada sentra sentra produksi.

Tabel 1.11
10 Komoditas Tertinggi Penyumbang Inflasi dan Deflasi
di Kota Surabaya Selama Tahun 2022

No	Inflasi	Sumbangan (%)	Deflasi	Sumbangan (%)
1	Bensin	1,58	Sekolah Menengah Atas	-0.07
2	Beras	0,29	Cabai Rawit	-0.07
3	Akademi/Perguruan Tinggi	0,23	Cabai Merah	-0.03
4	Sekolah Dasar	0,21	Tisu	-0.01
5	Angkutan Udara	0,21	Biaya Admin Transfer Uang	-0.01
6	Mobil	0,15	Jeruk	-0.00
7	Rokok Kretek Filter	0,15	Buku Pelajaran SD	-0.00
8	Telur Ayam Ras	0,12	Minyak Goreng	-0.00
9	Kue Kering Berminyak	0,11	Lada/Merica	-0.00
10	Kontrak Rumah	0,11	Udang Basah	-0.00

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023, diolah

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah



dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi dengan potensi daerah, PAD sebagai salah satu sumber daerah yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan pendapatan transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kota Surabaya tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.784.191.124.203,- atau 89,43% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target realisasi dan capaian pendapatan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.12
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	6.316.345.973.654	5.307.577.702.515	84,03%
2	Pendapatan Transfer	3.506.057.114.020	3.476.613.421.687	99,16%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah		9.822.403.087.674	8.784.191.124.203	89,43%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 meliputi realisasi pajak daerah sebesar Rp4.157.521.611.124,- atau 83,37%, retribusi daerah sebesar Rp269.547.479.046,- atau 72,81%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp233.686.218.755,- atau 139,41% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp646.822.393.590,- atau 81,68% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1.13
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	4.986.676.675.617	4.157.521.611.124	83,37%
2	Retribusi Daerah	370.184.163.024	269.547.479.046	72,81%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	167.621.848.477	233.686.218.755	139,41%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	791.863.286.536	646.822.393.590	81,68%
Jumlah		6.316.345.973.654	5.307.577.702.515	84,03%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp4.157.521.611.124,- atau 83,37%. Pajak Daerah secara umum belum mencapai target di tahun karena masih dalam tahap pemulihan pandemi Covid-19 meskipun sudah lebih baik dari tahun 2021. Tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya memberikan kelonggaran atas kewajiban pembayaran pajak daerah agar sektor perekonomian segera pulih, dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Surabaya;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Denda Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pahlawan;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 99 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif terhadap Bunga Pajak Daerah kepada Masyarakat dalam Rangka Hari Pahlawan.



5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Rangka Hari Pahlawan.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.14
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel			
a.	Pajak Hotel	377.582.241.716	285.236.883.526	75,54%
b.	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	4.006.683.717	2.650.719.793	66,16%
	Jumlah Pajak Hotel	381.588.925.433	287.887.603.319	75,44%
2	Pajak Restoran			
a.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	681.473.544.167	479.235.657.063	70,32%
b.	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	51.293.707.625	25.344.740.560	49,41%
	Jumlah Pajak Restoran	732.767.251.792	504.580.397.623	68,86%
3	Pajak Hiburan			
a.	Pajak Tontonan Film	32.370.823.661	18.668.949.059	57,67%
b.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	3.542.496.746	7.588.578.442	214,22%
c.	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	41.603.019.778	29.013.992.166	69,74%
	Jumlah Pajak Hiburan	77.516.340.185	55.271.519.667	71,30%
4	Pajak Reklame			
a.	Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	130.698.793.252	109.627.265.450	83,88%
b.	Pajak Reklame Kain	17.620.309.394	18.658.424.300	105,89%
	Jumlah Pajak Reklame	148.319.102.646	128.285.689.750	86,49%
5	Pajak Penerangan Jalan			
a.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	550.277.102	440.211.820	80,00%
b.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	499.701.634.634	435.229.950.561	87,10%
	Jumlah Pajak Penerangan Jalan	500.251.911.736	435.670.162.381	87,09%
6	Pajak Parkir			
a.	Pajak Parkir	109.709.913.071	80.295.315.799	73,19%
	Jumlah Pajak Parkir	109.709.913.071	80.295.315.799	73,19%
7	Pajak Air Tanah			
a.	Pajak Air Tanah	1.456.546.783	1.328.298.135	91,20%
	Jumlah Pajak Air Tanah	1.456.546.783	1.328.298.135	91,20%
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBBP2)			



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.469.595.742.368	1.383.793.705.392	94,16%
	Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.469.595.742.368	1.383.793.705.392	94,16%
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
	a. BPHTB-Pemindahan Hak	1.408.923.847.442	1.255.187.237.743	89,09%
	b. BPHTB-Pemberian Hak Baru	156.547.094.161	25.221.681.315	16,11%
	Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.565.470.941.603	1.280.408.919.058	81,79%
	Jumlah Pajak Daerah	4.986.676.675.617	4.157.521.611.124	83,37%

Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp269.547.479.046,- atau 72,81% dari target Rp370.184.163.024,- meliputi capaian dari retribusi jasa umum sebesar Rp103.576.940.511,- atau 75,92%, retribusi jasa usaha sebesar Rp93.314.446.203,- atau 87,43% dan retribusi perizinan tertentu sebesar Rp72.656.092.332,- atau 57,20%. Pada masa percepatan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19, selain kebijakan pengurangan pajak daerah, Pemerintah Kota juga memberikan keringanan pembayaran retribusi dengan menetapkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729;
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya;
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga Sebesar 2% (Dua %) terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung yang Terutang akibat Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Surabaya;
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-729;
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif terhadap Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Surabaya;



6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di Atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL);
7. Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan;
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam Rangka Hari Pahlawan;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 125 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif berupa Pembebasan atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung dalam Rangka Hari Pahlawan;
11. Instruksi Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman.

Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah
Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	529.091.200	784.069.000	148,19%
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	66.787.006.102	62.983.164.523	94,30%
c.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.320.930.000	3.351.920.000	40,28%
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan	36.500.000.000	18.516.678.957	50,73%
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	20.523.916.220	14.824.195.000	72,23%
f.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.000.000	-	0,00%
g.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	683.200.000	621.111.831	90,91%



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.078.723.725	2.495.801.200	81,07%
	Jumlah Retribusi Jasa Umum	136.423.867.247	103.576.940.511	75,92%
2	Retribusi Jasa Usaha			
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	84.426.994.611	78.326.216.369	92,77%
	Retribusi Penyewaan Tanah	77.118.131.236	72.857.508.434	94,48%
	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.943.767.900	3.453.826.384	69,86%
	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.854.970.475	1.799.081.550	96,99%
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	510.125.000	215.800.000	42,30%
	b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.553.584.000	562.310.000	36,19%
	c. Retribusi Terminal	3.125.772.137	3.034.480.900	97,08%
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	1.387.126.137	1.902.154.500	137,13%
	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	1.738.646.000	1.132.326.400	65,13%
	d. Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.154.735.000	5.462.109.234	59,66%
	e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.471.708.000	5.929.329.700	69,99%
	Jumlah Retribusi Jasa Usaha	106.732.793.748	93.314.446.203	87,43%
3	Retribusi Perizinan Tertentu			
	a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	126.264.288.029	72.009.924.332	57,03%
	b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	315.614.000	155.950.000	49,41%
	c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	447.600.000	490.218.000	109,52%
	Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	127.027.502.029	72.656.092.332	57,20%
	Jumlah Retribusi Daerah	370.184.163.024	269.547.479.046	72,81%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 sebesar Rp233.686.218.755,- atau 139,41% merupakan realisasi atas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh BUMD dan BUMN. Bagian laba yang disetorkan kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut merupakan output pendapatan BUMD dan BUMN di tahun 2022. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut:



Tabel 1.16
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN			
	a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.500.412.948	11.025.433.595	105,00%
	Jumlah Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	10.500.412.948	11.025.433.595	105,00%
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD			
	a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	17.494.876.392	18.419.392.769	105,28%
	b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	580.135.418	1.631.342.200	281,20%
	c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	139.046.423.719	197.609.979.220	142,12%
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	157.121.435.529	217.660.714.189	138,53%
3	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
	a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	5.000.070.971	0,00%
	Jumlah Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-	5.000.070.971	0,00%
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		167.621.848.477	233.686.218.755	139,41%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2022 sebesar Rp646.822.393.590,- atau 81,68% dari target yang telah ditetapkan.



Komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang perlu diperhatikan karena belum mencapai target tahun 2022 adalah Jasa Giro tercapai 70,92% dan penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain 8,88% berdasarkan perhitungan kas daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2022, Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.17
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kota Surabaya
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.836.687.500	3.009.536.696	106,09%
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.804.840.920	29.709.807.080	274,97%
3	Jasa Giro	7.372.303.231	5.228.409.719	70,92%
4	Pendapatan Bunga	7.409.589.042	13.784.520.548	186,04%
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	491.517.427	-
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	112.727.953.755	13.377.204.890	11,87%
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	4.622.501.418	2.651.805.004	57,37%
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.550.998.914	19.655.078.569	170,16%
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	399.115.258	3.744.813.109	938,28%
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	276.029.375	-
11	Pendapatan dari Pengembalian	2.500.000.000	1.030.695.320	41,23%
12	Pendapatan BLUD	604.763.460.890	527.280.827.500	87,19%
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	26.875.835.608	26.582.148.354	98,91%
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah		791.863.286.536	646.822.393.590	81,68%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2022 sebesar Rp 3.476.613.421.688,- atau 99,16% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan transfer Tahun 2022 yang tidak dapat direalisasikan adalah:

- DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD memerlukan penyediaan barang yang memenuhi persyaratan TKDN / Tingkat Komponen Dalam Negeri;
- DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat mengoptimalkan penggunaan silpa tahun 2021.



Tabel 1.18
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Transfer
Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan Transfer				
1	Pendapatan Transfer dari Pusat			
1.1	Dana Perimbangan			
1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)			
a.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.037.725.000	9.243.339.675	115,00%
b.	DBH PPh Pasal 21	289.511.085.000	355.766.418.155	122,89%
c.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	66.447.260.000	116.012.190.143	174,59%
d.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	30.440.939.000	30.440.939.000	100,00%
e.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	45.227.568.000	54.846.586.358	121,27%
f.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	2.873.483.000	2.873.483.000	100,00%
g.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	29.976.000	29.976.000	100,00%
h.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.321.200.000	3.049.142.985	131,36%
i.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	344.377.000	344.377.000	100,00%
j.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000	1.958.311.000	100,00%
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	447.191.924.000	574.564.763.316	128,48%
1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
a.	Dana Alokasi Umum	1.182.439.723.000	1.137.713.268.239	96,22%
	Jumlah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1.182.439.723.000	1.137.713.268.239	96,22%
1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik			
a.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.308.475.000	-	
b.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler Pelayanan Kefarmasian	2.200.672.000	948.290.814	43,09%
c.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Penurunan AKI dan AKB	7.833.870.000	6.372.442.630	81,34%
d.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	9.667.455.000	9.482.228.296	98,08%
e.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.767.866.000	1.408.728.380	79,69%



No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	f.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan Penurunan Stunting (KB)	3.059.989.000	1.925.725.000	62,93%
	g.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	3.557.334.000	2.844.811.250	79,97%
	h.	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	34.985.625.000	28.716.504.304	82,08%
	i.	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	860.997.000	860.997.000	100,00%
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		65.242.283.000	52.559.727.674	80,56%
1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik				
	a.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	356.702.280.000	334.845.734.264	93,87%
	b.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	5.260.000.000	2.700.000.000	51,33%
	c.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	229.844.005.000	197.714.738.840	86,02%
	d.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.263.000.000	3.410.400.000	80,00%
	e.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	62.701.040.000	59.899.549.000	95,53%
	f.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.439.600.000	3.883.600.000	87,48%
	g.	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.500.000.000	1.267.219.550	84,48%
	h.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	39.587.058.000	39.586.993.290	100,00%
	i.	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	403.645.340	99,86%
	j.	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	60.417.250.000	49.623.450.905	82,13%
	k.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	383.914.000	157.777.500	41,10%
	l.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	20.113.478.000	16.573.841.450	82,40%
	m.	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	251.171.370	55,59%
	n.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan dan Pertanian	247.100.000	-	
	Jumlah Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		786.314.725.000	710.318.121.509	90,34%
	Jumlah Dana Perimbangan		2.481.188.655.000	2.475.155.880.738	99,76%
1.2	Dana Insentif Daerah (DID)				
	a.	DID	41.136.702.000	41.136.702.000	100,00%
	Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)		41.136.702.000	41.136.702.000	100,00%
Jumlah Pendapatan Transfer dari Pusat			2.522.325.357.000	2.516.292.582.738	99,76%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
2.1	Pendapatan Bagi Hasil				
	a.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	396.087.861.223	349.205.536.331	88,16%
	b.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	260.042.562.130	277.021.970.069	106,53%
	c.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	222.935.117.150	203.198.766.825	91,15%
	d.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.332.074.528	1.240.304.993	93,11%
	e.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	82.430.741.989	108.619.860.733	131,77%
	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil		962.828.357.020	939.286.438.950	97,55%
2.2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	20.903.400.000	21.034.400.000	100,63%
	Jumlah Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	20.903.400.000	21.034.400.000	100,63%
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	983.731.757.020	960.320.838.950	97,62%
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.506.057.114.020	3.476.613.421.688	99,16%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi belanja daerah Kota Surabaya Tahun 2022 sebesar Rp9.446.247.887.248,- atau terealisasi 88,34%, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.19
Realisasi Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Daerah			
1	Belanja Operasi			
	Belanja Pegawai	2.752.910.233.811	2.460.367.884.874	89,37%
	Belanja Barang dan Jasa	5.520.786.198.376	4.892.062.090.433	88,61%
	Belanja Hibah	352.027.152.594	325.022.277.991	92,33%
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00%
	Jumlah Belanja Operasi	8.625.723.584.781	7.677.452.253.298	89,01%
2	Belanja Modal			
	Belanja Modal Tanah	184.237.218.641	181.872.132.600	98,72%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	459.072.469.350	406.539.524.326	88,56%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	381.358.724.738	344.055.978.498	90,22%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	964.614.255.192	827.064.729.888	85,74%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.243.751.689	6.498.101.216	70,30%
	Jumlah Belanja Modal	1.998.526.419.610	1.766.030.466.528	88,37%
3	Belanja Tidak Terduga			



No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Belanja Tidak Terduga	11.015.000.000	1.702.578.492	15,46%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	11.015.000.000	1.702.578.492	15,46%
4	Belanja Transfer			
	Belanja Bagi Hasil	1.062.588.930	1.062.588.930	100,00%
	Belanja Bantuan Keuangan	500.000.000	-	0,00%
	Jumlah Belanja Transfer	1.562.588.930	1.062.588.930	68,00%
	Jumlah Belanja Daerah	10.636.827.593.321	9.446.247.887.248	88,81%

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah meliputi :

- Adanya Surat Edaran Bersama No. 027/2929/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamankan penggunaan produk usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan penjadwalan ulang untuk pengadaan barang agar sesuai dengan ketentuan;
- Pendapatan daerah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2022 yang tercapai kurang dari target. Pendapatan Daerah Kota Surabaya memiliki target sebesar 9.822,4 Miliar dan hanya terealisasi sebesar 8.784,2 Miliar, sehingga perlu adanya penyesuaian ulang terkait prioritas belanja Perangkat Daerah;
- Harga produk dalam negeri diatas Standar Harga Satuan Daerah yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya penyesuaian harga satuan untuk memenuhi pembelian produk dalam negeri;
- Pelaksanaan anggaran Kelurahan menyesuaikan Pedoman Teknis yang telah diterbitkan di dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Masih banyak Kelompok Masyarakat yang belum terbentuk di kelurahan hingga akhir tahun, sehingga pelaksanaan Dana Kelurahan pekerjaan konstruksi yang direncanakan dengan metode swakela tidak dapat dilaksanakan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan belanja sebagai berikut :

- Perlu dilakukan identifikasi dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan penjadwalan ulang karena adanya Surat Edaran Bersama;
- Peningkatan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan agar penyelesaian



proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan tepat waktu, efisien dan efektif.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2022 meliputi penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) tahun 2021 sebesar Rp824.424.505.647,- serta penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp13.000.000,- yang digunakan untuk menutup defisit di tahun 2022 sebesar Rp662.056.763.044,- maka realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2022 sebesar Rp152.380.742.603,- secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.20
Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan	824.424.505.647	824.437.505.647	100,00%
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	824.424.505.647	824.424.505.647	100,00%
	Penerimaan kembali pinjaman daerah	-	13.000.000	-
2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%
	Penyertaan Modal	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00%

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pemulihan ekonomi berbagai Negara akibat terjadinya pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Optimisme pemulihan ekonomi global kedepan juga masih diiringi oleh resiko dan ketidakpastian yang tinggi akibat terjadinya peristiwa-peristiwa global seperti terjadinya perang Rusia-Ukraina, munculnya krisis pangan dan energi di Eropa serta kemungkinan peristiwa lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi global. Optimisme pemulihan ekonomi global tersebut didasarkan oleh perkembangan beberapa indikator ekonomi makro global yang masih terus menunjukkan perbaikan hingga saat ini.

Perekonomian domestik juga terus membaik secara bertahap. Realisasi perekonomian Nasional pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding periode yang sama di tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2022 Triwulan II sebesar 5,44 %. Momen pemulihan ekonomi yang tetap terjaga dan berlanjut meskipun dihadapkan bayangan munculnya virus varian baru yang lebih berbahaya. Meskipun demikian, realisasi kinerja ekonomi nasional yang menunjukkan pertumbuhan positif merupakan implementasi keberhasilan dari proses pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga didukung oleh pola hidup tatanan baru diiringi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan kondisi pandemi. Dengan demikian, pola hidup yang baru diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.

Perbaikan ekonomi juga terealisasi di Kota Surabaya. Realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya yang terus menunjukkan perbaikan positif setiap triwulannya seiring proses pemulihan ekonomi yang terus membaik dampak berhasilnya penanganan Covid-19 di Kota Surabaya. Seiring kondisi tersebut, peningkatan aktivitas ekonomi di Kota Surabaya mendorong kinerja perekonomian kembali produktif. Kebijakan pelonggaran PPKM sebagai imbas kasus Covid-19 di Kota Surabaya yang menurun, membuat banyaknya tenan-tenan pelaku usaha yang kembali beroperasi serta pusat perbelanjaan yang kembali ramai, menjadi salah satu indikator kembali pulihnya ekonomi di Kota Surabaya. Kebijakan pelonggaran tersebut tentunya diiringi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pencabutan status PPKM di seluruh Wilayah oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 diharapkan juga dapat mempercepat pemulihan ekonomi di Kota Surabaya di masa mendatang.

Data BPS Kota Surabaya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sejak triwulan I tahun 2022 menunjukkan perbaikan. Kondisi perekonomian yang membaik



terus berlanjut hingga triwulan II, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya di akhir tahun 2022 mencapai 6,51 %. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2022 ditopang oleh beberapa lapangan usaha yang tumbuh positif, yakni lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, penyediaan makan dan minum serta sektor Jasa.

Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi guna menjaga produktivitas ekonomi di Kota Surabaya tetap terjaga tinggi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang antara lain: 1) pemulihan sektor usaha mikro; 2) pemulihan sektor perdagangan; 3) penguatan ketahanan dan keamanan pangan; 4) pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; 5) pemulihan sektor tenaga kerja. Program-program tersebut selanjutnya diwujudkan dalam program maupun kegiatan yang harapannya dapat menstimulus perekonomian Kota Surabaya sesuai yang ditargetkan.

2.1. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pada tahun 2022 terdapat perubahan pendapatan di Kota Surabaya, dasar perubahan kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya Tahun 2022 adalah:

1. Mempertimbangkan realisasi pendapatan sampai dengan triwulan II maka Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian komposisi pendapatan untuk pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Penyesuaian target pendapatan berdasarkan regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk pendapatan dari dana transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai tindak lanjut perubahan kebijakan pendapatan tersebut maka disusun arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surabaya pada tahun 2022 yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
 - d. Memaksimalkan sistem pemungutan pajak maupun retribusi daerah;



- e. Sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi;
- f. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- g. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- h. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
- i. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- j. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- k. Peningkatan peran dan fungsi UPTSA sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- l. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait;
- m. Mencari obyek sumber penerimaan baru yang memiliki potensi menguntungkan serta tidak menghambat kinerja perekonomian pada pusat maupun daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan dengan cara melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut yang semula aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran



2022 menyebutkan bahwa Hibah Bos yang semula pada kode rekening lain-lain pendapatan daerah yang sah masuk ke dalam Dana Alokasi Khusus Non Fisik .

Pendapatan daerah Perubahan APBD 2022, mengalami perubahan semula sebesar Rp9.533.435.129.951,- menjadi Rp9.822.403.087.674,- mengalami peningkatan sebesar Rp288.967.957.723,- atau 3,03% yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp6.058.970.590.688,- menjadi Rp6.316.345.973.654,- mengalami peningkatan sebesar Rp257.375.382.966,- atau 4,25%;
2. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari Rp3.474.464.539.263,- menjadi Rp3.506.057.114.020,- mengalami peningkatan sebesar Rp31.592.574.757,- atau 0,91%;
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2022 tidak teralokasikan.

Rincian perubahan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian	APBD 2022		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
1	Pendapatan Asli Daerah				
	Pajak Daerah	4.768.251.212.053	4.986.676.675.617	218.425.463.564	4,58%
	Retribusi Daerah	352.737.274.643	370.184.163.024	17.446.888.381	4,95%
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	167.621.848.477	167.621.848.477	0	0,00%
	Lain-lain PAD yang sah	770.360.255.515	791.863.286.536	21.503.031.021	2,79%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	6.058.970.590.688	6.316.345.973.654	257.375.382.966	4,25%
2	Pendapatan Transfer				
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.501.585.625.000	2.522.325.357.000	20.739.732.000	0,83%
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	972.878.914.263	983.731.757.020	10.852.842.757	1,12%
	Jumlah Pendapatan Transfer	3.474.464.539.263	3.506.057.114.020	31.592.574.757	0,91%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah				
	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan	0	0	0	0,00%



No	Uraian	APBD 2022		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0	0	0,00%
	Jumlah Pendapatan Daerah	9.533.435.129.951	9.822.403.087.674	288.967.957.723	3,03%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023

2.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada berbagai aspek perlu ditindaklanjuti dengan pemulihan kinerja pada berbagai sektor utamanya pada pemulihan ekonomi, sistem pendidikan, sistem kesehatan dan sistem sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu Perubahan RKPD Tahun 2022 tetap diarahkan sesuai dengan tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2022 yaitu “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*” diprioritaskan untuk:

1. Pemulihan ekonomi lokal melalui pengembangan inovasi produk, jasa industri kreatif dan pariwisata;
2. Penataan ruang, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan memperhatikan daya dukung kota;
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui penguatan sistem pendidikan dan Kesehatan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
5. Peningkatan ketahanan pangan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penguatan system ketahanan bencana;
7. Peningkatan keamanan, ketertiban umum dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



2022, bahwa Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan Nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Covid-19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2022, mengalami perubahan dari Rp10.395.185.797.113,- menjadi Rp10.636.827.593.321,- bertambah sebesar Rp241.641.796.208,- atau 2,32%, yang meliputi:

1. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp8.248.906.765.781,- menjadi Rp8.625.723.584.781,- bertambah sebesar Rp376.816.819.000,- atau 4,57%;
2. Belanja Modal mengalami perubahan dari Rp2.137.455.120.345,- menjadi Rp1.998.526.419.610,- berkurang sebesar Rp 138.928.700.735,- atau -6,50%;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami perubahan dari Rp7.573.910.987,- menjadi Rp11.015.000.000,- bertambah sebesar Rp3.441.089.013,- atau 45,43%;
4. Belanja Transfer mengalami perubahan dari Rp1.250.000.000,- menjadi Rp1.562.588.930,- bertambah sebesar Rp312.588.930,- atau 25,01%.

Rincian perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Perubahan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Uraian	APBD 2022		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Daerah				
1	Belanja Operasi				
	Belanja Pegawai	2.779.218.227.871	2.752.910.233.811	-26.307.994.060	-0,95%
	Belanja Barang dan Jasa	5.247.182.763.948	5.520.786.198.376	273.603.434.428	5,21%
	Belanja Hibah	222.505.773.962	352.027.152.594	129.521.378.632	58,21%
	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0,00%
	Jumlah Belanja Operasi	8.248.906.765.781	8.625.723.584.781	376.816.819.000	4,57%
2	Belanja Modal				



No	Uraian	APBD 2022		Bertambah/Berkurang	
		Murni	Perubahan	Rp	%
	Belanja Modal Tanah	172.946.124.138	184.237.218.641	11.291.094.503	6,53%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.134.150.861	459.072.469.350	18.938.318.489	4,30%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	516.524.026.903	381.358.724.738	-135.165.302.165	-26,17%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	996.046.202.502	964.614.255.192	-31.431.947.310	-3,16%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.804.615.941	9.243.751.689	-2.560.864.252	-21,69%
	Jumlah Belanja Modal	2.137.455.120.345	1.998.526.419.610	-138.928.700.735	-6,50%
3	Belanja Tidak Terduga				
	Belanja Tidak Terduga	7.573.910.987	11.015.000.000	3.441.089.013	45,43%
	Jumlah Belanja Tidak Terduga	7.573.910.987	11.015.000.000	3.441.089.013	45,43%
4	Belanja Transfer				
	Belanja Bagi Hasil	750.000.000	1.062.588.930	312.588.930	41,68%
	Belanja Bantuan Keuangan	500000000	500000000	0	0,00%
	Jumlah Belanja Transfer	1.250.000.000	1.562.588.930	312.588.930	25,01%
	Jumlah Belanja Daerah	10.395.185.797.113	10.636.827.593.321	241.641.796.208	2,32%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2023

2.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan berdasarkan Surat Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : 49.A/LHP/XVIII.SBY/05/2022, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2022 yang memuat lampiran Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.B/LHP/XVIII.SBY/05/2022. Penerimaan pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang semula diproyeksikan sebesar Rp 871.750.667.162,-



berdasarkan hasil pemeriksaan menjadi sebesar Rp 824.424.505.647,- bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 diarahkan pada SiLPA dan diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya pengelolaan anggaran, dalam perubahan APBD Tahun 2022 kebijakan pembiayaan diarahkan pada :

1. Arah kebijakan penerimaan pembiayaan berdasarkan hasil audit laporan realisasi anggaran tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Surabaya tahun 2022 diarahkan pada penetapan kebijakan penempatan modal/ penyertaan modal untuk badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan untuk Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Pembayaran kewajiban pada pihak ketiga terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rincian perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah Kota Surabaya Tahun 2022

Uraian	APBD 2022		Bertambah/Berkurang	
	Murni	Perubahan	Rp	%
Penerimaan Pembiayaan	871.750.667.162	824.424.505.647	-47.326.161.515	-5,43%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	871.750.667.162	824.424.505.647	-47.326.161.515	-5,43%
Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0,00%
Penyertaan Modal	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0,00%
Pembiayaan Daerah Neto	861.750.667.162	814.424.505.647	-47.326.161.515	-5,49%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 diukur dari pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta dari pencapaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan. Capaian kinerja masing-masing kegiatan pada setiap urusan, terbagi dalam 8 bagian, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum.

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja

3.1.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Bruto (PDRB) menjadi pengukur struktur perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB/LPE mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi -4,85%. Hal ini terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Pemulihan ekonomi dilakukan beriringan dengan penanggulangan Pandemi Covid-19 yang membawa kinerja perekonomian Kota Surabaya yang semakin membaik sehingga pada tahun 2021 tumbuh sebesar 4,29% dan selanjutnya meningkat menjadi 6,51% di akhir tahun 2022.

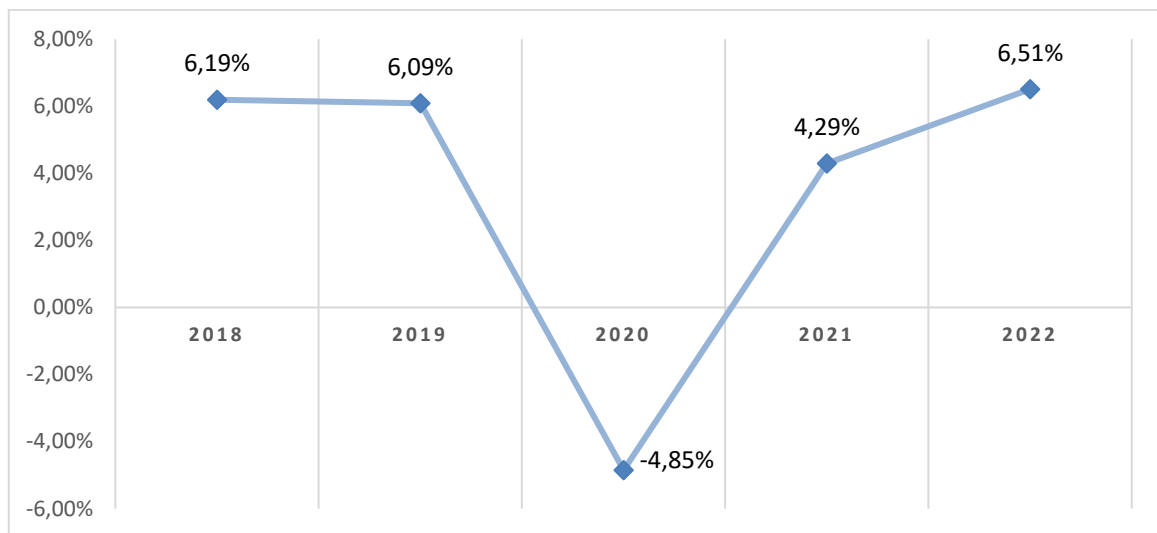
Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	6-6,5%	6,1-6,6%	6,3-6,7%	6,3 - 6,8%	2,96%
Realisasi	6,19%	6,10%	-4,85%	4,29%	6,51%
Capaian	100,00%	100,00%	-76,98%	68,10%	219,93%

Sumber : BPS Kota Surabaya, 2023



Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2023

Capaian kinerja ekonomi Kota Surabaya merupakan gambaran keberhasilan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam sinergi pemulihan ekonomi masyarakat Kota Surabaya. Dalam mewujudkan keberlanjutan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Surabaya menyusun berbagai program untuk menaikkan kembali kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya yang sempat terpuruk akibat dampak Covid-19. Intervensi diwujudkan melalui beberapa upaya antara lain :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya, selama tahun 2022 telah didirikan 34 rumah padat karya di 14 Kecamatan;
2. Perbaikan iklim investasi, selama tahun 2022 perbaikan iklim Investasi dilakukan dengan pendampingan bagi investor / calon investor berkaitan dengan kemudahan/percepatan perizinan, bimbingan teknis hingga fasilitasi pemenuhan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) melalui program khusus Jemput Bola (Jebol) LKPM, serta keterbukaan informasi khususnya terkait peluang dan potensi investasi di Surabaya dengan realisasi Investasi sebesar 34,89 T meningkat dibandingkan tahun 2021 yang terealisasi sebesar 29 T;
3. Penyediaan akses lowongan pekerjaan melalui program melalui job fair dan link and match ASSIK (*Arek Surabaya Siap Kerja*) yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali di tahun 2022 dengan mencakup 8.363 partisipan;
4. Pemulihan sektor wisata melalui pengawasan kawasan wisata pada kawasan Kalimas, Ampel, Kya-kya, Kenjeran, Tunjungan dan Romokalisari;



5. Pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi pemasaran online pada ePeken dengan UMKM yang tergabung sebanyak 3440 (UMKM, Tokel dan SWK), fasilitasi toko daring pada eKatalog sebanyak 598 UMKM, serta pembangunan Surabaya Kriya Gallery dan acara-acara yang melibatkan UMKM.

Selama proses pemulihan ekonomi, kecepatan laju pertumbuhan lapangan usaha berbeda antar lapangan usaha satu dengan yang lainnya. Kecepatan laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar peranan lapangan usaha berkontribusi terhadap perekonomian secara keseluruhan serta kendala dari masing-masing lapangan usaha untuk kembali produktif dengan semestinya. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya dilihat dari sisi penawaran, pada tahun 2022 terbentuk dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha pembentuk perekonomian Kota Surabaya. Terdapat 16 (enam belas) lapangan usaha yang tumbuh positif, dan 1 (satu) lapangan usaha yang masih berkontraksi yakni lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Pertumbuhan tertinggi berkontribusi oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,14% dan Jasa Lainnya sebesar 13,26%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya tumbuh pada kisaran 8% yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,48%), Pengadaan Listrik dan Gas (8,03%), diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor (6,95%), Industri Pengolahan (6,55%), diikuti Kontruksi (6,40%), dan Jasa Perusahaan (5,75%) dimana lapangan usaha tersebut tumbuh pada kisaran 6% selama tahun 2022. Sisanya tumbuh kisaran kurang dari 5%. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif selama tahun 2022 yakni Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar -1,98%. Sebagaimana yang telah diuraikan terperinci sebelumnya, lapangan usaha yang tidak berkaitan erat dengan situasi pandemi mengalami laju pertumbuhan yang lebih rendah dibanding ketika masa pandemi. Sementara lapangan usaha yang termasuk sektor-sektor produktif kembali tumbuh menggeliat menghasilkan nilai tambah yang tinggi seperti sedia kala.

Aktivitas ekonomi merupakan fungsi dari mobilitas dan aktivitas konsumsi, dimana tingkat mobilitas yang tinggi dan meningkatnya konsumsi masyarakat mengindikasikan semakin produktif suatu perekonomian. Kembali produktifnya ekonomi Surabaya ditunjukkan oleh capaian kinerja lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan menjadi lapangan usaha yang menghasilkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi yang tertinggi pada tahun 2023. Hal itu dikarenakan kemampuan pemulihan sektor transportasi selama tahun 2023 lebih cepat akibat meningkatnya mobilitas masyarakat seiring pembukaan kembali Pembatasan



Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada meningkatnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Lapangan usaha yang memiliki kemampuan lebih cepat tumbuh kembali selanjutnya yakni Jasa Lainnya. Jasa lainnya yang dimaksud salah satunya berkontribusi oleh komponen jasa hiburan. Situasi pandemi yang terus terkendali selama tahun 2022 mendorong pelanggaran kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat termasuk dibukanya kembali tempat wisata dan *event-event* hiburan mendorong kinerja lapangan usaha ini menghasilkan nilai tambah yang cukup besar pada tahun 2022. Pergerakan sektor pariwisata ini juga berdampak terhadap kinerja sektor kinerja sektor penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum yang tumbuh tinggi ketiga yang mencapai 8,48% di tahun 2022.

Sektor-sektor produktif dominan Kota Surabaya seperti Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Industri Pengolahan selama tahun 2022 menghasilkan nilai tambah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7%. Pertumbuhan ekonomi sektor ini ditopang oleh perbaikan konsumsi masyarakat seiring semakin tingginya kepercayaan masyarakat akan kondisi ekonomi kedepan mendorong daya beli masyarakat Kota Surabaya kembali tinggi. Hal ini menandakan aktivitas ekonomi terus berkinerja optimal seperti sedia kala sebelum terjadinya pandemi.

Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 selama tahun 2022 memberikan nilai tambah yang lebih kecil dibandingkan sebelumnya yaitu lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Seperti yang diketahui, lapangan usaha ini tumbuh signifikan selama terjadinya pandemi karena berkontribusi secara langsung dalam penanggulangan Covid-19. Sama halnya dengan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, meskipun pada tahun 2022 masih tumbuh cukup baik disebabkan permintaan masih tinggi untuk menunjang aktivitas masyarakat namun kinerjanya pada tahun 2022 tidak setinggi ketika terjadi adanya pandemi Covid-19. Lapangan usaha ini tumbuh signifikan ketika pandemi karena tingginya permintaan teknologi virtual untuk mendukung program WFH/SFH yang digalakkan ketika pembatasan aktivitas masyarakat untuk menurunkan penyebaran Covid-19.

Perbaikan kinerja ekonomi Kota Surabaya dari sisi permintaan selama tahun 2022 berkontribusi oleh perbaikan seluruh komponen pembentuk PDRB dari sisi permintaan. Tiingkat konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen yang berkontribusi tertinggi, pada tahun 2022 memberikan kontribusi hampir mencapai 60% dari total perekonomian Kota Surabaya. Semakin kembali normalnya perekonomian Kota Surabaya sebagai

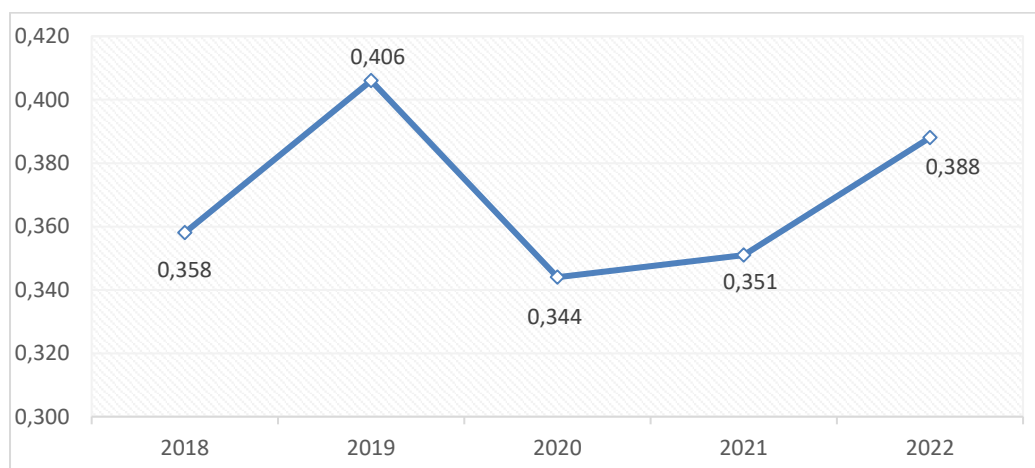


dampak pelanggaran kebijakan pembatasan masyarakat mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat disertai dengan kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi yang tercermin dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan ekonomi melalui intervensi program yang telah dilakukan. Perbaikan ekonomi mitra dagang Kota Surabaya turut mendorong kinerja perdagangan sehingga mampu menstimulus ekonomi dari sisi ekspor impor. Lebih lanjut lagi, kenaikan investasi juga mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi yang ditunjukkan oleh capaian realisasi investasi yang mengalami peningkatan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

B. Indeks Gini

Indeks Gini dipergunakan untuk mengukur ketimpangan/kesenjangan pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terjadi pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30.

Gambar 3.2
Indeks Gini Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kota Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2023

Tabel 3.2
Indeks Gini Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022*
Target	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,328
Realisasi	0,358	0,406	0,344	0,351	0,388
Capaian	103,24%	93,16%	107,03%	105,14%	81,71%



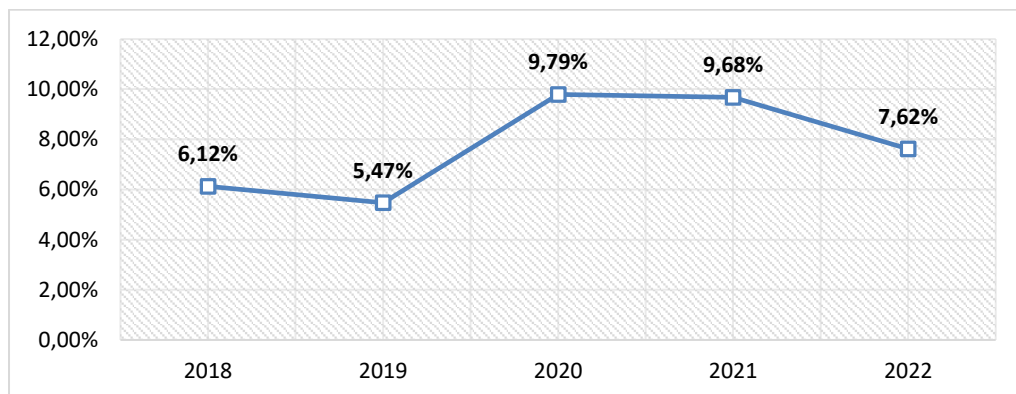
*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
Sumber: BPS Kota Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2022

Indeks Gini pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,351 menjadi 0,388 di tahun 2022. Kenaikan indeks gini juga dialami oleh 7 (tujuh) Kota dari 9 (sembilan) Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk menurunkan angka gini ratio agar terjadi pemerataan pendapatan, dengan strategi berfokus pada upaya untuk menuntaskan masalah kemiskinan melalui fasilitasi kesempatan berusaha, penciptaan lapangan pekerjaan dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin untuk peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran. Di masa mendatang, Intervensi Pemerintah Kota Surabaya difokuskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya yang bersumber dari sektor ekonomi dengan serapan tenaga kerja yang signifikan serta meningkatkan pendapatan utamanya masyarakat yang saat ini masih dengan penghasilan rendah. Indeks Gini merupakan konsep relatif yang artinya meskipun angka kemiskinan sangat rendah (sama dengan 0) ketimpangan akan tetap ada. Meskipun demikian Indeks Gini diupayakan berada pada skala moderat (0,3-0,5) dan skala rendah ($< 0,3$).

C. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Gambar 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022



Tabel 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022*
Target	6,59%	6,47%	6,40 - 5,95%	6,30 - 5,90%	8,99 %
Realisasi	6,12%	5,47%	9,79%	9,68%	7,62%
Capaian	107,13%	115,46%	47,03%	46,35%	115,24%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Realisasi TPT 2018 tercatat sebesar 6,12%, pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 5,47%. Namun, pada tahun 2020 TPT mengalami peningkatan menjadi 9,79%, hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan jumlah karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta pengurangan jam kerja. Pada tahun 2021 realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya tercatat sebesar 9,68% atau mengalami penurunan 0,11% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 dan semakin menurun pada tahun 2022 sebesar 2,06% menjadi 7,62% .

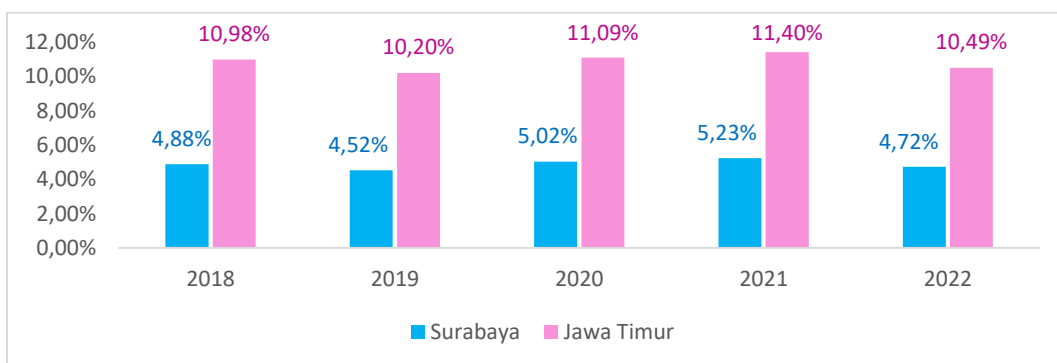
Upaya-upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk penyerapan tenaga kerja baik di sektor formal dan informal. Pada sektor formal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan bekal bagi para pencari kerja untuk siap dalam dunia kerja. Pada sektor formal, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja memberikan bekal bagi para pencari kerja untuk siap dalam dunia kerja dengan memberikan bimbingan teknis *soft skill* dengan peserta sebanyak 1000 orang, pemberian pelatihan yang menunjang keahlian pencari kerja sebanyak 732 orang dengan berbasis kompetensi, pemberian fasilitasi sertifikasi keahlian 912 orang dan pemagangan untuk meningkatkan daya saing para pencari kerja sehingga akhirnya dapat terserap pada perusahaan sebanyak 7.291 orang. Fasilitasi juga diberikan melalui job fair dan *link and match* ASSIK (Arek Surabaya Siap Kerja) untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan sesuai dengan keahliannya yang dilaksanakan sebanyak 4 kali, serta aktif melakukan himbauan dan sosialisasi ke hotel, toko swalayan, mall dan perusahaan untuk memprioritaskan menyerap tenaga kerja ber-KTP Surabaya. Sedangkan, untuk sektor informal dengan mendorong para pencari kerja untuk berwirausaha, memberikan bimbingan teknis/pelatihan berwirausaha dengan peserta sebanyak 532 orang, memberikan bantuan berupa fasilitasi penggunaan aset yang mencakup 274.orang. Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan pemenuhan sarana peralatan untuk berkegiatan usaha melalui Program Padat Karya dengan mendirikan 34

rumah padat karya di 14 Kecamatan, serta kemudahan akses pemasaran melalui e-Peken, Surabaya Kriya Galeri, dan Pameran.

D. Persentase Penduduk Miskin

Indikator Persentase Penduduk Miskin digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Namun demikian angka kemiskinan tetap diperhitungkan dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya selama lima tahun terakhir. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan atau batas kemiskinan menurut BPS adalah representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Gambar 3.4
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kota Surabaya dan BPS Jawa Timur, 2022

Tabel 3.4
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022*
Target	-	-	4,75 - 4,70%	4,71 - 4,60%	4,62 %
Realisasi	4,88%	4,52%	5,02%	5,23%	4,72%
Capaian	-	-	94,32%	88,96%	97,84%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

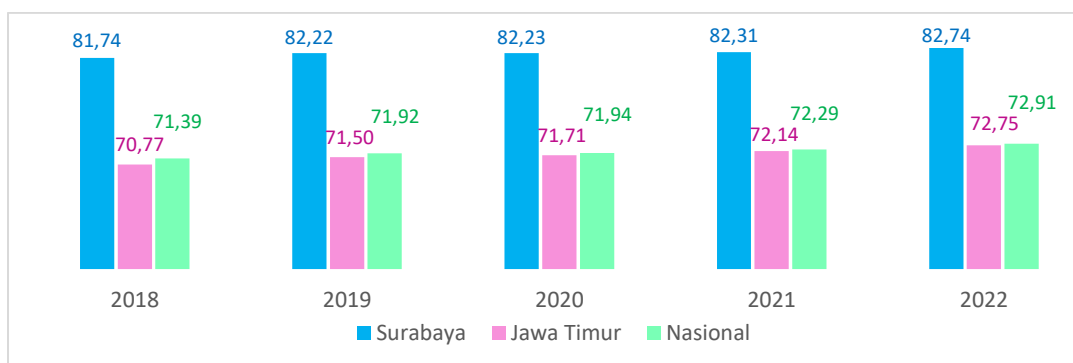


Berdasarkan data BPS Kota Surabaya, garis kemiskinan yang ditentukan BPS Kota Surabaya di tahun 2021 sebesar Rp611.466 perkapita perbulan dengan jumlah penduduk miskin Kota Surabaya mencapai 152.490 jiwa, sehingga persentase penduduk miskin sebesar 5,23%. Hal ini dikarenakan aktivitas perekonomian yang masih belum pulih akibat dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS Kota Surabaya mencapai Rp652,540 perkapita perbulan, meningkat sebesar Rp41.074 perkapita perbulan atau sebesar 6,72% bila dibandingkan tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Kota Surabaya tahun 2022 mencapai 138.210 jiwa, jumlah ini berkurang sebesar 14.280 jiwa dari tahun 2021, sehingga persentase penduduk miskin turun menjadi 4,72%. Menurunnya persentase kemiskinan di Kota Surabaya tidak terlepas dari upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan diantaranya pemberdayaan masyarakat menjadi pelaku usaha UMKM, pelatihan masyarakat (keluarga miskin) dalam program Padat Karya, pengembangan kawasan wisata dan event seni budaya, serta sebagai upaya optimalisasi penyelesaian masalah kemiskinan secara terpadu, dilakukan perbaikan data yang dilakukan melalui kegiatan musyawarah kelurahan (muskel) yang dilakukan setiap bulan dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Walikota.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan utamanya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh Pengeluaran Per Kapita per tahun.

Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 – 2022



Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022*
Target	79-80	80-81	80-81	81-82	82,50
Realisasi	81,74	82,22	82,23	82,31	82,74
Capaian	102,18%	101,51%	101,52%	100,38%	100,29%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya terus mengalami peningkatan selama periode 2018 hingga 2022. IPM Kota Surabaya meningkat dari 81,74 pada tahun 2018 menjadi 82,74 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Kota Surabaya selalu menduduki peringkat ke satu (tertinggi) di provinsi Jawa Timur dan termasuk kategori “sangat tinggi” karena sudah memiliki nilai IPM ≥ 80 .

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kota Surabaya mencapai 10,51 tahun (setingkat kelas XI SMA/MA/SMK) atau meningkat 0,01 poin dibanding tahun lalu dan Harapan Lama Sekolah mencapai 14,83 tahun (setingkat Diploma II/III) atau meningkat 0,02 poin dibanding tahun sebelumnya yaitu 14,81. Capaian di bidang Pendidikan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Surabaya antara lain, beasiswa bagi penghafal kitab suci sebanyak 1.162 siswa, beasiswa Pemuda Tangguh yang diperuntukkan kepada Siswa/i SMA/MA/SMK sebanyak 13.862 siswa dan Mahasiswa sebanyak 2.486 mahasiswa, Sekolah Inklusi pada 57 SD negeri dan swasta, kejar paket dengan muatan pendidikan vokasi, Sinau Bareng Arek Suroboyo yang diselenggarakan di 26 balai RW, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada jenjang pendidikan SD dan SMP, mendorong program Orang Tua Asuh,



Program Surabaya Mengajar yang melibatkan mahasiswa, serta pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Angka Harapan Hidup (AHH) dicapai melalui komitmen penjaminan kesehatan bagi Penduduk Kota Surabaya melalui *Universal Health Coverage* (UHC) yang telah mencapai 99,46% pada tahun 2022. Selain itu, upaya dilakukan untuk penurunan angka kematian Ibu menjadi sebesar 39,99 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian Bayi menjadi 4,34 per 100.000 kelahiran hidup, serta penurunan prevalensi Balita stunting menjadi 1,55% di tahun 2022, melalui pemberian intervensi gizi buruk yang dilakukan pada 1.033 balita, pendampingan Ibu hamil risiko tinggi sebanyak 8.714 orang ibu hamil risiko tinggi, penyediaan nutrisi dan vitamin yang memadai dengan melalui pemberian tablet Tambah Darah dengan Sasaran Remaja putri sebanyak 96.635 orang, Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil sebanyak 44.182 orang, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kalori (KEK) sebanyak 1.268 orang serta pemberian CFC (*Community Feeding Center*) atau PKMK (Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus) kepada balita malnutrisi sebanyak 342 serta penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai pada 63 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah, pembangunan sarana kesehatan lingkungan dan air bersih serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Pada tahun 2022 Pengeluaran per Kapita per Tahun mencapai Rp.18.345.000.- atau meningkat 0,973 % dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp.17.862.000.- per tahun atau lebih tinggi sebesar Rp483.000,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Kota Surabaya semakin membaik. Meningkatnya daya beli masyarakat yang seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, juga tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Beberapa upaya yang dilakukan antara lain pemberdayaan UMKM, program Padat Karya, pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, membuka peluang kerja melalui aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerja (ASSIK), menyelenggarakan acara *job fair* secara rutin, melibatkan partisipasi perusahaan swasta untuk penyerapan tenaga kerja, *rebranding* destinasi wisata baru dan menyelenggarakan event untuk meningkatkan omset dari para pelaku ekonomi.

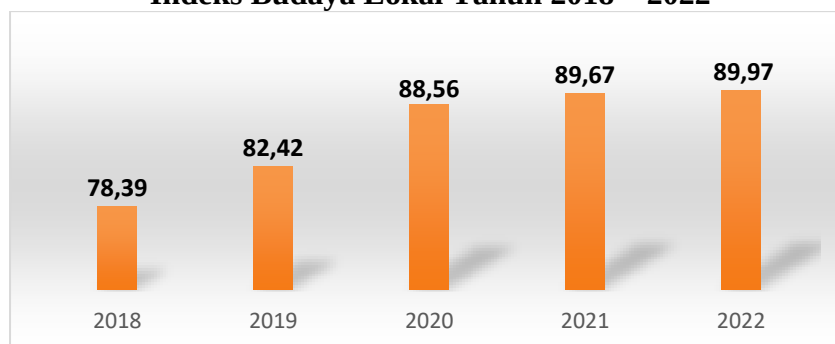
F. Indeks Harmoni Sosial

Indeks Harmoni Sosial merupakan indikator komposit yang terdiri dari Indeks Budaya Lokal, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial.

Indeks ini menekankan pada paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya solidaritas dalam masyarakat yang beragam tersebut. Indeks Budaya Lokal disusun oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal (mengenai jenis seni budaya dan cagar budaya) dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan merupakan indeks komposit yang tersusun atas 4 komponen, yakni: (1) persentase masyarakat yang pemahaman lingkungan hidupnya meningkat, (2) jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diusulkan, (3) peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan, dan (4) persentase rumah sehat. Kemudian, Indeks Kepedulian Sosial merupakan indeks yang ditentukan dengan hasil survei terhadap partisipasi masyarakat dalam aspek sosial, kemanusiaan, toleransi beragama dan kebangsaan.

Selama periode 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2018-2021), indeks ini bernama Indeks Budaya Lokal, yang dihitung melalui hasil penilaian tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Kota Surabaya menunjukkan capaian yang positif dalam hal tersebut. Hal ini dapat tercermin pada Gambar 3.6, di mana Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya menunjukkan kenaikan tiap tahunnya.

Gambar 3.6
Indeks Budaya Lokal Tahun 2018 – 2022



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Tabel 3.6
Indeks Budaya Lokal Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	76,1	79,61	80,00	81,50	88,90



Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Realisasi	78,39	82,42	88,56	89,67	89,97
Capaian	103,01%	103,53%	110,70%	110,02%	101,20%

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Sedangkan untuk tahun 2022, indeks ini disempurnakan menjadi Indeks Harmoni Sosial melalui penambahan Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dan Indeks Kepedulian Sosial. Penambahan kedua indikator ini guna mendukung upaya pembentukan karakter masyarakat Kota Surabaya yang produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan. Nilai Indeks Budaya Lokal dapat menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal dan tingkat kepedulian masyarakat dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan dapat menggambarkan tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Sedangkan Indeks Kepedulian Sosial dapat menggambarkan tingkat kepedulian antar masyarakat dalam lingkup sosial sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dianggap penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat terutama pada zaman modernisasi sekarang, di mana dengan berkembangnya teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, beserta lingkungan hidup yang mendukung aktivitas masyarakat.

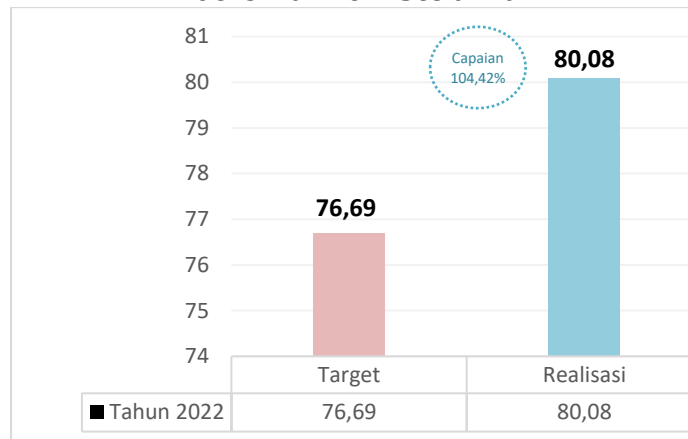
Tabel 3.7
Indeks Harmoni Sosial Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2022*

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Harmoni Sosial	76,69	80,08	104,42%
1.a	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan	47,97	48,01	100,09%
1.b	Indeks Kepedulian Sosial	89,10	97,67	109,61%
1.c	Indeks Budaya Lokal	88,90	89,97	101,20%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Gambar 3.7
Indeks Harmoni Sosial 2022



**Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026*

Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2023

Pencapaian Indeks Harmoni Sosial Kota Surabaya tahun 2022 sebesar 80,08% tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota dalam meningkatkan ragam dan frekuensi *event* budaya lokal, kepedulian lingkungan, serta penguatan karakter kebangsaan dan kerukunan antar masyarakat di Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut di antaranya merupakan hasil dari rutinnnya pelaksanaan *event*, festival serta parade dengan tema seni dan budaya serta sejarah yang diadakan di Kota Surabaya, seperti Parade Juang, Festival Rujak Uleg, Perobekan Bendera, *Heroic Track*, Sekolah Kebangsaan, *Surabaya Vaganza*, Cak dan Ning, Parade Budaya serta Sedekah Bumi. Selain itu, keberhasilan tersebut juga didukung oleh upaya edukasi lingkungan kepada masyarakat, baik pelajar maupun pelaku usaha mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk di antaranya pembinaan bank sampah di 470 lokasi dan 40 kampung *zero waste*, serta diadakannya perlombaan lingkungan seperti *Surabaya Smart City*, ECO school, ECO campus dan ECO pesantren. Kemudian, dukungan atas pencapaian Indeks Harmoni Sosial tersebut juga terwujud melalui upaya pemantapan karakter kebangsaan dan ideologi pancasila, serta penguatan kerukunan antar masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama, mediasi konflik umat beragama, serta sosialisasi anti narkoba dan koordinasi operasi gabungan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

G. Indeks Infrastruktur Kota

Indeks Infrastruktur Kota dihitung untuk mengukur keberhasilan dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur kota. Indeks Infrastruktur Kota menggambarkan implementasi penataan ruang kota yang terintegrasi melalui penyediaan dan peningkatan

kualitas infrastruktur kota yang terdiri dari tiga komponen, yaitu Indeks Kebinamargaan dan Pematusan, Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan serta Indeks Penyelenggaraan Transportasi.

Pola perhitungan Indeks Infrastruktur Kota pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi dan perbaikan pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026. Hal ini dikarenakan diperlukan penyesuaian komponen perhitungan untuk mengakomodir aspek infrastruktur kota yang masih perlu ditingkatkan pada periode 2021-2026. Sehingga formulasi perhitungan antara tahun 2020 - 2021 dengan tahun 2022 berbeda dan capaiannya tidak dapat disejajarkan.

Tabel 3.8
Indeks Infrastruktur Kota Tahun 2018 – 2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	n/a	n/a	0,8	0,84
Realisasi	n/a	n/a	0,95	0,995
Capaian	-	-	118,75%	124,37%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2022

Tabel 3.9
Indeks Infrastruktur Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2022

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Infrastruktur Kota	0,626	0,672	107,03%
1.a	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan	0,77	0,78	101,04%
1.b	Indeks Keciptakayaan, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,38	0,54	142,48%
1.c	Indeks Penyelenggaraan Transportasi	0,68	0,67	98,74%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, diolah, 2022

Pada tahun 2022 Realisasi Indeks Infrastruktur Kota Surabaya adalah sebesar 0,672. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas jalan dan prasarana melalui pembangunan pedestrian dan pelaksanaan *overlay* (pelapisan ulang aspal) pada 2.072 ruas jalan, peningkatan konektivitas jalan melalui pembangunan jalan baru (Jalan Lingkar Luar Barat). Penanganan genangan dilakukan melalui pembangunan dan/rehabilitasi sistem drainase pada 353 lokasi, penambahan kapasitas dan pembangunan rumah pompa baru sebanyak 4 unit, serta pengerukan saluran primer,



sekunder dan tersier sebanyak 1.192 lokasi. Selanjutnya, penyediaan hunian layak juga telah dilakukan melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat miskin sebanyak 105 blok rusunawa dan pembangunan baru 2 blok rusunawa yang tuntas pada akhir 2022, Program Dandan Omah sebagai upaya rehabilitasi terhadap rumah tapak tidak layak huni sebanyak 929 rumah, fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan sebanyak 22 lokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk pelayanan publik. Selain itu dari sisi penataan ruang dan penyediaan tanah telah dilakukan pelayanan penataan ruang dan bangunan yang terintegrasi serta berbasis teknologi. Sedangkan dari aspek transportasi, keberhasilan tersebut didukung oleh penyediaan layanan angkutan umum perkotaan dengan penyediaan angkutan suroboyo bus sebanyak 28 unit yang melayani 3 rute layanan dan kerjasama Kementerian Perhubungan melalui Teman Bus sebanyak 17 unit yang melayani 1 rute serta pengadaan angkutan feeder sebanyak 52 unit yang dioperasikan di tahun 2023, serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

H. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai kota Surabaya pada tahun 2022 sebesar 67,78. Sedangkan nilai IKLH Jawa Timur sebesar 69,92. Berikut capaian nilai IKLH Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
IKLH Kota Surabaya	61,34	61,43	60,96	67,78	67,78
IKLH Provinsi Jawa Timur	66,36	67,10	67,04	68,29	69,92
IKLH Nasional	71,67	66,55	70,27	N/A	N/A

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023



Selain IKLH, fokus peningkatan kualitas lingkungan di Kota Surabaya adalah pada pengelolaan sampah. Tingginya sampah yang dihasilkan seiring dengan dengan jumlah penduduk 2.987.863 Jiwa dan aktivitas ekonomi yang tinggi, oleh karenanya dibutuhkan prioritas pengelolaan persampahan, sehingga Kota Surabaya melakukan penambahan Indeks Persampahan dan menggunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan sebagai kinerja utama. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS), bertujuan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup dengan mengukur kualitas air (IKA) dan kualitas udara (IKU), kualitas lahan (IKL) dan kualitas layanan persampahan agar nantinya tercipta kualitas lingkungan hidup kota yang bersih, hijau, dan terjamin.

Kualitas dan kondisi udara, air dan tutupan tanah dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan, industri besar, industri kecil, kepadatan lingkungan permukiman. Sedangkan kondisi tutupan lahan yang sangat dipengaruhi oleh luas lahan dan besaran Ruang Terbuka Hijau serta sistem persampahan dan sanitasi. Hal ini sebagai tindak lanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

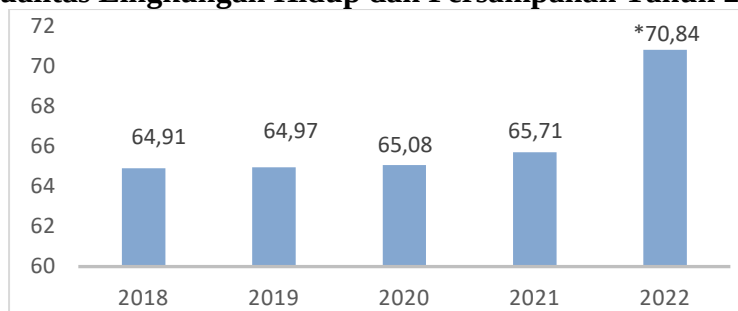
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah dilakukan evaluasi kembali pada penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dimana ada perubahan bobot perhitungan berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2020-2024, yang ditindaklanjuti pada penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 karena pada saat surat tersebut diterima Pemerintah Kota Surabaya sudah tidak diperkenankan melakukan perubahan atas RPJMD 2016-2021. Berikut merupakan capaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Persampahan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.11
Indeks Penyusun IKLHS Tahun 2018 – 2022

Indeks	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Air (IKA)	57,62	57,68	56,05	58,18	57,91
Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,26	90,30	90,35	90,28	90,55
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42,44	42,45	42,63	42,63	42,64
Indeks Persampahan	74,98	75,09	75,84	76,62	82,91

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Gambar 3.8
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2018 – 2022



*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

Tabel 3.12
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2018 – 2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Target	63,3	64,9	65	65,1	68,32
Realisasi	64,91	64,97	65,08	65,71	70,82
Capaian	102,54%	100,11%	100,12%	100,94%	103,66%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

Kondisi lingkungan hidup Kota Surabaya semakin membaik dari tahun 2018 sampai 2022, dimana pada tahun 2018 IKLHS sebesar 64,91 dan terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2022 IKLHS telah mencapai 70,82. Nilai IKLHS mengalami kenaikan karena salah satu unsur pembentuk yaitu indeks persampahan mengalami kenaikan. Hal ini terjadi disebabkan beroperasinya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan secara optimal terutama di TPA Benowo yang sudah menggunakan teknologi ramah lingkungan pengolah sampah menjadi energi listrik. Adapun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya antara lain pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, penghematan energi dengan cara konservasi energi yang dapat menurunkan pemakaian energi secara tidak tepat dan tidak efisien, serta upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. Selain pada Indeks Persampahan, Indeks Kualitas Udara juga mengalami peningkatan kinerja karena adanya upaya pengawasan kegiatan usaha untuk pengendalian pencemaran udara, Sosialisasi terkait program kampung iklim, pelaksanaan *Car Free Day* pada 7 lokasi, dan pembangunan taman sebanyak 30 lokasi.



I. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi indeks Reformasi Birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Evaluasi terhadap Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah yang terdiri dari:

1. Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Komponen Hasil (*Results*), merupakan dampak dari upaya-upaya atau program/kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi.

Capaian Indeks Reformasi Kota Surabaya Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2022

Tahun	2020	2021	2022*
Target	BB	A	82,61
Realisasi	BB 78,13	BB 78,38	A 80,14
Capaian	Tercapai	Tidak tercapai	97,01%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Bagian Organisasi dan Bappedalitbang Kota Surabaya, diolah, 2022

Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan predikat dari BB di tahun 2021 menjadi A dengan nilai 80,14 di tahun 2022. Berdasarkan



masukannya dari Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi 2022 (Surat dari KemenPAN RB Nomor B/1005/RB.06/2022). Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2022 antara lain :

1. Perangkat Daerah membangun strategi pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan isu strategis “*Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif*” dan memaparkan kepada Walikota beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah;
2. Melakukan internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan melakukan pengukuran pemahaman pegawai ;
3. Melakukan evaluasi produk hukum menyesuaikan dengan kewenangan, kebijakan daerah, dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi ;
4. Melakukan penyesuaian peraturan mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 962 Tahun 2021 yang tertuang dalam Perwali Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Menyusun SKP berdasarkan perjanjian kinerja hingga level individu, pengembangan pegawai berbasis kompetensi (*talent pool*) sesuai penerapan sistem merit;
6. Melaksanakan peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan pelaksanaan diklat dan pelatihan oleh BPKP ;
7. Melaksanakan reviu kinerja tata kelola perizinan dan pemantauan pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik; dan
8. Memfasilitasi kanal pengaduan melalui aplikasi wargaKU sebagai sarana pengaduan masyarakat yang langsung tersambung ke Kepala Perangkat daerah dan Walikota.

Adapun beberapa upaya yang perlu disempurnakan untuk pencapaian Reformasi Birokrasi antara lain: (1) Melakukan *review* dan perbaikan atas program-program reformasi birokrasi yang lebih mengedepankan aspek kolaborasi (2) Melakukan *Regulatory Impact Assessment (RIA)* agar menjamin efektivitas dampak dari kebijakan/inovasi yang disusun bagi masyarakat, pengidentifikasian ulang program, kegiatan dan anggaran PD serta mereviu peta risiko (3) Menyusun matrik peran hasil bagi para pegawai termasuk pejabat fungsional dan perencana dalam pencapaian kinerja organisasi, (4) Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, (5) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi.

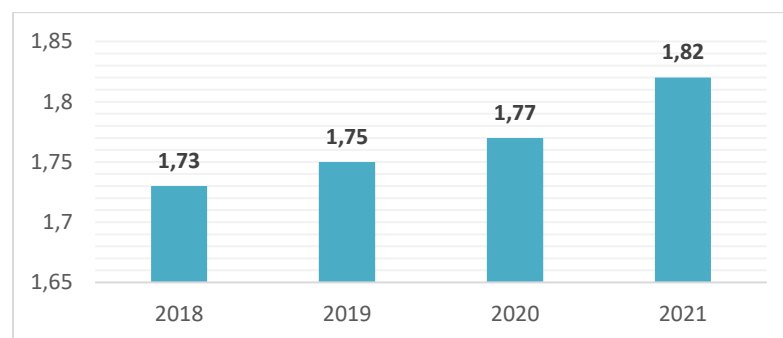


J. Indeks Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban Kota

Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota merupakan salah satu faktor pendukung yang penting untuk memastikan kepastian pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar serta menopang kepercayaan *investor*. Pengukuran terhadap keberhasilan pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota melalui indikator Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman, indeks ini diarahkan untuk melatih berbagai elemen masyarakat dalam rangka kesiap-siagaan dalam penanganan bencana, peningkatan ketenteraman dan ketertiban serta penyebarluasan informasi terkait penanganan bencana, peningkatan ketenteraman dan ketertiban.

Selama periode 4 (empat) tahun terakhir (tahun 2018-2021), indeks ini bernama Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota saja yang diukur dari rata-rata invers banyaknya kejadian anarkis dan banyaknya pelanggaran Perda. Pada periode empat tahun terakhir tersebut, Indeks Ketertiban dan Ketenteraman menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2021, Angka Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota mencapai angka 1,82 meningkat 0,05 poin dibandingkan tahun 2020 sebagaimana diilustrasikan pada gambar 3.4. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum norma dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berjalannya kegiatan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.9
Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota Tahun 2018 – 2021



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tabel 3.14
Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota Tahun 2018 – 2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	0,96	0,99	1,01	1,04
Realisasi	1,73	1,75	1,77	1,82
Capaian	180,21%	176,77%	175,25%	175,00%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022

Sesuai dengan fokus penguatan terhadap upaya penanggulangan bencana sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka pengukuran ditambah dengan Indeks Penanggulangan Bencana sehingga menjadi Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota terdiri dari dua komponen utama, yaitu Indeks Penanggulangan Bencana serta Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota. Indeks Penanggulangan Bencana sendiri diperoleh dari perhitungan: (1) penanganan bencana yang terintegrasi dan (2) pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang terintegrasi. Sedangkan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota mengalami perubahan formulasi dari periode sebelumnya, yakni menjadi diperoleh dari perhitungan rata-rata: (1) Penyelesaian konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan (IPOLEKSOSBUD) yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) serta (2) Penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan.

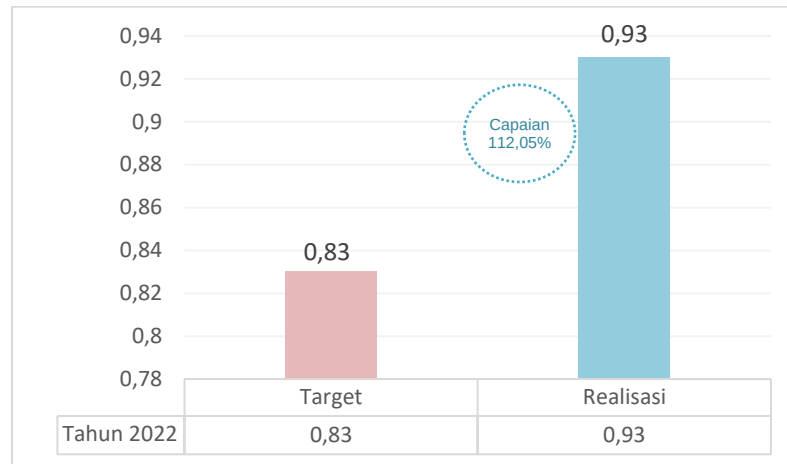
Tabel 3.15
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban Kota Beserta Indikator Penyusunnya Tahun 2022*

No	Indikator Penyusun	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan Ketertiban Kota	0,83	0,93	112,05%
1.a	Indeks Penanggulangan Bencana	0,792	0,96	121,29%
1.b	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kota	0,86	0,90	104,65%

*Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026

Sumber: Bappedalitbang, 2023 (data diolah)

Gambar 3.10
Indeks Penanggulangan Bencana, Ketenteraman dan
Ketertiban Kota Tahun 2022*



**Tahun 2022 sesuai Target RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026*
Sumber: Bappedalitbang, 2023 (data diolah)

Hingga tahun 2022, kepatuhan masyarakat terhadap hukum norma dan peraturan yang berlaku serta integrasi dan mitigasi guna menanggulangi dan menangani bencana masih menunjukkan hal positif. Hal ini terlihat pada Gambar 3.5 di atas, yang menunjukkan capaian Indeks Penanggulangan Bencana, Ketertiban dan Ketenteraman Kota. Hal tersebut tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota untuk melakukan mitigasi bencana dengan melakukan pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana Tingkat Pratama sebanyak 31 Kelurahan, pelatihan pencegahan dan pengurangan resiko bencana sebanyak 27 kali, penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana, serta upaya maksimal dalam penanganan korban bencana. Selain itu, dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, telah dilakukan upaya pemeriksaan proteksi kebakaran dan sosialisasi kepada pemilik bangunan gedung, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, serta peningkatan waktu tanggap kejadian kebakaran dengan standar ≤ 7 menit dan cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran melalui pembangunan pos pemadam kebakaran.

Tercapainya ketenteraman dan ketertiban juga tidak lepas dari upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pelaksanaan patroli rutin, penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penertiban pelanggaran Perda yang persuasif dan humanis dengan cara sosialisasi sebelum dilakukannya penertiban guna menemukan titik terang solusi dan mencegah adanya kesalahpahaman. Selain itu, dalam menjaga ketenteraman di



masyarakat, telah dilakukan upaya peningkatan koordinasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen dalam pencegahan konflik, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, koordinasi dalam pemantauan orang, tenaga kerja dan lembaga asing, serta mendorong peran partai politik untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

3.1.1.2 Realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai dengan RPJMD Kota Surabaya 2021-2026, bidang urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 38 bidang urusan dengan capaian Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan dalam tabel 3.16. Pada tabel 3.16 disajikan 38 bidang urusan dengan rata-rata capain sebesar 118,06%, hal ini menunjukkan bahwa bidang urusan telah diselenggarakan dengan baik, hal ini tidak lepas dari keberhasilan program kegiatan yang mendukung pencapaian pada 38 bidang urusan tersebut.



Tabel 3.16
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2022

BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
Layanan Urusan Wajib Dasar						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					
1.1.	Indeks Pendidikan		77.7	76.23	98.11%	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,51 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui pemberian beasiswa SMA/MA/SMK serta pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Selain itu untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2022 telah mencapai 14,81 tahun, Pemerintah Kota Surabaya memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin.
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					
2.1.	Angka Harapan Hidup		74.36	74.47	100.15%	
2.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat		88.31%	89.59%	101.45%	
	2.2.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan	88.31	87.32%	98.88%	Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap sistem pelayanan kesehatan sehingga ke depan Dinas Kesehatan berupaya untuk selalu memperbaiki sistem layanan kesehatan baik di Puskesmas maupun RS
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Indeks Kebinamargaan dan Pematusan		0.77	0.78	101.04%	
3.2.	Indeks Keciptakarya, Penataan Ruang dan Pertanahan		0.38	0.54	142.48%	



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
	3.2.1.	Indeks Penataan Ruang	0.285	0.31	109.82%	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					
4.1.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan		0.38	0.54	142.48%	
	4.1.1.	Indeks Keciptakaryaan	0.07	0.22	310.43%	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Indeks Penanggulangan Bencana		0.792	0.96	121.29%	
5.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0.86	0.90	104.65%	
	5.2.1.	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	76.39%	80.96%	105.98%	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					
6.1.	Indeks Kedalaman Kemiskinan		0.85	0.69	118.82%	
6.2.	Persentase PMKS terhadap jumlah penduduk		2.35%	20.435	113.04%	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					
1.1.	Persentase tenaga kerja yang terserap		21.14%	21.30%	100.76%	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.1.	Indeks Pembangunan Gender		93.73	93.9	100.18%	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					
3.1.	Skor Pola Pangan Harapan		93.00%	94.16%	101.25%	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
4.1.	Indeks Keciptakaryaan, Penataan Ruang dan Pertanahan		0.38	0.54	142.48%	
	4.1.1.	Indeks Pertanian	0.024	0.0047	19.58%	1. Menyesuaikan program prioritas pembangunan di tingkat kota, khususnya dalam pemulihan ekonomi dan penanganan genangan



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
						2. Penyesuaian kebutuhan luas yang dibebaskan berdasarkan NIB dari kantor pertanahan
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					
5.1.	Indeks Kualitas Air		56.07	57.91	103.28%	
5.2.	Indeks Kualitas Udara		90.32	90.55	100.25%	
5.3.	Indeks Kualitas Lahan		42.66	42.64	99.94%	Belum optimalnya penyediaan RTH publik di area perumahan melalui proses penyerahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Kota Surabaya.
5.4.	Indeks Persampahan		76.95	82.91	107.74%	
5.5.	Indeks Kapasitas Pengelolaan Lingkungan		47.97	48.01	100.09%	
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		88.31%	89.59%	101.45%	
	6.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat pada Layanan Administrasi Kependudukan	88.31%	87.36%	98.92%	1. Pelayanan adminduk tergantung pada ketersediaan blanko KTP-el dari Ditjendukcapil Kemendagri 2. Terjadinya maintenance SIAK terpusat yang menyebabkan pelayanan terganggu
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
7.1.	Angka Harapan Hidup		74.360	74.47	100.15%	
	7.1.1.	Indeks Bangga Kencana	65.05	57.5	88.39%	1. Masih adanya tribina yang belum difasilitasi di tingkat kelurahan 2. Masih adanya PUS yang tidak menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan adanya pasangan usia subur yang usianya sudah terlalu tua, tidak lagi subur, adanya permasalahan kesehatan, dan masih menginginkan anak lagi
8	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					
8.1.	Indeks Penyelenggaraan Transportasi		0.68	0.67	98.74%	Layanan Angkutan Umum di Kota Surabaya belum terintegrasi dengan simpul simpul transportasi terutama untuk Stasiun



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
						Gubeng pada tahun pertama dikarenakan ada penyesuaian ketersediaan moda transportasi.
9	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					
9.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3.1	3.69	119.03 %	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah					
10.1.	Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro		8.30%	9.34%	112.49%	
11	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					
11.1.	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah		4.60%	20.18%	438.77%	
11.2.	Nilai Kepuasan Masyarakat		88.31%	89.59%	101.45%	
	11.2.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	88.31%	86.48%	97.92%	Adanya renovasi mal pelayanan publik di Kota Surabaya dalam rangka peningkatan layanan perijinan. awal proses renovasi menyebabkan sedikit terganggunya pelayanan publik kepada masyarakat yang berpengaruh pada kepuasan masyarakat. setelah selesainya renovasi pelayanan publik perijinan sudah berjalan dengan normal dan mal pelayanan publik semakin nyaman bagi pengunjung sehingga nilai SKM perbulan setelah renovasi sudah melebihi target
12	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
12.1.	Indeks Pendidikan		77.7	76.23	98.11%	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,51 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui pemberian beasiswa SMA/MA/SMK



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
						serta pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Selain itu untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2022 telah mencapai 14,81 tahun, Pemerintah Kota Surabaya memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin.
	12.1.1.	Indeks Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan	0.7	1.11	158.71%	
13	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					
13.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3.1	3.69	119.03%	
	13.1.1.	Persentase hasil analisa data yang terpublikasi	100%	100%	100%	
14	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					
14.1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3.1	3.69	119.03%	
	14.1.1.	Persentase serangan terhadap sistem keamanan informasi yang ditangani	100%	100%	100%	
15	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					
15.1.	Indeks Budaya Lokal		88.9	89.97	101.20%	
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					
16.1.	Indeks Pendidikan		77.7	76.23	98.11%	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Surabaya sebagai salah satu unsur pembentuk Indeks Pendidikan berada di 10,51 tahun. Mengingat pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mendukung partisipasi sekolah di tingkat SMA/MA/SMK melalui pemberian beasiswa SMA/MA/SMK



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
						serta pendidikan kesetaraan berbasis vokasi melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan menggandeng PKBM dalam menyelenggarakan kejar paket. Selain itu untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah di mana pada tahun 2022 telah mencapai 14,81 tahun, Pemerintah Kota Surabaya memberikan beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga miskin.
	6.1.1.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68,4	68,45	100.07%	
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					
	17.1.1.	Persentase PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	69.23%	75.00%	108.33%	
Layanan Urusan Pilihan						
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					
	1.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori penyediaan akomodasi dan makan minum	4.87%	8.48%	174.21%	
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					
	2.1.	Skor Pola Pangan Harapan	93.00%	94.16%	101.25%	
	2.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian	10.00%	10.75%	107.49%	
3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					
	3.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3.65%	6.95%	190.50%	
	3.2.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3.61%	6.55%	181.44%	
	3.3.	Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5.24%	6.31%	120.46%	
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					
	4.1.	Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri pengolahan	3.61%	6.55%	181.44%	



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
	4.1.1.	Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan usaha	75.00%	99.77%	133.03%	
5	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					
5.1.	Skor Pola Pangan Harapan		93.00%	94.16%	101.25%	
	5.1.1.	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Perikanan dan Kelautan	2.50%	2.76%	110.38%	
Penunjang Urusan						
1	Perencanaan					
1.1.	Nilai SAKIP		81.92	80.31	98.03%	1. Secara umum dalam komponen penilaian SAKIP tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, namun dibanding dengan target RPJMD pada tahun 2022 masih belum tercapai. Dalam perencanaan kinerja, telah disusun pohon kinerja, namun terdapat perangkat daerah yang perlu dioptimalkan dalam menggambarkan CSF serta penerjemahannya dalam dokumen perencanaan, sehingga masih terdapat perumusan kinerja individu yang belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi. 2. Pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang perlu dioptimalkan untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang tidak berdampak pada pencapaian kinerja. 3. Pelaporan kinerja perlu dioptimalkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, menyebutkan upaya perbaikan selanjutnya, serta perlu kajian ulang untuk indikator yang realisasinya telah melampaui target tahun berikutnya. 4. LHE belum optimal dalam menjelaskan rekomendasi, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan kinerja.
	1.1.1.	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	23.62	24.38	103.22%	



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
2	Keuangan					
2.1.	Opini BPK		WTP	WTP	100.00%	
	2.1.1.	Persentase kontribusi Pendapatan terhadap APBD	90.87%	87.89%	96.72%	Pada tahun 2022 merupakan masa pemulihan (recovery) ekonomi. sehingga berdampak negatif pada Penerimaan Pendapatan Daerah
3	Kepegawaian					
	3.1.1.	Indeks Kualitas Pegawai	79,2	82,4	104.05%	
4	Pendidikan dan Pelatihan					
	4.1.1.	Cakupan pegawai yang telah ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	76,38	82,178	107.59%	
5	Penelitian dan pengembangan					
5.1.	Nilai SAKIP		81.92	80.31	98.03%	1. Secara umum dalam komponen penilaian SAKIP tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, namun dibanding dengan target RPJMD pada tahun 2022 masih belum tercapai. Dalam perencanaan kinerja, telah disusun pohon kinerja, namun terdapat perangkat daerah yang perlu dioptimalkan dalam menggambarkan CSF serta penerjemahannya dalam dokumen perencanaan, sehingga masih terdapat perumusan kinerja individu yang belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi. 2. Pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang perlu dioptimalkan untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang tidak berdampak pada pencapaian kinerja. 3. Pelaporan kinerja perlu dioptimalkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, menyebutkan upaya perbaikan selanjutnya, serta perlu kajian ulang untuk indikator yang realisasinya telah melampaui target tahun berikutnya.



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
						4. LHE belum optimal dalam menjelaskan rekomendasi, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan kinerja.
	5.1.1.	Nilai Indeks Inovasi Daerah	55	62.60	113.82%	
6	Sekretariat Daerah					
6.1.	Nilai SAKIP		81.92	80.31	98.03%	1. Secara umum dalam komponen penilaian SAKIP tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, namun dibanding dengan target RPJMD pada tahun 2022 masih belum tercapai. Dalam perencanaan kinerja, telah disusun pohon kinerja, namun terdapat perangkat daerah yang perlu dioptimalkan dalam menggambarkan CSF serta penerjemahannya dalam dokumen perencanaan, sehingga masih terdapat perumusan kinerja individu yang belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi. 2. Pemantauan pengukuran kinerja secara berjenjang perlu dioptimalkan untuk mengidentifikasi program/kegiatan yang tidak berdampak pada pencapaian kinerja. 3. Pelaporan kinerja perlu dioptimalkan analisa efisiensi penggunaan sumber daya, menyebutkan upaya perbaikan selanjutnya, serta perlu kajian ulang untuk indikator yang realisasinya telah melampaui target tahun berikutnya. 4. LHE belum optimal dalam menjelaskan rekomendasi, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan kinerja.
7	Sekretariat DPRD					
	7.1.1.	Persentase pelaksanaan fungsi DPRD	100.00%	100.48%	100.48%	
8	Inspektorat Daerah					
	8.1.1.	Indeks kualitas pengawasan	79,23	90,67	114.44%	



BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN
9	Kesatuan Bangsa dan Politik					
9.1.	Indeks Kepedulian Sosial		89.1	97.67	109.61%	
9.2.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota		0.86	0.9	104.65%	
	9.2.1.	Persentase penyelesaian konflik IPOLEKSOSBUD yang menimbulkan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan	95.51	100	104.70%	
10	Kecamatan					
10.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat		88.31%	89.59%	101.45%	
	10.1.1.	Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	88.31%	92.34%	104.56%	



3.1.2 Capaian Kinerja Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan

3.1.2.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial,.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum program dan kegiatan dalam urusan wajib pelayanan dasar telah memenuhi target sehingga capaian 100%. Penjabaran pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pelayanan dasar yang dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Surabaya, dijabarkan dalam 6 Bidang urusan antara lain :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial



Tabel 3.17
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.01.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90.96 %	91.8333 %	100.96 %			1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, bahwa pengadaan dengan anggaran BOS, hibah dll dapat difasilitasi melalui aplikasi SIPLAH. Sehingga, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan agar UMKM binaan dapat terdaftar di aplikasi SIPLAH. 2. Pelaksanaan PPDB tahun 2022 mengacu pada Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021, yang selaras dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Di mana pada tingkat provinsi, zonasi berdasar Kota/Kabupaten,
1.01.01.2.01		Dinas Pendidikan	-Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	14 dokumen	14 dokumen	100.00 %		
93		Dinas Pendidikan			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah lembaga pendidikan yang mengikuti kegiatan fasilitasi pengelolaan manajemen sekolah	1207 lembaga	1223 lembaga	101.33 %		
			-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022			Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00 %		
1.01.01.2.02		Dinas Pendidikan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %		
94		Dinas Pendidikan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %		
1.01.01.2.06		Dinas Pendidikan	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	94.36 %	94.36 %	Realisasi penyediaan peralatan dan perlengkapan	Penajaman Perencanaan berdasarkan kebutuhan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023							perkantoran menyesuaikan kebutuhan rill		sedangkan pada tingkat kota, zonasi berdasarkan Kelurahan (SD) dan Kecamatan (SMP). Pemerintah Kota Surabaya juga mengajukan permohonan Kepada Kemendikbudristek untuk penyempurnaan sistem PPDB 2023/2024 dengan, diantaranya: 1. Perubahan daya tampung PPDB pada jalur prestasi 2. Perubahan daya tampung PPDB pada jalur zonasi 3. Intervensi terhadap MBR telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui pemberian biaya personal (kebutuhan dasar, antara lain: seragam sekolah, sepatu, ikat pinggang, tas, dsb.) 4. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Dengan demikian Dinas Pendidikan
1159		Dinas Pendidikan	-Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 jenis	19 jenis	111.76 %			
1.01.01.2.07		Dinas Pendidikan	-Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100 %	71.27 %	71.27 %	Realisasi pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran menyesuaikan kebutuhan rill	Penajaman Perencanaan berdasarkan kebutuhan	
95		Dinas Pendidikan	Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36 jenis	59 jenis	163.89 %			
1.01.01.2.08		Dinas Pendidikan	-Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	94.36 %	94.36 %	Realisasi penyediaan barang dan jasa perkantoran menyesuaikan kebutuhan rill	Penajaman Perencanaan berdasarkan kebutuhan	
1161		Dinas Pendidikan	-Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan	100.00 %			
1668		Dinas Pendidikan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02		Dinas Pendidikan	-Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %	100 %	100.00 %			setiap tahunnya terus berupaya untuk melakukan pemetaan guna memenuhi daya tampung lulusan SD/MI untuk dapat meneruskan ke jenjang SMP/MTS baik negeri maupun swasta. 5. Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan: 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM terkait penyediaan barang peralatan sekolah maupun makanan/minuman di koperasi sekolah. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penggunaan KaTePay untuk metode pembayaran di koperasi dan kantin sekolah. 6. Pelatihan TIK bagi guru dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan selama ini melalui sub kegiatan Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan, antara lain: 1) Pelatihan
1.01.02		Dinas Pendidikan			Angka Kelulusan SMP/MTS	100 %	100 %	100.00 %			
1.01.02		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100 %	84.0426 %	84.04 %	Adanya proses penyesuaian penggunaan aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi yang baru, sehingga diperlukan waktu untuk migrasi data.	melakukan bimtek kemampuan adaptif terhadap aplikasi perijinan	
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase guru PAUD yang kompeten	100 %	99.4234 %	99.42 %	Beberapa guru terkendala faktor kesehatan, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pelatihan.	memprioritaskan peserta pelatihan yang tidak terkendala masalah kesehatan	
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase guru yang mendapat pengembangan karir	19 %	15.539 %	81.78 %	Adanya kendala bagi para guru dalam memenuhi target angka kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat.	Telah menggunakan forum asistensi untuk membahas kendala pengisian angka kredit	
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase lembaga PAUD berkualitas	83.33 %	98.7613 %	118.52 %			
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase Pendidikan Nonformal/Kesetaraa	85.44 %	100 %	117.04 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					n yang sesuai standar nasional pendidikan						pemantapan Implementasi Microsoft Office 365 bagi Guru SD-SMP Negeri dan Swasta 2) Pelatihan Penguatan Pemanfaatan Google Workspace bagi guru PAUD 3) Pelatihan Penguatan Pemanfaatan Canva bagi guru PAUD 4) Pelatihan Coding sederhana (bagi pemula) bagi guru PAUD. Permohonan pelatihan tersebut telah difasilitasi Dinas Pendidikan bersama Diskominfo pada aplikasi SIMPAUD dan SIBUNDA. 7. Mekanisme pemberian BOPDA telah difasilitasi melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase penyelesaian permasalahan guru dan tenaga kependidikan	80 %	100 %	125.00 %			
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase SD terakreditasi minimal B	93.24 %	93.2735 %	100.04 %			
1.01.02		Dinas Pendidikan			Persentase SMP terakreditasi minimal B	96.79 %	95.0437 %	98.20 %	Jumlah sasaran sekolah akreditasi terkendala kuota yang ditetapkan BAN S/M.	Telah dilakukan koordinasi dengan Kemendikbud perihal kemungkinan penambahan kuota BAN S/M	
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	3 Laporan	3 Laporan	100.00 %			
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah laporan pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah dasar	4 laporan	4 laporan	100.00 %			
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Jumlah lembaga pendidikan dasar yang mendapatkan peningkatan mutu	692 Lembaga	691 Lembaga	99.86 %	Realisasi disesuaikan dengan jumlah lembaga yang memenuhi syarat BPD.	Sesuai ketentuan perihal lembaga penerima BPD	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100 %	90.57 %	90.57 %	Adanya proses penyesuaian penggunaan aplikasi pelayanan perizinan terintegrasi yang baru, sehingga diperlukan waktu untuk migrasi data.	Telah dibentuk Tim yang mendukung kelancaran Migrasi Data Aplikasi Pelayanan Perizinan	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah. 8. Secara umum, untuk efektifitas pelaksanaan tugas, serta mengacu kebijakan zonasi, maka penempatan guru diupayakan dekat dengan domisili. Namun demikian, penempatan guru tetap memprioritaskan pemerataan jumlah dan kualitas guru di seluruh sekolah dan seluruh wilayah kota Surabaya. Pengisian formasi guru oleh calon PPPK berdasarkan pilihan calon guru pendaftar serta ketersediaan formasi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat. 9. Dinas Pendidikan telah memberikan kesempatan pada para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Surabaya untuk berpartisipasi dalam Program Surabaya Mengajar untuk ditempatkan di berbagai sekolah di
1.01.02.2.01		Dinas Pendidikan			Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %			
96		Dinas Pendidikan		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	56 lembaga	56 lembaga	100.00 %			
97		Dinas Pendidikan		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar tepat waktu	690 lembaga	691 lembaga	100.14 %			
98		Dinas Pendidikan		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga SD yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	650 lembaga	643 lembaga	98.92 %	adanya lembaga yang belum memiliki siswa kelas 5, sehingga tidak mengikuti ANBK	Pelaksanaan asesmen berdasarkan ketentuan	
99		Dinas Pendidikan		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	13 kali	13 kali	100.00 %			
104		Dinas Pendidikan		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	11376 orang	10319 orang	90.71 %	Perlunya sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama yang intensif antara	Peningkatan koordinasi antara Guru dan Kepala Sekolah perihal	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				kepala sekolah dan para guru SDN yang sudah pernah mendapatkan diklat PK agar penilaian kinerja guru dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.	metode pelaksanaan penilaian kinerja guru yang efektif dan tepat waktu	wilayah Kota Surabaya, terutama sekolah-sekolah yang membutuhkan. Selain mengajar, mahasiswa juga dapat melakukan pendampingan terkait masalah belajar anak, terutama literasi dan numerasi, serta masalah psikososial yang timbul akibat belajar dari rumah. 10. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, bahwa pengadaan dengan anggaran BOS, hibah dll dapat difasilitasi melalui aplikasi SIPLAH. Sehingga, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan agar UMKM binaan dapat terdaftar di aplikasi SIPLAH. Pengadaan seragam dilaksanakan di sekolah masing-masing agar dapat
							Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	1842 Orang	2070 Orang	112.38 %			
105		Dinas Pendidikan					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan Peningkatan dan Pemetaan Mutu Kelembagaan Sekolah Dasar	260 lembaga	260 lembaga	100.00 %		
106		Dinas Pendidikan					Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD Penerima BOS	285 lembaga	285 lembaga	100.00 %		
1246		Dinas Pendidikan					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah lembaga yang mendapat alokasi Penyediaan Sarana Prasarana yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan	10 lembaga	0 lembaga	0.00 %	Adanya komponen dalam paket pekerjaan yang belum ber-TKDN, sehingga tidak dapat direalisasikan	Melakukan konsultasi dengan Kemendikbudristek dan meminta petunjuk apabila apakah komponen yang tidak ber-TKDN masih tetap masuk di dalam Juknis DAK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3442		Dinas Pendidikan				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %		mempercepat proses pelaksanaan sehingga anak didik mendapatkan seragam lebih cepat. 11. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur serta hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, disampaikan bahwa dalam rangka percepatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan perlu adanya pembatasan pendirian SMA. Selain itu, disarankan untuk mengoptimalkan SMAN 12 yang berada di kecamatan Benowo melalui penambahan ruang kelas/rombel.
3443		Dinas Pendidikan				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhabilitasi	266 Lokasi	266 Lokasi	100.00 %		
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	3 Laporan	3 Laporan	100.00 %		
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan					Jumlah lembaga pendidikan menengah yang mendapatkan peningkatan mutu	312 Lembaga	312 Lembaga	100.00 %		
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan					Ketepatan waktu pelayanan perizinan bidang pendidikan	100 %	75.61 %	75.61 %	Alur izin penyelenggaraan pendidikan semula melalui beberapa tahap user verifikator, sehingga membutuhkan waktu verifikasi yang lebih panjang. Sejak bulan Oktober alur perizinan diperbaiki sehingga waktu verifikasi yang dibutuhkan tidak terlalu panjang	Dibentuk Tim yang mendukung kelancaran Migrasi Data Aplikasi Pelayanan Perizinan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan				Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %			
1.01.02.2.02		Dinas Pendidikan				Pencairan biaya pendidikan daerah jenjang sekolah menengah tepat waktu	4 laporan	4 laporan	100.00 %			
107		Dinas Pendidikan			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat peningkatan perlengkapan sekolah	12 Lembaga	63 Lembaga	525.00 %			
109		Dinas Pendidikan			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang mendapatkan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah tepat waktu	312 lembaga	312 lembaga	100.00 %			
111		Dinas Pendidikan			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah lembaga SMP yang dibina dalam Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	300 lembaga	300 lembaga	100.00 %			
112		Dinas Pendidikan			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Penunjang Prestasi yang dilaksanakan	17 kali	18 kali	105.88 %			
114		Dinas Pendidikan			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	5745 orang	5134 orang	89.36 %	Perlunya sosialisasi, koordinasi, dan kerjasama yang intensif antara kepala sekolah dan para guru SMPN	Peningkatan koordinasi antara Guru dan Kepala Sekolah perihal metode pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											yang sudah pernah mendapatkan diklat PK agar penilaian kinerja guru dapat dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu.	penilaian kinerja guru yang efektif dan tepat waktu	
							Jumlah guru yang mendapat pelatihan dan pengembangan karir	641 Orang	647 Orang	100.94 %			
115		Dinas Pendidikan				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah lembaga yang mendapatkan pembinaan terkait kelembagaan dan manajemen sekolah	254 Lembaga	305 Lembaga	120.08 %			
116		Dinas Pendidikan				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Penerima BOS	63 lembaga	63 lembaga	100.00 %			
3444		Dinas Pendidikan				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun	3 lokasi	3 lokasi	100.00 %			
3445		Dinas Pendidikan				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang direhabilitasi	51 lokasi	60 lokasi	117.65 %			
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan				Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik PAUD	4 laporan	4 laporan	100.00 %			
1.01.02.2.03		Dinas Pendidikan				Laporan penilaian kinerja yang disusun	1 laporan	1 laporan	100.00 %			
117		Dinas Pendidikan			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Biaya personil Peserta Didik PAUD	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00 %			
118		Dinas Pendidikan			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan proses belajar PAUD	2600 lembaga	2644 lembaga	101.69 %			
121		Dinas Pendidikan			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru yang Mendapatkan Penilaian Kinerja	5163 Orang	4608 Orang	89.25 %	Pemahaman terkait pentingnya penilaian kinerja yang belum sama serta adanya perbedaan mekanisme penilaian kinerja di lembaga PAUD swasta sehingga belum semua tenaga pendidik dilakukan penilaian kinerja	Telah membentuk Forum konsultasi pendampingan pengisian penilaian kinerja Guru Swasta	
						Jumlah Pendidik PAUD yang mendapatkan Pengembangan Karir	6176 orang	1077 orang	17.44 %	1. Adanya tahapan persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan diklat berjenjang tingkat dasar bagi pendidik PAUD	Penajaman perencanaan kegiatan berupa timeline acuan kegiatan yang didalamnya juga memuat agenda/	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											yang membutuhkan waktu cukup panjang, antara lain: a. Proses penyusunan perjanjian kerjasama dengan lembaga penyelenggara diklat (LPD); b. Koordinasi dengan tim GTK Kemendikbudristek Republik Indonesia terkait pembuatan akun id.belajar dan penyiapan LMS dari Tim GTK Kemendikbudristek Republik Indonesia; c. Penerbitan sertifikat peserta adalah wewenang Tim dari GTK Kemendikbudristek Republik Indonesia. 2. Belum optimalnya perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.	Jadwal Lembaga Penyelenggara Diklat dan Tim GTK Kemendikbudristek	
122		Dinas Pendidikan					Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah lembaga yang mendapatkan penyediaan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD yang dibiayai dari Dana Alokasi	2592 lembaga	2539 lembaga	97.96 %	Realisasi sesuai dengan juknis BOP PAUD dan Kesetaraan dari Kemendikbudristek.	Telah dilaksanakan sesuai ketentuan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Khusus (DAK) Non Fisik						
1279		Dinas Pendidikan				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen PAUD	878 lembaga	467 lembaga	53.19 %	Kuota Akreditasi untuk Tahun 2022 telah ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional	Berkoordinasi dengan Kemendikbud perihal kemungkinan penambahan kuota BAN PAUD PNF	
3539		Dinas Pendidikan				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Lembaga yang mendapatkan bantuan Pengadaan Perlengkapan PAUD	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00 %			
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan kegiatan pelatihan dan pengembangan karir	1 Laporan	1 Laporan	100.00 %			
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan					Jumlah laporan pencairan jasa pelayanan pendidik kesetaraan	4 laporan	4 laporan	100.00 %			
1.01.02.2.04		Dinas Pendidikan					Penanganan anak rentan putus sekolah dan putus sekolah	3 hari	1.27 hari	157.67 %			
124		Dinas Pendidikan				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapat penyediaan biaya personil	1 lembaga	1 lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
125		Dinas Pendidikan					Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang difasilitasi dalam penyelenggaraan proses Belajar mengajar pendidikan Kesetaraan	34 Lembaga	35 Lembaga	102.94 %			
							Jumlah Tenaga Pendidik Keagamaan yang Difasilitasi dalam Jasa Pelayanan Masyarakat Tenaga Pendidik Keagamaan	11626 Orang	11562 Orang	99.45 %	Jumlah penerima sesuai dengan jumlah usulan jasa pelayanan	Telah dilaksanakan sesuai usulan	
127		Dinas Pendidikan					Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan non formal yang mendapatkan pelatihan	250 orang	96 orang	38.40 %	Belum optimalnya perencanaan pelatihan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.	Peningkatan komitmen pelaksana kegiatan dan peserta untuk mengagendakan kegiatan pelatihan diluar waktu Belajar Mengajar	
128		Dinas Pendidikan					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan jumlah Lembaga nonformal/kesetaraan yang dibina	113 lembaga	153 lembaga	135.40 %			
129		Dinas Pendidikan					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan jumlah lembaga yang mendapatkan BOP	34 lembaga	30 lembaga	88.24 %	Realisasi sesuai dengan juknis BOP PAUD dan Kesetaraan dari Kemendikbudristek.	Pelaksanaan Sesuai Juknis BOP	
3538		Dinas Pendidikan					Pengadaan Perlengkapan Jumlah Lembaga yang mendapatkan	1 lembaga	1 lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	bantuan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1.01.04		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Rasio Guru/ Murid jenjang SD	0.05	0.0501	100.20 %			
1.01.04		Dinas Pendidikan				Rasio Guru/ Murid jenjang SMP	0.05	0.0547	109.40 %			
1.01.04.2.01		Dinas Pendidikan			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	12685 orang	11559 orang	91.12 %	Menunggu proses pengangkatan ASN dari Pusat, untuk pemenuhan kebutuhan di tahun berikutnya.	Menyesuaikan kebijakan formasi CPNS dari Pemerintah Pusat	
1.01.04.2.01		Dinas Pendidikan				Jumlah ketersediaan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah	7725 orang	5926 orang	76.71 %	Menunggu proses pengangkatan ASN dari Pusat, untuk pemenuhan kebutuhan di tahun berikutnya.	Menyesuaikan kebijakan formasi CPNS dari Pemerintah Pusat	
133		Dinas Pendidikan			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen perhitungan dan pemetaan guru dan tenaga kependidikan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00 %			
1275		Dinas Pendidikan			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Jumlah sekolah yang mendapatkan fasilitas operasional selama 12 bulan	458 lembaga	497 lembaga	108.52 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Bhakti Dharma Husada yang mencapai target	82 %	91.5663 %	111.67 %			1. Dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada telah terakreditasi Paripurna pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan mutu RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada secara berkala melalui Survei Verifikasi setiap tahun dan Survei Akreditasi RS setiap 3 (tiga) tahun. 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap implementasi SOP yang berlaku di Rumah Sakit. 3.
1.02.01		RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	92.3425 %	104.93 %			
1.02.01.2.02		RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
91		RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.01.2.08		RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100.00 %			
908		RSUD Bhakti Dharma Husada	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.10		RSUD Bhakti Dharma Husada	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan Di Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jenis Kebutuhan Operasional Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	100 %	100 %	100.00 %			Meningkatkan kompetensi petugas dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 4. Pemenuhan sarana dan prasarana secara berkelanjutan. 2. Upaya yang dilakukan RSUD Bhakti Dharma Husada adalah dengan terus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelaksanaan pelayanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. 3. Dalam mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat, RSUD Bhakti Dharma Husada telah menerapkan sinkronisasi aplikasi sebagai berikut: 1. Antrian online JKN Mobile dengan SIM RS dan E-Health. 2. Pendaftaran JKS penduduk Surabaya melalui E-Dabu. 3. Pendaftaran E-Klaim terkait pencatatan kependudukan. 4. Manajemen Pengaduan Masyarakat melalui
3172		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di RS yang terpenuhi	12 Jenis	12 Jenis	100.00 %			
1.02.02		RSUD Bhakti Dharma Husada		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai dengan kelas rumah sakit	98 %	100.6168 %	102.67 %			
1.02.02.2.01		RSUD Bhakti Dharma Husada		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	100 %	100 %	100.00 %			
82		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	2 Kelompok	2 Kelompok	100.00 %			
84		RSUD Bhakti Dharma Husada		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kelompok alat kesehatan/alat penunjang medik yang diadakan	1 Kelompok	1 Kelompok	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Stunting Di Kota Surabaya										Aplikasi Wargaku, WA CS RSUD Bhakti Dharma Husada, Media sosial. 5. Rencana pengembangan dan sinkronisasi E-Rekam Medik hingga E-Resep. 4. RSUD Bhakti Dharma Husada telah melakukan pengembangan pelayanan Intensive Care Unit (ICU) sebanyak 9 TT dan Intensive Care Cardiac Unit (ICCU) sebanyak 1 TT, ICU Isolasi 2 TT 5. RSUD BDH telah meningkatkan kualitas SDM RSUD Bhakti Dharma Husada secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut: 1. Evaluasi dan monitoring penerapan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) serta perbaikan Grooming dan Etiket karyawan RS menjadi lebih Humanis dan solutif 2. Evaluasi dan monitoring budaya organisasi (Core Value) RSUD Bhakti



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
													Dharma Husada yaitu kesembuhan dan kepuasan anda adalah kebahagiaan kami. 3. Melaksanakan pelatihan terkait service excellence terhadap SDM RSUD Bhakti Dharma Husada dengan mendatangkan tenaga pakar dari akademisi. 6. Dalam melaksanakan Sistem Rujukan, RSUD Bhakti Dharma Husada telah dan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS melalui komunikasi antar PIC Fasilitas Kesehatan, serta didukung oleh sistem rujukan online yang telah terintegrasi (ehealth) 7. RSUD Bhakti Dharma Husada telah menyusun Rencana Strategis / Business Plan Tahun 2021- 2026 yang mencakup rencana pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada secara



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
													berkelanjutan sesuai dengan pengembangan pelayanan. Pada Tahun 2022, RSUD Bhakti Dharma Husada telah melakukan pengembangan pelayanan berupa ICU sebanyak 9 TT dan ICCU sebanyak 1 TT, ICU Isolasi 2 TT
1.02.01		Dinas Kesehatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	85.5367 %	85.54 %	Adanya kebijakan Pemerintah dalam menggunakan produk-produk dalam negeri (P3DN) sehingga beberapa rencana pengadaan perlu dilakukan peninjauan ulang	Koordinasi dengan PD terkait mengenai pemilihan barang yang telah memiliki sertifikat P3DN	1. Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPJS Surabaya terkait sistem aplikasi kepesertaan yang terkoneksi dengan data kependudukan. BPJS melalui aplikasi elektronik data badan usaha (e-dabu) memberikan akses kepada Pemerintah Daerah yang bekerja sama dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Surabaya untuk mendaftar kepesertaan BPJS dan verifikasi kependudukan (KTP Surabaya).
1.02.01.2.02		Dinas Kesehatan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1502		Dinas Kesehatan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.01.2.07		Dinas Kesehatan			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	64.73 %	64.73 %	Adanya kebijakan pemerintah untuk pembelian produk dengan Tenaga	Koordinasi serta penyusunan rencana penyediaan dan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										Kerja Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% serta adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasi sesuai rencana anggaran kas bulanan yang telah direncanakan	pemeliharaan sarana prasarana kantor secara lebih tepat dan efisien	2. Dalam pelaksanaan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, telah dimanfaatkan NIK untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pasien.
1607		Dinas Kesehatan			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	4 jenis	6 jenis	150.00 %			3. 1. Mekanisme rujukan bagi pasien BPJS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1 Tahun 2012 bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis 2. Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan sistem rujukan, serta review SOP sistem rujukan secara berkala. 3. Fasilitas Kesehatan telah melakukan upaya KIE pada pasien dan masyarakat yang berkunjung mengenai sistem rujukan berjenjang 4. Dinas Kesehatan telah
1.02.01.2.08		Dinas Kesehatan			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	90.62 %	90.62 %	Adanya kebijakan pemerintah untuk pembelian produk dengan Tenaga Kerja Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% serta adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa direalisasi sesuai rencana anggaran kas bulanan yang telah direncanakan	Koordinasi serta penyusunan rencana penyediaan barang dan jasa kantor secara lebih tepat dan efisien	
1608		Dinas Kesehatan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 jenis	7 jenis	140.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			4. mengembangkan aplikasi sistem rujukan online dari puskesmas ke RSUD Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Kesehatan bersama Kader Surabaya Hebat (KSH) melakukan pemantauan dan pelaporan atas setiap permasalahan kesehatan di lingkungannya sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tanggap, dan optimal. 5. 1. Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti dengan menghimbau ke 17 RS yang belum bekerja sama dengan BPJS untuk segera mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS. 2. Selama tahun 2022 terdapat penambahan 1 Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS dengan total 44 rumah sakit dari 60 rumah sakit di Kota Surabaya 3. Rumah sakit yang belum bekerjasama dengan
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					ditingkatkan pelayanannya						BPJS Kesehatan disebabkan antara lain karena tidak lolos verifikasi BPJS. Dinas Kesehatan telah melaksanakan peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan mutu SDM dan sarana/prasarana, serta alat kesehatan: - Sebanyak 1 puskesmas telah dilakukan peningkatan status menjadi puskesmas rawat inap. - Sebanyak 5 puskesmas telah dilakukan peningkatan kapasitas ruang pelayanan dan 37 puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi sarana prasarana untuk peningkatan mutu pelayanan. Terkait fasilitas parkir, dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, sedangkan untuk penyediaan lahan parkir menyesuaikan dengan ketersediaan lahan.
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			7. Dinas Kesehatan telah mempunyai SOP terkait penanganan penduduk yang belum memiliki NIK agar mendapatkan pelayanan kesehatan. SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS telah dilatih untuk memanfaatkan aplikasi e-klampid new generation (Dispendukcapil) dalam pengurusan NIK. 8. 1. Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti dengan menghimbau ke 17 RS yang belum bekerja sama dengan BPJS untuk segera mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS. 2. Selama tahun 2022 terdapat penambahan 1 Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS dengan total 44 rumah sakit dari 60 rumah sakit di Kota Surabaya 3. Rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan disebabkan antara
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					ditingkatkan pelayanannya						lain karena tidak lolos verifikasi BPJS. Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit yang dimaksud supaya dapat segera melakukan pengurusan kerjasama dengan BPJS. 9. 1. Mekanisme rujukan bagi pasien BPJS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1 Tahun 2012 bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis 2. Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan sistem rujukan, serta review SOP sistem rujukan secara berkala. 3. Fasilitas Kesehatan telah melakukan upaya KIE pada pasien dan masyarakat yang
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			berkunjung mengenai sistem rujukan berjenjang 4. Dinas Kesehatan telah mengembangkan aplikasi sistem rujukan online dari puskesmas ke RSUD Pemerintah Kota Surabaya. 10. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan RS apabila terjadi penolakan pelayanan terhadap pasien warga Surabaya, dan menghimbau RS untuk tetap memberikan edukasi kepada pasien terkait prosedur pelayanan kesehatan. 11. 1. Dinas Kesehatan telah mengirimkan surat (Nomor 440/15334/436.7.2/2022, Tanggal 25 April 2022, Perihal Pemberitahuan) kepada 6 RS tersebut agar segera mengajukan proses kerjasama dengan BPJS. 2. Rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan disebabkan antara
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					ditingkatkan pelayanannya						lain karena tidak lolos verifikasi BPJS. Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit yang dimaksud supaya dapat segera melakukan pengurusan kerjasama dengan BPJS. 12. Pada tahun 2022, RSIA IBI telah melakukan bimbingan akreditasi oleh lembaga akreditasi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Dan direncanakan di Tahun 2023 untuk penilaian akreditasi 13. 1. Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran sudah bekerjasama dengan BPJS. 2. Dinas Kesehatan terus menghimbau kembali kepada RS National Hospital untuk segera bekerja sama dengan BPJS. 14. Dinas Kesehatan telah melakukan pendampingan kepada petugas RS tentang mekanisme
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											pelayanan JKS bagi warga Kota Surabaya serta menghimbau RS untuk tetap memberikan edukasi kepada pasien terkait prosedur pelayanan kesehatan. 15. Dinas Kesehatan telah dan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan kepada orang terlanjar yang tidak memiliki identitas.
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						ditingkatkan pelayanannya						
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						ditingkatkan pelayanannya						
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.01.2.10		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas BLUD yang ditingkatkan pelayanannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
3549		Dinas Kesehatan			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3550		Dinas Kesehatan			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Puskesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3551		Dinas Kesehatan			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
							penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi						
3552		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3553		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3554		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %			
3555		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3556		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi						
3557		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3558		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3559		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
3560		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3561		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3562		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3563		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3564		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3565		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3566		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3567		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3568		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3569		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3570		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3571		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3572		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3573		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3574		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3575		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3576		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3577		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3578		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3579		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3580		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3581		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3582		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3583		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3584		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3585		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3586		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3587		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3588		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3589		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3590		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3591		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3592		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3593		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3594		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3595		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3596		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3597		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3598		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3599		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3600		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3601		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3602		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3603		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3604		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3605		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3606		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3607		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3608		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		
3609		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	4 Jenis	200.00 %		
3610		Dinas Kesehatan					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3611		Dinas Kesehatan				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di Pukesmas terpenuhi	2 Jenis	3 Jenis	150.00 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Cakupan Kelurahan yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan					Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	99.03 %	100.3863 %	101.37 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan					Cakupan Pelayanan Kesehatan Usila	82.45 %	129.2466 %	156.76 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan					Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Tolinakes)	99.17 %	100.0119 %	100.85 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan					Persentase cakupan Kelurahan yang Mengalami Kejadian Luar Biasa yang Ditangani $\leq 1 \times 24$ Jam	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan					Persentase Fasilitas dengan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai Standar	77.78 %	96.8254 %	124.49 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pemantauan Mutu	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Jaminan Kesehatan	96.64 %	97.9867 %	101.39 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	100 %	100.8197 %	100.82 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Puskesmas yang Memenuhi Syarat Ijin Operasional	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Puskesmas yang Terakreditasi Minimal Utama	53 %	69.8413 %	131.78 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Rumah Sehat	88.18 %	88.4419 %	100.30 %			
1.02.02		Dinas Kesehatan			Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang telah Terintegrasi	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02		Dinas Kesehatan			Prevalensi Balita Gizi Buruk	0.104 %	0.0975 %	106.25 %			
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang mendapatkan pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	1 lembaga	1 lembaga	100.00 %			
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah Gedung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dibangun dan dipelihara	14 Bangunan	15 Bangunan	107.14 %			
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar	63 Puskesmas	66 Puskesmas	104.76 %			
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.01		Dinas Kesehatan			Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi syarat pengembangan sarana	1 lembaga	2 lembaga	200.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1610		Dinas Kesehatan				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang dipelihara dan diadakan	33 Jenis	38 Jenis	115.15 %		
1611		Dinas Kesehatan				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis alat kesehatan yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	100.00 %		
1612		Dinas Kesehatan				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen analisa pengembangan sarana dan prasarana kesehatan	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00 %		
1613		Dinas Kesehatan				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis bahan habis pakai yang diadakan	61 Jenis	62 Jenis	101.64 %		
1614		Dinas Kesehatan				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat yang diadakan	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %		
1617		Dinas Kesehatan				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang diadakan	1 Jenis	1 Jenis	100.00 %		
3453		Dinas Kesehatan				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	12 Bangunan	13 Bangunan	108.33 %		
3454		Dinas Kesehatan				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana	Jumlah Rumah Sakit yang dibangun	1 Bangunan	2 Bangunan	200.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						dan Prasarana Pendukungnya						
3541		Dinas Kesehatan				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang direhabilitasi dan dipelihara	1 Bangunan	1 Bangunan	100.00 %		
4372		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan melalui pendekatan keluarga	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %		
4374		Dinas Kesehatan				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Paket	2 Paket	100.00 %		
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegawatdaruratan yang pada posko terpadu	7 dokumen	8 dokumen	114.29 %		
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan					Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	154 Kelurahan	156 Kelurahan	101.30 %		
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan					Jumlah kelurahan yang melaksanakan	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan tradisional						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah lembaga yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir	63 Puskesmas	126 Puskesmas	200.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	63 puskesmas	63 puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan lingkungan						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan lingkungan						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan lingkungan						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan lingkungan						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	63 Puskesmas	65 Puskesmas	103.17 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Menular (bindu PTM)						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Menular (bindu PTM)						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Menular (bindu PTM)						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Menular (bindu PTM)						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Menular (bindu PTM)						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Menular (bindu PTM)						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pembinaan terpadu Penyakit Tidak Menular (bindu PTM)	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pencegahan dan pengendalian penyakit menular						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pengendalian penyakit menular						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pencegahan dan pengendalian penyakit menular						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pengendalian penyakit menular						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pencegahan dan pengendalian penyakit menular						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pengendalian penyakit menular						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pencegahan dan pengendalian penyakit menular						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	63 Puskesmas	65 Puskesmas	103.17 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						dan pembinaan imunisasi						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dan pembinaan imunisasi						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						dan pembinaan imunisasi						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan usia lanjut						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan usia lanjut						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan usia lanjut						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Kesehatan usia lanjut						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						operasional kegiatannya						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						operasional kegiatannya						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						operasional kegiatannya						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						operasional kegiatannya						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						operasional kegiatannya						
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas yang terpenuhi operasional kegiatannya	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.02		Dinas Kesehatan				Peningkatan Penerima Jaminan Kesehatan bagi PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda	54669 jiwa	123676 jiwa	226.23 %			
1507		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah PBP (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	1045749 jiwa	1175129 jiwa	112.37 %			
1584		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Kunjungan Ibu dan Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	138 Kunjungan	1137 Kunjungan	823.91 %			
1588		Dinas Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan	63 Puskesmas	126 Puskesmas	200.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
1589		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
1590		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita yang mendapatkan layanan perbaikan gizi	196 Balita	196 Balita	100.00 %			
1591		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
1593		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			
1594		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Lokasi Kegawatdaruratan yang dilayani	900 Lokasi	906 Lokasi	100.67 %			
1595		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jenis pengadaan sarana dan prasarana operasional pelayanan puskesmas	1 Jenis	1 Jenis	100.00 %			
1596		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu PTM)	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1597		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100.00 %		
1598		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	63 Kegiatan	68 Kegiatan	107.94 %		
3545		Dinas Kesehatan					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan pelayanan Telemedicine	41 Puskesmas	41 Puskesmas	100.00 %		
3546		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		
3612		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3613		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3614		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3615		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3616		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3617		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3618		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3619		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133.33 %		
3620		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	13 Kegiatan	144.44 %		
3621		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3622		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133.33 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan di Puskesmas						
3623		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3624		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %			
3625		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3626		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3627		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %			
3628		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3629		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	13 Kegiatan	144.44 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3630		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3631		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3632		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133.33 %		
3633		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3634		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133.33 %		
3635		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3636		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %		
3637		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan di Puskesmas						
3638		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3639		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %			
3640		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %			
3641		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	14 Kegiatan	155.56 %			
3642		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3643		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %			
3644		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3645		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	13 Kegiatan	144.44 %		
3646		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %		
3647		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %		
3648		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3649		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133.33 %		
3650		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3651		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3652		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan di Puskesmas						
3653		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %			
3654		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %			
3655		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3656		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %			
3657		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3658		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	13 Kegiatan	144.44 %			
3659		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3660		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3661		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %		
3662		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3663		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3664		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %		
3665		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133.33 %		
3666		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %		
3667		Dinas Kesehatan					Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan di Puskesmas						
3668		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3669		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	12 Kegiatan	133.33 %			
3670		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3671		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	10 Kegiatan	111.11 %			
3672		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	11 Kegiatan	122.22 %			
3673		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			
3674		Dinas Kesehatan				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah kegiatan operasional pelayanan di Puskesmas	9 Kegiatan	9 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3675		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
3676		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3677		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3678		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3679		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3680		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3681		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3682		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan ibu hamil						
3683		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3684		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3685		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3686		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3687		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3688		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3689		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3690		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3691		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3692		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3693		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3694		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3695		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3696		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
3697		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan ibu hamil						
3698		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3699		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3700		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3701		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3702		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3703		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3704		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3705		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3706		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3707		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3708		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3709		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3710		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3711		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3712		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan ibu hamil						
3713		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3714		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3715		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3716		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3717		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3718		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3719		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3720		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3721		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3722		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3723		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3724		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3725		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3726		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3727		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan ibu hamil						
3728		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3729		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3730		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3731		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
3732		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3733		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
3734		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3735		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3736		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3737		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
3738		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3739		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3740		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3741		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3742		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3743		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3744		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3745		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3746		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3747		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3748		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3749		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3750		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3751		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3752		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3753		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3754		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3755		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3756		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	6 Kegiatan	200.00 %		
3757		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3758		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3759		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3760		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	7 Kegiatan	233.33 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3761		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3762		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3763		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3764		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3765		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	6 Kegiatan	200.00 %		
3766		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	6 Kegiatan	200.00 %		
3767		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3768		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3769		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3770		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3771		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3772		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	8 Kegiatan	266.67 %		
3773		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3774		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3775		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3776		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	6 Kegiatan	200.00 %		
3777		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3778		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3779		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3780		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3781		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3782		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3783		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3784		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	6 Kegiatan	200.00 %		
3785		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3786		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3787		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3788		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %			
3789		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %			
3790		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %			
3791		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %			
3792		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %			
3793		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	10 Kegiatan	333.33 %			
3794		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	8 Kegiatan	266.67 %			
3795		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %			
3796		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3797		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	8 Kegiatan	266.67 %		
3798		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	8 Kegiatan	266.67 %		
3799		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3800		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	3 Kegiatan	10 Kegiatan	333.33 %		
3801		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3802		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3803		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3804		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3805		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3806		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3807		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3808		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3809		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3810		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3811		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3812		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3813		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3814		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3815		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3816		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3817		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3818		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3819		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3820		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3821		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3822		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3823		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3824		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3825		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3826		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3827		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3828		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3829		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3830		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3831		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3832		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3833		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3834		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3835		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3836		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3837		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3838		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3839		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3840		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3841		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3842		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3843		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3844		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3845		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3846		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3847		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3848		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3849		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3850		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3851		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3852		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3853		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3854		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3855		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3856		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3857		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3858		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
3859		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3860		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3861		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3862		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3863		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan usia lanjut	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
3864		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400.00 %		
3865		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3866		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3867		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3868		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3869		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400.00 %		
3870		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3871		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3872		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3873		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3874		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3875		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3876		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3877		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3878		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3879		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3880		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3881		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3882		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3883		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3884		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3885		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3886		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3887		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3888		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3889		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3890		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3891		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3892		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3893		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3894		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3895		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3896		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3897		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3898		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3899		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3900		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3901		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3902		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400.00 %		
3903		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3904		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3905		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3906		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3907		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3908		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3909		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3910		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3911		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3912		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3913		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3914		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3915		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3916		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3917		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3918		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3919		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
3920		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3921		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
3922		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3923		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	4 Kegiatan	400.00 %		
3924		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3925		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %		
3926		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
3927		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3928		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3929		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3930		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3931		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3932		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3933		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3934		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3935		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3936		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3937		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3938		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
3939		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
3940		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %			
3941		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
3942		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
3943		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
3944		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
3945		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3946		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3947		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3948		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3949		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3950		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3951		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3952		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3953		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
3954		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3955		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3956		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3957		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3958		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3959		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3960		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3961		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3962		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3963		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3964		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3965		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3966		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3967		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3968		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
3969		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3970		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3971		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3972		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3973		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3974		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3975		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3976		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3977		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
3978		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3979		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3980		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3981		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3982		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
3983		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kegiatan pelaksanaan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							pelayanan kesehatan kerja dan olahraga						
3984		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
3985		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
3986		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
3987		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
3988		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
3989		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
3990		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3991		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3992		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3993		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3994		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3995		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
3996		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
3997		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3998		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
3999		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4000		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4001		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4002		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4003		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4004		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4005		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4006		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4007		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4008		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4009		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4010		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4011		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	6 Kegiatan	200.00 %		
4012		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4013		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4014		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4015		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4016		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4017		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4018		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4019		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4020		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4021		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4022		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4023		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4024		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4025		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4026		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4027		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4028		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	7 Kegiatan	233.33 %		
4029		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4030		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	6 Kegiatan	200.00 %		
4031		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4032		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4033		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4034		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4035		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4036		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4037		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4038		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4039		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4040		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4041		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4042		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4043		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4044		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4045		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4046		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4047		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4048		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4049		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4050		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	5 Kegiatan	166.67 %		
4051		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00 %		
4052		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Kegiatan	4 Kegiatan	133.33 %		
4053		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4054		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		
4055		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4056		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		
4057		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
4058		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4059		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		
4060		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	7 Kegiatan	175.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi						
4061		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %			
4062		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	7 Kegiatan	175.00 %			
4063		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4064		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4065		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %			
4066		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dan pembinaan imunisasi						
4067		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4068		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %			
4069		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4070		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4071		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	7 Kegiatan	175.00 %			
4072		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4073		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4074		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4075		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	7 Kegiatan	175.00 %		
4076		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	12 Kegiatan	300.00 %		
4077		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4078		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
4079		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi						
4080		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
4081		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		
4082		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		
4083		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		
4084		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
4085		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dan pembinaan imunisasi						
4086		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4087		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4088		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %			
4089		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4090		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4091		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4092		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4093		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	7 Kegiatan	175.00 %		
4094		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4095		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
4096		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4097		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4098		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi						
4099		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4100		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4101		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4102		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4103		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4104		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dan pembinaan imunisasi						
4105		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4106		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4107		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4108		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %			
4109		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %			
4110		Dinas Kesehatan					Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	6 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4111		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4112		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4113		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
4114		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100.00 %		
4115		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah kegiatan pelaksanaan surveilans terpadu dan pembinaan imunisasi	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125.00 %		
4116		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4117		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4118		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4119		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4120		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4121		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4122		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4123		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4124		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4125		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4126		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4127		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4128		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4129		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4130		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4131		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4132		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4133		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4134		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4135		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4136		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4137		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4138		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4139		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4140		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4141		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4142		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4143		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %		
4144		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4145		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4146		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4147		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4148		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %		
4149		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4150		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4151		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %		
4152		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4153		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4154		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4155		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4156		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4157		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4158		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4159		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4160		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4161		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4162		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4163		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4164		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4165		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4166		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4167		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4168		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4169		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4170		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4171		Dinas Kesehatan					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4172		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4173		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4174		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4175		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4176		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4177		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4178		Dinas Kesehatan				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
1.02.02.2.03		Dinas Kesehatan				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang diterapkan	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100.00 %			
1618		Dinas Kesehatan				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau	122 Lembaga	123 Lembaga	100.82 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						peningkatan mutu pelayanan						
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						peningkatan mutu pelayanan						
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						peningkatan mutu pelayanan						
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						peningkatan mutu pelayanan						
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.02.2.04		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang melaksanakan peningkatan mutu pelayanan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1619		Dinas Kesehatan			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melakukan pemantapan mutu fasilitas kesehatan	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			
1620		Dinas Kesehatan			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dibangun dan diawasi	59 lembaga	97 lembaga	164.41 %			
4179		Dinas Kesehatan			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4180		Dinas Kesehatan			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas						
4181		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4182		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4183		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4184		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4185		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4186		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4187		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4188		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4189		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4190		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4191		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4192		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4193		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4194		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4195		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas						
4196		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300.00 %			
4197		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4198		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4199		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
4200		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %			
4201		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4202		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4203		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4204		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4205		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4206		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4207		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4208		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4209		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4210		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas						
4211		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4212		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4213		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4214		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4215		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4216		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4217		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4218		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
4219		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4220		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4221		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4222		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4223		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4224		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4225		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas						
4226		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4227		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4228		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4229		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4230		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4231		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4232		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4233		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4234		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4235		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
4236		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200.00 %		
4237		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4238		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4239		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		
4240		Dinas Kesehatan					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas						
4241		Dinas Kesehatan			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Puskesmas	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
1.02.03		Dinas Kesehatan		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan kapasitas	46.82 %	47.4055 %	101.25 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						promkes dan tenaga administrasi sesuai standar						
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						administrasi sesuai standar						
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						promkes dan tenaga administrasi sesuai standar						
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					administrasi sesuai standar						
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan			Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						promkes dan tenaga administrasi sesuai standar						
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						administrasi sesuai standar						
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah Puskesmas dengan tenaga promkes dan tenaga administrasi sesuai standar	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.03.2.02		Dinas Kesehatan				Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan	1794 Orang	3024 Orang	168.56 %			
1621		Dinas Kesehatan			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	28 Kali	28 Kali	100.00 %			
3547		Dinas Kesehatan			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dengan pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	63 Puskesmas	63 Puskesmas	100.00 %			
4242		Dinas Kesehatan			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4243		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4244		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4245		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4246		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4247		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4248		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4249		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4250		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kesehatan sesuai Standar						
4251		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4252		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4253		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4254		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4255		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4256		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4257		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4258		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4259		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4260		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4261		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4262		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4263		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4264		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4265		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kesehatan sesuai Standar						
4266		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4267		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4268		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4269		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4270		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4271		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4272		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	3 Orang	150.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4273		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	3 Orang	150.00 %		
4274		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4275		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4276		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4277		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4278		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4279		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4280		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kesehatan sesuai Standar						
4281		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4282		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4283		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4284		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4285		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4286		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4287		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4288		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4289		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4290		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4291		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4292		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4293		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4294		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4295		Dinas Kesehatan					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Kesehatan sesuai Standar						
4296		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4297		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4298		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4299		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4300		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4301		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		
4302		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4303		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %			
4304		Dinas Kesehatan				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah pemenuhan tenaga promkes dan tenaga administrasi	2 Orang	2 Orang	100.00 %			
1.02.04		Dinas Kesehatan				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.04.2.01		Dinas Kesehatan				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat, kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00 %			
4376		Dinas Kesehatan				Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	180 Sarana	246 Sarana	136.67 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.04.2.06		Dinas Kesehatan			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah PIRT yang dibina	217 PIRT	215 PIRT	99.08 %	Optimalisasi kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku industri rumah tangga sehingga memenuhi syarat kesehatan	
1622		Dinas Kesehatan			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah sampel yang diperiksa	2230 Sampel	2458 Sampel	110.22 %			
1.02.05		Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Aktif	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.05.2.02		Dinas Kesehatan			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kampanye GERMAS (CERDIK)	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100.00 %			
1586		Dinas Kesehatan			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Puskesmas dengan penyelenggaraan Promosi Kesehatan	63 Puskesmas	65 Puskesmas	103.17 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Upaya Kesehatan	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)						
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan						
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan						
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan						
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan			Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan						
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1.02.05.2.03		Dinas Kesehatan				Jumlah puskesmas yang mendampingi pelaksanaan UKBM di tingkat kelurahan	1 Puskesmas	1 Puskesmas	100.00 %			
1506		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Jenis Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibina	6 Jenis	8 Jenis	133.33 %			
4305		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4306		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Daya Masyarakat (UKBM)						
4307		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4308		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %			
4309		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4310		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4311		Dinas Kesehatan			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					
4312		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4313		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4314		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4315		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4316		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah kegiatan Pengembangan dan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						
4317		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %		
4318		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
4319		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4320		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4321		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4322		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4323		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4324		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4325		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	5 Kegiatan	250.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
4326		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4327		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4328		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4329		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4330		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4331		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4332		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4333		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4334		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4335		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
4336		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4337		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4338		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4339		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4340		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
4341		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200.00 %			
4342		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4343		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4344		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4345		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
4346		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4347		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4348		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4349		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4350		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4351		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4352		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4353		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4354		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4355		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
4356		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4357		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4358		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4359		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			
4360		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANAAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
4361		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4362		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4363		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4364		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %			
4365		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4366		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00 %		
4367		Dinas Kesehatan				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150.00 %		
1.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang mencapai target	82.85 %	86.8687 %	104.85 %			1. RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan review SOP secara berkala setiap 2 tahun sekali. SOP yang sudah direview di tahun 2022 sebanyak 674 dari 1799 SOP. 2. RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah lain terkait pelayanan kesehatan. Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain Dinas Kesehatan, DP3APKB, Dinas
1.02.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	87.85 %	91.63 %	104.30 %			
1.02.01.2.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
336		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.02.01.2.08		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100.00 %			Sosial, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya. 3. Tahun 2022, RSUD dr. M. Soewandhie telah melengkapi sarana/prasarana untuk menunjang kapasitas pelayanan administrasi RS seperti HT dan CCTV. 4. RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan, sekolah spesialis, workshop, serta berbagai jenis kursus lainnya. Serta telah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar. 5. Pada tahun 2022, RSUD dr. M. Soewandhie telah menyediakan lahan parkir di gedung baru. Koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Perhubungan, Kecamatan/Kelurahan, serta dengan RW terkait, untuk mengurangi parkir liar di sekitar lingkungan. Di tahun
360		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	100 %	100.00 %			
1.02.01.2.10		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	100 %	100 %	100.00 %			
3021		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah jenis kebutuhan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD di rumah sakit yang terpenuhi	14 jenis	14 jenis	100.00 %			
1.02.02		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai dengan kelas rumah sakit	98.08 %	100 %	101.96 %			
1.02.02.2.01		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persentase pemenuhan sarana fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	dr. Mohamad Soewandhie						2023, akan dilakukan seleksi penyedia yang bersedia untuk menyewa dan mengelola lahan RSUD untuk parkir umum (basement). 6. Tahun 2022, RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil dan BPJS, serta telah menunjuk PIC untuk berkomunikasi jika terdapat masalah dengan NIK pasien, agar pembuatan NIK dapat dipercepat. Selain itu, RSUD telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendaftarkan pasien yang belum punya NIK melalui E-DABU (elektronik data badan usaha) dari BPJS Kesehatan 7. RSUD dr. M. Soewandhie telah melaksanakan rekomendasi terkait penggunaan WA Desktop untuk pelayanan di front office. 8. RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan evaluasi secara rutin terhadap petugas front office
329		RSUD dr. Mohamad Soewandhie			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah kelompok alat kesehatan / alat penunjang medik rumah sakit yang diadakan	1 kelompok	1 kelompok	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
													untuk melayani dengan lebih baik. Selain itu, RSUD dr. M. Soewandhie juga sudah melakukan pelatihan pelayanan publik secara berkala. 9. RSUD dr. M. Soewandhie telah berproses untuk melakukan pengelolaan anggaran RS secara mandiri.
1.03.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 -Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 -Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Persentase bangunan yang ber IMB	2.06 %	2.0532 %	99.67 %	- Pemohon melakukan Pembatalan/Pencabutan Permohonan IMB - Pemohon hanya mengajukan SKRK untuk mengetahui informasi tata ruang, bukan untuk pengajuan IMB - Konfirmasi tindak lanjut permohonan tidak bisa dilakukan karena pemohon tidak ditemukan - Hasil monev pengawasan bangunan dari kecamatan memerlukan identifikasi pemilahan alas hak dan kesesuaian dengan RDTR.	- menerbitkan regulasi untuk mempermudah perizinan seperti pengurangan retribusi, pembayaran yang dapat diangsur, penghapusan denda pada momen tertentu, dll - melakukan pengawasan secara berkala - melakukan sosialisasi secara intensif	1. Pemerintah kota Surabaya memperluas akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain: 1) Perbaikan rumah tidak layak huni dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kelurahan setempat; 2) Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pekerjaan, 3) Penyelenggaraan sayembara desain yang juga terus ditingkatkan sebagai media agar warga



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 -Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Persentase jumlah bangunan gedung yang berfungsi baik	90.22 %	90.4509 %	100.26 %			dapat turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan kota. 2. 1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait dan narasumber/tenaga ahli guna mendapatkan pertimbangan/saran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Disamping itu, Pemerintah Kota Surabaya telah meminta klarifikasi kepada pihak Golden City serta menghadiri beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya terakhir pada tanggal 28 November 2022. 2. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan evaluasi terhadap perizinan Golden City sampai dengan tahapan upaya Banding Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang
1.03.08		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan yang diselesaikan	80 %	85.1629 %	106.45 %			
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung daerah yang dibangun/direhabilitasi dan dilakukan pemeliharaan	241 Bangunan	302 Bangunan	125.31 %			
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Padat		Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang diproses	3619 Berkas	4874 Berkas	134.68 %			
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Jumlah berkas permohonan SLF yang diproses	170 Berkas	268 Berkas	157.65 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Karya Pada Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum			Jumlah dokumen penataan bangunan yang disusun	4 Dokumen	5 Dokumen	125.00 %			hasil akhirnya merekomendasikan agar pihak yang bersengketa untuk melakukan gugatan ke pengadilan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meninjau kembali perizinan Golden City. 3. Terkait desain Ampel karena berada di kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi, maka Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi secara intensif dengan tim Ahli Cagar Budaya dan tokoh masyarakat agar keberadaan bangunan/infrastruktur baru dapat lebih meningkatkan kualitas lingkungan dan kekhasan budaya di kawasan wisata religi Ampel. 4. Pembangunan di Kota Surabaya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur diantaranya Tenaga Ahli, Seniman, dan Masyarakat sehingga Kota Surabaya
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Jumlah lokasi pengawasan bangunan yang dilaksanakan	150 Lokasi	150 Lokasi	100.00 %			
1.03.08.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Jumlah pendataan penyelenggaraan bangunan	2281 Berkas	2503 Berkas	109.73 %			
201		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangun/Direhab	156 Bangunan	166 Bangunan	106.41 %			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Daerah yang Disusun	68 Dokumen	73 Dokumen	107.35 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
202		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan					Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah	173 Bangunan	183 Bangunan	105.78 %		menjadi Kota yang tertata dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
204		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan					Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	jumlah lokasi pengawasan bangunan yang di tindak lanjuti	150 Lokasi	150 Lokasi	100.00 %		
								Jumlah pendataan dan penyelenggaraan bangunan yang dimasukkan kedalam peta	2281 Data	2503 Data	109.73 %		
221		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan					Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah berkas Perizinan Bidang Tata Bangunan yang terbit dan telah disahkan	2533 Berkas	2865 Berkas	113.11 %		
								Jumlah berkas permohonan SLF yang terbit dan telah disahkan	30 Berkas	61 Berkas	203.33 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
222		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penataan bangunan yang terbit dan telah disahkan	2 Dokumen	3 Dokumen	150.00 %			
1.03.11		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas perusahaan jasa konstruksi	91 %	103 %	113.19 %			
1.03.11.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jenis perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	5 jenis	5 jenis	100.00 %			
3470		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	100 perusahaan	103 perusahaan	103.00 %			
1.03.12		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pelayanan penataan ruang	95 %	98.3549 %	103.53 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.12.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTr) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %			
173		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau kajian teknis pendukung penataan ruang daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %			
1.03.12.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota dan informasi penataan ruang kota yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00 %			
176		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah wilayah updating peta Informasi Penataan Ruang	154 Kelurahan	154 Kelurahan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
547		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pemanfaatan rencana ruang kota	2 dokumen	2 dokumen	100.00 %			
1.03.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	90 %	95.3125 %	105.90 %			- Untuk penanganan jalan sebagai prasarana transportasi telah dilakukan sesuai dengan standar kualitas teknis pelaksanaan dan material yang digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Pada tahun 2022 pemeliharaan jalan telah menggunakan alat finisher sehingga kualitas pemeliharaan jalan lebih baik - setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja rumah pompa maka dilaksanakan penambahan kapasitas pompa dengan teknologi terbaru (VSD/inverter) di beberapa rumah pompa di Surabaya
1.03.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga					Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	86 %	90.0033 %	104.66 %			
1.03.01.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 %	100 %	100.00 %			
715		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100.00 %			
1.03.01.2.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1016		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %		3. Untuk penanganan pengendalian genangan, telah dilaksanakan perencanaan penanganan genangan di setiap sistem drainase secara terpadu dan terintegrasi mulai dari bagian hulu sampai dengan hilir sesuai dengan standar operasional prosedur serta dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. 4. Untuk penanganan pengendalian genangan, telah dilaksanakan perencanaan penanganan genangan di setiap sistem drainase secara terpadu dan terintegrasi mulai dari bagian hulu sampai dengan hilir sesuai dengan standar operasional prosedur serta dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
1.03.01.2.06		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	87.21 %	87.21 %	Adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan dan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan kantor	
1011		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	100 %	87.21 %	87.21 %	Adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan dan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan kantor	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.01.2.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan, peralatan dan alat besar dalam kondisi layak	315 unit	315 unit	100.00 %			5. Optimalisasi kinerja SDM di rumah pompa telah dilakukan antara lain dengan: - memberikan edukasi rasa tanggungjawab dan leadership terhadap tugas yang sudah diberikan kepada operator atau penjaga rumah pompa - memastikan operator pompa melaporkan secara rutin baik melalui handy talky (HT) maupun melalui grup WhatsApp kepada pengawas, rayon wilayah, command center SDA, dan juga ke pimpinan 6. Penanganan sistem saluran drainase di Kota Surabaya telah diupayakan dengan: - Peningkatan kapasitas dan diversi dari saluran irigasi menjadi saluran drainase mulai dari saluran tersier, sekunder sampai dengan saluran primer; - Peningkatan
1.03.01.2.09		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Persentase Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya layak operasional	100 %	100 %	100.00 %			
586		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan dan alat besar yang dipelihara selama 12 bulan	72 unit	72 unit	100.00 %			
587		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dioperasikan dan dipelihara selama 12 bulan	243 unit	243 unit	100.00 %			
849		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %	91.49 %	91.49 %	Adanya penyesuaian jadwal pelaksanaan dan realisasi disesuaikan dengan kebutuhan kantor	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										administrasi sarpras	
1.03.02		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase rumah pompa yang beroperasi	100 %	100 %	100.00 %			
1.03.02.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	60 unit	60 unit	100.00 %			
157		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah unit pompa dan kelengkapannya yang dipelihara	264 unit	264 unit	100.00 %			
1.03.03		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum jaringan perpipaan	99 %	99.85 %	100.86 %			
1.03.03.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi penerima intervensi jaringan perpipaan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100.00 %			
3544		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah lokasi perluasan SPAM jaringan perpipaan (DAK Air Minum)	1 Lokasi	1 Lokasi	100.00 %			
1.03.05		Dinas Sumber Daya		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase capaian penyediaan IPAL	100 %	100 %	100.00 %			

prasarana pendukung pengendalian banjir seperti peningkatan kinerja rumah pompa, baik dari peralatan maupun sumber daya operator rumah pompa; - Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam sistem pengendalian banjir dan pemantauan kinerja sarana prasarana pendukung.

7. Terkait dengan penanganan genangan saat ini sedang disiapkan roadmap pembangunan sistem drainase kota

8. DSADBM telah: 1) Memberikan bekal SOP kepada operator rumah pompa untuk pengoperasian pompa beserta perangkat pendukungnya, guna mengoptimalkan kinerja perangkat rumah pompa 2)



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Air dan Bina Marga			komunal di kawasan permukiman						
1.03.05		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Volume kapasitas operasional pelayanan pengolahan air limbah yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya	901 m3	1041 m3	115.54 %			
1.03.05.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	jangkauan pelayanan sistem air limbah domestik yang dibangun	2 kelurahan	2 kelurahan	100.00 %			
1.03.05.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Jumlah jenis lokasi IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %			
870		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah IPAL yang dipelihara dan berfungsi baik	96 lokasi	96 lokasi	100.00 %			
3548		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah prasarana sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang dibangun	3 Lokasi	3 Lokasi	100.00 %			
1.03.06		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100 %	100 %	100.00 %			9. Memberikan pelatihan dari akademisi dan narasumber kepada operator rumah pompa, guna meningkatkan kemampuan operator rumah pompa dalam mengoperasikan perangkat rumah pompa 3) Memberikan pelatihan yang intensif guna menambah pemahaman tentang perencanaan pemasangan troubleshooting dan pemeliharaan pompa submersible dan diharapkan akan meningkatkan pengelolaan di dalam operasi di lapangan. Pemahaman materi yang diperlukan meliputi: 1. teori dasar pompa, 2. jenis-jenis pompa dan aplikasinya



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan sistem drainase perkotaan yang disusun	90 dokumen	90 dokumen	100.00 %		
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase	1270 lokasi	1318 lokasi	103.78 %		
1.03.06.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Jumlah lokasi pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	230 Lokasi	232 Lokasi	100.87 %		
143		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah lokasi pengerukan saluran	1150 lokasi	1192 lokasi	103.65 %		
158		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana sistem drainase yang dibangun	70 lokasi	75 lokasi	107.14 %		
159		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan sistem drainase perkotaan yang disusun	60 dokumen	60 dokumen	100.00 %		
160		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah lokasi saluran yang direhabilitasi	50 lokasi	51 lokasi	102.00 %		

rekayasa lalu lintas di lapangan untuk mengurai kemacetan 2. Penyusunan Transport Demand Management (TDM) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk penataan transportasi secara menyeluruh di Kota Surabaya 3. DSDABM juga telah melakukan peningkatan kemandirian jalan untuk mengoptimalkan kapasitas jalan.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
161		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen supervisi sistem drainase perkotaan yang disusun	30 dokumen	30 dokumen	100.00 %			
3456		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah lokasi drainase lingkungan yang dibangun	230 Lokasi	232 Lokasi	100.87 %			
1.03.07		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase rekomendasi pemanfaatan jalan dan saluran oleh pihak lain	7 %	7.3506 %	105.01 %			
1.03.07		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga					Persentase rekomendasi teknis yang diterbitkan tepat waktu	100 %	100 %	100.00 %			
1.03.07.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan masuk yang sudah diproses	260 berkas	267 berkas	102.69 %			
1.03.07.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga					Jumlah SK Walikota tentang penetapan formulasi sewa tanah yang ditetapkan	12 Dokumen	13 Dokumen	108.33 %			
154		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis	Jumlah permohonan masuk yang memenuhi syarat	260 berkas	267 berkas	102.69 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Daerah Kabupaten/Kota							
3520		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Pemberitahuan Nilai Sewa kepada pemohon	21 Dokumen	23 Dokumen	109.52 %			
1.03.10		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Luas jalan yang diperbaiki	130000 m2	472008.7506 m2	363.08 %			
1.03.10		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Panjang jalan yang dibangun dan prasarana pejalan kaki yang dibangun	10850 meter	28753.34 meter	265.01 %			
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	205 dokumen	212 dokumen	103.41 %			
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	259 lokasi	272 lokasi	105.02 %			
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dipelihara	3806 lokasi	3918 lokasi	102.94 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.03.10.2.01		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga				Luas lahan/tanah yang dibebaskan untuk penyelenggaraan infrastruktur	19183 m2	19184 m2	100.01 %			
62		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Pembangunan Jalan	Jumlah lokasi jalan, jembatan dan kelengkapannya yang dibangun	9 lokasi	9 lokasi	100.00 %			
						Jumlah lokasi jalan lingkungan yang dibangun	250 Lokasi	263 Lokasi	105.20 %			
146		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah lokasi pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan infrastruktur	4 lokasi	4 lokasi	100.00 %			
147		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah lokasi jalan yang dilakukan pemeliharaan	3805 lokasi	3917 lokasi	102.94 %			
148		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen pengawasan teknis jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	65 dokumen	69 dokumen	106.15 %			
149		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis	Jumlah dokumen perencanaan jalan, jembatan dan kelengkapannya yang disusun	140 dokumen	143 dokumen	102.14 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan							
4380		Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			Rehabilitasi Jalan	Jumlah lokasi pembangunan / rekonstruksi jalan (DAK Fisik)	1 Lokasi	1 Lokasi	100.00 %			
1.04.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	87.5 %	92.055 %	105.21 %			1. Pelaksanaan pemeliharaan melalui Satuan tugas (Satgas) Bangunan Gedung Pemerintahan berupaya menangani permasalahan di lapangan terkait bangunan gedung pemerintahan yang dikelola oleh Pemerintah Kota secara efektif dan terus meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat Kota Surabaya. 2. Pemerintah kota Surabaya memperluas akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain: 1) Perbaikan rumah tidak layak huni dengan membentuk
1.04.01.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00 %			
1203		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 dokumen	8 dokumen	100.00 %			
1.04.01.2.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1205		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 -Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kelurahan setempat; 2) Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pekerjaan, 3) Penyelenggaraan sayembara desain yang juga terus ditingkatkan sebagai media agar warga dapat turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan kota. 3. Definisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Berdasarkan Perwali Kota Surabaya No. 9 Tahun 2022 merupakan bangunan rumah yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas - batasnya dengan kriteria-kriteria yang tercantum dalam aturan tersebut, sehingga
1.04.01.2.06		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	15 Jenis	100.00 %			
1207		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	85 %	100 %	117.65 %			
1.04.01.2.09		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	6 Jenis	6 Jenis	100.00 %			
1461		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Tentang Tarif			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang berfungsi baik	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.04.02		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penghuni rusunawa yang sesuai dengan kriteria	50 %	70.7239 %	141.45 %			rehabilitasi berfokus pada bangunan rumah tinggal agar menjadi hunian yang layak. Terkait rehabilitasi lingkungan sekitar, Pemerintah Kota Surabaya melibatkan seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan masing-masing untuk menciptakan kondisi hunian dan lingkungan yang layak. 4. Kegiatan Perbaikan Rutilahu merupakan salah satu kegiatan dalam Program Padat Karya yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Surabaya sebagai upaya pemulihan ekonomi warga Kota Surabaya termasuk intervensi untuk menaikkan taraf hidup penerima manfaat perbaikan Rutilahu.
1.04.02.2.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya -Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah ijin/sewa rumah susun dan rumah aset Pemerintah Kota Surabaya	5708 ijin/sewa	5508 ijin/sewa	96.50 %	1. adanya kriteria khusus penyandang difabel bagi hunian rusunawa di lantai 1, sehingga pemenuhan unit hunian butuh identifikasi lebih lanjut permohonan antrian yang masuk 2. terdapat beberapa unit hunian rusunawa yang masih memerlukan rehabilitasi	1. Percepatan verifikasi data permohonan sewa rusunawa yang memenuhi kriteria untuk penghuni Unit hunian rusunawa Lantai 1 2. Percepatan identifikasi kerusakan pada unit hunian yang membutuhkan rehabilitasi 3. Percepatan pelaksanaan rehabilitasi unit hunian rusunawa yang rusak.	
166		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah blok rumah susun sederhana yang dikelola	105 blok	105 blok	100.00 %			
1.04.03		Dinas Perumahan Rakyat dan		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase perbaikan rumah tapak tidak layak huni	89 %	103.2222 %	115.98 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kawasan Permukiman serta Pertanahan									5. Aplikasi e-Rusun telah dikembangkan,terutama untuk fitur pengajuan permohonan dan database penghuni rusun. Telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya untuk persiapan integrasi Sistem Informasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SIMBR), dan akan dikoordinasikan terkait intregasi SSW Alfa 6. Terhadap semua pengajuan permohonan ijin pemakaian rusunawa Pakal yang masuk akan dilakukan verifikasi melalui sistem e-Rusun agar tepat sasaran 7. Berdasarkan Perwali No. 35 Tahun 2022 Kriteria Penerima Manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu adalah penduduk Kota Surabaya yang belum pernah mendapatkan
1.04.03.2.03		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jenis perbaikan rumah tapak tidak layak huni	2 jenis	2 jenis	100.00 %			
3471		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	900 unit	929 unit	103.22 %			
1.04.04		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan pembangunan/rehabilitasi rumah susun sederhana sewa	100 %	111.1111 %	111.11 %			
1.04.04.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan pencegahan permukiman kumuh	9 lokasi	10 lokasi	111.11 %			
172		Dinas Perumahan		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah susun sederhana sewa yang	9 Bangunan	10 Bangunan	111.11 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	dibangun dan direhabilitasi						8. bantuan Perbaikan Rutinlah kecuali untuk Korban Bencana dan Calon Penerima Manfaat diusulkan oleh Kelurahan yang selanjutnya prioritas penanganannya ditetapkan dalam musyawarah Kesepakatan Rencana Perbaikan Rumah (KRPR) Berdasarkan Perwali No. 83 Tahun 2022 Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Setiap penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara. Dan penduduk yang dimaksud merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah.
1.04.05		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik	20 %	24.6575 %	123.29 %			
1.04.05.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang diproses	11 dokumen	12 dokumen	109.09 %			
229		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas secara administrasi yang disusun	11 dokumen	12 dokumen	109.09 %			
1.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN	Satuan Polisi Pamong Praja	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96 %	97.8567 %	101.93 %			1. Telah dilakukan pembinaan hardskill dan softskill secara intensif kepada



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 -Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022								setiap personel SATPOL PP Kota maupun SATPOL PP Kecamatan Kelurahan, dan dilakukan pertemuan secara rutin dengan mengundang Kasi Trantib dan Kasi Bantib. Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP memastikan dilakukan sosialisasi dan pendekatan secara humanis, persuasif dan personal. Pendekatan preventif juga dilakukan, contohnya berupa edukasi dini pada siswa/siswi sekolah melalui Satpol PP Goes to School. 2. Telah dilakukan operasi yustisi bersama jajaran samping, yang tidak hanya menyasar RHU namun juga menyasar rumah kos, PMKS, PKL, reklame, dan
1.05.01.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1490		Satuan Polisi Pamong Praja	-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1.05.01.2.06		Satuan Polisi Pamong Praja	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	100.00 %			
2920		Satuan Polisi Pamong Praja	-Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	64.32 %	64.32 %	Perlu penyesuaian terhadap TKDN	Melakukan penyesuaian terhadap TKDN	
1.05.01.2.08		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100 %	88.17 %	88.17 %	perlu penyesuaian terhadap TKDN	Melakukan penyesuaian terhadap TKDN	
2921		Satuan Polisi Pamong Praja		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	88.17 %	88.17 %	Perlu penyesuaian terhadap TKDN	Melakukan penyesuaian terhadap TKDN	
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja	Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100.00 %			bangunan liar. Khusus pengawasan orang asing pelaksanaannya bekerjasama dengan BAKESBANGPOL. 3. Telah dilakukan penambahan personil petugas, serta peningkatan kapasitas untuk seluruh personil Satpol PP dalam rangka peningkatan pelayanan trantibum kepada masyarakat. 4. Operasi berkala sudah dilakukan melalui sub kegiatan "Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan" dengan realisasi sebesar 10.205 Objek penertiban.
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase PPNS yang dibina	100 %	98.8636 %	98.86 %	Dari total 88 orang PPNS terdapat 1 orang PPNS yang telah pindah ke kementrian, sehingga output tidak bisa tercapai 100% Namun telah dilaksanakan Pembinaan PPNS sesuai target.	Dilakukan pembinaan sesuai dengan jumlah PPNS	
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase SDM Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	100 %	100.00 %			
1.05.02		Satuan Polisi Pamong Praja			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100.00 %			
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkerjasama dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00 %			
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah lokasi penertiban	92 Titik/Lokasi	92 Titik/Lokasi	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pelanggaran Perda dan Perkada						Operasional dilakukan dengan patroli rutin yang juga melibatkan SATPOL PP kecamatan dan kelurahan serta kerjasama dengan jajaran sampling. Telah dilakukan review indikator tersebut, sehingga di RPJMD 2021-2026 terdapat indikator baru, yakni "Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan", dengan fokus penanganan pelanggaran PERDA/PERKADA sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap pelanggaran sehingga dipastikan telah mematuhi ketentuan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Peningkatan kapasitas SDM
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah petugas satpol PP yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	978 Orang	1045 Orang	106.85 %			
1.05.02.2.01		Satuan Polisi Pamong Praja			Jumlah Warga Sekitar lokasi penegakan Perda/Perkada yang berpotensi terkena dampak penegakan Perda/Perkada yang mendapatkan layanan	1040 Orang	1340 Orang	128.85 %			
1296		Satuan Polisi Pamong Praja			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	74 Kali	79 Kali	106.76 %			
1314		Satuan Polisi Pamong Praja			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	192 Kali	200 Kali	104.17 %			
1508		Satuan Polisi Pamong Praja			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	219 Kali	293 Kali	133.79 %			6.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Gangguan Ketertarikan Umum					7. SATPOL PP telah dilakukan melalui pelatihan softskill yang juga memuat materi dasar hukum saat pelaksanaan penegakan PERDA serta materi terkait pemahaman SOP, bagi Satpol PP pusat, Kecamatan dan Kelurahan. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi rokok ilegal dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Polrestaes Surabaya dan Polrestaes Tanjung Perak. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan dengan pembicara dari Kantor Bea Cukai, dan pada tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi terkait cukai hasil
3447		Satuan Polisi Pamong Praja					Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah SOP terkait Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat serta penegakan perda/perkada yang disusun	18 SOP	18 SOP	100.00 %		
3529		Satuan Polisi Pamong Praja					Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah objek Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan yang ditangani	10080 Objek	10205 Objek	101.24 %		
3530		Satuan Polisi Pamong Praja					Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah potensi unjuk rasa dan kerusuhan massa akibat penertiban pelanggaran perda/perkada yang ditangani	36 Penertiban	43 Penertiban	119.44 %		
1.05.02.2.02		Satuan Polisi Pamong Praja					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penegakan Perda dan Perkada yang ditegakkan	11 Perda/perkada	13 Perda/perkada	118.18 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1510		Satuan Polisi Pamong Praja					Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang diselidiki, dilakukan penyidikan, dan diselesaikan	250 Objek	280 Objek	112.00 %		tembakau ilegal terhadap pelaku usaha dan masyarakat pada bulan November dan Desember di 6 kecamatan, dengan menggandeng Dirjen Bea Cukai Kanwil Jatim, kejaksaan, dan jajaran samping lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa.
1511		Satuan Polisi Pamong Praja					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah objek pelanggaran perda dan perkada yang ditindak dan diselesaikan	965 Objek	1042 Objek	107.98 %		
4371		Satuan Polisi Pamong Praja					Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/Perkada kepada masyarakat/keompok masyarakat/pelaku usaha	2 Laporan	2 Laporan	100.00 %		
1.05.02.2.03		Satuan Polisi Pamong Praja					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang memberikan Pembinaan PPNS	7 Lembaga	7 Lembaga	100.00 %		
2909		Satuan Polisi Pamong Praja					Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan kapasitas	88 Orang	87 Orang	98.86 %	Dari total 88 orang PPNS terdapat 1 orang PPNS yang telah pindah ke Kementerian, sehingga output tidak bisa tercapai 100%. Namun telah dilaksanakan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota	Dilakukan pembinaan sesuai dengan jumlah PPNS



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											Surabaya sesuai dengan target.		
1.05.01		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	93 %	95.8567 %	103.07 %			Pada tahun 2022 telah dilakukan Pelatihan Kelurahan tangguh bencana, Pelatihan Sekolah tangguh bencana, Pelatihan Rumah sakit/Puskesmas tangguh bencana, Pelatihan Dasa Wisma tangguh bencana, serta Pelatihan peningkatan satgas/linmas di kelurahan.
1.05.01.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
472		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1.05.01.2.06		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100 %	100 %	100.00 %			
1232		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100 %	68.29 %	68.29 %	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran terkendala oleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi sarpras	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.05.01.2.08		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100 %	92.06 %	92.06 %	Pelaksanaan penyerapan anggaran jasa penunjang umum sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan dan menyesuaikan kebutuhan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
721		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100 %	92.06 %	92.06 %	Pelaksanaan penyerapan anggaran jasa penunjang umum sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100 %	97.8153 %	97.82 %	1. Perlunya penambahan pos pantau di lokasi yang sering terjadi kedaruratan untuk meningkatkan optimalisasi respon	Memperbanyak penempatan Pos Terpadu dan Pos Pantau untuk dapat memaksimalkan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									kedaruratan 2. Telah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk penanganan kedaruratan pada jam sibuk	cakupan wilayah penanganan	
1.05.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100 %	52.7273 %	52.73 %	1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan potensi bahaya dari kejadian bencana yang dapat terjadi setiap saat berdasarkan pretest dan post tes yang dilakukan 2. Perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penilaian dalam peningkatan kapasitas sesuai dengan sasaran intervensi	Memberikan materi terkait kebencanaan yang mudah dipahami serta menyebarkan informasi kebencanaan secara masif kepada masyarakat	
1.05.03.2.02		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	31 Kawasan	31 Kawasan	100.00 %			
195		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah jenis sarana penanggulangan bencana yang diadakan	5 jenis	5 jenis	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
363		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pelatihan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1650 orang	1650 orang	100.00 %			
752		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan	12 Kali	10 Kali	83.33 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan	Dilakukan pembagian jadwal kepada Kelurahan-Kelurahan dalam 1 kecamatan yang sama agar penyampaian materi serta praktek dapat dipahami dan dapat diterapkan	
1.05.03.2.03		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6000 Orang	6020 Orang	100.33 %			
189		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jenis kejadian bencana yang ditangani dengan cepat	10 jenis	11 jenis	110.00 %			
194		Badan Penanggulangan Bencana Daerah				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Pokok Korban Bencana	4 Jenis	4 Jenis	100.00 %			
1.05.01		Dinas Pemadam Kebakaran				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap	88 %	93.1142 %	105.81 %			1. Pada tahun 2022 penyediaan alat pelindung diri telah



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Penyelamatan			Pelayanan Kesekretariatan						
1.05.01.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
251		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			2.
1.05.01.2.06		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana pendukung perkantoran dalam kondisi baik dan ketepatan waktu dalam pemenuhannya	100 %	100 %	100.00 %			3.
940		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran dan yang terpelihara	100 %	100 %	100.00 %			
1.05.01.2.08		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa pelayanan perkantoran	100 %	93.15 %	93.15 %	1. Terkendala TKDN sehingga terjadi penyesuaian dalam pelaksanaan 2. Jasa pelayanan perkantoran yang dianggarkan dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan jasa di tahun sebelumnya dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen	dilaksanakan secara bertahap melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Setiap petugas pemadam kebakaran telah difasilitasi alat pelindung diri dalam melaksanakan tugas. SOP penanganan kebakaran di bangunan gedung tinggi telah disusun dan disosialisasikan kepada perusahaan yang memiliki bangunan tinggi Pada tahun 2022 telah dibangun satu pos pemadam kebakaran di wilayah Balas Klumprik yang kemudian untuk dilengkapi sarana dan prasarana serta aparaturnya. Penyediaan pos pemadam kebakaran dibangun dengan mempertimbangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga layanan pos pemadam kebakaran dapat mencakup ke seluruh wilayah Kota Surabaya.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi jasa	4. Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran untuk anak-anak dilaksanakan melalui beberapa kegiatan salah satunya sosialisasi pencegahan dan penanganan awal kebakaran di SD dan SMP serta kegiatan wisata damkar cilik (wisdadil) yang diwujudkan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
846		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa pelayanan kantor	12 Bulan	12 Bulan	100.00 %			5. 1. DPKP telah melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran melalui Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) disetiap rayon dan pos 2. DPKP telah memiliki SOP terkait evakuasi dan penyelamatan
1.05.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	48	45.1828	105.87 %			6. 1. Sosialisasi pencegahan dan penanganan terhadap bahaya kebakaran
1.05.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			Persentase Penanganan Waktu Tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	100 %	100 %	100.00 %			
1.05.04.2.01		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	764 Petugas Pemadam Terlatih	764 Petugas Pemadam Terlatih	100.00 %			
231		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksana operasional pemadaman kebakaran dan Penyelamatan yang	632 Orang	635 Orang	100.47 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							dipenuhi kebutuhannya						dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dimana salah satu pelaksanaannya difokuskan pada kawasan yang memiliki intensitas bangunan padat yaitu apartemen atau gedung-gedung perkantoran. 2. DPKP telah menghimbau dan mensosialisasikan kepada pengelola bangunan gedung, termasuk rumah susun terkait Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang memuat salah satunya tentang emergency response team dan emergency response plan. Pada tahun 2022 telah dibangun satu pos pemadam kebakaran di wilayah Balas Klumprik yang kemudian untuk dilengkapi sarana dan
232		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Peningkatan kompetensi aparatur	10 Kali	10 Kali	100.00 %			
233		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan yang terpelihara dan berfungsi selayaknya	220 Unit	220 Unit	100.00 %			
234		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit sarana dan prasarana penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang dilakukan pengadaan sesuai dengan kebutuhan	1399 Unit	1567 Unit	112.01 %			
1.05.04.2.02		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Berkas permohonan pemeriksaan siaten proteksi kebakaran pemilik bangunan/gedung guna pencegahan kebakaran di Kota Surabaya	440 Berkas	472 Berkas	107.27 %			
240		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pemeriksaan bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan laik	520 Bangunan/Gedung	520 Bangunan/Gedung	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
							fungsi dari sistem proteksi kebakaran						prasarana serta aparturnya. Penyediaan pos pemadam kebakaran dibangun dengan mempertimbangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga layanan pos pemadam kebakaran dapat mencakup ke seluruh wilayah Kota Surabaya. 8. Dalam rangka meminimalisasi resiko dalam kejadian kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan beberapa upaya yaitu sosialisasi pencegahan dan penanganan awal terhadap bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam datang. 9. Pada tahun 2022 penyediaan alat pelindung diri telah dilaksanakan secara bertahap melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Setiap petugas pemadam kebakaran telah difasilitasi alat
1.05.04.2.04		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kegiatan pelatihan dengan memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan penyelamatan melalui sosialisasi dan simulasi	70 Kegiatan	71 Kegiatan	101.43 %			
235		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Sosialisasi dan simulasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang dilaksanakan	120 Kali	146 Kali	121.67 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
													10. pelindung diri dalam melaksanakan tugas. 1. Sosialisasi pencegahan dan penanganan terhadap bahaya kebakaran dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dimana salah satu pelaksanaannya difokuskan pada kawasan yang memiliki intensitas bangunan padat yaitu apartemen atau gedung-gedung perkantoran. 2. DPKP telah menghimbau dan mensosialisasikan kepada pengelola bangunan gedung, termasuk rumah susun terkait Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang memuat salah satunya tentang emergency response team dan emergency response plan. 11. Sosialisasi mengenai pencegahan dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
													penanganan awal kebakaran untuk anak-anak dilaksanakan melalui beberapa kegiatan salah satunya sosialisasi pencegahan dan penanganan awal kebakaran di SD dan SMP serta kegiatan wisata damkar cilik (wisdadil) yang diwujudkan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
1.06.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	89.8792 %	102.14 %			1. Setiap bulan telah dilakukan musyawarah kelurahan atau muskel yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi data MBR by name by address 2. Telah dilakukan optimalisasi penggunaan ambulans yang ada
1.06.01.2.02		Dinas Sosial	-Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1497		Dinas Sosial			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1.06.01.2.06		Dinas Sosial			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan dan	100 %	76.82 %	76.82 %	sebagian peralatan masih dalam	Dilakukan pemetaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 -Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang			pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor				kondisi baik sehingga tidak memerlukan perbaikan serta sudah terpenuhinya perlengkapan kantor	kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi peralatan kantor yang ada	3. untuk pelayanan rutin antar jemput warga untuk pemeriksaan kesehatan dan untuk pelayanan pengantaran jenazah. Dinas Sosial telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin (Pembersihan, Pemeriksaan, Kelengkapan Kendaraan) dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk validitas data MBR dilakukan dengan: 1. Sinkronisasi data MBR dan DTKS dan Penindaklayakan 2. musyawarah kelurahan atau muskel yang dilakukan oleh Dinas Sosial setiap bulan bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi data MBR by name by address 3. Pengusulan pengalihan kepesertaan BPJS
1402		Dinas Sosial	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 -Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia dan dipelihara	135 unit	103 unit	76.30 %	sebagian peralatan masih dalam kondisi baik sehingga tidak memerlukan perbaikan serta sudah terpenuhinya perlengkapan kantor	akan dilakukan pemetaan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan kondisi peralatan kantor yang ada	
1.06.01.2.08		Dinas Sosial	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	100.00 %			
1387		Dinas Sosial	-Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	100 %	100 %	100.00 %			
1.06.02		Dinas Sosial	-Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Jenis PSKS dan Lembaga kepahlawanan yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	76.47 %	81.8182 %	106.99 %			
1.06.02		Dinas Sosial	Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan	84.94 %	76.6111 %	90.19 %	Kurangnya partisipasi dari PSKS jenis perorangan untuk mengikuti kegiatan pembinaan - Dilakukan inovasi pada kegiatan	- Dilakukan pendekatan kepada anggota terkait pentingnya pembinaan - Dilakukan inovasi pada kegiatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Surabaya		masalah kesejahteraan sosial				pengentasan PMKS. Selain itu, juga perlu menggandeng Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.	pembinaan sehingga tidak terkesan monoton	4. dari PBPU kota ke PBI.JK Dinas Sosial telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin (Pembersihan, Pemeriksaan, Kelengkapan Kendaraan) dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.06.02.2.03		Dinas Sosial	-Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengemudi Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi -Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS dan lembaga kepalawanan yang dibina	13 jenis	11 jenis	84.62 %	Pepabri belum bisa mengikuti kegiatan di tahun ini dikarenakan seluruh anggota sudah lanjut usia. Selain itu, juga perlu menggandeng Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.	- Dilakukan pemetaan kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan pembinaan untuk Pepabri. - Menggandeng Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.	
1.06.02.2.03		Dinas Sosial	-Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan		Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS	1496 orang	1800 orang	120.32 %			
1240		Dinas Sosial		Peningkatan Kemampuan Potensi	Jumlah jenis PSKS kelembagaan dan	8 jenis	7 jenis	87.50 %	untuk pepabri belum bisa	Dilakukan pemetaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIA N	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kota Surabaya Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi -Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya			Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga kepalawanan yang dibina				mengikuti kegiatan di tahun ini dikarenakan seluruh anggota sudah lanjut usia	kegiatan dan penyesuaian konsep kegiatan pembinaan untuk Pepabri.	
							Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS kelembagaan	926 orang	1322 orang	142.76 %			
3537		Dinas Sosial				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis PSKS perorangan yang dibina	5 jenis	4 jenis	80.00 %	Perlunya menggandeng Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.	Menggandeng Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi untuk berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.	
							Jumlah peserta pembinaan pemberdayaan PSKS perorangan	570 orang	491 orang	86.14 %	Kurangnya antusias dari relawan sosial untuk mengikuti kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PSKS	Dilakukan perluasan jejaring sosial untuk memberi kesempatan bagi relawan baru	
1.06.04		Dinas Sosial		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase lansia terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %	100 %	100.00 %			
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase penyandang disabilitas terlanjar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %	100 %	100.00 %			
1.06.04		Dinas Sosial			Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti sosial	100 %	100 %	100.00 %			
1.06.04.2.01		Dinas Sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlanjar, Anak Terlanjar, Lanjut Usia Terlanjar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan pelayanan reunifikasi bagi PMKS	12 kali	12 kali	100.00 %			
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Anak	12 kali	12 kali	100.00 %			
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Lanjut Usia	12 kali	12 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1.06.04.2.01		Dinas Sosial			Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial dasar bagi Penyandang Disabilitas	12 kali	12 kali	100.00 %			
1225		Dinas Sosial			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah PMKS yang Mendapat Pelayanan reunifikasi	1561 orang	1654 orang	105.96 %			
1311		Dinas Sosial			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Anak yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	130 orang	117 orang	90.00 %	Kurang optimalnya peran relawan sosial dalam melaksanakan pendampingan secara persuasif kepada orang tua anak terlantar untuk difasilitasi mengikuti pembinaan di UPTD Kampung Anak Negeri	Membangun dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi PMKS serta melakukan koordinasi dengan relawan sosial dalam rangka optimalisasi penyaluran dan pendampingan anak terlantar ke UPTD Kampung Anak Negeri	
					Jumlah Lanjut Usia yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	215 orang	185 orang	86.05 %	Menyesuaikan jumlah penghuni yang ada di Griya Wreda dan akan terus dilakukan fasilitasi untuk lansia terlantar yang belum tertampung di UPTD Griya Wreda	Membangun dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi PMKS serta melakukan koordinasi dengan relawan sosial dalam rangka optimalisasi	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												penyaluran dan pendampingan lanjut usia terlanter ke UPTD Griya Wreda	
							Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	60 orang	47 orang	78.33 %	Menyesuaikan jumlah penghuni yang ada di UPTD Liponsos Babat Jerawat dan akan terus dilakukan fasilitasi dan pendampingan di UPTD Liponsos Babat Jerawat	Membangun dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi PMKS serta melakukan koordinasi dengan relawan sosial dalam rangka optimalisasi penyaluran dan pendampingan disabilitas terlanter ke UPTD Liponsos Babat Jerawat	
1.06.04.2.02		Dinas Sosial					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah kegiatan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial	12 kali	12 kali	100.00 %		
1.06.04.2.02		Dinas Sosial						Jumlah laporan pemberian layanan kedaruratan	12 laporan	12 laporan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1230		Dinas Sosial				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1100 orang	1073 orang	97.55 %	Menyesuaikan jumlah penghuni yang ada di UPTD Liponsos Keputih dan akan terus dilakukan fasilitasi dan pendampingan di UPTD Liponsos Keputih	Membangun dan melakukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi PMKS serta melakukan koordinasi dengan relawan sosial dalam rangka optimalisasi penyaluran dan pendampingan tuna sosial terlanter ke UPTD Liponsos Keputih	
1239		Dinas Sosial				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah fasilitasi layanan kedaruratan	4716 kali	4784 kali	101.44 %			
1.06.05		Dinas Sosial		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			Persentase MBR yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	87 %	88.5333 %	101.76 %			
1.06.05.2.02		Dinas Sosial				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	12 laporan	12 laporan	100.00 %			
1.06.05.2.02		Dinas Sosial					Jumlah laporan pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan MBR	12 laporan	12 laporan	100.00 %			
1189		Dinas Sosial				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Jumlah jenis data yang dikelola	24 data	24 data	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Daerah Kabupaten/Kota							
1266		Dinas Sosial			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan koordinasi dan monitoring intervensi sosial	27 kali	27 kali	100.00 %			
3449		Dinas Sosial			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemutakhiran data MBR dan PMKS	12 kali	12 kali	100.00 %			
4370		Dinas Sosial			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	650 Orang	650 Orang	100.00 %			
1.06.07		Dinas Sosial		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dalam kondisi baik	100 %	100 %	100.00 %			
1.06.07.2.01		Dinas Sosial			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	7 lokasi	7 lokasi	100.00 %			
3441		Dinas Sosial			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	3 jenis	3 jenis	100.00 %			



3.1.2.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu penyelenggaraan pada bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan Dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, serta Kearsipan. Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Surabaya telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari capaian program dan kegiatan yang positif. Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika



10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata
13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika
14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika
15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata
16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Berikut ini merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pemerintah Kota Surabaya tahun 2022.



Tabel 3.18
Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
02.07.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	91%	93.88%	103.17%			1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan sasaran peserta pendidikan dan pelatihan dimaksud dengan kualifikasi yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah merupakan warga Kota Surabaya dan ber-KTP Surabaya. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis klaster kompetensi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari para pencari kerja yang setelahnya di ujikan kompetensinya sebagai pemantapan dari pelatihan yang telah diikuti untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Selain pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dengan sertifikat BNSP, dilaksanakan beragam bimbingan teknis (bimtek) untuk mendukung Program Padat Karya antara lain : 1. Laundry 2. Cuci motor 3. Membatik 4. Menjahit 5. Olahan masakan 6. Membuat slipper 7. MUA 8. Pembuatan sabun 9. Sablon, dan sebagainya. Untuk jenis pelatihan lainnya Disperinaker masih mengupayakan Lembaga Pelatihan Kerja dengan kesesuaian skema yang ditentukan Pemerintah Kota Surabaya. 2. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya telah memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan
2.07.01.2.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1020		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.07.01.2.08		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
2.07.01.2.08		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
1018		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	95.45%	95.45%	Pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3519		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa Perkantoran	100%	93.87%	93.87%	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan namun terkendala dengan TKDN	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	pengusaha atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Adapun jenis perselisihan hubungan industrial yang dimediasi untuk diselesaikan diluar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan mediator akan berupaya seoptimal mungkin untuk membantu mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha atau antar serikat pekerja/ serikat buruh. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengembangkan aplikasi PensilBuin (Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial). Selain itu, dilaksanakan bimtek kepada serikat pekerja/serikat buruh untuk memberikan pemahaman terkait peraturan ketenagakerjaan 3. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan upaya agar pencari kerja ber KTP Surabaya dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan baru yang ada di Surabaya. Upaya tersebut diantaranya melakukan link and match kebutuhan kompetensi perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya terhadap pencari kerja. Sehingga dapat dilakukan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi berbasis kompetensi yang dapat menunjang pencari kerja ber KTP Surabaya untuk dapat terserap pada kebutuhan pasar kerja. Diharapkan dengan dilakukannya link and match kebutuhan kompetensi tersebut dapat
02.07.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	77.02%	83.06%	107.84%			
02.07.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil		Persentase Peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	90.05%	98.36%	109.23%			
2.07.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan atau pemagangan	720 Orang	732 Orang	101.67%			
2.07.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompetensi	720 Orang	732 Orang	101.67%			
705		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mengikuti Pelatihan berdasarkan Klaster Kompetensi	720 Orang	732 Orang	101.67%			
719		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana	Jumlah pencari kerja yang mengikuti magang	120 Orang	130 Orang	108.33%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Cukai Hasil Tembakau	dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja							lebih mengoptimalkan penempatan tenaga kerja ber KTP Surabaya. 4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melaksanakan kegiatan yang mengakomodir optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMA/SMK, sebagai berikut : 1. Kegiatan Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja bagi Siswa SMK; 2. Melakukan pendataan terhadap lulusan SMA/SMK tahun berjalan sebagai bahan untuk menawarkan berbagai program atau kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, termasuk di antaranya Bimbingan Teknis (Bimtek), Jobfair dan Job matching, dengan cara menghubungi pencari kerja dari data lulusan SMA/SMK untuk dicocokkan dengan data lowongan aktif yang masuk di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. 3. Selain itu juga menginformasikan dan mengarahkan untuk memanfaatkan website Siap Kerjo Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja yang dapat di akses di url. Disnaker.surabaya.go.id sub menu Siap Kerja.
2.07.03.2.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
1700		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah dokumen Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
2.07.03.2.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang difasilitasi uji sertifikasi kompetensi	912 Orang	912 Orang	100.00%			
720		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti sertifikasi	912 Orang	912 Orang	100.00%			
02.07.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	2%	2.03%	101.32%			
2.07.04.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis	1460 orang	1592 orang	109.04%			
594		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis penyuluhan dan bimbingan jabatan	1000 orang	1000 orang	100.00%			
779		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelayanan antar Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis peningkatan pelayanan antar kerja	60 orang	60 orang	100.00%			
914		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi perluasan kesempatan kerja	400 orang	532 orang	133.00%			
2.07.04.2.03		Dinas Perindustrian		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan penyelenggaraan	4 Laporan	4 Laporan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Tenaga Kerja			Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja						
1120		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Jobfair/Bursa Kerja	4 Kali	4 Kali	100.00%			
2.07.04.2.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	2 Laporan	2 Laporan	100.00%			
728		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi CPMI/PMI	100 Orang	100 Orang	100.00%			
02.07.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama	12.51%	13.00%	103.92%			
02.07.05		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	20%	21.06%	105.32%			
2.07.05.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
539		Dinas Perindustrian		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Jumlah dokumen perhitungan Kebutuhan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Tenaga Kerja		Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Layak (KHL) Kota Surabaya yang disusun						
					Jumlah perusahaan yang mendapat pembinaan syarat kerja	500 Lembaga	513 Lembaga	102.60%			
1576		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang mendapatkan Pengesahan	220 Berkas	270 Berkas	122.73%			
2.07.05.2.02		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
542		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek Harmonisasi Hubungan Industrial	500 Orang	500 Orang	100.00%			
729		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	110 Kasus	120 Kasus	109.09%			
02.08.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	• Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	93.04%	93.04%	Perlunya optimalisasi pemberian pelayanan kesekretariatan untuk	akan dilakukan optimalisasi pemberian pelayanan kesekretariatan untuk	1. Melalui Puspaga <i>Goes To School</i> , DP3APKB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan melakukan Bimbingan kepada Peserta Didik. 2. Berkolaborasi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022						seluruh pegawai di DP3APPKB	seluruh pegawai di DP3APPKB	dengan BNN untuk sosialisasi terkait program pencegahan penyalahgunaan narkoba 3. Koordinasi dengan SATPOLPP terkait penjangkauan perempuan dan anak yang berkaitan
2.08.01.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum 4. Program kedepan akan dilanjutkan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dispusip, Disporapar 2. Tim Psikolog DP3APPKB bekerjasama dengan Psikolog Voulenteer / APSI/HIMPSSI/ Apsilangga/LSM Pemerhati Perempuan dan Anak/Universitas/ Mahasiswa Psikologi MBKM melakukan bimbingan konseling secara berkala di 31 Kecamatan dengan sasaran relawan PKBM, Satgas PPA, TP PKK, Bunda PAUD, KS/Guru dan Tenaga Kependidikan, LKMK, Komunitas Orang Tua dan seluruh masyarakat
1309		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			3. Implementasi Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS), menekan kenakalan anak dan remaja dengan memberlakukan jam pendidikan, dimana pukul 18.00 WIB anak dan remaja sudah masuk rumah dan berada dalam pantauan orang tua, tanpa gadget dan televisi, waktu dioptimalkan untuk keluarga dan belajar. Dengan dikawal dan diawasi oleh RT, RT dan LKMK.
2.08.01.2.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	93.56%	93.56%	Pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai perencanaan.	akan dilakukan optimalisasi dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai perencanaan.	4. DP3APPKB telah bekerjasama dengan BKKBN dan TP PKK Kota untuk membentuk Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di Kelurahan Tegalsari pada tahun 2022. 2. Pada tahun 2022 kegiatan SOTH yang dilakukan meliputi edukasi kepada orangtua balita tentang pola asuh balita, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
1307		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	23 Rekening	23 Rekening	100.00%			5. Akan dilaksanakan Program Sakera (PUSPAGA Keliling Surabaya)



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.08.01.2.08		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	63.96%	63.96%	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah sesuai perencanaan.	akan dilakukan optimalisasi dalam pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan perangkat daerah sesuai perencanaan.	DP3APPKB sinergi dengan program di Dispusip dengan Materi Ketahanan Anak dan Remaja serta Pola Asuh Orang Tua 6. Telah dilaksanakan fasilitas bimbingan konseling anak dan remaja melalui hotline Puspaga dan PPTP2A. Kegiatan dimaksud tertuang dalam program Peningkatan Kualitas Keluarga. 2. Telah dibangun sistem aplikasi perlindungan perempuan dan anak (SIAP PPAK) yang digunakan bersama dengan Perangkat Daerah terkait sehingga memudahkan koordinasi dan penanganan permasalahan 7. DP3APPKB melalui PUSPAGA, Forum Anak Surabaya, Sekolah Kebangsaan (Dispora) dan Organisasi Pelajar Pelopor Surabaya (Organisasi Para Ketua OSIS Kota Surabaya (ORPES) Dispendik, bekerjasama dengan Psikolog Voulenteer , TP PKK, Relawan PKBM, Satgas PPA melakukan penyuluhan dan penanganan kenakalan remaja di Satuan Pendidikan/Kecamatan/Kelurahan 2. Dilakukan sosialisasi bersama Bakesbangpol terkait pencegahan radikalisasi terhadap anak 8. DP3APPKB telah bekerjasama dengan lintas Perangkat Daerah, Akademisi, LSM/Komunitas, Badan Usaha, Media saling berkolaborasi untuk Berani Mencegah Tindakan Kekerasan dalam upaya mewujudkan sekolah ramah anak. DP3APPKB bersama dispendik dan LSM genta bekerjasama untuk giat Konselor Sebaya bersama Puspaga Goes To School untuk Sosialisasi Anti Bullying , Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Klinik Psikologi di Sekolah. 9. Jumlah Kelurahan Ramah Anak pada tahun 2022 bertambah sebanyak 42
1308		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	20 Rekening	20 Rekening	100.00%			
02.08.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100%	102.94%	102.94%			
02.08.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100%	100%	100.00%			
2.08.02.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana									Kelurahan sehingga total Kelurahan Ramah Anak di Kota Surabaya sebanyak 95 Kelurahan. Dalam rangka meningkatkan capaian Kelurahan Ramah Anak (KLA) dan Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KPKAS) telah dilaksanakan Rebranding KLA dan KPKAS dengan menambahkan Aspek Indikator Ramah Perempuan dan Anak. 2. Pada Tahun 2022, seluruh Kecamatan merupakan Kecamatan responsif Gender. DP3APPKB telah berhasil mengupayakan seluruh 154 Kelurahan untuk menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk meningkatkan capaian Kelurahan Responsif Gender, dilakukan upaya sosialisasi secara menyeluruh terhadap pemangku kepentingan melalui kegiatan Capacity Building Vocal Point. 3. DP3APPKB telah melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui kader kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menjadi peserta KB. Selain itu, DP3APPKB telah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang siap memberikan pelayanan pelayanan KB menjadi 183 fasilitas kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri bidan).
1675		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00%			
2.08.02.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	600 Orang	100.00%			
1673		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4 Kali	4 Kali	100.00%			
2.08.02.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21 Kegiatan	20 Kegiatan	95.24%	Kegiatan yang dilakukan oleh TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pengajuan proposal kegiatan oleh TP PKK dan DWP sehingga jadwal yang telah disusun dalam	akan dilakukan koordinasi yang intensif untuk persiapan dan rencana pelaksanaan DWP dan PKK	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									perencanaan akan menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan dari TP PKK dan DWP		
3070		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1132 Orang	1132 Orang	100.00%			
02.08.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100%	100%	100.00%			
02.08.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	32.25%	32.26%	100.03%			
2.08.03.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%			
4383		Dinas Pemberdayaan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.08.03.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	31 kasus	38 kasus	122.58%			
1699		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	31 kasus	38 kasus	122.58%			
1701		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	31 kasus	38 kasus	122.58%			
2.08.03.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	10 kecamatan	10 kecamatan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana									
1702		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	100 orang	133 orang	133.00%			
02.08.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	209	322	154.07%			
2.08.04.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan layanan keluarga oleh Ruang Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	12 laporan	12 laporan	100.00%			
1381		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2 lembaga	2 lembaga	100.00%			
02.08.05		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
2.08.05.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00%			
1677		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	2 Kali	2 Kali	100.00%			
02.08.06		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kelurahan Layak Anak	47.40%	61.69%	130.14%			
2.08.06.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%			
1704		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	42 Kelurahan	42 Kelurahan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							
2.08.06.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%			
1706		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431 Lembaga	447 Lembaga	103.71%			
1708		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2 Lembaga	2 Lembaga	100.00%			
02.08.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.08.07		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	32.25%	32.26%	100.03%			
2.08.07.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100.00%			
4381		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
2.08.07.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	10 lembaga	10 lembaga	100.00%			
2.08.07.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan			Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	154 kasus	102.67%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana									
1710		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima	150 kasus	154 kasus	102.67%			
1713		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150 kasus	154 kasus	102.67%			
2.08.07.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.00%			
4382		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.09.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	• Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93%	93.70%	100.75%			1. Intervensi berbasis inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan telah dilakukan melalui: 1) Pengelolaan lahan aset untuk budidaya peternakan yang dikelola oleh masyarakat antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging dengan teknologi kandang semi close house di Tahura Jeruk dan Tahura Lempung 2) Pelatihan inovasi olahan pangan lokal berbasis potensi wilayah 3) Penambahan jenis budidaya ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi 4) Inovasi pengembangan TOGA yang dapat dimanfaatkan sebagai produk minuman kemasan serta pelatihan budidaya pertanian bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP. 2. Pemerintah Kota Surabaya telah menindaklanjuti dengan: 1) Penjajakan kerjasama dengan daerah penghasil bahan pangan, melakukan survey ketersediaan dan harga pangan 2) Pelatihan olahan pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) serta 3) Pengawasan keamanan pangan segar untuk mendukung ketahanan pangan.
2.09.01.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1501		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	• Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.09.01.2.08		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	• Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	91.34%	91.34%	Terkendala adanya regulasi pembelian barang/jasa ber-TKDN dalam sistem pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan perubahan penjadwalan proses pembelian barang.	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	
1645		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	• Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	91.34%	91.34%	Terkendala adanya regulasi pembelian barang/jasa ber-TKDN dalam sistem pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan perubahan penjadwalan proses pembelian barang.	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	
			• Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022								



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1646		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana Lingkup DKPP	80%	63.32%	79.15%	Terkendala adanya regulasi pembelian barang/jasa ber-TKDN dalam sistem pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan perubahan penjadwalan proses pembelian barang.	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	
02.09.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Indeks Kecukupan Pangan Pokok	1.11	1.11	100.00%			
2.09.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Laporan	15 Laporan	100.00%			
988		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	15 Kali	15 Kali	100.00%			
2.09.03.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100.00%			
990		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan dan Jumlah pelaksanaan	39 Kali	40 Kali	102.56%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pengembangan Diversifikasi Pangan						
02.09.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Bahan Pangan Segar yang dinyatakan aman	97.87%	96%	98.09%	Masih ada pedagang di pasar tradisional yang kurang memperhatikan sanitasi dan kebersihan lapak penjualan. Perlunya menjaga kualitas sample pangan segar yang diperiksa.	Melakukan sosialisasi dan edukasi serta pembinaan kepada pelaku usaha yang masih belum memenuhi standar	
2.09.05.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	4 Laporan	4 Laporan	100.00%			
989		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel pangan segar yang diperiksa	1500 sampel	1500 sampel	100.00%			
02.10.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	30081.9 M2	7763 M2	25.81%	1. Menyesuaikan program prioritas pembangunan di tingkat kota, khususnya dalam pemulihan ekonomi dan penanganan genangan 2. Penyesuaian kebutuhan luas yang dibebaskan berdasarkan NIB dari kantor pertanahan	1. Rutin melakukan Rapat Koordinasi dengan tim anggaran serta melaporkan progress pengadaan tanah kepada Sekretaris Daerah dan Walikota 2. Membuat Sekretariat Bersama (Sekber) di Kantor Pertanahan guna memudahkan koordinasi.	
2.10.05.2.01		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tahap pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan non infrastruktur	1 dokumen	1 dokumen	100.00%			
643		Dinas Perumahan		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian	Jumlah lokasi pengadaan/pembelian	1 lokasi	1 lokasi	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • - Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk	Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	tanah dan/atau bangunan yang tertuang dalam dokumen tahapan pengadaan tanah dan/atau bangunan						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kepentingan Umum								
02.11.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	85%	88.00%	103.53%			- Untuk pelaksanaan pembangunan jamban bagi pemohon yang tidak memiliki alas hak, telah difasilitasi melalui Perwali No. 115 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perwali No. 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya, bahwa persyaratan penerima jamban antara lain tidak memiliki jamban dan merupakan penduduk Kota Surabaya/berdomisili di Kota Surabaya - Pencanangan kampung Zero Waste dimulai tahun 2022,dengan jumlah 40 kampung yang akan dijadikan sebagai percontohan dalam hal pengurangan sampah dari sumbernya, dengan target pengurangan timbulan sampah 40 ton/hari. dengan proses yang berkelanjutan, ditargetkan tercapai pada tahun 2026 terbentuk 200 kampung yg mampu mengurangi timbulan sampah menjadi 200 ton/hari - Pemerintah Kota Surabaya menggunakan kendaraan Angkutan Sampah jenis Arm roll maupun Truck Compactor untuk pengangkutan sampah. Penggunaan compactor refuse dapat menjadi alternatif penanganan dan pengolahan sampah dan pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan. - Pengadaan bak sampah dilakukan melalui proses lelang dan dilakukan pemilihan bak sampah yang memiliki kualitas baik sehingga penggunaannya bisa lebih dari 1 (satu) tahun - Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam hal Pengelolaan Limbah B3 , kewenangan Pemerintah Kabupaten/
2.11.01.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1040		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.11.01.2.08		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	90.54%	90.54%	Terkendala pembelian belanja modal yang mempunyai sertifikat TKDN Proses pembelian barang masih dalam pengiriman, direncanakan sampai akhir Desember dapat terealisasi	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
958		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	90.54%	90.54%	Terkendala pembelian belanja modal yang mempunyai sertifikat TKDN	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
2.11.01.2.09		Dinas Lingkungan Hidup		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengelolaan barang	100%	79.15%	79.15%	Terkendala pembelian belanja modal yang	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarpras di	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		milik daerah penunjang urusan				mempunyai sertifikat TKDN Pembelian barang masih dalam proses pembayaran. rencana terealisasi akhir Desember	tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi sarpras	6. Kota diatur dalam batasan ruang lingkup: a. Penyimpanan sementara limbah B3 yang sudah tersedia di Kota Surabaya b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota Mengenai Kegiatan pemakaman jenazah di 12 Makam yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya selalu memperhatikan berkas persyaratan pemakaman diantaranya : a. Surat Kematian dari Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas, atau Dokter b. Foto Copy KTP Almarhum dan Pelapor c. Surat Pengantar dari RT/RW. Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan verifikasi terutama pada NIK Almarhum yang menunjukkan bahwa NIK tersebut terdaftar sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui website : https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/ dan membebaskan biaya retribusi pemakaman. 7. Telah dilaksanakan Pembangunan Jamban bagi masyarakat MBR dan di kawasan prioritas yang bersumber dari pendanaan APBD Kota Surabaya, dengan bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat di tiap Kelurahan. Pada tahun 2023 direncanakan Surabaya Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free/ODF) yang telah didukung dengan percepatan pembangunan jamban sebanyak 300 unit di tahun 2022. 8. Terkait Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, pemerintah Kota
995		Dinas Lingkungan Hidup	Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	79.15%	79.15%	Terkendala pembelian belanja modal yang mempunyai sertifikat TKDN	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
02.11.03		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan status mutu air dalam kondisi Baik	42%	45.58%	108.51%			
02.11.03		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase Peningkatan udara Ambien dalam kondisi memenuhi baku mutu	82%	99.44%	121.27%			
2.11.03.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jenis kualitas lingkungan yang dimonitoring selama 1 tahun	2 jenis	2 jenis	100.00%			
2.11.03.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			jumlah rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
171		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah data kualitas air dan data kualitas udara ambien sesaat selama 1 tahun	1010 data	1011 data	100.10%			Surabaya dalam proses perubahan menyesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Retribusi 9. Kajian alternatif pengangkutan sampah yang mendukung efisiensi penggunaan APBD dalam proses penyusunan. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan upaya untuk menekan volume produksi sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai bagian dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. 10. Beberapa upaya pengolahan sampah yang telah dilakukan untuk memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain: 1) Penggiatan Bank Sampah dan inovasi pemanfaatan sampah 2) Penjualan sampah plastik hasil kontribusi layanan Surabaya Bus dengan sistem pelelangan. 3) Proses gasifikasi di TPA yaitu pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik untuk dijual kembali kepada PLN. 11. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam hal Pengelolaan Limbah B3, kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota diatur dalam batasan ruang lingkup: a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota 2. Berdasarkan: • Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021
174		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	jumlah lokasi pendampingan audit energi, pelaksanaan CFD dan pendampingan proklamasi	23 lokasi	23 lokasi	100.00%			
2.11.03.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA) yang digunakan untuk menentukan ISPU kota dalam 1 tahun	2 stasiun	2 stasiun	100.00%			
2.11.03.2.02		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	100%	100%	100.00%			
175		Dinas Lingkungan Hidup		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Indeks Standard Pencemar Udara (ISPU) yang terpublikasi dari 2 Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) dalam 1 tahun	365 data	365 data	100.00%			
1276		Dinas Lingkungan Hidup		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah jamban termasuk instalasi septic tank yang terpasang	300 unit	300 unit	100.00%			
02.11.04		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase kelestarian keanekaragaman hayati	98.98%	101.42%	102.47%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.11.04.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian pemeliharaan lingkungan hidup daerah yang disusun	3 dokumen	3 dokumen	100.00%			tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.
2.11.04.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	2.79 Ha	2.79 Ha	100.00%			
177		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi taman dan jalur hijau yang ditata dan dipelihara	463 lokasi	463 lokasi	100.00%			
3025		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Pengembangan Dekorasi Kota yang Difasilitasi	79 Lokasi	79 Lokasi	100.00%			
3044		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Pemakaman yang dikelola dan dipelihara	14 lokasi	14 lokasi	100.00%			
3543		Dinas Lingkungan Hidup		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah ekosistem keanekaragaman hayati yang disurvei	7 ekosistem	7 ekosistem	100.00%			
02.11.05		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase ketepatan waktu rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	80%	100%	125.00%			
02.11.05		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase peningkatan jumlah lokasi penanganan limbah B3/Sampah spesifik	80%	80%	100.00%			
2.11.05.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diterbitkan	200 berkas	214 berkas	107.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
291		Dinas Lingkungan Hidup		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah permohonan rincian teknis pengelolaan (penyimpanan) limbah B3 yang diproses	200 Berkas	220 Berkas	110.00%			
2.11.05.2.02		Dinas Lingkungan Hidup		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan limbah B3 yang dilakukan	1 kegiatan	1 kegiatan	100.00%			
861		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah lokasi penanganan limbah B3 atau sampah spesifik yang dilakukan	8 lokasi	8 lokasi	100.00%			
02.11.06		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan/kepatuhan kegiatan usaha terhadap aspek lingkungan	50%	50.79%	101.57%			
2.11.06.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah obyek kegiatan usaha dan titik IPAL yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	432 obyek	432 obyek	100.00%			
2.11.06.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase ketepatan waktu persetujuan lingkungan yang diterbitkan	80%	100%	125.00%			
181		Dinas Lingkungan Hidup		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah persetujuan lingkungan yang diterbitkan	250 Berkas	259 Berkas	103.60%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Jumlah persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah yang diterbitkan	150 Berkas	158 Berkas	105.33%			
183		Dinas Lingkungan Hidup		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan usaha yang dibina dan diawasi pengelolaan dan pemantauan lingkungannya	254 Lembaga	254 Lembaga	100.00%			
					Jumlah titik IPAL kegiatan monitoring pengelolaan air limbah	178 lokasi	178 lokasi	100.00%			
02.11.08		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	50.27%	59.89%	119.14%			
02.11.08		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase peningkatan peran serta kader lingkungan dalam pengelolaan persampahan	55.70%	55.77%	100.13%			
2.11.08.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	1 jenis	1 jenis	100.00%			
2.11.08.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan yang dibutuhkan	12 kali	12 kali	100.00%			
76		Dinas Lingkungan Hidup		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang	12 kali	12 kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					lingkungan yang diselenggarakan						
					Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh kader lingkungan	3 kegiatan	3 kegiatan	100.00%			
02.11.09		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase jumlah perolehan penghargaan lingkungan hidup oleh masyarakat	50.40%	50.40%	100.00%			
2.11.09.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup yang di usulkan	4 penghargaan	4 penghargaan	100.00%			
77		Dinas Lingkungan Hidup		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100.00%			
					Jumlah lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	10 lokasi	10 lokasi	100.00%			
02.11.10		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah penyelesaian permasalahan lingkungan hidup melalui upaya pemberian sanksi administrasi dan non sanksi administrasi	50 obyek	44 obyek	112.00%			
2.11.10.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
184		Dinas Lingkungan Hidup		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah permasalahan lingkungan hidup yang ditangani	50 Obyek	44 Obyek	112.00%	lingkungan hidup		
02.11.11		Dinas Lingkungan Hidup		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna yang beroperasi dengan baik	2.56%	2.56%	100.16%			
02.11.11		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase pengangkutan sampah ke TPA ≤ 1 hari	87.27%	91.05%	104.33%			
02.11.11		Dinas Lingkungan Hidup			Persentase pengolahan sampah di TPS 3R	50%	74.62%	149.24%			
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup		Pengelolaan Sampah	Jumlah jenis kegiatan pemanfaatan sampah yang dilakukan	3 jenis	3 jenis	100.00%			
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah jenis kegiatan penanganan sampah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	100.00%			
2.11.11.2.01		Dinas Lingkungan Hidup			Jumlah jenis sarana dan prasarana persampahan yang disediakan dan dikelola	4 jenis	4 jenis	100.00%			
855		Dinas Lingkungan Hidup		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/T PST / SPA Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pelaksanaan operasional pengangkutan sampah	267 lokasi	276 lokasi	103.37%			
					Jumlah lokasi pelaksanaan pembersihan sampah	939 lokasi	973 lokasi	103.62%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
856		Dinas Lingkungan Hidup		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Rumah Kompos/PLTSa/TPS 3R yang dikelola	39 lokasi	40 lokasi	102.56%			
1623		Dinas Lingkungan Hidup		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi prasarana kebersihan yang dikelola	190 lokasi	193 lokasi	101.58%			
02.12.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	85.77%	88.91%	103.66%			1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan asistensi melalui rapat koordinasi secara rutin.
2.12.01.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100.00%			2. Pelayanan pendaftaran dan pemutakhiran identitas penduduk diwujudkan melalui sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dimana pelaksanaannya telah tersebar diseluruh wilayah Kota Surabaya yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 31 Kantor Kecamatan, 154 Kantor Kelurahan, pemberian pelayanan secara jemput bola secara langsung kepada masyarakat, pengajuan permohonan secara mandiri, serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat terkait dengan usulan kebutuhan dan pemenuhan blangko ktp-el.
1556		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100.00%			3. Koordinasi dengan Kemenag Surabaya dan Pengadilan Agama telah dilakukan dalam program Lontong Kupang Dispendukcapil. Terkait upaya sinkronisasi pencatatan sipil dilakukan koordinasi dengan beberapa lembaga terkait, antara lain dengan KUA, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri.
1634		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Pembahasan, konsultasi dan koordinasi DAK Non Fisik	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			4. Sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh baik melalui media cetak, media elektronik, media online dan secara tatap muka.
2.12.01.2.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1492		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12.01.2.05		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tahun Anggaran 2023 • Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	100%	100%	100.00%			Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menggerakkan kesadaran adminduk melalui program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) sampai dengan level RT. 5. Bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi, difasilitasi oleh Dispendukcapil Surabaya agar mendapatkan akses dan pemanfaatan <i>data ware house</i> Ditjendukcapil Kemendagri 6. Dispendukcapil Surabaya berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran data melalui Jemput bola ke : - SMA/SMK - Rumah Warga yang memiliki keterbatasan fisik - Liponsos dan Panti Sosial lainnya 7. Mengembangkan program Kalimasada agar setiap RT bisa memberikan pemahaman dan pelayanan administrasi kependudukan kepada warganya secara <i>de facto dan de jure</i>
1554		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase sosialisasi administrasi kependudukan melalui media cetak dan elektronik	100%	100%	100.00%			
2.12.01.2.06		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	81.90%	81.90%	Terdapat perubahan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa sehingga berdampak pada realisasi bulanan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
1631		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk menunjang kebutuhan sekretariat Dinas	100%	81.90%	81.90%	Terdapat perubahan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa sehingga berdampak pada realisasi bulanan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
2.12.01.2.08		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00%			
1632		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	95.68%	95.68%	Terdapat perubahan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa sehingga	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarpras di tahun sebelumnya	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									berdampak pada realisasi bulanan	agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi sarpras	
02.12.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	95%	100%	105.26%			
2.12.02.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas	325504 berkas	102.20%			
1540		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	318500 berkas	325504 berkas	102.20%			
2.12.02.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	346050 berkas	388497 berkas	112.27%			
3526		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah berkas permohonan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	346050 berkas	388497 berkas	112.27%			
02.12.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	95%	100.00%	105.26%			
2.12.03.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70080 berkas	73753 berkas	105.24%			
1542		Dinas Kependudukan		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	70080 berkas	73753 berkas	105.24%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Pencatatan Sipil			Pelaporan Peristiwa Penting	Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan					
2.12.03.2.02		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	109176 berkas	129119 berkas	118.27%		
3527		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Berkas Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil yang diterbitkan	109176 berkas	129119 berkas	118.27%		
02.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah layanan kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis IT	65%	79.10%	121.70%		
02.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Persentase jumlah PD/Lembaga yang Melakukan kerjasama	20%	54.55%	272.73%		
02.12.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Persentase kesesuaian data penduduk antara Data Kementrian Bersih dengan data penduduk layanan	95%	97.87%	103.02%		
2.12.04.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	119710 data	119798 data	100.07%		
3532		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	119710 data	119798 data	100.07%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.12.04.2.03		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	11 Lembaga	12 Lembaga	109.09%			
3531		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Lembaga yang bekerjasama	10 Lembaga	11 Lembaga	110.00%			
3534		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan	9 Lembaga	9 Lembaga	100.00%			
2.12.04.2.04		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	32 unit layanan	100.00%			
3533		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Unit layanan yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	32 unit layanan	32 unit layanan	100.00%			
02.12.05		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase jenis informasi yang dimutakhirkan dalam data profil kependudukan	100%	100%	100.00%			
2.12.05.2.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Profil Perkembangan Kependudukan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			
1548		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah penyusunan dokumen profil perkembangan kependudukan	2 kali	2 kali	100.00%			
02.14.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	30.15%	24.45%	81.11%	Belum maksimalnya kehadiran mitra kerja sebagai perwakilan sekolah tingkat SLTP/MTS	DP3APPKB akan secara aktif melakukan sosialisasi sekolah siaga kependudukan bagi SMP/MTS yang kurang aktif dalam kegiatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana	Tahun Anggaran 2022								terhadap perempuan dan anak kepada satgas PPA di 31 Kecamatan dan relawan PKBM di 153 kelurahan 2) kegiatan Training of Trainee (ToT) berupa transfer knowledge dari psikolog ke satgas PPA dan relawan PKBM. 2. Jumlah Kelurahan Ramah Anak pada tahun 2022 bertambah sebanyak 42 Kelurahan sehingga total Kelurahan Ramah Anak di Kota Surabaya sebanyak 95 Kelurahan. Dalam rangka meningkatkan capaian Kelurahan Ramah Anak (KLA) dan Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KPKAS) telah dilaksanakan Rebranding KLA dan KPKAS dengan menambahkan Aspek Indikator Ramah Perempuan dan Anak. 3. Pada Tahun 2022, seluruh Kecamatan merupakan Kecamatan responsif Gender. DP3APPKB telah berhasil mengupayakan seluruh 154 Kelurahan untuk menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk meningkatkan capaian Kelurahan Responsif Gender, dilakukan upaya sosialisasi secara menyeluruh terhadap pemangku kepentingan melalui kegiatan Capacity Building Vocal Point. 4. DP3APPKB telah melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui kader kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menjadi peserta KB. Selain itu, DP3APPKB telah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang siap memberikan pelayanan pelayanan KB menjadi 183 fasilitas kesehatan (Rumah
2.14.02.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	70 Sekolah	54 Sekolah	77.14%	konsistensi kehadiran audien pada kegiatan sekolah siaga kependudukan belum maksimal	DP3APPKB akan secara aktif melakukan sosialisasi sekolah siaga kependudukan bagi SMP/MTS yang kurang aktif dalam kegiatan	
1684		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	140 Orang	133 Orang	95.00%	konistensi kehadiran audien pada kegiatan sekolah siaga kependudukan belum maksimal	DP3APPKB akan secara aktif melakukan sosialisasi sekolah siaga kependudukan bagi SMP/MTS yang kurang aktif dalam kegiatan	
2.14.02.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	100.00%			
1685		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
4386		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022								sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri bidan).
02.14.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18.55%	21.39%	84.68%	1. Ditemukan adanya masalah, baik masalah kesehatan maupun persetujuan pasangan yang menyebabkan sasaran pasangan usia subur tidak memungkinkan untuk menggunakan alat kontrasepsi. 2. Belum optimalnya kepesertaan KB pria	Di Tahun 2023 akan dilakukan penambahan fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan KB serta menggandeng kelompok juang kencana dan paguyuban wira pertiwi untuk meningkatkan partisipasi dari pria untuk ber-KB	
02.14.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	82%	93.41%	113.92%			
2.14.03.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31 kecamatan	31 kecamatan	100.00%			
4384		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	1 Laporan	1 Laporan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana		(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						
4385		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan	100.00%			
2.14.03.2.02		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12 Kali	12 Kali	100.00%			
3064		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	12 kali	12 kali	100.00%			
3065		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1566 Orang	1566 Orang	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Keluarga Berencana									
2.14.03.2.03		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	303734 Orang	303968 Orang	100.08%			
3063		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	301784 Orang	303968 Orang	100.72%			
3066		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	37 Unit	37 Unit	100.00%			
3067		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	1950 orang	2184 orang	112.00%			
2.14.03.2.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	4 Laporan	4 Laporan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							
3069		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00%			
4377		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31 Kecamatan	31 Kecamatan	100.00%			
02.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	20 tahun	23.33 tahun	116.65%			
02.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase balita yang mengikuti PAUD	41.53%	41.52%	99.97%	Belum banyak anak berusia pra PAUD (0-3th) yang diikutsertakan pada kegiatan PAUD	DP3APPKB akan meningkatkan sosialisasi kepada orang tua terkait pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini bagi balita.	
02.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan			Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	39.24%	116.32%	296.43%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
02.14.04		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	40%	42.86%	107.14%			
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	1 laporan	1 laporan	100.00%			
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	1 laporan	1 laporan	100.00%			
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 laporan	1 laporan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.14.04.2.01		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	1 laporan	1 laporan	100.00%			
1676		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	160 keluarga	160 keluarga	100.00%			
1678		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	14 keluarga	14 keluarga	100.00%			
1679		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	28 paket	28 paket	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	16 paket	16 paket	100.00%			
1681		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	31 kecamatan	31 kecamatan	100.00%			
3023		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	344 keluarga	344 keluarga	100.00%			
					Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	113 keluarga	113 keluarga	100.00%			
					Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	54 keluarga	54 keluarga	100.00%			
02.15.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	92%	91.96%	99.95%	Pengadaan barang / jasa terkendala komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang mengakibatkan	Optimalisasi perencanaan pemenuhan pelayanan kesekretariatan	1. Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui SITS (Surabaya Intelligence Traffic System) menggabungkan aplikasi SCATS, CCTV, ETLE, dan Sistem Informasi lainnya (Google Maps, Waze, dll) agar mampu



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022						proses pengadaan mengalami keterlambatan		mendeteksi adanya potensi kepadatan / peningkatan lalu lintas baik di suatu ruas jalan maupun persimpangan. Selain itu kondisi lalu lintas di lapangan terpantau melalui laporan masyarakat lewat layanan 112 Command Center maupun aplikasi Wargaku Surabaya dan media lainnya . Dengan dukungan Command Center dan SITS, penguraian pada titik-titik ruas jalan dan persimpangan yang mengalami kepadatan dapat dilakukan dengan efektif sehingga hambatan di lapangan dipastikan selesai.
2.15.01.2.02		Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
467		Dinas Perhubungan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.15.01.2.06		Dinas Perhubungan	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%	100.00%			
923		Dinas Perhubungan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	75.62%	75.62%	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran terkendala oleh Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
2.15.01.2.08		Dinas Perhubungan	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	100%	100.00%			
722		Dinas Perhubungan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Umum	100%	100%	100.00%			
02.15.02		Dinas Perhubungan	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	40 km/jam	40.2072 km/jam	100.52%			
02.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	48.65%	50.77%	104.36%			2. Untuk penempatan petugas lapangan, diupayakan mendekati tempat tinggal (domisili) selain itu penempatan petugas lapangan juga diprioritaskan dengan tujuan pemerataan kualitas layanan diseluruh wilayah kota Surabaya 3. Realisasi pembangunan PJU dilakukan secara bertahap baik dg swakelola maupun dengan anggaran pemasangan PJU melalui APBD Kota Surabaya 4. Optimalisasi dan respon terhadap gangguan PJU sudah terbagi atas beberapa rayon sehingga diharapkan ada percepatan dalam penanganan gangguan PJU 5. Bahwa pembayaran Surabaya Bus tetap berdasarkan perwali 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya dan untuk yang perwali 56 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Bus Surabaya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 6. Selain dari pembayaran dengan botol air minum bekas, berdasarkan Peraturan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.15.02		Dinas Perhubungan	Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Persentase kepuasan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum perkotaan di Kota Surabaya	80%	82.86%	103.58%			Walikota No. 056 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Bus Surabaya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya disebutkan bahwa tarif layanan Suroboyo Bus dikenakan sebesar Rp. 5000 untuk masyarakat umum, Rp. 2500 untuk pelajar dan mahasiswa. 7. a. Dinas Perhubungan telah Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas di lapangan untuk mengurangi kemacetan b. Perlunya dilakukan penyusunan Transport Demand Management (TDM) untuk penataan transportasi secara menyeluruh di Kota Surabaya
02.15.02		Dinas Perhubungan			Persentase kepuasan masyarakat terkait operasional Prasarana dan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	80%	80.25%	100.32%			
2.15.02.2.02		Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan di Kota Surabaya	31 Kawasan	31 Kawasan	100.00%			
2.15.02.2.02		Dinas Perhubungan			Penyelenggaraan Prasarana Jalan di Kota Surabaya	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00%			
1648		Dinas Perhubungan		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU hemat energi yang terpasang	3000 Unit	3002 Unit	100.07%			
					Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun	3 Bangunan	6 Bangunan	200.00%			
1649		Dinas Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang direhabilitasi	6 Lokasi	9 Lokasi	150.00%			
					Jumlah rekening listrik PJU yang dibayarkan	7447 Rekening	7455 Rekening	100.11%			
					Jumlah titik PJU yang dipelihara	93252 Titik	93252 Titik	100.00%			
1650		Dinas Perhubungan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Diadakan dan Dipasang	2500 Unit	2506 Unit	100.24%			
1651		Dinas Perhubungan		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jenis Perlengkapan Jalan yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	100.00%			
2.15.02.2.03		Dinas Perhubungan		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Angkutan Umum	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang Dikelola selama 12 bulan						
316		Dinas Perhubungan		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jam Pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Kota Surabaya	14 Jam	14 Jam	100.00%			
2.15.02.2.04		Dinas Perhubungan		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	60 Berkas	44 Berkas	73.33%	kurangnya kesadaran dan peran serta pelaku usaha untuk mengurus izin penyelenggaraan tempat parkir di persilnya, baik yang perpanjangan izin maupun izin baru	Melakukan sosialisasi pentingnya pengurusan perijinan parkir swasta serta mengirimkan surat pemberitahuan untuk perijinan yg kadaluarsa, maupun yg mendekati habis masa berlakunya	
1652		Dinas Perhubungan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perparkiran di Wilayah Kota Surabaya (Baik Lokasi Parkir TJU maupun PTK)	1821 Titik	1821 Titik	100.00%			
2.15.02.2.05		Dinas Perhubungan		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji KIR	134525 Unit	134918 Unit	100.29%			
1653		Dinas Perhubungan		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang Melaksanakan Uji KIR di Lokasi Pengujian Kendaraan Bermotor	146069 Unit	138964 Unit	95.14%	1. Adanya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran Muatan (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) sehingga banyak kendaraan yang Over Dimensi tidak mengujikan kendaraannya 2.	Karena terdapat Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan Nomor No. 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan terhadap mobil barang atas pelanggaran Muatan (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension) yang menyebabkan pemilik kendaraan yang Over Dimension tidak mengujikan kendaraannya,	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									Banyaknya kendaraan Taksi dan Angkot yang dirubah menjadi plat hitam sehingga terjadi penurunan jumlah kendaraan yang melakukan uji kir	Sehingga menggenjot dan memberikan informasi yang jelas kepada pemilik kendaraan bahwa pentingnya melakukan pengujian kendaraan.	
2.15.02.2.06		Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Angkutan Jalan yang Diawasai dan Dikendalikan	7 Jenis	7 Jenis	100.00%			
2.15.02.2.06		Dinas Perhubungan			Jumlah Implementasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	10 Lokasi	10 Lokasi	100.00%			
320		Dinas Perhubungan		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Yang Tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	100.00%			
321		Dinas Perhubungan		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Selama 12 Bulan	365 Kali	365 Kali	100.00%			
2.15.02.2.09		Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan angkutan umum di Kota Surabaya	3 Koridor	4 Koridor	133.33%			
2.15.02.2.09		Dinas Perhubungan			Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Abdi Yasa Teladan	75 Orang	75 Orang	100.00%			
310		Dinas Perhubungan		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Perizinan Angkutan Umum Perkotaan	365 Kali	365 Kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
469		Dinas Perhubungan		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Transportasi Umum yang Diselenggarakan	28 Unit	28 Unit	100.00%			
					Transportasi Pelajar yang Diselenggarakan	8 Unit	8 Unit	100.00%			
2.15.02.2.11		Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan umum perkotaan	1 Jaringan	1 Jaringan	100.00%			
311		Dinas Perhubungan		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Angkutan Umum Perkotaan yang Dilaksanakan	9 Dokumen	9 Dokumen	100.00%			
02.15.03		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Transportasi Perairan	100%	100%	100.00%			
2.15.03.2.04		Dinas Perhubungan		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi Keselamatan Angkutan Perairan	2 Kali	2 Kali	100.00%			
324		Dinas Perhubungan		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Transportasi Perairan	200 Orang	200 Orang	100.00%			
02.15.05		Dinas Perhubungan		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyelenggaraan Keselamatan Perkeretaapian	100%	100%	100.00%			
2.15.05.2.01		Dinas Perhubungan		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Sosialisasi	2 Kali	2 Kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Keselamatan Angkutan Perkeretaapian						
326		Dinas Perhubungan		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Orang yang Mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Keselamatan Perkeretaapian	50 Orang	50 Orang	100.00%			
02.16.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	89.54%	91.15%	101.80%			1. Pembinaan telah secara rutin dilakukan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk peningkatan kapasitas SDM, seperti : Pelatihan penulisan blog, pembuatan vlog, literasi digital, dll dengan narasumber yang kompeten. Selain itu dilaksanakan lomba foto dan video terkait potensi kewilayahan. Kader KIM juga masuk menjadi Kader Surabaya Hebat, sehingga mendapatkan fasilitasi honor untuk semakin memacu kinerja KIM sebagai mitra Pemkot Surabaya dalam diseminasi informasi.
2.16.01.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1222		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.16.01.2.06		Dinas Komunikasi dan Informatika		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	95.46%	95.46%	Adanya perubahan regulasi pengadaan barang sehingga berpengaruh pada jadwal pelaksanaan pengadaan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	2. Untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan UMKM Kota Surabaya, Diskominfo bersinergi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam penyediaan aplikasi e-peken dan memasukkan UMKM ke dalam e-peken sehingga mereka mendapatkan market pembeli yang lebih luas untuk meningkatkan penjualan. Saat ini tercatat sebanyak 3.034 UMKM di aplikasi Peken Surabaya. Peken Surabaya juga terdaftar sebagai mitra toko daring LKPP untuk meningkatkan pasar UMKM.
1223		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	4 Jenis	100.00%			3. Penyediaan jaringan internet di RW telah dianggarkan oleh pemerintah kota Surabaya melalui Kecamatan
2.16.01.2.09		Dinas Komunikasi		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan	100%	87.24%	87.24%	Adanya perubahan regulasi pengadaan barang sehingga	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarpras di	4. Masyarakat sudah bisa mendaftar ke Web peken.surabaya.go.id untuk berbelanja kebutuhan pokok di Toko



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Informatika	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		pengadaan sarana perkantoran				berpengaruh pada jadwal pelaksanaan pengadaan	tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi sarpras	5. Kelontong dan Produk UMKM serta SWK. Aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo memperhatikan kebutuhan user dalam hal ini masyarakat. Kemudahan dan kecepatan penggunaan aplikasi menjadi fokus untuk pengembangan User Interface / User Experience. Untuk membantu optimalisasi pelayanan penggunaan aplikasi oleh masyarakat, Pemkot Surabaya juga telah menyediakan BLC (Boardband Learning Center) yang memberikan pelatihan TIK kepada masyarakat Surabaya secara gratis. Disamping memberikan pelatihan TIK, di BLC ini juga memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait semua layanan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya memiliki 53 BLC yang tersebar diseluruh wilayah Surabaya. Sosialisasi juga dilakukan di 31 Kecamatan dan melalui konten di Media sosial milik Pemerintah Kota Surabaya. 6. Untuk membantu optimalisasi pelayanan penggunaan aplikasi oleh masyarakat, Pemkot Surabaya telah menyediakan BLC (Boardband Learning Center) yang memberikan pelatihan TIK kepada masyarakat Surabaya secara gratis. Disamping memberikan pelatihan TIK, di BLC ini juga memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait semua layanan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya memiliki 53 BLC yang tersebar diseluruh wilayah Surabaya. 7. Optimalisasi pemanfaatan saluran komunikasi terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai saluran
1224		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	100.00%			
02.16.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan melalui aplikasi WargaKu ≤ 24 jam	85%	90.09%	105.99%			
2.16.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang diselenggarakan	4 Jenis	4 Jenis	100.00%			
2.16.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika			Kecepatan respon terhadap permohonan informasi atau penjelasan ke PPID ≤ 17 hari kerja	100%	100%	100.00%			
1214		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah kegiatan koordinasi dalam pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi publik	50 Kali	52 Kali	104.00%			
1218		Dinas Komunikasi dan Informatika		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaksanaan kegiatan kemitraan dengan pemangku kepentingan	100 Kali	100 Kali	100.00%			
1219		Dinas Komunikasi		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi yang diupload di media	360 Konten	360 Konten	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Informatika			sosial yang dikelola oleh Diskominfo per tahun						komunikasi (Instagram, facebook, twitter, tik tok, dan youtube) dalam diseminasi informasi program pembangunan disamping melalui rilis yang dikirim ke media. Tahun 2022 capaian kunjungan pemanfaatan saluran komunikasi melebihi target menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dan kemudahan akses saluran komunikasi yang disediakan oleh Diskominfo. 8. Perhitungan potensi pendapatan pelaku usaha e-peken telah dilakukan. Saat ini Peken Surabaya telah menjadi Mitra Toko Daring LKPP sehingga Perangkat Daerah bisa melakukan belanja kebutuhan kantor melalui Peken. Saat ini juga sedang berproses untuk fasilitasi jasa kirim dengan beberapa perusahaan jasa pengiriman. 9. Diskominfo telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perubahan materi sosialisasi informasi di traffic light agar menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat. 10. Konten-konten yang dipublikasikan melalui website dan media sosial terus dimutakhirkan dan konsepnya kekinian, sehingga menarik bagi publik untuk mengakses konten tersebut. 11. Diskominfo memiliki peran/support pada TIK. Upaya perbaikan teknologi pada pelayanan Call Center terus dilakukan, sebagai contoh agar penerimaan telepon masuk ke 112 lebih mudah dan lancar, teknologi SIMbox diganti dengan teknologi SIPTrunk, yang membantu meningkatkan kapasitas penerimaan telepon dan telah dapat menerima panggilan dari seluruh operator.
					Jumlah pelaksanaan publikasi melalui media	2942 Kali	3096 Kali	105.23%			
02.16.03		Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemenuhan penanganan insiden layanan SPBE yang telah ditangani.	100%	100%	100.00%			
2.16.03.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah a. Jaringan non FO $\leq 1 \times 24$ jam b. Jaringan FO $\leq 3 \times 24$ jam	100%	100%	100.00%			
1211		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah lokasi sistem jaringan intra pemerintah daerah yang dibangun dan/atau dipelihara dan pengembangan sarana dan prasarana TIK	220 lokasi	249 lokasi	113.18%			
2.16.03.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat data yang mengelola satu server	2 Pusat data	2 Pusat data	100.00%			
2.16.03.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika			Persentase penanganan gangguan terkait TIK yang dilaporkan oleh perangkat daerah terkait aplikasi $\leq 1 \times 24$ jam	100%	100%	100.00%			
1202		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan	Jumlah PD yang mendapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan	58 PD	58 PD	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Komunikasi Pemerintah Daerah	kompetensi sumber daya TIK (service desk tier 1 dan tier 2)						12. Pemanfaatan CCTV telah dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini dapat dilihat bahwa pemeliharaan CCTV yang dikelola Diskominfo ditangani langsung oleh tim Diskominfo sehingga dalam maintenance lebih efektif dan efisien. Terkait penyediaan jaringan fiber optik terus dilakukan setiap tahun.
1206		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dilakukan pemantauan dan evaluasi dalam pemanfaatan TIK	58 PD	58 PD	100.00%			
1209		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pengelolaan / pengembangan aplikasi / proses bisnis	190 Aplikasi	190 Aplikasi	100.00%			13. Konten dalam website surabaya.go.id terus dimutakhirkan terhadap kegiatan, program, dan layanan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuannya, agar website surabaya.go.id dapat menjadi rujukan dalam mencari informasi seputar Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Surabaya.
1210		Dinas Komunikasi dan Informatika		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengecekan Pusat Data yang dikelola	364 Kali	378 Kali	103.85%			
02.17.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	90.48%	101.66%			1. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) berperan aktif dalam usaha peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam kegiatan UMKM melalui berbagai kegiatan meliputi pendampingan manajemen usaha dan pemberian intervensi untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan berupa bimbingan teknis terkait pengelolaan manajemen usaha serta fasilitasi kemitraan agar pelaku usaha mikro dapat mengakses sumber daya modal usaha yang dibutuhkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dinkopdag berupaya agar pelaku usaha mikro binaan memiliki mindset pengusaha yang tangguh, ulet, kreatif, dan menghasilkan produk yang memiliki daya saing.
2.17.01.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
3403		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.17.01.2.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Perkantoran	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
2.17.01.2.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			2. Dalam hal pemasaran produk, Dinkopdag memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui sarana yang



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Perdagangan	Tahun Anggaran 2022								dimiliki seperti Surabaya Kriya Gallery (SKG) dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) serta mengikutsertakan pelaku usaha mikro binaan dalam berbagai macam pameran. Dinkopdag menilai bahwa pada era digital ini, tren pemasaran produk pun bergeser menjadi pemasaran digital, sehingga berbagai upaya dan kerjasama dilakukan yang berfokus pada kegiatan ecommerce, termasuk pemanfaatan e-peken.
3424		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00%			
3425		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	98.19%	98.19%	Terkendala pengadaan untuk TKDN yang belum dapat dipenuhi oleh penyedia (stok barang di pasaran tidak ada yang sesuai spesifikasi TKDN)	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	
02.17.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	15%	15.90%	106.02%			
2.17.02.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	100.00%			
3420		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi guna memperoleh izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.17.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	67%	86.02%	128.39%			
2.17.03.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	415 koperasi	100.00%			
3421		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	415 koperasi	415 koperasi	100.00%			
02.17.05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	14%	14.38%	102.70%			
2.17.05.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	179 Orang	179 Orang	100.00%			
3422		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengelola yang mendapat pendidikan dan pelatihan	179 orang	179 orang	100.00%			
02.17.06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan	20%	20%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					mengembangkan unit usaha						
2.17.06.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	83 koperasi	100.00%			
3423		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengembangan unit usaha	83 koperasi	83 koperasi	100.00%			
02.17.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	9.97%	10.65%	106.82%			
02.17.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	69%	83.67%	121.27%			
2.17.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	135 Orang	135 Orang	100.00%			
2.17.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya	10 sentra	11 sentra	110.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Perdagangan			mendapatkan fasilitas pembinaan						
3427		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kemitraan	135 orang	135 orang	100.00%			
3428		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitas pendampingan peningkatan kualitas produk	10 sentra	11 sentra	110.00%			
02.17.08		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	52%	52.24%	100.46%			
2.17.08.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitas pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang	668 orang	133.60%			
3429		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitas pelatihan dan pendampingan manajemen usaha	525 orang	668 orang	127.24%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
02.18.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	90.26%	101.41%			1. Optimalisasi sistem online dan peningkatan layanan perijinan telah dilakukan melalui: a.SSW Alfa (Surabaya Single Window) dan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach b. Pada tahun 2022, telah disusun draft Perwali yang berhubungan dengan penyederhanaan alur proses perijinan dimulai dari berkas masuk dari Pemohon langsung diteruskan ke PD Teknis untuk verifikasi teknis dan pengesahan dari DPMPTSP c. Penyesuaian terkait percepatan perijinan dan non perijinan, penyederhanaan alur dan durasi pelayanan perijinan menjadi maksimal 1 hari kerja di lingkup DPMPTSP d. Memberikan asistensi dan konsultasi terhadap permasalahan proses pengurusan perijinan berusaha di klinik investasi e. Memberikan pendampingan dan fasilitasi pengurusan perijinan berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil perorangan di 31 kecamatan Kota Surabaya 2. a. Tingginya minat investasi telah didukung dengan promosi investasi baik berupa virtual maupun offline dan meningkatkan media sosial dan videotron untuk mempromosikan kemudahan investasi di Kota Surabaya b.Upaya peningkatan nilai realisasi investasi juga dilakukan melalui JEBOL LKPM (Jemput Bola Laporan Kegiatan Penanaman Modal) ke pelaku usaha yang akan melaporkan LKPM setiap semesternya. c. DPMPTSP
2.18.01.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1494		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.18.01.2.08		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	98.79%	98.79%	pelaksanaan belanja sampai dengan akhir tahun anggaran telah sesuai dengan perencanaan/target awal tahun dan telah terpenuhi, namun penyerapan di awal tahun sempat terkendala dengan adanya penyesuaian regulasi penggunaan TKDN dan PDN dalam belanja daerah.	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	
2.18.01.2.08		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Persentase pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran	100%	78.37%	78.37%	pelaksanaan belanja sampai dengan akhir tahun anggaran telah sesuai dengan perencanaan/target awal tahun dan telah	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022						terpenuhi, namun penyerapan di awal tahun sempat terkendala dengan adanya penyesuaian regulasi penggunaan TKDN dan PDN dalam belanja daerah.	sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi sarpras	menyediakan Peta Potensi dan Peluang Investasi berupa kajian dan website peta potensi untuk ditawarkan kepada calon investor di Kota Surabaya, serta melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan FGD dengan para pelaku usaha menengah besar dalam rangka untuk menjangkau kerjasama kemitraan dengan UMK.
1695		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana perkantoran	100%	78.37%	78.37%	pelaksanaan belanja sampai dengan akhir tahun anggaran telah sesuai dengan perencanaan/target awal tahun dan telah terpenuhi, namun penyerapan di awal tahun sempat terkendala dengan adanya penyesuaian regulasi penggunaan TKDN dan PDN dalam belanja daerah.	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi sarpras	d. DPMPTSP juga melakukan bimtek terkait tata cara pengajuan permohonan perijinan berusaha melalui aplikasi OSS serta bimtek tata cara pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) e. Selain itu DPMPTSP melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perijinan berusaha dan LKPM DPMPTSP bersama dengan Disperinaker telah melakukan penghimbau kepada perusahaan sektor pariwisata untuk menyerap tenaga kerja warga Surabaya diantaranya pada saat desk perijinan dengan pelaku usaha hotel, restoran, dan mall, serta bersama dengan Bakesbangpol melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja di perusahaan PMA/PMDN.
1703		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan Barang dan Jasa	100%	98.79%	98.79%	pelaksanaan belanja sampai dengan akhir tahun anggaran telah sesuai dengan perencanaan/target awal tahun dan telah terpenuhi, namun penyerapan di awal tahun sempat terkendala dengan adanya penyesuaian regulasi penggunaan TKDN dan PDN dalam belanja daerah.	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas	4. a. Tingginya minat investasi telah didukung dengan promosi investasi baik berupa virtual maupun offline dan meningkatkan media sosial dan videotron untuk mempromosikan kemudahan investasi di Kota Surabaya.b.Pemerintah Kota Surabaya juga selalu berupaya menjaga kondusivitas iklim investasi melalui penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. c. DPMPTSP menyediakan Peta Potensi dan Peluang Investasi berupa kajian dan
02.18.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA/PMDN	150 Perusahaan	151 Perusahaan	100.67%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.18.02.2.02		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Usaha Terhadap Peta Potensi dan Peluang Usaha	70%	72.81%	104.01%			website peta potensi untuk ditawarkan kepada calon investor di Kota Surabaya; melakukan pembinaan dan sosialisasi berkaitan pelaporan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja serta mendorong perusahaan untuk memprioritaskan warga Kota Surabaya dalam hal proses rekrutmen tenaga kerjanya; serta melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan FGD dengan para pelaku usaha menengah besar dalam rangka untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja seperti kegiatan Job Market Fair (Bursa Kerja) serta program Website Siap Kerjo serta menjangkau kerjasama kemitraan dengan UMK.
965		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peluang dan Potensi Investasi Kota Surabaya	4 Dokumen	5 Dokumen	125.00%			
02.18.03		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Calon Investor / Investor yang Mempunyai Minat Berinvestasi	50%	58.82%	117.65%			
2.18.03.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Investor / Investor Yang Memperoleh Informasi Peluang dan Potensi Investasi	200 Calon Investor / Investor	221 Calon Investor / Investor	110.50%			
967		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Investasi Yang Dilaksanakan	3 Pameran	4 Pameran	133.33%			
02.18.04		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	100%	99.35%	99.35%	1. Perhitungan durasi waktu proses penerbitan SKRK dan IMB untuk Non Rumah Tinggal dipersamakan antara Non RT Sederhana dan Non RT pengembang, yang mana tahapan teknis pemrosesan Non RT Pengembang lebih kompleks, sehingga	1. Mengevaluasi realisasi nilai investasi daerah pada tahun 2022 sebagai upaya pemetaan pelaku usaha yang melaporkan LKPM 2. Berkomunikasi lebih lanjut kepada BKPM RI agar untuk menentukan realisasi di tahun depan sesuai dengan perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									terjadi keterlambatan SK Terbit; 2. Adanya ketentuan/peraturan baru terkait rekomendasi yang menjadi salah satu syarat penerbitan IMB, sehingga membutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan PD teknis yang membidangi	3. Menggandeng OPD terkait, asosiasi/ kelompok usaha untuk memperluas informasi terkait kewajiban LKPM	
2.18.04.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	80000 berkas	90564 berkas	113.21%			
2.18.04.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 pelaku usaha	11734 pelaku usaha	106.67%			
962		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang ijin usahanya diawasi	11000 Pelaku Usaha	11734 Pelaku Usaha	106.67%			
970		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah berkas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	80000 berkas	90564 berkas	113.21%			
02.18.05		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan	42%	50.46%	120.14%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Terpadu Satu Pintu			dengan perusahaan yang mengikuti bimbingan teknis						
2.18.05.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang telah di bimtek maupun yang belum mengikuti bimtek	1100 perusahaan	1111 perusahaan	101.00%			
1096		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan ke lokasi proyek penanaman modal (DAK)	170 proyek	170 proyek	100.00%			
					Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan penanaman modal (APBD)	2700 perusahaan	2706 perusahaan	100.22%			
1097		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi	258 peserta	327 peserta	126.74%			
02.18.06		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	jumlah permohonan pemanfaatan data investasi dan penanaman modal	20 lembaga	21 lembaga	105.00%			
2.18.06.2.01		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan evaluasi kinerja penanaman modal	300 perusahaan	309 perusahaan	103.00%			
994		Dinas Penanaman		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah data investasi yang dikelola	46054 data	46167 data	100.25%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
02.19.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	20%	20.07%	100.35%			1. Hingga saat ini sudah terdapat 172 lapangan futsal terbangun yang tersebar di berbagai wilayah dan pemanfaatan lapangan olahraga tersebut akan terus dioptimalkan melalui kegiatan event dan lomba di tingkat masyarakat b. Penambahan pembangunan lapangan futsal di berbagai wilayah untuk pemerataan fasilitas olahraga sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan perlombaan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaraan masyarakat yang menggunakannya dengan baik dan teratur untuk masyarakat Kota Surabaya 2. Pembangunan Fasilitas olahraga tetap dilakukan sehingga lapangan olahraga yang telah terbangun sampai tahun 2022 di Kota Surabaya sejumlah 603 Lapangan Olahraga yang terdiri dari berbagai jenis lapangan antara lain futsal, bulu tangkis, tenis, softball, hockey, basket, voli, sepak bola, kolam renang, atletik, sirkuit, dan Gedung Olahraga. Dengan adanya Sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan Kegiatan event dan lomba serta dimanfaatkan oleh Cabang Olahraga untuk penjangkaran event bibit atlet berkolaborasi dengan KONI, KORMI dan NPC. 3. Total penerima beasiswa Mahasiswa sebanyak 2.486 orang telah disalurkan melalui Perguruan Tinggi masing-masing.
02.19.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase pemuda yang menjadi wirausaha mandiri	20%	20.11%	100.53%			
02.19.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	46.48%	46.49%	100.02%			
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Daya Saing Wira Usaha Pemula	2 jenis	2 jenis	100.00%			
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	33 jenis	33 jenis	100.00%			
2.19.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah laporan hasil studi mahasiswa yang diterima	28791 laporan	16458 laporan	57.16%	1. Jumlah laporan menyesuaikan dengan jumlah penerima beasiswa 2. Banyak pendaftar penduduk luar kota Surabaya 3. Banyak siswa dan mahasiswa sudah	1. Memperluas jangkauan sosialisasi terkait program beasiswa pemuda tangguh melalui sekolah, MKKS, media sosial serta kelurahan dan kecamatan. 2.	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022						mendapatkan beasiswa sejenis	Mendorong perguruan tinggi swasta untuk menyiapkan mekanisme triple helix sehingga bisa memenuhi persyaratan kerjasama beasiswa pemuda tangguh	4. Sampai dengan saat ini, Disbudporapar telah menyediakan sekretariat bersama yang dapat digunakan semua organisasi pemuda yang belokasi di Gelanggang Remaja. 5. Intervensi Kegiatan Pembinaan atlet telah dilaksanakan Bersama dengan KONI Kota Surabaya dengan pemberian Reward Atlet dan Pelatih di setiap Kejuaraan Propinsi, Kejuaraan Nasional maupun Kejuaraan Internasional selain itu Program Latihan dan perkembangan atlit dipantau oleh DISBUDPORAPAR bersama KONI Kota Surabaya melalui Kegiatan Pusat Latihan cabang Olahraga (PUSLATCAB) Bagi Atlet dan Pelatih PUSLATCAB sehingga KONI Kota Surabaya mempunyai data dasar Perkembangan Atlit Kota Surabaya 6. Disbudporapar berkoordinasi dengan KONI terkait JAPRES (Jalur Prestasi) berdasarkan surat pengantar dari Cabang Olahraga yang disetujui berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KONI. Sebelum PPDB DISBUDPORAPAR telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Penerimaan JAPRES sehingga DISBUDPORAPAR dan KONI Kota Surabaya menentukan aturan yang akan dilakukan. 7. Total penerima beasiswa SMA/SMK sederajat sebanyak 13.862 orang. Optimalisasi pemberian beasiswa telah dilakukan melalui perluasan jangkauan untuk pendaftaran berbasis online. Selain itu, untuk perluasan penyebaran informasi bahwa ada program pemberian beasiswa melalui
3412		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Daya Saing Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	34 kegiatan	34 kegiatan	100.00%			
3413		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Kegiatan Wirausaha Muda Pemula	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100.00%			
3415		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	40 kegiatan	40 kegiatan	100.00%			
3416		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah penerima beasiswa pendidikan	28791 orang	16458 orang	57.16%	1. Jumlah laporan menyesuaikan dengan jumlah penerima beasiswa 2. Banyak pendaftar penduduk luar kota Surabaya 3. Banyak siswa dan mahasiswa sudah mendapatkan beasiswa sejenis	1. Memperluas jangkauan sosialisasi terkait program beasiswa pemuda tangguh melalui sekolah, MKKS, media sosial serta kelurahan dan kecamatan. 2. Mendorong perguruan tinggi swasta untuk menyiapkan mekanisme triple helix sehingga bisa memenuhi persyaratan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										kerjasama beasiswa pemuda tangguh	media sosial dan sekolah-sekolah lewat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)
02.19.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	164 medali	354 medali	215.85%			8. a. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga terus dilakukan agar keandalan prasarana dan sarananya selalu laik fungsi dan dilakukan upaya perawatan sarana dan prasarana olahraga berupa memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar sarana prasarana tetap laik fungsi. Untuk Penyediaan Fasilitas Kolam Renang hanya 1 lokasi yaitu di Jambangan, untuk Saat ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berfokus pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas kolam renang tersebut. b. Dilakukan Perbaikan sarana dan prasarana secara rutin maupun jangka waktu tertentu menyesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang tersebar di kota Surabaya. Untuk Kolam Renang yang terbangun hanya 1 Kolam renang yang terletak di Jambangan, untuk Saat ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berfokus pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas kolam renang tersebut dan melakukan kajian pengembangan fasilitas Kolam renang tersebut.
02.19.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase Penambahan dan Peningkatan Fasilitas Olahraga	10%	10%	100.00%			
2.19.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah yang memperoleh penambahan prasarana olahraga	10 kecamatan	10 kecamatan	100.00%			
3525		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Olahraga yang Dibangun dan Ditingkatkan	30 unit	30 unit	100.00%			
2.19.03.2.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	42 cabang olahraga	43 cabang olahraga	102.38%			
3408		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Olahraga Prestasi yang diselenggarakan	50 kegiatan	50 kegiatan	100.00%			
2.19.03.2.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah jenis pengembangan dan Peningkatan kualitas SDM olahraga rekreasi	12 jenis	12 jenis	100.00%			
2.19.03.2.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan			Jumlah Prasarana Olahraga yang	263 lokasi	263 lokasi	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Olah Raga serta Pariwisata			Difasilitasi dan Dipelihara						
3409		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	12 kegiatan	12 kegiatan	100.00%			
3410		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana olahraga yang dilakukan	286 kali	286 kali	100.00%			
02.20.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data statistik sektoral yang terpenuhi	100%	100%	100.00%			
2.20.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sektor yang dianalisa	5 Sektor	5 Sektor	100.00%			
1220		Dinas Komunikasi dan Informatika	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah kegiatan pengumpulan data statistik sektoral	12 Kali	12 Kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 • Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022								
02.21.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan keamanan informasi	8%	13.79%	172.41%			
2.21.02.2.01		Dinas Komunikasi dan Informatika	• Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan patroli keamanan data di server Dinas Komunikasi dan Informatika	3 kali/per hari	3.01 kali/per hari	100.33%			
1213		Dinas Komunikasi dan Informatika		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengawasan keamanan informasi	13 PD	13 PD	100.00%			
2.21.02.2.02		Dinas Komunikasi dan Informatika	• Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi komunikasi sandi antar PD yang diselenggarakan	6 Kali	6 Kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1212		Dinas Komunikasi dan Informatika	2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 • Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 • Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana sistem persandian perkotaan yang dikelola	1489 Unit	1576 Unit	105.84%			
02.22.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	• Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	90.78%	102.00%			1. Untuk memperkenalkan bangunan cagar budaya kepada anak-anak muda dilaksanakan melalui sekolah kebangsaan yang diadakan di tempat cagar budaya serta mempublikasikan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2.22.01.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			narasi sejarah melalui website dan media sosial Disbudporapar sehingga anak-anak muda dapat mengetahui, menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya. Selain itu juga mengoptimalkan pemanfaatan bis SSCT (Surabaya Shopping and Culinary Track) untuk mengunjungi tempat-tempat cagar budaya di Kota Surabaya sehingga anak-anak muda mengetahui sejarah dari bangunan cagar budaya yang dikunjungi. 2. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa event, antara lain Parade Surabaya Juang, Heroic Track (Wisata Kepahlawanan) dan Sekolah Kebangsaan, Perobekan Bendera di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan yang termasuk di dalamnya napak tilas. Pengenalan napak tilas sejarah, tokoh dan pahlawan di Kota Surabaya juga dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum, dimana didalamnya terdapat Pameran Museum dan Pameran Keliling. 3. Pengembalian fungsi cagar budaya ke fungsi semula dan revitalisasi cagar budaya ditindaklanjuti melalui Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dimana tahun 2022 terdapat 266 cagar budaya yang dilakukan monitoring dan evaluasi.
3385		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.22.01.2.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran.	100%	95.43%	95.43%	Terkendala adanya peralihan dari tanda tangan manual menjadi tanda tangan elektronik, sehingga SP2D tertunda melebihi tanggal 10.	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	
2.22.01.2.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022								
2.22.01.2.08		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	83.07%	83.07%	Terkendala adanya regulasi pembelian barang/jasa ber-TKDN dalam sistem pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan perubahan penjadwalan proses pembelian barang dan direncanakan sampai akhir desember dapat terealisasi	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	
3386		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan	66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		dan Olah Raga serta Pariwisata	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022								
3387		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	3 jenis	3 jenis	100.00%			
02.22.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal	60%	60%	100.00%			
2.22.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan budaya daerah	450 kali	451 kali	100.22%			
3378		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan event budaya daerah	450 kali	451 kali	100.22%			
2.22.02.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan tradisi budaya lokal	3 kali	3 kali	100.00%			
3379		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah pelaksanaan festival budaya lokal	3 kali	3 kali	100.00%			
02.22.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	59.10%	59.16%	100.10%			
2.22.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	770 kali	770 kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3380		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional yg difasilitasi	770 kali	770 kali	100.00%			
02.22.04		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase siswa yang memahami materi sejarah	72%	73.39%	101.93%			
2.22.04.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Event yang bertema sejarah dan kepahlawanan	10 kali	10 kali	100.00%			
3384		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah pelaksanaan event peningkatan akses masyarakat terhadap nilai sejarah	10 kali	10 kali	100.00%			
02.22.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang masih sesuai dengan kaidah pelestarian	92.04%	95.86%	104.16%			
2.22.05.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan kaidah pelestarian	266 lokasi	266 lokasi	100.00%			
3377		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dimonitoring sesuai dengan kaidah pelestarian	266 lokasi	266 lokasi	100.00%			
02.22.06		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase museum yang berhasil dikembangkan	100%	100%	100.00%			
2.22.06.2.01		Dinas Kebudayaan,		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang dikembangkan,	8 lokasi	8 lokasi	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
		Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			dipelihara dan disediakan sarana penunjang						
3381		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang dipelihara dan disediakan sarana penunjang	2 lokasi	2 lokasi	100.00%			
3382		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah museum yang dikembangkan	2 lokasi	2 lokasi	100.00%			
3383		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah kegiatan program publik yang dilaksanakan di Museum 10 November dan dr. Soetomo	8 kegiatan	8 kegiatan	100.00%			
3468		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah museum yang ditingkatkan sarana dan prasarananya	7 lokasi	7 lokasi	100.00%			
02.23.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.05%	94.98%	99.93%	Berdasarkan kondisi dan skala prioritas pemenuhan pelayanan kesekretariatan	Optimalisasi perencanaan pemenuhan pelayanan kesekretariatan	- Pada tahun anggaran 2022, untuk menambah koleksi buku telah dilaksanakan pengadaan e-book pada sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka. - Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah TBM yang ada sebanyak 530 TBM. - Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapat bantuan buku Braille dari Kapolda Jatim dan Kementerian Sosial . Dalam rangka optimalisasi layanan baca yang lebih inklusif, pada tahun 2023 direncanakan fasilitas buku suara (voice book) di Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Surabaya untuk melayani pemustaka berkebutuhan khusus (Tuna Netra).
2.23.01.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
802		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
2.23.01.2.06		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	77.31%	77.31%	Beberapa pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor memperhitungkan prioritas pemenuhan kebutuhan sehingga beberapa realisasi	Perencanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor akan disesuaikan dengan hasil analisa	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022						tidak sesuai F1 namun realisasi output telah sesuai target	kebutuhan yang terinci dalam F1.	
877		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	77.31%	77.31%	Beberapa pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor memperhitungkan prioritas pemenuhan kebutuhan sehingga beberapa realisasi tidak sesuai F1 namun realisasi output telah sesuai target	Perencanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor akan disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan yang terinci dalam F1.	
2.23.01.2.07		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	73.58%	73.58%	Beberapa pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor memperhitungkan prioritas pemenuhan kebutuhan sehingga beberapa realisasi tidak sesuai F1 namun realisasi output telah sesuai target	Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor akan disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan yang terinci dalam F1.	
814		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	73.58%	73.58%	Beberapa pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor memperhitungkan prioritas pemenuhan kebutuhan sehingga beberapa realisasi tidak sesuai F1 namun realisasi output telah sesuai target	Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor akan disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan yang terinci dalam F1.	
2.23.01.2.08		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
876		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penyelenggaraan Perpustakaan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00%			
878		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100.00%			
02.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase event literasi yang diselenggarakan	19.20%	19.20%	100.00%			
02.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase pemenuhan koleksi buku baru sesuai dengan hasil analisis kebutuhan	19.95%	56.13%	281.37%			
02.23.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	56.28%	57.92%	102.92%			
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis buku yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100.00%			
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Jumlah perpustakaan / layanan baca yang dibina	251 Lembaga	251 Lembaga	100.00%			
2.23.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			Tingkat Kepuasan Pemustaka	81.5 nilai	81.78 nilai	100.34%			
727		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dikelola	1494 lokasi	1494 lokasi	100.00%			
736		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar sesuai kewenangannya yang dibina	50 lembaga	50 lembaga	100.00%			
737		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan baca yang dibina	200 lembaga	201 lembaga	100.50%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
738		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan yang dibina	500 orang	502 orang	100.40%			
739		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka	4210 Exemplar	4210 Exemplar	100.00%			
2.23.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bibit penulis dan pendongeng	3493 orang	3637 orang	104.12%			
740		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah kegiatan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	240 kali	242 kali	100.83%			
02.24.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	27.66%	27.93%	100.98%			
02.24.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Persentase Instansi yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	52.07%	52.11%	100.08%			
02.24.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10.16%	10.35%	101.92%			
2.24.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsipnya	10226 item	10226 item	100.00%			
2.24.02.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Jumlah PD dan BUMD yang memperoleh nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan kategori Cukup	42 lembaga	48 lembaga	114.29%			
1892		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah sarana penyimpanan, pengolahan, pemeliharaan dan	19 Item	19 Item	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022		penyelamatan kearsipan yang diadakan						
3136		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah frekuensi pengawasan kearsipan internal perangkat Daerah dan BUMD yang dilakukan	66 Kali	66 Kali	100.00%			
2.24.02.2.02		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip yang dialih mediakan	10020 Lembar	10020 Lembar	100.00%			
1898		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan pendataan dan penataan sistem kearsipan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100.00%			
2.24.02.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	5200 item	5298 item	101.88%			
2.24.02.2.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan evaluasi sistem kearsipan	70 Lembaga	78 Lembaga	111.43%			
1947		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah pelaksanaan layanan informasi kearsipan	40 kali	43 kali	107.50%			
1951		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	PD, Unit Kerja, BUMD yang mendapatkan pendampingan sistem kearsipan	70 Lembaga	78 Lembaga	111.43%			
02.24.03		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang dinilai dan direkomendasikan untuk dimusnahkan	19.95%	97.76%	490.01%			
2.24.03.2.01		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen proses penilaian, penetapan dan pelaksanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tentang Tata Kearsipan Dan Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	pemusnahan arsip yang disusun						
3458		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan proses penilaian, penetapan dalam rangka pelaksanaan pemusnahan arsip	1656 Item arsip	1656 Item arsip	100.00%			



3.1.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintahan Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Pemerintah Kota Surabaya menjalankan urusan pilihan diantaranya Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan dan Perindustrian.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil memaksimalkan pengembangan potensi dan kekhasan daerah dimana terlihat dari program dan kegiatan yang telah mencapai target yang ditentukan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan melalui bidang urusan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Berikut merupakan penjabaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan pilihan pada tahun 2022.



Tabel 3.19
Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
03.25.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang memiliki sarana prasarana perikanan tangkap yang memadai	30%	31.67%	105.56%			- Intervensi sektor hidroponik dan perikanan telah ditindaklanjuti melalui : a. kegiatan pelatihan hidroponik kepada masyarakat termasuk MBR. b. Fasilitasi paket hidroponik kepada kelompok pembudidaya pertanian perkotaan. c. Pelatihan budidaya perikanan maupun perikanan tangkap dengan sasarannya adalah pembudidaya perikanan dan nelayan. - Lahan aset Pemerintah Kota Surabaya telah dimanfaatkan antara lain: 1) Pengembangan budidaya peternakan antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging 2) Penyediaan bibit dan sarana prasarana untuk budidaya melalui sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3)
3.25.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	1 laporan	1 laporan	100.00%			
969		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang diberikan kepada kelompok pelaku usaha perikanan tangkap	50 unit	50 unit	100.00%			
03.25.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah pembudidaya perikanan yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	20 orang/kelompok	22 orang/kelompok	110.00%			
3.25.04.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	32 kali	32 kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1042		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Tahun Anggaran 2023 • Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pelaksanaan pelatihan budidaya perikanan	875 orang	875 orang	100.00%			Budidaya tanaman pangan dan sayuran serta sebagai tempat wisata pertanian dengan melibatkan warga sekitar. 3. Intervensi berbasis inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan telah dilakukan melalui: 1) Pengelolaan lahan aset untuk budidaya peternakan yang dikelola oleh masyarakat antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging dengan teknologi kandang semi close house di Tahura Jeruk dan Tahura Lempung 2) Pelatihan inovasi olahan pangan lokal berbasis potensi wilayah 3) Penambahan jenis budidaya ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi 4) Inovasi pengembangan TOGA yang dapat dimanfaatkan sebagai produk minuman kemasan serta pelatihan budidaya pertanian bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP.
3.25.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah laporan penyediaan sarana budidaya ikan	1 laporan	1 laporan	100.00%			
1021		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana budidaya ikan yang diadakan	86 unit	86 unit	100.00%			
03.25.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	0 kasus	0 kasus	100.00%			
3.25.05.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
1047		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap	12 kali	12 kali	100.00%			4. Telah dilaksanakan pelatihan budidaya pertanian sesuai program dan pelatihan bagi masyarakat umum yang berminat melalui
03.25.06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pelaku usaha di sentra pengolahan dan pemasaran hasil ikan yang produktif	60%	61.20%	102.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.25.06.2.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sentra ikan yang dikelola	3 sentra	3 sentra	100.00%			pendaftaran secara online di website DKPP, serta pelatihan tepat guna terkait budidaya perikanan maupun perikanan tangkap.
1281		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan yang diberikan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	250 pelaku usaha	250 pelaku usaha	100.00%			
03.26.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	•Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	35.71%	35.71%	100.01%			1. Web http://tourism.surabaya.go.id / untuk pengenalan kegiatan/agenda pariwisata di Kota Surabaya telah dilaunching. Dalam website tersebut berisi informasi daftar destinasi wisata, cagar budaya, event-event seni budaya dan sejarah termasuk Peta Wisata yang ada di Kota Surabaya. Selain melalui web, Disbudporapar juga mempunyai akun di beberapa media sosial yaitu Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter dan Youtube yang mudah diakses oleh masyarakat. 2. Pembenahan fasilitas di THP Kenjeran telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang dikerjakan oleh Disbudporapar dan DPRKPP, meliputi pekerjaan penataan landscape penataan di THP Kenjeran Utara dan Selatan,
3.26.02.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	•Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	2 lokasi	2 lokasi	100.00%			
3373		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	•Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	60 kali	60 kali	100.00%			
3374		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	•Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	2 lokasi	2 lokasi	100.00%			
3.26.02.2.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 lokasi	1 lokasi	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3370		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 •Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 •Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kampung wisata dan wisata terintegrasi yang dikembangkan	1 lokasi	1 lokasi	100.00%			pemeliharaan toilet, serta stand-stand UMKM dan pengelolaan masih terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya
3375		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan destinasi pariwisata	1 dokumen	1 dokumen	100.00%			
03.26.03		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemulihan kunjungan wisatawan di obyek wisata	41.50%	49.79%	119.96%			
3.26.03.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	3 dokumen	3 dokumen	100.00%			
3368		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pemasaran pariwisata baik di dalam maupun luar negeri	206 kali	206 kali	100.00%			
03.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase hasil karya peserta pelatihan yang ditampilkan	60%	66.67%	111.11%			
03.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Persentase peserta pelatihan yang telah melaksanakan pengembangan pariwisata	20%	22.88%	114.38%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
03.26.05		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder pariwisata yang dilaksanakan 20 kesepakatan	20%	25%	125.00%			
3.26.05.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dilaksanakan	9 kali	9 kali	100.00%			
3.26.05.2.01		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata			Jumlah pemangku kepentingan pariwisata yang dilakukan peninjauan kerjasama	2 kelompok	2 kelompok	100.00%			
3371		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	6 kali	6 kali	100.00%			
3372		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah pelatihan dasar SDM kepariwisataan yang dilaksanakan	3 kali	3 kali	100.00%			
3.26.05.2.02		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk ekonomi kreatif yang dihasilkan	3 Produk	3 Produk	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3376		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan	20 Kali	20 Kali	100.00%			
03.27.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah pembudidaya pekarangan yang berproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	25 Orang	25 Orang	100.00%			1. Intervensi sektor hidroponik dan perikanan telah ditindaklanjuti melalui : a. kegiatan pelatihan hidroponik kepada masyarakat termasuk MBR. b. Fasilitasi paket hidroponik kepada kelompok pembudidaya pertanian perkotaan. c. Pelatihan budidaya perikanan maupun perikanan tangkap dengan sarannya adalah pembudidaya perikanan dan nelayan. 2. Lahan aset Pemerintah Kota Surabaya telah dimanfaatkan antara lain: 1) Pengembangan budidaya peternakan antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging 2) Penyediaan bibit dan sarana prasarana untuk budidaya melalui sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3) Budidaya tanaman pangan dan sayuran serta sebagai tempat wisata pertanian dengan melibatkan warga sekitar.
3.27.02.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pembudidaya Pekarangan	10 Jenis	10 Jenis	100.00%			
367		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Peserta Pembinaan Pengguna Sarana Pemanfaatan Lahan Pekarangan	500 Orang	500 Orang	100.00%			
3.27.02.2.05		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sarana Budidaya Peternakan yang disediakan	6 jenis	6 jenis	100.00%			
1216		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Monitoring penyediaan benih/bibit ternak	12 kali	12 kali	100.00%			
03.27.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah lahan aset yang dikelola untuk mendukung cadangan pangan masyarakat	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
03.27.03		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kota Surabaya Tahun 2022 • Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Peningkatan luas taman hutan raya yang dikelola sebagai pendukung cadangan pangan masyarakat	2 Ha	2 Ha	100.00%			3. Telah ditindaklanjuti dengan merintis kampung sayur di 11 kecamatan dan dalam proses pengembangan branding wisata budidaya pertanian perkotaan. 4. Intervensi berbasis inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan telah dilakukan melalui: 1) Pengelolaan lahan aset untuk budidaya peternakan yang dikelola oleh masyarakat antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging dengan teknologi kandang semi close house di Tahura Jeruk dan Tahura Lempung 2) Pelatihan inovasi olahan pangan lokal berbasis potensi wilayah 3) Penambahan jenis budidaya ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi 4) Inovasi pengembangan TOGA yang dapat dimanfaatkan sebagai produk minuman kemasan serta pelatihan budidaya pertanian bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP. 5. Telah dilaksanakan pelatihan budidaya pertanian sesuai program dan pelatihan bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP, serta pelatihan tepat guna terkait budidaya perikanan maupun perikanan tangkap.
3.27.03.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian Yang Disediakan Bagi Pengelola lahan aset untuk budidaya pertanian	4 Jenis	4 Jenis	100.00%			
933		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah lahan aset yang direalisasikan untuk kegiatan budidaya pertanian	4 Lokasi	4 Lokasi	100.00%			
3.27.03.2.02		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	13 Laporan	13 Laporan	100.00%			
482		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah lokasi taman hutan raya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	13 lokasi	13 lokasi	100.00%			
03.27.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah pembudidaya ternak yang memproduksi konsisten dengan hasil layak dipasarkan	3 kelompok	3 kelompok	100.00%			
03.27.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Persentase populasi ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	89.38%	89.68%	100.34%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.27.04.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase hewan sehat yang telah diintervensi pelayanan kesehatan hewan	80%	89.20%	111.50%			6. Telah ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan Petani-petani yang ada di Kota Surabaya agar mereka dapat menjual produknya di e-Peken dan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka. 7. Telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draft Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dalam proses penyempurnaan harmonisasi di tingkat Kemenkumham 8. Kampung zero waste binaan Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki budidaya pertanian menjadi bagian dalam pembinaan kampung urban farming binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan pembentukan kelompok budidaya maggot sebagai media decomposing sampah dan media tanam pertanian yang berlokasi di tanah aset Pemkot antara lain di Tambak Wedi dan Krembangan. Kegiatan ini telah dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup.
813		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit hewan serta Zoonosis	2750 ekor	2803 ekor	101.93%			
3.27.04.2.04		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pelaksanaan pendampingan unit usaha dan produk asal hewan	25 Unit	25 Unit	100.00%			
1204		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pelaksanaan pelatihan budidaya peternakan	8 Kali	8 Kali	100.00%			
03.27.06		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan usaha lingkup pertanian yang diproses	100%	100%	100.00%			
3.27.06.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketepatan waktu penerbitan berkas perizinan dan non perizinan lingkup pertanian yang diproses	80%	99.36%	124.20%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
874		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Persentase ketepatan waktu pemberian penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha lingkup pertanian	80%	92.36%	115.45%			
03.27.07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	100%	100%	100.00%			
03.27.07		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Tingkat Produktivitas Pertanian	5.8 ton/ha	6.45 ton/ha	111.13%			
3.27.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kapasitasnya	6 Kelompok	6 Kelompok	100.00%			
3.27.07.2.01		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek/pelatihan	25 orang	25 orang	100.00%			
485		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani	6 Kali	6 Kali	100.00%			
1164		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah pelaksanaan bimtek/pelatihan untuk penguatan SDM Penyuluh	5 kali	5 kali	100.00%			
03.30.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	•Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase ketepatan waktu pelayanan	92%	100%	108.70%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.30.02.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 •Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah sektor usaha di sektor pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	3 Sektor Usaha	3 Sektor Usaha	100.00%			
3395		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 •Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang difasilitasi	450 pelaku usaha	456 pelaku usaha	101.33%			
3.30.02.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah sektor usaha pergudangan yang difasilitasi	1 Sektor usahaUsaha Perdagangan	1 Sektor usahaUsaha Perdagangan	100.00%			
3396		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Tahun Anggaran 2022 •Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah gudang yang difasilitasi	450 Pelaku usaha	556 Pelaku usaha	123.56%			
3.30.02.2.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah sektor usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	1 Sektor usaha	1 Sektor usaha	100.00%			
3397		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	•Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah usaha waralaba dalam negeri yang difasilitasi	55 Pelaku usaha	58 Pelaku usaha	105.45%			
3.30.02.2.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah sektor usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	1 Sektor Usaha	1 Sektor Usaha	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3398		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Surabaya Tahun 2022	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah usaha waralaba luar negeri yang difasilitasi	24 Pelaku Usaha	24 Pelaku Usaha	100.00%			
3.30.02.2.05		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah sektor usaha penjualan Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	1 Pelaku usaha	1 Pelaku usaha	100.00%			
3399		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang difasilitasi	380 Pelaku usaha	400 Pelaku usaha	105.26%			
3.30.02.2.06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sektor usaha fasilitas penyimpanan bahan berbahaya yang diawasi	1 Sektor usaha	1 Sektor usaha	100.00%			
3400		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah lokasi penyimpanan bahan berbahaya yang diperiksa	20 lokasi	21 lokasi	105.00%			
03.30.03		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	100.00%			
3.30.03.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3388		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola	12 lokasi	12 lokasi	100.00%			
					Jumlah Pelaku Usaha Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	550 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan	551 pelaku usaha sarana distribusi perdagangan	100.18%			
03.30.04		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	100%	100.00%			
3.30.04.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
3.30.04.2.02		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
3389		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Frekuensi Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 kali	12 kali	100.00%			
3390		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	217 kali	302 kali	139.17%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
03.30.06		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	100%	100.00%			
3.30.06.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
3401		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	22430 Unit	24198 Unit	107.88%			
3402		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah alat UTTP yang diawasi	4750 unit	5036 unit	106.02%			
03.30.07		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	100%	100.00%			
3.30.07.2.01		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	12 laporan	100.00%			
3393		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	5220 orang	5363 orang	102.74%			
03.31.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	15%	16.40%	109.32%			
3.31.02.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemberdayaan pelaku usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3431		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku usaha yang mendapat pemberdayaan	450 Pelaku usaha	550 Pelaku usaha	122.22%			
4369		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
03.31.03		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase pelaku usaha yang diawasi izin usahanya	80%	99.77%	124.72%			
3.31.03.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah laporan hasil pengawasan izin usaha	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
3281		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah pelaku usaha yang diawasi perizinannya	350 Pelaku usaha	457 Pelaku usaha	130.57%			
03.31.04		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase dokumen data dan analisis yang mendukung kebijakan perencanaan Industri	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3.31.04.2.01		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyusunan dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	1 Laporan	1 Laporan	100.00%			
3432		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen data pelaku usaha sektor industri, kawasan industri dan analisisnya	1 dokumen	1 dokumen	100.00%			



3.1.2.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur pendukung urusan pemerintahan ini merupakan unsur yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surabaya.



Tabel 3.20
Capaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
04.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	Sekretariat Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketepatan waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00%			- Pemerintah Kota Surabaya memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) ASN yang berkompeten dalam bidang hukum serta menyusun strategi percepatan penanganan permasalahan hukum dengan melibatkan jajaran samping (Kejaksaan dan Kepolisian). - Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Hukum dan Kerjasama sudah mengundang pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya. - Penyelesaian sengketa aset Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan menggandeng kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (narasumber advokat), akademisi melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi melalui upaya konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Terkait proses pensertipikatan tanah aset Pemerintah
04.01.01		Sekretariat Daerah	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Persentase ketepatan waktu Penyediaan Jasa surat menyurat dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	100.00%			
04.01.01		Sekretariat Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja		Persentase paket pengadaan barang jasa (metode pascakualifikasi) melalui UKPBJ yang diusulkan Perangkat Daerah diproses ≤ 30 Hari Kerja	90%	95.80%	106.45%			
04.01.01		Sekretariat Daerah	Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021		Persentase perangkat daerah dengan analisis jabatan sesuai dengan reviu kelembagaan yang dilakukan	80%	100%	125.00%			
04.01.01		Sekretariat Daerah			Persentase perangkat daerah	63.88%	87.93%	137.65%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori A						Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan permohonan bantuan non litigasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,II dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang. Selama tahun 2022 telah dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama/patok batas/pagar kawat berduri dan pengamanan hukum berupa sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.
04.01.01		Sekretariat Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya		Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00%			
04.01.01		Sekretariat Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah		Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar.	100%	100%	100.00%			
04.01.01		Sekretariat Daerah	Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama		Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
04.01.01		Sekretariat Daerah	- Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman		Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang nilai kualitas pelayanan publiknya minimal berkategori baik	97%	100%	103.09%			
04.01.01		Sekretariat Daerah	Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Gayungan,		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	93.70%	93.70%	1. Penyesuaian pemenuhan barang/jasa perkantoran dengan pemenuhan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri 2. Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran	1. Dilakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai prioritas pemenuhan barang/jasa perkantoran yang memenuhi ketentuan TKDN; 2. Dilakukan optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran dengan menyediakan ruang pelayanan yang dilengkapi dengan peralatan serta petugas yang stand by dalam proses pelayanan. 3.	4. Bagian Organisasi telah: 1) Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisa Beban Kerja dan Analisis Jabatan, untuk mendapatkan data dan informasi yang valid terkait kondisi saat ini dibandingkan dengan kebutuhan pegawai ideal; 2) Membangun aplikasi anjab-abk untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menganalisis dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo Dan Kecamatan Rungkut Di Kota Surabaya							Telah di terbitkan nya Surat Edaran Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kota Surabaya, serta perhitungan Nilai TKDN, dalam rangka percepatan realisasi	menyampaikan kebutuhan pegawai yang menjadi dasar BKPSDM untuk rekrutmen pegawai 3) Melakukan pendampingan penyusunan standar pelayanan dan SOP untuk menguatkan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4) Melakukan penguatan pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (RB) melalui pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk menunjang peningkatan nilai SAKIP dan membangun aplikasi monitoring dan pelaksanaan RB di Perangkat Daerah
4.01.01.2.02		Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1182		Sekretariat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
4.01.01.2.05		Sekretariat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12 laporan	12 laporan	100.00%			
274		Sekretariat Daerah		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang diadakan	33846 Stel	46335 Stel	136.90%			
4.01.01.2.07		Sekretariat Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 laporan	12 laporan	100.00%			5.
283		Sekretariat Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	8760 Unit	8526 Unit	97.33%	Adanya perubahan perencanaan pengadaan barang milik daerah di PAK menyesuaikan dengan kebutuhan sehingga total kuantiti berkurang	Telah dilakukan re-schedule perencanaan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan.	
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase jasa peralatan dan perlengkapan	100%	85.63%	85.63%	Dalam proses pengadaan terkendala dengan TKDN dan	1. Telah dilakukan sosialisasi terkait prioritas pengadaan dengan TKDN dan	6.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					kantor yang diadakan PD				menyesuaikan dengan kebutuhan	pendataan terkait kebutuhan dengan kesesuaian terhadap TDKN nya 2. Telah di terbitkan nya Surat Edaran Pelaksanaan Belanja Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kota Surabaya, serta perhitungan Nilai TKDN, dalam rangka percepatan realisasi	7. Rakyat telah menindaklanjuti permohonan fasilitasi dari kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi Perangkat Daerah, jajaran samping, maupun tenaga ahli apabila diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah			Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00%			8. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan pembinaan kepada 31 kecamatan dan 154 kelurahan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kompetensi camat dan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Materi yang disampaikan selama pelatihan terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan.
4.01.01.2.08		Sekretariat Daerah			Persentase Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Surat Menyurat yang tepat waktu dan tepat sasaran	100%	100%	100.00%			8. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan sosialisasi Peraturan Walikota tentang pembentukan dan pembinaan RT, RW dan LPMK serta memfasilitasi kegiatan pelantikan ketua RT, RW dan LPMK
164		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00%			9. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan pembinaan kepada 31
1680		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Ketersediaan jasa pelayanan umum kantor yang tepat waktu dan sasaran	100%	100%	100.00%			
1698		Sekretariat Daerah		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat masuk yang tersampaikan tepat waktu	100%	100%	100.00%			
4.01.01.2.11		Sekretariat Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Keberhasilan administrasi keuangan dan	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					operasional kepada daerah dan wakil kepala daerah						kecamatan dan 154 kelurahan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kompetensi camat dan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Materi yang disampaikan selama pelatihan terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan. 10. Belanja langsung khususnya terkait pengadaan barang dan jasa memprioritaskan dan terus dioptimalkan pada produk lokal (termasuk UMKM) dan produk nasional yang tersedia melalui katalog elektronik (e-Peken, katalog lokal, katalog nasional dan Toko Daring). Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong UMKM untuk mendaftarkan di katalog lokal Kota Surabaya. Selain itu, juga Telah dilakukan tagging atau penanda pada komponen-komponen yang dialokasikan khusus untuk intervensi pasca-pandemi agar dapat dimonitor pelaksanaan pekerjaannya. Telah dilaksanakan sosialisasi rokok ilegal pada tahun 2021 dengan
1185		Sekretariat Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan gaji dan/atau tunjangan	2 Orang	2 Orang	100.00%			
1186		Sekretariat Daerah		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yangmendapatkan dana penunjang operasiol	2 Orang	2 Orang	100.00%			
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah		Penataan Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penerapan SAKIP	58 instansi	58 instansi	100.00%			
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah			Jumlah perangkat daerah yang didampingi penyusunan analisis jabatan sesuai kelembagaan yang berlaku	58 instansi	58 instansi	100.00%			
4.01.01.2.13		Sekretariat Daerah			Jumlah unit penyelenggara pelayanan publik yang didampingi untuk peningkatan kualitas layanan	253 unit	253 unit	100.00%			
67		Sekretariat Daerah		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah kegiatan pendampingan peningkatan kualitas unit penyelenggara pelayanan publik	253 kegiatan	253 kegiatan	100.00%			
68		Sekretariat Daerah		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan pendampingan penerapan SAKIP perangkat daerah	58 kegiatan	58 kegiatan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
69		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah kegiatan pendampingan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah	58 kegiatan	58 kegiatan	100.00%			melibatkan Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Tanjung Perak. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan dengan pembicara dari Kantor Bea Cukai. Sedangkan pada tahun 2022, telah dilakukan sosialisasi terkait cukai hasil tembakau ilegal terhadap pelaku usaha dan masyarakat pada bulan November dan Desember di 6 kecamatan, dengan menggandeng Dirjen Bea Cukai Kanwil Jatim, kejaksaan, dan jajaran samping lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa. 12. PD Pasar Surya telah melakukan penyesuaian jabatan terhadap pegawai sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai, dan pada tahun 2022 PD Pasar Surya telah melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan. 13. Pelaksanaan kerja sama BUMD baik dengan pihak swasta maupun
4.01.01.2.14		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	100.00%			
4.01.01.2.14		Sekretariat Daerah			Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100.00%			
322		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Keberhasilan Penyediaan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	100%	100%	100.00%			
3365		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan	89 kali	116 kali	130.34%			
04.01.02		Sekretariat Daerah		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kecepatan waktu pelaporan outreach	2 hari	1 hari	150.00%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Kecepatan waktu rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS yang di laporkan	14 hari	12 hari	114.29%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase kerja sama luar negeri yang difasilitasi	90%	100%	111.11%			sinergi antar BUMD telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan keuntungan perusahaan. Sebagai contoh: 1. PD Pasar Surya bekerjasama dengan BNI, BRI dan Bank Jatim dalam hal digitalisasi pembayaran iuran perpasaran; 2. PDTs KBS bekerjasama dengan BRI untuk digitalisasi tiket masuk di Kebun Binatang Surabaya Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melibatkan tenaga ahli dalam penyelesaian permasalahan BUMD secara berkala. BUMD secara mandiri dan berkala telah menyelenggarakan pelatihan terhadap karyawan internal perusahaan dengan melibatkan konsultan/coach/mentor 14. 15. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama dengan Perangkat Daerah terkait telah melibatkan tenaga ahli dalam penyusunan kajian kelayakan perpindahan Rumah Potong Hewan Pegirian ke Banjarsugihan. Hasil kajian dimaksud
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase kerjasama yang dievaluasi dan diinformasikan	82%	100%	121.95%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100%	100%	100.00%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase Lembaga yang meningkat pemahaman administrasi pemerintahannya	19.45%	19.46%	100.05%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase Naskah Kerja sama dalam negeri yang diselesaikan	97.50%	100%	102.56%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	70.96%	70.97%	100.01%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100%	100%	100.00%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	100%	100.00%			
04.01.02		Sekretariat Daerah			Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					arahan dari pimpinan						menunjukkan bahwa perpindahan Rumah Potong Hewan Pegirian ke Banjarsugihan dinilai layak secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. 16. Bahwa pelaksanaan kerja sama BUMD dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kajian kelayakan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investasi BUMD dapat dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal, pembentukan anak perusahaan maupun penerapan bagi hasil atas pengelolaan/pemanfaatan aset BUMD.
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah memahami materi pembinaan	36 Lembaga	36 Lembaga	100.00%			
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang disampaikan	2 dokumen	2 dokumen	100.00%			
4.01.02.2.01		Sekretariat Daerah			Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100.00%			
873		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah pendataan batas wilayah kecamatan	22 Kecamatan	22 Kecamatan	100.00%			
1627		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Berkas	2 Berkas	100.00%			
1628		Sekretariat Daerah		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan	185 Peserta	185 Peserta	100.00%			
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%			
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah			Jumlah kegiatan pelaksanaan outreach	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%			
4.01.02.2.02		Sekretariat Daerah			Jumlah kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat masyarakat SIMPROLAMAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%			
1669		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Kesejahteraan Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%			17. Pada tahun 2022, telah diselenggarakan seleksi dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Direktur Utama serta Direktur Teknik dan Usaha dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. 18. Pengadaan souvenir ikon Kota Surabaya telah diarahkan untuk pemberdayaan UMKM. Misalnya, adanya variasi souvenir berupa udeng, patung miniatur Suroboyo, batik tulis, tas dan box souvenir, dan pigura produk-



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Jumlah dokumen laporan outreach	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			produk UKM. Selain itu makan dan minum produk UKM diberikan kepada tamu saat kunjungan kerja kedinasan atau acara yang melibatkan lembaga luar Pemkot. Tamu kunjungan kerja kedinasan atau acara lain yang berasal dari luar Kota Surabaya juga disarankan mengunjungi Kriya Gallery yang memasarkan produk-produk UKM Kota Surabaya. 19. Bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menginventasiasi terkait aduan dan pengajuan masyarakat kepada Walikota Surabaya sudah tertampung secara daring melalui aplikasi Warga-Ku untuk menampung aspirasi dan aduan warga sekaligus didapati fitur status tindak lanjut yang dilakukan. Selain itu, rekapitulasi pengaduan/saran/masukan warga melalui WargaKu juga disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah melalui e-Surat sehingga memudahkan dan mempercepat penyampaian surat serta
					Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan pada pelayanan masyarakat SIMPROLAMAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
1670		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum	25 permasalahan hukum	100.00%			
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah			Jumlah produk hukum yang dipublikasi	80 produk hukum	155 produk hukum	193.75%			
4.01.02.2.03		Sekretariat Daerah			Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	80 rancangan produk hukum	155 rancangan produk hukum	193.75%			
811		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang disusun	80 rancangan produk hukum	155 rancangan produk hukum	193.75%			
821		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah permasalahan hukum yang ditangani	25 permasalahan hukum	25 permasalahan hukum	100.00%			
822		Sekretariat Daerah		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasi	80 produk hukum	155 produk hukum	193.75%			
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah laporan evaluasi kerjasama yang dilakukan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah			Jumlah laporan kerjasama dalam	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					negeri yang difasilitasi						20. proses tindak lanjut dari Perangkat Daerah. BPD Jatim telah mensosialisasikan persyaratan pengajuan pinjaman kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya dengan persyaratan yang mudah dan suku bunga yang bersaing dengan perbankan lainnya
4.01.02.2.04		Sekretariat Daerah			Jumlah laporan kerjasama luar negeri yang difasilitasi	12 Laporan	12 Laporan	100.00%			
140		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang difasilitasi	20 Lembaga	20 Lembaga	100.00%			21. PT BPD Jatim telah mengalokasikan anggaran CSR kepada UMKM tiap tahun berkolaborasi dengan PT BPR UMKM Jatim, PT BPR Surya Artha Utama dan Perangkat Daerah terkait dalam penyaluran bantuan kepada UMKM berupa barang.
					Jumlah kerjasama dalam negeri yang dievaluasi	25 Lembaga	25 Lembaga	100.00%			
141		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah kerja sama luar negeri yang dievaluasi	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00%			22. PT BPD Jatim akan memasang mesin ATM setor dan tarik tunai di kantor DPRD Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) unit pada tahun 2023.
					Jumlah kerja sama luar negeri yang difasilitasi	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00%			
04.01.03		Sekretariat Daerah		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	100%	100.00%			23. BPD Jatim telah mensosialisasikan persyaratan pengajuan pinjaman kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya dengan persyaratan yang mudah dan suku bunga yang bersaing dengan perbankan lainnya.
04.01.03		Sekretariat Daerah			Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq 76\%$	84%	86.91%	103.46%			
04.01.03		Sekretariat Daerah			Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD	75%	100%	133.33%			
4.01.03.2.01		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan kebijakan perekonomian	12 laporan	12 laporan	100.00%			
49		Sekretariat Daerah		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD yang dimonitor dan dievaluasi	9 BUMD	9 BUMD	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
50		Sekretariat Daerah		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Analisa Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pangan Daerah	12 laporan	12 laporan	100.00%			24. PT BPR Surya Artha Utama telah melaksanakan program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (PUSPITA) kepada UMKM dengan suku bunga rendah dalam rangka bantuan modal usaha, dan telah disosialisasikan sampai dengan skala Kelurahan.
51		Sekretariat Daerah		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	4 kali	4 kali	100.00%			
4.01.03.2.02		Sekretariat Daerah		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%			25. PT BPR Surya Artha Utama telah membuat dan menyebarkan brosur program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (PUSPITA) kepada UMKM dengan suku bunga rendah dalam rangka bantuan modal usaha, dan telah disosialisasikan sampai dengan skala Kelurahan.
452		Sekretariat Daerah		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan pembangunannya	58 lembaga	58 lembaga	100.00%			
					Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara	6 sistem	6 sistem	100.00%			26. PT BPR Surya Artha Utama telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pembukaan rekening bagi siswa SD dan SMP di Kota Surabaya melalui program Tabungan Perisai Junior.
453		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun	16 dokumen	17 dokumen	106.25%			
454		Sekretariat Daerah		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%			27. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun rencana pengembangan usaha PD Rumah Potong Hewan dalam bentuk relokasi ke lokasi aset
4.01.03.2.03		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	90%	100%	111.11%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
4.01.03.2.03		Sekretariat Daerah			Presentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00%			Pemerintah Kota Surabaya. Relokasi tersebut telah mempertimbangkan dampak sosial
270		Sekretariat Daerah		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	95.01%	95.01%	Dalam proses pengadaan terkendala dengan TKDN dan menyesuaikan dengan kebutuhan	Dilakukan pendataan terkait ketersediaan barang dan jasa perkantoran disesuaikan dengan pemenuhan TKDN dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.	28. PDAM Surya Sembada telah melakukan perbaikan pipa di tahun 2022 dan telah mengalokasikan anggaran perbaikan dan investasi pipa sebagai prioritas di tahun 2023 dalam rangka pemenuhan cakupan layanan sebesar 100% dengan tekanan air 2 meter selama 24 jam bagi warga Kota Surabaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan reservoir di wilayah Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian
284		Sekretariat Daerah		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan	386 Dokumen	310 Dokumen	80.31%	Penyusunan dokumen pengadaan lelang barang/jasa menyesuaikan usulan pengadaan dari Perangkat Daerah	Telah diterbitkan surat edaran pelaksanaan tender dalam satu tahun dan mengkomunikasikan kepada Perangkat Daerah secara periodik.	29. PDAM Surya Sembada telah memfasilitasi permohonan pasang baru melalui aplikasi PDAM maupun WargaKu serta berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk melakukan identifikasi bagi warga yang belum mendapatkan air bersih 30. PDAM Surya Sembada telah memfasilitasi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											penanganan keluhan melalui call center 24 jam maupun aplikasi WargaKu yang direspon dalam waktu kurang dari 24 jam 31. Penyesuaian iuran layanan pasar dan sewa stan di PD Pasar Surya mempertimbangkan hasil studi kelayakan, harga pasar dan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat 32. Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk melakukan pemenuhan modal dasar dan penambahan penyertaan modal kepada PD Pasar Surya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public 33. DPRD Kota Surabaya telah mengajukan Peraturan Daerah Prakarsa berkaitan dengan Perubahan Bentuk Hukum PD Pasar Surya. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama dengan PD Pasar Surya juga telah melakukan pembahasan konsep perubahan Peraturan Daerah tentang PD Pasar Surya dan akan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti 34. PD Rumah Potong Hewan telah



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											mengajukan sertifikasi halal terhadap produk olahan daging yang dijual kepada masyarakat. Di sisi lain, pemotongan hewan RPH Pegirian telah memperoleh sertifikasi halal dan telah memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner) 35. Produk olahan daging RPH telah dipasarkan melalui aplikasi e-peken sejak tahun 2022 36. Pemerintah Kota Surabaya telah bekerjasama dengan PD Rumah Potong Hewan dalam hal pendistribusian daging beserta olahannya melalui e-Peken, sehingga meningkatkan minat masyarakat Kota Surabaya untuk mengonsumsi produk dari PD Rumah Potong Hewan baik produk daging beku kemasan dan produk olahan daging lainnya 37. Pemerintah Kota Surabaya telah bekerjasama dengan PD Rumah Potong Hewan dalam hal pendistribusian daging beserta olahannya melalui e-Peken, sehingga meningkatkan minat masyarakat Kota Surabaya untuk mengonsumsi produk dari PD Rumah Potong



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											Hewan baik produk daging beku kemasan dan produk olahan daging lainnya 38. Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun rencana pengembangan usaha PD Rumah Potong Hewan dalam bentuk relokasi ke lokasi aset Pemerintah Kota Surabaya. Relokasi tersebut juga mempertimbangkan pemisahan antara pemotongan babi dengan sapi dan kambing, untuk menjaga mutu daging PD Rumah Potong Hewan sebagai daging yang halal 39. KBS telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mempromosikan kepada siswa PAUD hingga SMP berkunjung ke KBS secara fisik maupun virtual. KBS juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada sarana pendidikan seperti museum satwa dalam rangka meningkatkan sarana prasarana di bidang edukasi di tahun 2023, yang telah dicantumkan pada RKAP Tahun 2023 40. Pada tahun 2022, di area KBS sudah terdapat tenant-tenant



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											UMKM yang dapat menyediakan snack/mamin bagi para pengunjung dengan biaya diluar dari harga tiket. KBS akan mempertimbangkan usulan tersebut dan berkoordinasi dengan Dinkopdag dan BPSDA untuk tindak lanjutnya 41. KBS telah melakukan upaya pakan mandiri di Kebun Binatang Surabaya untuk memenuhi kebutuhan satwa KBS dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk tindak lanjut usulan tersebut 42. KBS telah menyediakan spot foto di dalam area KBS untuk dimanfaatkan bagi pengunjung, sedangkan fotografer tersedia di depan lobby tiket dengan biaya tersendiri 43. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama dengan KBS telah melakukan pembahasan konsep perubahan Peraturan Daerah tentang PD TS KBS dan akan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti 44. PD TS KBS telah memprioritaskan upaya promosi atau pemasaran melalui sosial media



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan untuk meningkatkan angka kunjungan ke KBS 45. PD TS KBS telah melakukan penyetoran dividen sebesar Rp1.506.203.050,- atas kinerja tahun 2019 kepada Pemerintah Kota Surabaya secara mengangsur 46. PT SIER telah merealisasikan CSR tiap tahunnya berupa bantuan kepada UMKM binaan PT. SIER dan masyarakat sekitar area industri PT. SIER dan PIER 47. PT Surya Karsa Utama telah mempromosikan kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan unit rumah di Graha Surya Nata dengan harga yang relatif murah dan promo yang menarik 48. PT Surya Karsa Utama telah mempromosikan kepada warga Kota Surabaya melalui Kecamatan dan Kelurahan berkaitan dengan unit rumah di Graha Surya Nata dengan harga yang relatif murah dan promo yang menarik 49. PT. Surya Karsa Utama telah melibatkan BPR



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											Surya Artha Utama untuk pemberian kredit properti
04.02.01	SEKRETARIAT DPRD	Sekretariat DPRD	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	92%	89.05%	96.79%	Beberapa kegiatan belum mencapai target program dikarenakan kendala pada pemenuhan produk yang diharuskan menggunakan PDN dan TKDN	Mengupayakan beberapa komponen tetap terealisasi dengan produk yang menggunakan PDN dan TKDN	1. Anggaran kegiatan lain yang tidak terpakai telah dialokasikan untuk kegiatan reses. 2. Proses digitilisasi berkas telah dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pembuatan aplikasi digitalisasi berkas.
4.02.01.2.02		Sekretariat DPRD	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1374		Sekretariat DPRD	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
4.02.01.2.06		Sekretariat DPRD	tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00%			
1375		Sekretariat DPRD	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis penyediaan barang dan jasa perkantoran	11 Jenis	11 Jenis	100.00%			
4.02.01.2.09		Sekretariat DPRD	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata waktu penyiapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	1 Hari	1 Hari	100.00%			
1376		Sekretariat DPRD	Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	83.37%	83.37%	beberapa pengadaan barang terkendala karena faktor TKDN	Sudah berupaya mendapatkan produk yang ber TKDN	
4.02.01.2.14		Sekretariat DPRD	Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rata-rata waktu Penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	1 Hari	1 Hari	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1377		Sekretariat DPRD	Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan yang di dilaksanakan	426 Kali	470 Kali	110.33%			
4.02.01.2.15		Sekretariat DPRD		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	100%	100.00%			
1378		Sekretariat DPRD		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100%	100%	100.00%			
4.02.01.2.16		Sekretariat DPRD		Layanan Administrasi DPRD	Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	2 Hari	1.46 Hari	127.00%			
1379		Sekretariat DPRD		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di ikuti dan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Surabaya	36 Kali	67 Kali	186.11%			
04.02.02		Sekretariat DPRD		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100%	100.48%	100.48%			
4.02.02.2.01		Sekretariat DPRD		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%			
1358		Sekretariat DPRD		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Kebijakan Dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100.00%			
4.02.02.2.04		Sekretariat DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	82 Orang	164.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1371		Sekretariat DPRD		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Pelaksanaan Publikasi DPRD	4 Media	4 Media	100.00%			
3201		Sekretariat DPRD		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang dilaksanakan	13 Kali	18 Kali	138.46%			
4.02.02.2.05		Sekretariat DPRD		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah dokumen pelaksanaan reses	3 Dokumen	3 Dokumen	100.00%			
1372		Sekretariat DPRD		Pelaksanaan Reses	Jumlah Fasilitas Reses	3 Kali	3 Kali	100.00%			
4.02.02.2.08		Sekretariat DPRD		Fasilitasi Tugas DPRD	Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	2 Hari	1 Hari	150.00%			
1373		Sekretariat DPRD		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	875 Kali	1060 Kali	121.14%			



3.1.2.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi pelaksanaan fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur penunjang urusan Pemerintahan dilaksanakan melalui :

1. Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Bidang kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.21
Capaian Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2022



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
05.01.01	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.40%	95.35%	99.95%	1. Pemenuhan barang/jasa perkantoran yang menyesuaikan dengan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 2. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras 3. Mengevaluasi dan berkomitmen dalam melakukan percepatan dan perbaikan pelayanan kedinasan	1. Penentuan target RPJMD selalu mempertimbangkan kondisi awal dan pencapaian kinerja sebelumnya. Demikian pula dalam penentuan target kinerja pada RKPD sebagai bentuk konsistensi perencanaan namun tetap memperhatikan capaian tahun sebelumnya. Kedua hal ini telah ditindaklanjuti dalam proses penyusunan RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2022. 2. Telah ditindaklanjuti dengan pendataan baseline peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman prioritas sesuai peraturan berlaku untuk selanjutnya disinkronisasi dengan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) 3. Dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 telah dilakukan penyesuaian pada target dan komponen perhitungan Indeks Infrastruktur Kota 4. Penentuan kategori warga miskin berdasarkan Perwali 106 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin bahwa keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.01.01.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	2 jenis	2 jenis	100.00%			rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dimana penetapannya melalui proses musyawarah kelurahan.
1383		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.01.01.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1292		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
5.01.01.2.08		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00%			
1293		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	96.48%	96.48%	Adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan penyesuaian terhadap ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri	1. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan barjas/sarpras di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan 2. Berkomitmen dalam melakukan percepatan pengurusan administrasi barjas/sarpras	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1635		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00%			
05.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	100%	100%	100.00%			
05.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	100%	100%	100.00%			
05.01.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan			Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100.00%			
5.01.02.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disahkan menjadi produk hukum daerah	2 dokumen	2 dokumen	100.00%			
1295		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	6 dokumen	6 dokumen	100.00%			
5.01.02.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data urusan yang dikelola	38 data urusan	38 data urusan	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1392		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pengampu data urusan	58 PD	58 PD	100.00%			
5.01.02.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100.00%			
1391		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pembangunan Daerah	58 PD	58 PD	100.00%			
05.01.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program Perangkat Daerah mitra di atas 76%	98.23%	99.21%	101.00%		Mengevaluasi dan intensif menghimbau Perangkat Daerah dalam untuk pencapaian realisasi indikator-indikatornya	
5.01.03.2.01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100.00%			
1435		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1436		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100.00%			
5.01.03.2.02		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Bidang SDA yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%			
1561		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			
1562		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			
5.01.03.2.03		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%			
2375		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2376		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			
05.02.01	KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	91.40%	101.56%			1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mengembangkan Aplikasi SIMBADA khususnya agar dapat menyajikan informasi aset Pemerintah Kota Surabaya yang komprehensif dan memiliki aksesibilitas yang memadai menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Dinas Komunikasi dan
5.02.01.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			Informatika mendukung penyelenggaraan SIMBADA dengan mengatasi kendala jaringan atau konektivitas agar dapat lebih mudah diakses oleh setiap PD sehingga pemutakhiran data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu, pada tahun 2022, BPKAD telah mengembangkan aplikasi e-RKBMD, yaitu aplikasi terkait rencana kebutuhan barang milik daerah. Dengan adanya aplikasi tersebut, perencanaan kebutuhan barang milik daerah lebih efektif dan tepat peruntukannya karena didukung dengan data yang riil dan relevan. Aplikasi
1113		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
5.02.01.2.07		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah sarana kedinasan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	90%	60.79%	67.54%	1. Adanya regulasi terkait ketentuan Pengadaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Beberapa paket pekerjaan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tidak bisa direalisasikan karena kebijakan TKDN diantaranya : - Mesin Penghancur Kertas - Delegate - Rally Camera - Printer Inkjet Multifungsi	a. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal b. Mengevaluasi paket pekerjaan yang berdampak langsung terhadap kebijakan Pemerintah terkait Ketentuan Pengadaan TKDN c. Menjalin komunikasi dan sinergi yang aktif dan efektif terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
271		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	100%	100.00%			lainnya seperti SIGAD dan SI-IBMD yang akan dipakai untuk identifikasi/inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah masih dalam proses pengembangan.
5.02.01.2.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing - Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan - Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	95.23%	95.23%	Adanya regulasi terkait ketentuan Pengadaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal b. Mengevaluasi paket pekerjaan yang berdampak langsung terhadap kebijakan Pemerintah terkait Ketentuan Pengadaan TKDN c. Menjalinkan komunikasi dan sinergi yang aktif dan efektif terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	2. - Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam rangka pengawasan aset Pemerintah Kota Surabaya. - Melakukan pengawasan dan sosialisasi secara intensif dengan kelurahan dan kecamatan terkait deteksi dini terhadap terjadinya kerusakan terhadap sarana pengamanan aset (papan, patok, pagar) dan pemanfaatan/penggunaan tanpa ijin sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.02.01.2.08		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Ke Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729 - Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729 - Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi		Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	59.07%	59.07%	Adanya regulasi terkait ketentuan Pengadaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal b. Mengevaluasi paket pekerjaan yang berdampak langsung terhadap kebijakan Pemerintah terkait Ketentuan Pengadaan TKDN c. Menjalin komunikasi dan sinergi yang aktif dan efektif terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Daerah Kepada Kecamatan. Kegiatan ini melibatkan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dan diperkuat dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 593/16464/436.8.2/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Hal Pelaksanaan Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya 3. Terkait penggunaan dan pemanfaatan aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyediakan fitur penyusunan SK Penetapan Status Pengguna pada Aplikasi SIMBADA untuk aset tanah yang belum dimanfaatkan oleh PD.
1167		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung Yang Terutang Akibat Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Tata Cara	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	59.07%	59.07%	Adanya regulasi terkait ketentuan Pengadaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal b. Mengevaluasi paket pekerjaan yang berdampak langsung terhadap kebijakan Pemerintah terkait Ketentuan Pengadaan TKDN c. Menjalin komunikasi dan sinergi yang aktif dan efektif terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Dengan demikian, proses identifikasi bidang tanah yang belum dimanfaatkan akan lebih cepat dan tepat sehingga bisa segera diusulkan terkait penggunaan dan pemanfatannya 4. Penyelesaian sengketa aset Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan menggandeng kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (narasumber advokat), akademisi melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi melalui upaya konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Terkait proses



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1707		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2022	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	95.23%	95.23%	Adanya regulasi terkait ketentuan Pengadaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	a. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal b. Mengevaluasi paket pekerjaan yang berdampak langsung terhadap kebijakan Pemerintah terkait Ketentuan Pengadaan TKDN c. Menjalin komunikasi dan sinergi yang aktif dan efektif terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan permohonan bantuan non litigasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, II dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang. Selama tahun 2022 telah dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama/patok batas/pagar kawat berduri dan pengamanan hukum berupa sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.
5.02.01.2.09		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729 - Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun - Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Terhadap Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan Dalam Rangka	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketepatan pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100%	100%	100.00%		a. Mengevaluasi realisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di tahun sebelumnya agar perencanaan dapat dilakukan secara optimal b. Mengevaluasi paket pekerjaan yang berdampak langsung terhadap kebijakan Pemerintah terkait Ketentuan Pengadaan TKDN c. Menjalin komunikasi dan sinergi yang aktif dan efektif terhadap pihak-pihak yang berkompeten dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
286		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemulihan Ekonomi Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya - Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diurus administrasinya	2800 Unit	2806 Unit	100.21%			
05.02.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda PBB Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila Dan Hari Pahlawan - Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	100%	100%	100.00%			
5.02.02.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Bunga Pajak Daerah Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Pahlawan - Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2022	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	7 Dokumen	100.00%			
1139		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan - Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2022	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Laporan	1 Laporan	100.00%			
1143		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Hari Pahlawan - Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2022	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Laporan	2 Laporan	100.00%			
3439		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3440		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Pahlawan - Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2022	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			
5.02.02.2.02		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.	76318 berkas	82675 berkas	108.33%			
1122		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Hari Pahlawan	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani.	76318 Berkas	82675 Berkas	108.33%			
1130		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Penerimaan serta Pengeluaran Daerah yang dikelola	244 Dokumen	244 Dokumen	100.00%			
5.02.02.2.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen	22 Dokumen	100.00%			
1119		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	22 Dokumen	22 Dokumen	100.00%			
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	100%	100.00%			
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%	100%	100.00%			
5.02.02.2.04		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	70.23%	280.92%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1144		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampak bencana	100%	100%	100.00%			
1148		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Persentase realisasi bagi hasil retribusi	100%	100%	100.00%			
1169		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase realisasi dana darurat dan mendesak	25%	70.23%	280.92%			
05.02.03		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	26.70%	26.75%	100.18%			
5.02.03.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Dokumen	30 Dokumen	100.00%			
5.02.03.2.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			Persentase aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dikelola	100%	100%	100.00%			
635		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan	7679 lokasi	7970 lokasi	103.79%			
637		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah aset berupa tanah dan/atau bangunan yang diamankan	100 bidang	100 bidang	100.00%			
					Jumlah tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang	700 dokumen	700 dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
638		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani	30 Kasus/Obyek	30 Kasus/Obyek	100.00%			1. Optimalisasi pendapatan daerah telah dilakukan melalui: 1) Pengendalian dan Penagihan tunggakan wajib pajak serta memonitoring pembayaran wajib pajak; 2) Memberikan kemudahan dalam permohonan pendaftaran data wajib pajak secara online dan mengupayakan tax surveillance secara elektronik dan terintegrasi secara real time; 3) Kebijakan pengurangan pokok pajak, keringanan dengan angsuran dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga/denda kepada masyarakat Surabaya untuk mendorong pembayaran pajak; 4) Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak eksternal untuk mengoptimalkan pembayaran pajak; serta 5)
3518		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring pencatatan Barang Milik Daerah	58 Lembaga	58 Lembaga	100.00%			
05.02.01		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	90.43%	100.47%			
5.02.01.2.02		Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
3461		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
5.02.01.2.04		Badan Pendapatan Daerah		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			
3463		Badan Pendapatan Daerah		Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			
5.02.01.2.08		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3459		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	86.34%	86.34%	Dalam proses pengadaan terkendala dengan adanya regulasi terkait TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri)	1. Berkomunikasi kepada penyedia/vendor agar melakukan pendaftaran di LPSE untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan 2. Melakukan review kembali terhadap penjadwalan rencana realisasi belanja (F1)	Menyusun kajian potensi pendapatan daerah.
3460		Badan Pendapatan Daerah		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00%			
05.02.02		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%	100%	100.00%			
5.02.02.2.02		Badan Pendapatan Daerah		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 dokumen	4 dokumen	100.00%			
1131		Badan Pendapatan Daerah		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Triwulan Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%			
05.02.04		Badan Pendapatan Daerah		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketetapan pajak daerah yang diterbitkan	80%	99.96%	124.95%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
05.02.04		Badan Pendapatan Daerah			Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	65%	67.19%	103.37%			
05.02.04		Badan Pendapatan Daerah			Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	55%	74.04%	134.63%			
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan Pajak Daerah	547650 Objek Pajak	549323 Objek Pajak	100.31%			
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	71268 Objek Pajak	78533 Objek Pajak	110.19%			
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	253518 Objek Pajak	254734 Objek Pajak	100.48%			
5.02.04.2.01		Badan Pendapatan Daerah			Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	823518 Objek Pajak	832668 Objek Pajak	101.11%			
1046		Badan Pendapatan Daerah		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan PBB dan BPHTB	547650 Objek Pajak	549323 Objek Pajak	100.31%			
1067		Badan Pendapatan Daerah		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Penagihan, Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan serta pengurangan, angsuran, restitusi, kompensasi, keberatan dan Penghapusan Piutang Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, PPJ dan Pajak Parkir yang dilayani	71268 Objek Pajak	78533 Objek Pajak	110.19%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1117		Badan Pendapatan Daerah		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerahh Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hiburan, Reklame dan Air Tanah	253518 Objek Pajak	254734 Objek Pajak	100.48%			
1123		Badan Pendapatan Daerah		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	823518 Objek Pajak	832668 Objek Pajak	101.11%			
3462		Badan Pendapatan Daerah		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 bulan	12 bulan	100.00%			
05.03.01	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	89%	92.55%	103.99%			1. Peningkatan kesejahteraan ASN diberikan sesuai dengan kompetensi beban kerja dan kondisi kerja sesuai dengan ketentuan.
5.03.01.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			2. Penggajian dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
858		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			3. Psikotest diadakan sebagai pendukung penentuan talenta pada penerapan manajemen Talenta pada ASN. Psikotest pada tenaga kontrak dilakukan sesuai dengan evaluasi Pembuat Komitmen pada Perangkat
5.03.01.2.06		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
862		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100%	100%	100.00%			Daerah bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. 4. BKPSDM telah menyusun rencana kebutuhan ASN 5 tahun kedepan sesuai dengan standar kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan turunannya(PP, PermenpanRB, dan Perka BKN) yang meliputi standar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, standar pola karier, standar penilaian kinerja.
5.03.01.2.08		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00%			5. Telah dilakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan peningkatan kompetensi kepada seluruh ASN. Kota Surabaya telah mengimplementasikan sistem merit dengan membangun aplikasi sistem merit online (SIMATA SYANAS) (Sistem Informasi Manajemen Talenta Surabaya Naik Kelas). Nilai Sistem Merit Kota Surabaya Tahun 2022 dengan kategori Baik (341,5)
859		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00%			
05.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase keterisian pegawai sesuai ABK pada Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%			
05.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang berkinerja minimal baik	91%	100%	109.89%			
05.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang disiplin	96.21%	96.76%	100.58%			
05.03.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Persentase pegawai yang telah mengikuti asesmen	29.64%	37.57%	126.74%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5.03.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Surabaya	90%	99.95%	111.06%			
266		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan yang dikirim tepat waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%			
267		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah tahapan seleksi penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN)	2 Tahap Seleksi	2 Tahap Seleksi	100.00%			
268		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang dikelola	8537 Data pegawai	9659 Data pegawai	113.14%			
5.03.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah berkas mutasi, promosi dan rotasi jabatan serta penataan administrasi kepegawaian	8650 berkas	9659 berkas	111.66%			
263		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas mutasi ASN	200 berkas	805 berkas	402.50%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
264		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas penataan administrasi kepegawaian	8437 berkas	8841 berkas	104.79%			
265		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah berkas promosi dan rotasi jabatan ASN	13 berkas	13 berkas	100.00%			
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah intervensi peningkatan kinerja aparatur	2 jenis	2 jenis	100.00%			
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Jumlah jenis intervensi asesmen pegawai	1 jenis	1 jenis	100.00%			
5.03.02.2.04		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			Jumlah Jenis intervensi Disiplin	5 jenis	5 jenis	100.00%			
757		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah jenis intervensi pengelolaan disiplin pegawai yang diberikan	5 jenis	5 jenis	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
763		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	6398 orang	6364 orang	99.47%	Penyesuaian data kepegawaian setelah adanya Pensiun/Meninggal/Pindah	Target harus disesuaikan dengan jumlah eksisting (karena target yang digunakan adalah data dua tahun sebelumnya)	
3528		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pelaksanaan asesmen pegawai	5 kali	6 kali	120.00%			
05.04.02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pegawai yang pemahamannya meningkat setelah mengikuti diklat/pelatihan/e-learning	94%	98.31%	104.58%			1. Kehadiran ASN telah dipantau melalui aplikasi Tekocak, pengembangan Potensi dilakukan melalui pengembangan Manajemen Talenta di BKPSDM.
5.04.02.2.01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	3393 orang	3574 orang	105.33%			
795		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah orang yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	3393 orang	3574 orang	105.33%			
5.04.02.2.02		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	869 orang	927 orang	106.67%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
791		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	869 orang	927 orang	106.67%			
05.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase rekomendasi penelitian dan pengembangan inovasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%			
5.05.02.2.04		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100.00%			
1388		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3430		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 - Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 - Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah dokumen pengembangan inovasi yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00%			



3.1.2.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Unsur pengawasan urusan pemerintahan mencakup Urusan Pemerintahan bidang Inspektorat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan di Kota Surabaya pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kota Surabaya tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.22
Capaian Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
06.01.01	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	92.81%	92.81%	Efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan prioritas.	akan dilakukan optimalisasi pemberian pelayanan kesekretariatan untuk seluruh pegawai di Inspektorat	1. Pemerintah Kota Surabaya membangun aplikasi e-audit yang mengakomodir kegiatan-kegiatan pendampingan dan pengawasan pada Perangkat Daerah, serta pembangunan aplikasi penanganan pengaduan masyarakat (Whistleblowing System (WBS)). 2. Terkait data pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan ditindaklanjuti dengan Surat Teguran, telah diakomodir melalui aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Pencatatan Pelanggaran Disiplin Pegawai) yang datanya bersumber dari BKPSDM. Aplikasi SIGAP telah terintegrasi dengan Sistem Merit
6.01.01.2.02		Inspektorat	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1489		Inspektorat	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
6.01.01.2.06		Inspektorat	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.00%			
1599		Inspektorat	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100.00%			
6.01.01.2.08		Inspektorat	- Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	84.76%	84.76%	perlu penyesuaian terhadap TKDN	Dilakukan penyesuaian terhadap TKDN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1602		Inspektorat	Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	84.76%	84.76%	perlu penyesuaian terhadap TKDN	Dilakukan penyesuaian terhadap TKDN	BKPSDM terkait informasi pelanggaran disiplin pegawai. Namun, data detail terkait kasus pelanggaran administrasi tersebut hanya bisa diakses oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Inspektur, dan Kepala BPKSDM karena untuk menjaga kerahasiaan, etika, dan privasi 3. Pendampingan telah dilakukan secara berkala untuk seluruh Perangkat Daerah dan 2 RSUD terkait penatausahaan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BMD dan permakanan. Pengawasan dilakukan pada Perangkat Daerah yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisa potensi risiko.
06.01.02		Inspektorat		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100%	100%	100.00%			
06.01.02		Inspektorat				Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100%	100%	100.00%			
06.01.02		Inspektorat				Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100%	100%	100.00%			
6.01.02.2.01		Inspektorat			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan	12 Dokumen	17 Dokumen	141.67%			
6.01.02.2.01		Inspektorat				Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	12 Rekomendasi	14 Rekomendasi	116.67%			
6.01.02.2.01		Inspektorat				Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	69 lembaga	69 lembaga	100.00%			
1560		Inspektorat				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah frekuensi pelaksanaan pengawasan keuangan	69 Kali	71 Kali	102.90%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1563		Inspektorat			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah lembaga atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang dimonitoring	60 Lembaga	70 Lembaga	116.67%		
3286		Inspektorat			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah frekuensi reviu laporan kinerja	10 Kali	10 Kali	100.00%		
3287		Inspektorat			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah frekuensi reviu laporan keuangan	5 Kali	7 Kali	140.00%		
6.01.02.2.02		Inspektorat			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	24 lembaga	120.00%		
1566		Inspektorat			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah frekuensi pelaksanaan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 kali	24 kali	120.00%		
3446		Inspektorat			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penanganan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4 Kali	4 Kali	100.00%		
06.01.03		Inspektorat			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100%	100%	100.00%		
06.01.03		Inspektorat				Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100.00%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
06.01.03		Inspektorat			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%			
6.01.03.2.01		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	7 dokumen	175.00%			
1564		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah frekuensi Kebijakan teknis di bidang pengawasan yang dirumuskan	4 kali	4 kali	100.00%			
3282		Inspektorat		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah frekuensi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	4 kali	4 kali	100.00%			
6.01.03.2.02		Inspektorat		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00%			
6.01.03.2.02		Inspektorat			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60 Lembaga	60 Lembaga	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1565		Inspektorat			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah frekuensi pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah	60 Kali	60 Kali	100.00%		
3288		Inspektorat			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Kali	21 Kali	105.00%		
3289		Inspektorat			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah frekuensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	48 Kali	50 Kali	104.17%		
3290		Inspektorat			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah frekuensi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 Kali	12 Kali	100.00%		



3.1.2.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Kewilayahan ini meliputi Bidang Kecamatan yang dilaksanakan oleh 31 Kecamatan.

Pelaksanaan unsur Kewilayahan di Kota Surabaya pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Kewilayahan Kota Surabaya tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.23
Capaian Unsur Kewilayahan Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01.01	KECAMATAN	Kec. Genteng	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.3 %	92.5567 %	95.13 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasaran dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan		
7.01.01.2.02		Kec. Genteng	-Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
843		Kec. Genteng			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Genteng	-Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	89.75 %	89.75 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1840		Kec. Genteng	-Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	89.75 %	89.75 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			-Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022 -Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Surabaya								dan Perlengkapan Kantor	dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Genteng			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	72.06 %	72.06 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan		
1841		Kec. Genteng			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	72.06 %	72.06 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan		
7.01.02		Kec. Genteng		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	98.9772 %	98.98 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Genteng					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Genteng					Persentase usulan Musrenbang	16.67 %	40.0943 %	240.52 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kecamatan yang dipertimbangkan						
7.01.02.2.01		Kec. Genteng		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
1775		Kec. Genteng		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	80 Orang	80 Orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Genteng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	364 Lembaga	364 Lembaga	100.00 %			
1811		Kec. Genteng		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Genteng		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Genteng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Genteng			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1823		Kec. Genteng			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3600 Berkas	3816 Berkas	106.00 %			
1825		Kec. Genteng			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %			
1862		Kec. Genteng			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	49 berkas	46 berkas	93.88 %	Kurangnya pemahaman warga terkait tertib perizinan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
7.01.03		Kec. Genteng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindakkanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Genteng			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Genteng		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Genteng			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %			
1829		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
1830		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	2 RW	2 RW	100.00 %			
1831		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
1832		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
1833		Kec. Genteng		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	16 RW	16 RW	100.00 %			
1834		Kec. Genteng		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1835		Kec. Genteng				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %		
1836		Kec. Genteng				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %		
1837		Kec. Genteng				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %		
1838		Kec. Genteng				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	16 RW	16 RW	100.00 %		
2526		Kec. Genteng				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	10 Kali	100.00 %		
7.01.03.2.03		Kec. Genteng				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	48 Lembaga	53 Lembaga	110.42 %		
3219		Kec. Genteng				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	59 Kali	122.92 %		
7.01.04		Kec. Genteng		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan		100 %	100 %	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pelanggaran Perda di Kecamatan						
7.01.04.2.01		Kec. Genteng		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %			
1842		Kec. Genteng		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Genteng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Genteng		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	9 Kasus	12 Kasus	133.33 %			
7.01.05.2.01		Kec. Genteng			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
1844		Kec. Genteng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi	4 Kali	4 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	dan Pembinaan terhadap RT						
1886		Kec. Genteng			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	9 Kasus	12 Kasus	133.33 %			
7.01.01		Kec. Simokerto		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.43 %	95.27 %	97.78 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Simokerto			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
378		Kec. Simokerto			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Simokerto			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	88.57 %	88.57 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
905		Kec. Simokerto				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	88.57 %	88.57 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Simokerto				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	84.85 %	84.85 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1333		Kec. Simokerto				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	84.85 %	84.85 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Simokerto		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	99.2095 %	99.21 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Simokerto			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	39.18 %	65.9864 %	168.42 %			
7.01.02.2.01		Kec. Simokerto		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	5 lembaga	10 lembaga	200.00 %			
3073		Kec. Simokerto		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	100 orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Simokerto		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	356 lembaga	356 lembaga	100.00 %			
1788		Kec. Simokerto		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Simokerto			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1790		Kec. Simokerto			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	64 Berkas	52 Berkas	81.25 %	Kurangnya kesadaran sebagian kecil warga dalam mengurus IMB.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1791		Kec. Simokerto			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	11000 Berkas	11052 Berkas	100.47 %		
1792		Kec. Simokerto			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Simokerto		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03		Kec. Simokerto			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Simokerto			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %			
3115		Kec. Simokerto		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali	10 kali	100.00 %			
3123		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
3128		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
3132		Kec. Simokerto		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3137		Kec. Simokerto			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %		
3138		Kec. Simokerto			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	14 RW	14 RW	100.00 %		
3147		Kec. Simokerto			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %		
3149		Kec. Simokerto			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %		
3150		Kec. Simokerto			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
3154		Kec. Simokerto			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	14 RW	100.00 %		
3155		Kec. Simokerto			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %		
7.01.03.2.03		Kec. Simokerto			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	50 Lembaga	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3114		Kec. Simokerto			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	74 Kali	154.17 %			
7.01.04		Kec. Simokerto		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Simokerto			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	29 Lokasi	207.14 %			
3118		Kec. Simokerto			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.05		Kec. Simokerto		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	7 Kasus	8 Kasus	114.29 %			
7.01.05.2.01		Kec. Simokerto				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional						
3119		Kec. Simokerto			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			
3120		Kec. Simokerto			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus	10 Kasus	142.86 %			
7.01.01		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.95 %	91.9242 %	93.85 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Tegalsari			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1175		Kec. Tegalsari			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Tegalsari			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	86.29 %	86.29 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2310		Kec. Tegalsari			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	86.29 %	86.29 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Tegalsari			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	84.48 %	84.48 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2755		Kec. Tegalsari			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	84.48 %	84.48 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
7.01.02		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	85.4877 %	85.49 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									spesifikasi yang dibutuhkan	kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Tegalsari			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Tegalsari			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.25 %	66.6667 %	286.74 %			
7.01.02.2.0 1		Kec. Tegalsari			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %		
2292		Kec. Tegalsari			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang	100 Orang	100.00 %		
7.01.02.2.0 2		Kec. Tegalsari			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	365 Lembaga	365 Lembaga	100.00 %		
2580		Kec. Tegalsari			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	5 Bidang Urusan	83.33 %	Minimnya kemampuan petugas di lapangan untuk pengetahuan di bidang ini	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan dan PD dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelimpahan wewenang	
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tegalsari			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2289		Kec. Tegalsari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	3 Laporan	75.00 %	Kurangnya koordinasi dalam pelaporan pelaksanaan pelimpahan kewenangan di kecamatan	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan dan PD dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelimpahan wewenang	
2296		Kec. Tegalsari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	11200 Berkas	10397 Berkas	92.83 %	kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus surat2 adminduk	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
												kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam peningkatan pelayanan non perizinan	
2297		Kec. Tegalsari				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	138 Berkas	109 Berkas	78.99 %	1.Minimnya kesadaran warga dalam pengurusan IMB perubahan bangunan di wilayah 2.Keterbatasan lahan di wilayah yg mengakibatkan minimnya pengurusan IMB bangunan baru.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
7.01.03		Kec. Tegalsari		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Tegalsari					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	99.1803 %	99.18 %	Adanya dukungan dari RT, RW, LPMK serta PD dalam menjaring masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam peningkatan perekonomian	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam proses pendataan, pendampingan dan sosialisasi potensi usaha di wilayah kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Tegalsari			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %			
3090		Kec. Tegalsari		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	10 Kali	100.00 %			
3101		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	7 RW	4 RW	57.14 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3102		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
3103		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
3104		Kec. Tegalsari		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	10 RW	8 RW	80.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						prasarananya direalisasikan				dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3105		Kec. Tegalsari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	14 RW	11 RW	78.57 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3106		Kec. Tegalsari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	4 RW	57.14 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3107		Kec. Tegalsari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
3108		Kec. Tegalsari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
3109		Kec. Tegalsari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3110		Kec. Tegalsari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	7 RW	50.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.03.2.03		Kec. Tegalsari			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	192 Lembaga	242 Lembaga	126.04 %			
3082		Kec. Tegalsari			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	57 Kali	118.75 %			
7.01.04		Kec. Tegalsari			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Tegalsari			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	21 Lokasi	22 Lokasi	104.76 %			
3060		Kec. Tegalsari			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 Kali	365 Kali	101.39 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05		Kec. Tegalsari		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	62 Kasus	39 Kasus	62.90 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Tegalsari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3061		Kec. Tegalsari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	20 Kali	2 Kali	10.00 %	kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan RT	
3062		Kec. Tegalsari		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	38 Kasus	39 Kasus	102.63 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Bubutan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.94 %	91.7075 %	95.59 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Bubutan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1491		Kec. Bubutan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Bubutan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	90.89 %	90.89 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2288		Kec. Bubutan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	90.89 %	90.89 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Bubutan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2294		Kec. Bubutan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Bubutan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	84.7632 %	84.76 %	Masih banyak pelaku usaha yang belum ber NIB atau masih dalam proses pengurusan NIB	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Bubutan				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Bubutan				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %	68.2927 %	299.27 %			
7.01.02.2.01		Kec. Bubutan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	13 Lembaga	216.67 %			
1923		Kec. Bubutan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 Orang	76 Orang	50.67 %	Terdapatnya jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan dikarenakan adanya warga/peserta yang sudah tidak menjabat sebagai pengurus	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											kampung (Ketua RW dll) dan karena pelaksanaan musrenbang kecamatan dilakukan via daring sehingga ada yang tidak terdata kehadirannya.	pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.0 2		Kec. Bubutan				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	414 Lembaga	414 Lembaga	100.00 %			
1939		Kec. Bubutan				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Bubutan				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	5 Bidang Urusan	83.33 %	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan bulan tetapi sesuai dengan F1	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan dan PD dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelimpahan wewenang	
7.01.02.2.0 4		Kec. Bubutan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Bubutan					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					non usaha yang dilimpahkan kepada Camat						
1724		Kec. Bubutan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	45 Berkas	28 Berkas	62.22 %	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani kurang karena status tanah / status lahan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1725		Kec. Bubutan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2697 Berkas	1964 Berkas	72.82 %	Karena pelayanan sudah menerapkan sistem online mandiri.	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam peningkatan pelayanan non perizinan
1726		Kec. Bubutan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Bubutan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Bubutan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	126.7905 %	126.79 %			
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Bubutan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100.00 %			
1784		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
1786		Kec. Bubutan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
1865		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
1868		Kec. Bubutan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	2 RW	20.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1870		Kec. Bubutan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	6 RW	66.67 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
1872		Kec. Bubutan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	9 RW	90.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
1873		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
1876		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
1877		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
1878		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1888		Kec. Bubutan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	10 Kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Bubutan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	400 Lembaga	478 Lembaga	119.50 %			
1764		Kec. Bubutan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	55 Kali	114.58 %			
7.01.04		Kec. Bubutan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Bubutan			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %			
1758		Kec. Bubutan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	363 Kali	100.83 %			
7.01.05		Kec. Bubutan		PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase penanganan potensi konflik tidak	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan						
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	39 Kasus	43 Kasus	110.26 %			
7.01.05.2.01		Kec. Bubutan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
1755		Kec. Bubutan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	2 Kali	50.00 %	tidak mengadakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional karena target sudah terpenuhi pada bulan maret 2022 di Kelurahan Alun-Alun Contong	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan RT	
1756		Kec. Bubutan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 Kasus	43 Kasus	97.73 %	Adanya dukungan dari 3 pilar dalam pelaksanaan penanganan potensi konflik	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.69 %	96.425 %	97.70 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Kenjeran		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
488		Kec. Kenjeran		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Kenjeran		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2955		Kec. Kenjeran		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.09		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2956		Kec. Kenjeran		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase data terverifikasi yang	100 %	88.8139 %	88.81 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan	Meningkatkan koordinasi antar	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dibutuhkan Perangkat Daerah				sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Kenjeran			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Kenjeran			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	17.19 %	76.2658 %	443.66 %			
7.01.02.2.01		Kec. Kenjeran		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	4 Lembaga	66.67 %	Kurangnya koordinasi dan persiapan dalam pelaksanaan musrenbang secara daring	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
1728		Kec. Kenjeran		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 orang	44 orang	29.33 %	Kurangnya koordinasi dan persiapan dalam pelaksanaan musrenbang secara daring	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.0 2		Kec. Kenjeran			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	460 Lembaga	460 Lembaga	100.00 %			
1774		Kec. Kenjeran			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Kenjeran			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Kenjeran				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Kenjeran				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1780		Kec. Kenjeran			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	278 berkas	250 berkas	89.93 %	Optimalnya sumber daya di kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										kewenangan sesuai ketentuan.	keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
2121		Kec. Kenjeran			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	10287 berkas	10603 berkas	103.07 %			
2127		Kec. Kenjeran			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %			
7.01.03		Kec. Kenjeran		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Kenjeran				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Kenjeran				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %			
2272		Kec. Kenjeran		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah RW yang usulan sarana dan	14 RW	14 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						prasarananya direalisasikan						
2273		Kec. Kenjeran			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	9 RW	90.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2274		Kec. Kenjeran			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2276		Kec. Kenjeran			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
2277		Kec. Kenjeran			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	14 RW	100.00 %			
2278		Kec. Kenjeran			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2280		Kec. Kenjeran			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2281		Kec. Kenjeran			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2959		Kec. Kenjeran			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	8 Kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Kenjeran			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	500 pelaku usaha	518 pelaku usaha	103.60 %			
3465		Kec. Kenjeran			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100 kali	127 kali	127.00 %			
7.01.04		Kec. Kenjeran		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Kenjeran			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	10 Lokasi	10 Lokasi	100.00 %			
2914		Kec. Kenjeran			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	360 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Kenjeran		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.0 1		Kec. Kenjeran			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	47 Kasus	195.83 %			
7.01.05.2.0 1		Kec. Kenjeran				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2922		Kec. Kenjeran			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			
2923		Kec. Kenjeran			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	30 kasus	47 kasus	156.67 %			
7.01.01		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.55 %	92.5792 %	94.90 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
827		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Pabean Cantian		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	95.95 %	95.95 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2322		Kec. Pabean Cantian		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	95.95 %	95.95 %	Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Pabean Cantian		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	92.59 %	92.59 %	Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2323		Kec. Pabean Cantian			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	92.59 %	92.59 %	Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	96.3145 %	96.31 %	Kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam melakukan survey	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Pabean Cantian				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Pabean Cantian				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	15 %	67.7966 %	451.98 %			
7.01.02.2.01		Kec. Pabean Cantian			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
2050		Kec. Pabean Cantian			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	50 Orang	50 Orang	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Pabean Cantian			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	376 Lembaga	376 Lembaga	100.00 %		
2076		Kec. Pabean Cantian			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Pabean Cantian				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
2077		Kec. Pabean Cantian			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	62 Berkas	61 Berkas	98.39 %	adanya aturan yang tidak sinkron terkait pengurusan IMB lahan milik pelabuhan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2078		Kec. Pabean Cantian			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5291 Berkas	5291 Berkas	100.00 %			
2079		Kec. Pabean Cantian			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %			
7.01.03		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Pabean Cantian				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Pabean Cantian				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %			
2057		Kec. Pabean Cantian		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali	10 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2060		Kec. Pabean Cantian			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
2061		Kec. Pabean Cantian			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
2062		Kec. Pabean Cantian			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	5 RW	50.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2063		Kec. Pabean Cantian			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	8 RW	66.67 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2064		Kec. Pabean Cantian			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
2065		Kec. Pabean Cantian			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2066		Kec. Pabean Cantian			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
2067		Kec. Pabean Cantian			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2069		Kec. Pabean Cantian			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
2071		Kec. Pabean Cantian			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Pabean Cantian			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	50 Lembaga	54 Lembaga	108.00 %			
3121		Kec. Pabean Cantian			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	51 Kali	106.25 %			
7.01.04		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Pabean Cantian			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang dipantau dan ditertibkan						
2073		Kec. Pabean Cantian		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	360 Kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Pabean Cantian		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	28 Kasus	140.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Pabean Cantian			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2074		Kec. Pabean Cantian		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			
2075		Kec. Pabean Cantian		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	20 Kasus	28 Kasus	140.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Peraturan Perundang-Undangan							
7.01.01		Kec. Semampir		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	94,92 %	93.315 %	98,31 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Semampir			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
964		Kec. Semampir			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Semampir			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2282		Kec. Semampir			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.09		Kec. Semampir			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2284		Kec. Semampir			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kantor atau Bangunan Lainnya							
7.01.02		Kec. Semampir		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Semampir				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Semampir				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %	65.3409 %	286.33 %			
7.01.02.2.01		Kec. Semampir		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %			
2115		Kec. Semampir		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	285 Orang	379 Orang	132.98 %			
7.01.02.2.02		Kec. Semampir		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	636 Lembaga	636 Lembaga	100.00 %			
2275		Kec. Semampir		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Semampir			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Semampir				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
2124		Kec. Semampir			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	24 Berkas	25 Berkas	104.17 %		
2126		Kec. Semampir			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7927 Berkas	7928 Berkas	100.01 %		
7.01.03		Kec. Semampir			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %		
7.01.03		Kec. Semampir				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Semampir			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Semampir			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %			
3203		Kec. Semampir			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	10 Kali	100.00 %		
3205		Kec. Semampir			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	14 RW	100.00 %		
3206		Kec. Semampir			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	16 RW	16 RW	100.00 %		
3207		Kec. Semampir			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	17 RW	17 RW	100.00 %		
3208		Kec. Semampir			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %		
3209		Kec. Semampir			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3210		Kec. Semampir			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	14 RW	14 RW	100.00 %			
3211		Kec. Semampir			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
3212		Kec. Semampir			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
3213		Kec. Semampir			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	16 RW	9 RW	56.25 %	Adanya kendala perubahan lokasi pembangunan yang terlambat sehingga tidak terakomodir dalam perubahan anggaran 2022.	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3214		Kec. Semampir			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	17 RW	15 RW	88.24 %	Belum adanya tempat penyimpanan yang dimiliki RW penerima manfaat, sehingga tidak terealisasi.	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.03.2.03		Kec. Semampir			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	140 Unit Usaha	140 Unit Usaha	100.00 %			
3204		Kec. Semampir			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	82 Kali	170.83 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04		Kec. Semampir		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Semampir		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	16 Lokasi	16 Lokasi	100.00 %			
3053		Kec. Semampir		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	364 Kali	101.11 %			
7.01.05		Kec. Semampir		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Semampir		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	21 Kasus	21 Kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Semampir			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3054		Kec. Semampir			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	5 Kali	100.00 %			
3055		Kec. Semampir			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	21 Kasus	21 Kasus	100.00 %			
7.01.01		Kec. Krembangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.25 %	93.99 %	96.65 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Krembangan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
548		Kec. Krembangan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Krembangan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
1280		Kec. Krembangan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Krembangan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	87.84 %	87.84 %	Menyesuaikan dengan kebutuhan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
549		Kec. Krembangan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	87.84 %	87.84 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Krembangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	89.1578 %	89.16 %	Kompleksnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Krembangan			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Krembangan			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	37.11 %	65.4378 %	176.33 %			
7.01.02.2.01		Kec. Krembangan		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan						
1722		Kec. Krembangan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	150 orang	80 orang	53.33 %	Menyesuaikan dengan jumlah perwakilan yang hadir untuk setiap sektor/keompok masyarakat	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.02		Kec. Krembangan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	431 Lembaga	431 Lembaga	100.00 %			
1746		Kec. Krembangan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Krembangan			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1818		Kec. Krembangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	141 berkas	117 berkas	82.98 %	masih kurangnya kesadaran warga untuk mengurus SKRK dan IMB	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1819		Kec. Krembangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	14379 berkas	15226 berkas	105.89 %		
1820		Kec. Krembangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	3 laporan	75.00 %	Perlunya komitmen terhadap jadwal perencanaan penyusunan laporan	Perlu adanya komitmen antara Kecamatan dan PD dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelimpahan wewenang
7.01.03		Kec. Krembangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Krembangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Krembangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %			
2082		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	19 RW	211.11 %			
2083		Kec. Krembangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	18 RW	200.00 %			
2117		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %			
2156		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	13 RW	13 RW	100.00 %			
2159		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	16 RW	200.00 %			
2160		Kec. Krembangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2187		Kec. Krembangan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %		
2188		Kec. Krembangan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %		
2190		Kec. Krembangan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	13 RW	13 RW	100.00 %		
2191		Kec. Krembangan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %		
2503		Kec. Krembangan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 Kali	10 Kali	100.00 %		
7.01.03.2.03		Kec. Krembangan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	345 Pelaku Usaha	257 Pelaku Usaha	74.49 %	Kendala dalam mengidentifikasi jenis dan skala potensi usaha serta kondisi/situasi yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan intervensi	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan
3268		Kec. Krembangan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	48 Kali	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04		Kec. Krembangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Krembangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %			
1794		Kec. Krembangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Krembangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	19 Kasus	79.17 %	Menyesuaikan dengan konflik yang terjadi di lapangan pada tahun 2022	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Krembangan			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1821		Kec. Krembangan			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	2 kali	50.00 %	Perlunya komitmen terhadap jadwal perencanaan penyusunan laporan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan RT	
1822		Kec. Krembangan			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 kasus	19 kasus	79.17 %	Menyesuaikan dengan konflik yang terjadi di lapangan pada tahun 2022	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.01		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.2 %	93.5558 %	96.25 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Tambaksari			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1504		Kec. Tambaksari			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Tambaksari		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	91.39 %	91.39 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2405		Kec. Tambaksari		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	91.39 %	91.39 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	73.68 %	73.68 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2407		Kec. Tambaksari		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	73.68 %	73.68 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase data terverifikasi yang	100 %	96.7153 %	96.72 %	banyaknya data yang kurang valid	Meningkatkan koordinasi antar	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dibutuhkan Perangkat Daerah					personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Tambaksari			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Tambaksari			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	40.82 %	79.7048 %	195.26 %			
7.01.02.2.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	3 Lembaga	50.00 %	Adanya usulan yang sudah menjadi prioritas namun belum terealisasi oleh OPD terkait.	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
2325		Kec. Tambaksari		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	100 orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Tambaksari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang	749 Lembaga	749 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan						
2430		Kec. Tambaksari			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	12 kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tambaksari				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2347		Kec. Tambaksari			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2357		Kec. Tambaksari				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	198 berkas	102 berkas	51.52 %	kurangnya sdm untuk memahami dan malasnya untuk datang mengurus (kurang paham)	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
2366		Kec. Tambaksari				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	12462 berkas	12655 berkas	101.55 %		
7.01.03		Kec. Tambaksari				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %		
7.01.03		Kec. Tambaksari					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	2 kelurahan	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Tambaksari					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan	8 kelurahan	100.00 %		
2844		Kec. Tambaksari				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	16 kali	16 kali	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2851		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2853		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2854		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2867		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2870		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2871		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2872		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
2873		Kec. Tambaksari			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2879		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2880		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2881		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2882		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2883		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2884		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2885		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
2886		Kec. Tambaksari			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Tambaksari		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha	117 pelaku usaha	78.00 %	faktor tenaga kerja dan sarana prasarana yg mendukung	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3267		Kec. Tambaksari		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	50 kali	104.17 %			
7.01.04		Kec. Tambaksari		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Tambaksari		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	25 lokasi	28 lokasi	112.00 %			
3270		Kec. Tambaksari		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	365 kali	101.39 %			
7.01.05		Kec. Tambaksari		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	94.7368 %	94.74 %	monimnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan sehingga masih menimbulkan konflik sosial yang terkadang	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									sulit untuk melakukan mediasi	penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	36 kasus	42 kasus	116.67 %			
7.01.05.2.01		Kec. Tambaksari			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3271		Kec. Tambaksari		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			
3272		Kec. Tambaksari		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	36 kasus	45 kasus	125.00 %			
7.01.01		Kec. Gubeng		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.85 %	93.0017 %	96.03 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Gubeng		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
614		Kec. Gubeng		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Gubeng		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	97.05 %	97.05 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2857		Kec. Gubeng		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	97.05 %	97.05 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Gubeng		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	92.42 %	92.42 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2858		Kec. Gubeng		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana gedung	100 %	92.42 %	92.42 %	Belum optimalnya perencanaan dan	Evaluasi berkala untuk memonitor	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Gubeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	98.8774 %	98.88 %	Kompleksnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Gubeng				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Gubeng				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	20.59 %	52.9851 %	257.33 %			
7.01.02.2.01		Kec. Gubeng			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %			
1727		Kec. Gubeng			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	86 Orang	86 Orang	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Gubeng			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	480 Lembaga	480 Lembaga	100.00 %		
1730		Kec. Gubeng			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	12 kali	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Gubeng				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
1734		Kec. Gubeng			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	156 berkas	105 berkas	67.31 %	1. Banyak rumah tinggal dan non rumah tinggal dengan kewenangan kecamatan yang merupakan Surat Ijo; 2. Kesadaran pemilik bangunan untuk pentingnya mengurus IMB ataupun	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										perubahan IMB; 3. Persyaratan pengurusan IMB yang dirasa memberatkan bagi sebagian pemilik bangunan (sanksi atau biaya pengurusan).		
1742		Kec. Gubeng				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3254 berkas	3254 berkas	100.00 %		
1749		Kec. Gubeng				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Gubeng		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Gubeng				Persentase potensi usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Gubeng				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1757		Kec. Gubeng			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2469		Kec. Gubeng			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2473		Kec. Gubeng			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2492		Kec. Gubeng			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2612		Kec. Gubeng			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2627		Kec. Gubeng			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2629		Kec. Gubeng			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2637		Kec. Gubeng			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2643		Kec. Gubeng			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	13 RW	118.18 %			
2652		Kec. Gubeng			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	13 RW	13 RW	100.00 %			
2656		Kec. Gubeng			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2657		Kec. Gubeng			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	7 RW	87.50 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2850		Kec. Gubeng			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Gubeng			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	90 Unit Kerja	82 Unit Kerja	91.11 %	Peran serta UMKM dalam proses pendataan serta kemudahan pengurusan perijinan oleh dinas terkait	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3273		Kec. Gubeng			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	48 Kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Gubeng		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Gubeng			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	49 Lokasi	204.17 %			
3274		Kec. Gubeng			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	362 Kali	100.56 %			
7.01.05		Kec. Gubeng		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	30 Kasus	125.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Gubeng				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional						
3275		Kec. Gubeng		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			
3276		Kec. Gubeng		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 Kasus	30 Kasus	125.00 %			
7.01.01		Kec. Rungkut		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.66 %	89.8708 %	92.98 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Rungkut		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
781		Kec. Rungkut		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Rungkut		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	91.74 %	91.74 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2545		Kec. Rungkut			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	91.74 %	91.74 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Rungkut			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2546		Kec. Rungkut			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Rungkut			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	67.9862 %	67.99 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Rungkut				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Rungkut			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	28 %	47.3684 %	169.17 %			
7.01.02.2.0 1		Kec. Rungkut		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %			
2094		Kec. Rungkut		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	36 Orang	36 Orang	100.00 %			
7.01.02.2.0 2		Kec. Rungkut		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	488 Lembaga	488 Lembaga	100.00 %			
2099		Kec. Rungkut		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Rungkut		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Rungkut			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dilimpahkan kepada Camat						
7.01.02.2.04		Kec. Rungkut			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2138		Kec. Rungkut			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	12742 berkas	24141 berkas	189.46 %		
2916		Kec. Rungkut			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %		
2917		Kec. Rungkut			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	395 Berkas	281 Berkas	71.14 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib mengurus IMB dan SKRK	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
7.01.03		Kec. Rungkut		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Rungkut			Persentase potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	70.9596 %	70.96 %	Masih terbatasnya antusiasme dari warga dalam mengembangkan potensi perekonomian	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Rungkut			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			
2197		Kec. Rungkut		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
2198		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	14 RW	127.27 %			
2199		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	24 RW	600.00 %			
2200		Kec. Rungkut		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	20 RW	200.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2202		Kec. Rungkut			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	21 RW	525.00 %			
2204		Kec. Rungkut			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	5 RW	9 RW	180.00 %			
2206		Kec. Rungkut			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	10 RW	333.33 %			
2209		Kec. Rungkut			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	22 RW	200.00 %			
2210		Kec. Rungkut			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	24 RW	200.00 %			
2212		Kec. Rungkut			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	14 RW	350.00 %			
2215		Kec. Rungkut			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	12 RW	171.43 %			
2217		Kec. Rungkut			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	13 RW	25 RW	192.31 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2218		Kec. Rungkut			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	14 RW	350.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Rungkut			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	305 Unit Usaha	281 Unit Usaha	92.13 %	banyak potensi usaha baru yang muncul dan pendataan berjalan dengan baik	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3135		Kec. Rungkut			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	312 Kali	312 Kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Rungkut		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Rungkut			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	22 Lokasi	23 Lokasi	104.55 %			
3141		Kec. Rungkut			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	408 Kali	408 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05		Kec. Rungkut		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	27 Kasus	112.50 %			
7.01.05.2.01		Kec. Rungkut				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3145		Kec. Rungkut			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	2 Kali	50.00 %	Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan bimtek wawasan kebangsaan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan RT	
3146		Kec. Rungkut			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 Kasus	27 Kasus	112.50 %			
7.01.01		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.96 %	93.05 %	94.99 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
698		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Gunung Anyar		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2583		Kec. Gunung Anyar		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.09		Kec. Gunung Anyar		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	94.23 %	94.23 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2584		Kec. Gunung Anyar		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	94.23 %	94.23 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	93.9394 %	93.94 %	Kompleksnya data yang dibutuhkan sehingga membutuhkan waktu lebih untuk melakukan verifikasi data sesuai dengan ketentuan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Gunung Anyar			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Gunung Anyar			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.14 %	51.8987 %	161.48 %			
7.01.02.2.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
2555		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	80 orang	80 orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Gunung Anyar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	217 Lembaga	217 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2560		Kec. Gunung Anyar			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Gunung Anyar				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2573		Kec. Gunung Anyar			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	331 berkas	215 berkas	64.95 %	- Anggapan administrasi yang memberatkan warga utamanya terkait biaya adminitrasi, - Anggapan persyaratan IMB sulit di mengerti oleh masyarakat, - Perlu diadakanya sosialisai terkait pengurusan IMB oleh Instansi terkait, - Masyarakat kurang memahami manfaat SKRK dan IMB.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2577		Kec. Gunung Anyar				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4553 berkas	4554 berkas	100.02 %		
2579		Kec. Gunung Anyar				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Gunung Anyar				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %		
7.01.03		Kec. Gunung Anyar					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Gunung Anyar					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %		
3085		Kec. Gunung Anyar				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	5 kali	62.50 %	Adanya komitmen dan koordinasi yang baik terutama dengan elemen masyarakat dalam pelaksanaan musbangkel	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musbangkel	
3089		Kec. Gunung Anyar				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %		
3091		Kec. Gunung Anyar				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %		
3092		Kec. Gunung Anyar				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %		
3093		Kec. Gunung Anyar				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	9 RW	3 RW	33.33 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan
3094		Kec. Gunung Anyar				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	4 RW	50.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3095		Kec. Gunung Anyar			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	4 RW	50.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3096		Kec. Gunung Anyar			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	5 RW	55.56 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3097		Kec. Gunung Anyar			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	8 RW	200.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Gunung Anyar			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	90.00 %	Tidak ada kendala	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3098		Kec. Gunung Anyar			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	53 Kali	110.42 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Gunung Anyar		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	15 Lokasi	100.00 %			
3099		Kec. Gunung Anyar		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 Kali	407 Kali	99.75 %	data dilapangan belum lengkap	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dalam penanganan pelanggaran Perda	
7.01.05		Kec. Gunung Anyar		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	39 kasus	162.50 %			
7.01.05.2.01		Kec. Gunung Anyar			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3100		Kec. Gunung Anyar			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			
3122		Kec. Gunung Anyar			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 kasus	39 kasus	162.50 %			
7.01.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	95.93 %	93.1017 %	97.05 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1423		Kec. Tenggilis Mejoyo			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Tenggilis Mejoyo			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	97.13 %	97.13 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2149		Kec. Tenggilis Mejoyo			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	97.13 %	97.13 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	83.33 %	83.33 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1427		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	83.33 %	83.33 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	97.1736 %	97.17 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan	35.21 %	74.0157 %	210.21 %			
7.01.02.2.0 1		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
1918		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	100 orang	100.00 %			
7.01.02.2.0 2		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	185 Lembaga	185 Lembaga	100.00 %			
1934		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	12 kali	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tenggilis Mejoyo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1965		Kec. Tenggilis Mejoyo				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	78 berkas	43 berkas	55.13 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib pengurusan IMB dan SKRK.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1967		Kec. Tenggilis Mejoyo				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2685 berkas	2686 berkas	100.04 %		
1971		Kec. Tenggilis Mejoyo				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PEMBERDAYAAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							
7.01.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Tenggilis Mejoyo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %			
2016		Kec. Tenggilis Mejoyo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	8 Kali	100.00 %			
2020		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2022		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %			
2025		Kec. Tenggilis Mejoyo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2026		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	9 RW	112.50 %			
2027		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2028		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %			
2029		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2030		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	9 RW	112.50 %			
7.01.03.2.03		Kec. Tenggilis Mejoyo			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.00 %			
3464		Kec. Tenggilis Mejoyo			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	49 Kali	102.08 %			
7.01.04		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 lokasi	14 lokasi	100.00 %			
2112		Kec. Tenggilis Mejoyo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 Kali	363 Kali	100.83 %			
7.01.05		Kec. Tenggilis Mejoyo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	30 kasus	125.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Tenggilis Mejoyo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2113		Kec. Tenggilis Mejoyo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2114		Kec. Tenggilis Mejoyo			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 kasus	30 kasus	125.00 %			
7.01.01		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.95 %	92.8108 %	95.73 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Sukolilo			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
816		Kec. Sukolilo			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Sukolilo			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	95.66 %	95.66 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
817		Kec. Sukolilo			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	95.66 %	95.66 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Sukolilo			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
819		Kec. Sukolilo			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	88.3871 %	88.39 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Sukolilo				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Sukolilo				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.8 %	62.9371 %	253.78 %			
7.01.02.2.01		Kec. Sukolilo			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	12 Lembaga	200.00 %			
1737		Kec. Sukolilo			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah masyarakat yang hadir dalam	220 Orang	207 Orang	94.09 %	Adanya sebagian kecil warga yang berhalangan untuk	Meningkatkan koordinasi antar personil	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan				hadir langsung di lokasi musrenbang	Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.0 2		Kec. Sukolilo			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	439 Lembaga	439 Lembaga	100.00 %			
1778		Kec. Sukolilo			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Sukolilo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Sukolilo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.0 4		Kec. Sukolilo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1779		Kec. Sukolilo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	217 berkas	153 berkas	70.51 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib IMB	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
1781		Kec. Sukolilo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %			
2673		Kec. Sukolilo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6162 berkas	6419 berkas	104.17 %			
7.01.03		Kec. Sukolilo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Sukolilo				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Sukolilo				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	7 kelurahan	7 kelurahan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						berdasarkan konsep inovasi						
2930		Kec. Sukolilo			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	14 Kali	8 Kali	57.14 %	Belum Adanya Usulan Pembangunan dari masyarakat	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musbangkel	
2935		Kec. Sukolilo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	9 RW	1 RW	11.11 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2937		Kec. Sukolilo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	3 RW	2 RW	66.67 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2938		Kec. Sukolilo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	9 RW	112.50 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2939		Kec. Sukolilo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	1 RW	1 RW	100.00 %			
2941		Kec. Sukolilo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	11 RW	6 RW	54.55 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2943		Kec. Sukolilo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	3 RW	25.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2944		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2945		Kec. Sukolilo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	1 RW	14.29 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2946		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	8 RW	88.89 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2947		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	9 RW	150.00 %			
2948		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2949		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
2950		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	8 RW	72.73 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2951		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	11 RW	137.50 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Sukolilo			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	181 Pelaku Usaha	176 Pelaku Usaha	97.24 %	Pendampingan kepada pelaku usaha mikro yang menjadi binaan kecamatan melalui pendataan, sosialisasi, pemantapan dan pelatihan dengan narasumber yang ahli di bidangnya serta kerjasama dengan OPD terkait, jajaran pendidikan (UKWM), SHS, PT Donarta Hakiki dan pelaku usaha yg berkembang.	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3074		Kec. Sukolilo			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	53 Kali	110.42 %			
7.01.04		Kec. Sukolilo			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	103.5533 %	103.55 %			
7.01.04.2.01		Kec. Sukolilo			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	11 Lokasi	11 Lokasi	100.00 %			
3083		Kec. Sukolilo			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	408 Kali	394 Kali	96.57 %	faktor penghambat nya adalah lambat untuk berkoordinasi	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dalam penanganan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											pelanggaran Perda	
7.01.05		Kec. Sukolilo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	85.7143 %	85.71 %	Minimnya toleransi dan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan sehingga masih menimbulkan konflik sosial yang terkadang sulit untuk dilakukan mediasi	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	5 Kasus	6 Kasus	120.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Sukolilo				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3112		Kec. Sukolilo			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			
3113		Kec. Sukolilo			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	7 Kasus	7 Kasus	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.94 %	92.3225 %	95.24 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Mulyorejo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1493		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Mulyorejo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	87.5 %	87.50 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1717		Kec. Mulyorejo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	87.5 %	87.50 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Mulyorejo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	80 %	80.00 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilit	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1720		Kec. Mulyorejo			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	80 %	80.00 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Mulyorejo				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Mulyorejo				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.91 %	54.0541 %	226.07 %			
7.01.02.2.01		Kec. Mulyorejo			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
1729		Kec. Mulyorejo			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	120 orang	120 orang	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Instansi Vertikal Terkait							
7.01.02.2.02		Kec. Mulyorejo			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	346 Lembaga	346 Lembaga	100.00 %			
1845		Kec. Mulyorejo			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Mulyorejo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1847		Kec. Mulyorejo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	479 berkas	303 berkas	63.26 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib mengurus IMB dan SKRK, khususnya	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										masyarakat menengah ke bawah.	keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
1850		Kec. Mulyorejo				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4222 berkas	5239 berkas	124.09 %		
1852		Kec. Mulyorejo				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Mulyorejo				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Mulyorejo				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			
2350		Kec. Mulyorejo				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	11 RW	12 RW	109.09 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						prasarananya direalisasikan						
2351		Kec. Mulyorejo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	9 RW	90.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2353		Kec. Mulyorejo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	6 RW	75.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2354		Kec. Mulyorejo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2355		Kec. Mulyorejo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	13 RW	12 RW	92.31 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2356		Kec. Mulyorejo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	5 RW	50.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2358		Kec. Mulyorejo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	12 RW	109.09 %			
2359		Kec. Mulyorejo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	9 RW	90.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2360		Kec. Mulyorejo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	5 RW	62.50 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2361		Kec. Mulyorejo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2363		Kec. Mulyorejo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	13 RW	7 RW	53.85 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2364		Kec. Mulyorejo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	6 RW	60.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2604		Kec. Mulyorejo			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	12 kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Mulyorejo			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	84 Pelaku Usaha	84.00 %	Kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang fasilitasi pendaftaran NIB di Kecamatan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3466		Kec. Mulyorejo			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	80 Kali	166.67 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.04		Kec. Mulyorejo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	109.3834 %	109.38 %			
7.01.04.2.01		Kec. Mulyorejo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	26 Lokasi	28 Lokasi	107.69 %			
1854		Kec. Mulyorejo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	408 kali	373 kali	91.42 %	Kurang sadarnya masyarakat tentang Undang Undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dalam penanganan pelanggaran Perda	
7.01.05		Kec. Mulyorejo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	25 Kasus	104.17 %			
7.01.05.2.01		Kec. Mulyorejo			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1856		Kec. Mulyorejo			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			
1857		Kec. Mulyorejo			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 kasus	25 kasus	104.17 %			
7.01.01		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.84 %	94.395 %	96.48 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Wonokromo			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1286		Kec. Wonokromo			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Wonokromo			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	97.24 %	97.24 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2309		Kec. Wonokromo				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	97.24 %	97.24 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Wonokromo				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2313		Kec. Wonokromo				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	91.5279 %	91.53 %	kurangnya sarana dan prasarana	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Wonokromo					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Wonokromo					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	35.29 %	54.9451 %	155.70 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %			
1744		Kec. Wonokromo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	102 Orang	102 Orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	568 Lembaga	568 Lembaga	100.00 %			
2732		Kec. Wonokromo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wonokromo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat						
1761		Kec. Wonokromo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	170 Berkas	125 Berkas	73.53 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib IMB.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1763		Kec. Wonokromo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5758 Berkas	7397 Berkas	128.46 %		
1769		Kec. Wonokromo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Wonokromo			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %		
7.01.03		Kec. Wonokromo				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	3 Kelurahan	3 Kelurahan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Wonokromo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			
2207		Kec. Wonokromo			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	12 Kali	100.00 %		
2221		Kec. Wonokromo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %		
2225		Kec. Wonokromo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %		
2227		Kec. Wonokromo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %		
2229		Kec. Wonokromo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	12 RW	11 RW	91.67 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2232		Kec. Wonokromo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2234		Kec. Wonokromo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2237		Kec. Wonokromo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
2238		Kec. Wonokromo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
2241		Kec. Wonokromo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %			
2242		Kec. Wonokromo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2243		Kec. Wonokromo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2244		Kec. Wonokromo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Wonokromo		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	951 Unit Usaha	976 Unit Usaha	102.63 %			
3157		Kec. Wonokromo		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	48 Kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Wonokromo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Wonokromo		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	41 Lokasi	43 Lokasi	104.88 %			
3158		Kec. Wonokromo		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	366 Kali	101.67 %			
7.01.05		Kec. Wonokromo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	116 Kasus	91 Kasus	78.45 %	Menyesuaikan dengan konflik yang terjadi di lapangan pada tahun 2022	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Babinsa/Babinkamtibmas					dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Wonokromo				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3159		Kec. Wonokromo			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	5 Kali	100.00 %			
3160		Kec. Wonokromo			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	116 Kasus	91 Kasus	78.45 %	Dalam Kegiatan Sinergitas satuan Polisi pamong Praja , Kepolisian Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia sangat efektif sehingga dalam menjalankan tugas terlihat kerjasama dan saling mendukung	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.01		Kec. Karangpilang			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.76 %	93.23 %	96.35 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Karangpilang		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1495		Kec. Karangpilang		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Karangpilang		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	98.57 %	98.57 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1572		Kec. Karangpilang		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	98.57 %	98.57 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	93.94 %	93.94 %	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan perencanaan e-project	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1575		Kec. Karangpilang		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Persentase sarana dan prasarana gedung	100 %	93.94 %	93.94 %	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan perencanaan e-project	perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	99.6459 %	99.65 %	Kompleksnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Karangpilang				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Karangpilang				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.8 %	62.2222 %	261.44 %			
7.01.02.2.01		Kec. Karangpilang			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
2606		Kec. Karangpilang			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	70 Orang	70 Orang	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Karangpilang			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	220 Lembaga	220 Lembaga	100.00 %		
2640		Kec. Karangpilang			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Karangpilang				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
2634		Kec. Karangpilang			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	93 berkas	66 berkas	70.97 %	Sebagian besar Wilayah Kecamatan Karang Pilang merupakan area Militer, Industri dan Pergudangan termasuk kepemilikan lahan yang bukan milik warga	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										sendiri (Irigasi dan PJKA)		
2649		Kec. Karangpilang				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	6455 Berkas	6468 Berkas	100.20 %		
2651		Kec. Karangpilang				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Karangpilang		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Karangpilang				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Karangpilang				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %			
2856		Kec. Karangpilang				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	8 Kali	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Pembangunan di Kelurahan						
2861		Kec. Karangpilang				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %		
2862		Kec. Karangpilang				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	13 RW	13 RW	100.00 %		
2863		Kec. Karangpilang				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %		
2864		Kec. Karangpilang				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %		
2865		Kec. Karangpilang				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %		
2866		Kec. Karangpilang				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	13 RW	13 RW	100.00 %		
2868		Kec. Karangpilang				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2869		Kec. Karangpilang			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Karangpilang			Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	116 Lembaga	116 Lembaga	100.00 %			
2805		Kec. Karangpilang			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	48 Kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Karangpilang		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Karangpilang			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %			
2770		Kec. Karangpilang			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Karangpilang		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	73 Kasus	73 Kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Karangpilang			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2785		Kec. Karangpilang		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	2 Kali	50.00 %	palaksanaan wasbang sesuai jadwal dari Bakesbang	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan RT	
2788		Kec. Karangpilang		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	73 Kasus	73 Kasus	100.00 %			
7.01.01		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.31 %	90.6958 %	94.17 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasaran dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1416		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Dukuh Pakis		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	93.38 %	93.38 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2419		Kec. Dukuh Pakis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	93.38 %	93.38 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2422		Kec. Dukuh Pakis		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Dukuh Pakis			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.32 %	55.7377 %	211.77 %			
7.01.02.2.01		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	7 Lembaga	175.00 %			
1858		Kec. Dukuh Pakis		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 Orang	119 Orang	119.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Dukuh Pakis		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	196 Lembaga	196 Lembaga	100.00 %			
1709		Kec. Dukuh Pakis		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Dukuh Pakis				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
1855		Kec. Dukuh Pakis			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4449 berkas	4577 berkas	102.88 %		
1861		Kec. Dukuh Pakis			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	110 Berkas	70 Berkas	63.64 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB, sudah dilaksanakan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk mengurus perizinan IMB. Luas rumah tinggal yang ada di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis lebih dari 500m2 sehingga warga langsung mengurus di UPTSA.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1863		Kec. Dukuh Pakis				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Dukuh Pakis				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Dukuh Pakis				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %			
1921		Kec. Dukuh Pakis			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
1922		Kec. Dukuh Pakis			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	8 RW	114.29 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1990		Kec. Dukuh Pakis			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
1992		Kec. Dukuh Pakis			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	6 RW	7 RW	116.67 %		
1994		Kec. Dukuh Pakis			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	3 RW	75.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan
2001		Kec. Dukuh Pakis			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	8 Kali	100.00 %		
2003		Kec. Dukuh Pakis			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
2004		Kec. Dukuh Pakis			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
2005		Kec. Dukuh Pakis			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	4 RW	3 RW	75.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						masyarakatnya direalisasikan				Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.03.2.03		Kec. Dukuh Pakis			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	130 Lembaga	108 Lembaga	83.08 %	Pelaku usaha ekonomi menengah dan mikro yaitu UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Dukuh Pakis sangat merespon positif untuk memproses kepengurusan NIB untuk lebih meningkatkan pemasaran usaha menengah dan usaha kecil, dari hasil pendataan UMKM yang dilaksanakan oleh seksi kesarapereko.	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
1905		Kec. Dukuh Pakis			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	60 Kali	65 Kali	108.33 %			
7.01.04		Kec. Dukuh Pakis			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Dukuh Pakis			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	15 Lokasi	125.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3144		Kec. Dukuh Pakis			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Dukuh Pakis		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	72 Kasus	70 Kasus	97.22 %	1.Permasalahan yang sangat kompleks 2.Kurangnya data pendukung 3.SDM masih kurang memadai	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Dukuh Pakis				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3193		Kec. Dukuh Pakis			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	5 Kali	5 Kali	100.00 %			
3199		Kec. Dukuh Pakis			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	72 Kasus	70 Kasus	97.22 %	1.Kurangnya kesadaran toleransi antar warga / tetangga 2.Pemahaman masyarakat terkait	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											aturan Perda / Hukum kurang	Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.01		Kec. Gayungan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.98 %	92.7508 %	94.66 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Gayungan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1051		Kec. Gayungan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Gayungan			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2464		Kec. Gayungan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.09		Kec. Gayungan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3134		Kec. Gayungan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Gayungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	92.2554 %	92.26 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Gayungan				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Gayungan				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.54 %	53.7415 %	219.00 %			
7.01.02.2.01		Kec. Gayungan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
1969		Kec. Gayungan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	100 orang	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.02		Kec. Gayungan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	197 Lembaga	197 Lembaga	100.00 %		
2718		Kec. Gayungan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Gayungan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
1972		Kec. Gayungan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	245 berkas	237 berkas	96.73 %	dengan rutinnya petugas di kecamatan dan kelurahan memberikan informasi di bawah meningkatnya antusias warga untuk mengurus IMB dan SKRK	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1973		Kec. Gayungan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2861 berkas	3346 berkas	116.95 %			
1974		Kec. Gayungan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %			
7.01.03		Kec. Gayungan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Gayungan				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Gayungan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %			
2059		Kec. Gayungan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	8 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2887		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	8 RW	88.89 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2892		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	6 RW	85.71 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2893		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2894		Kec. Gayungan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2895		Kec. Gayungan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
2896		Kec. Gayungan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	5 RW	71.43 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										aturan pengadaan barang yang TKDN		
2899		Kec. Gayungan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2901		Kec. Gayungan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Gayungan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga	139 Lembaga	115.83 %			
3148		Kec. Gayungan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	62 Kali	129.17 %			
7.01.04		Kec. Gayungan			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Gayungan			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi	25 Lokasi	104.17 %			
3151		Kec. Gayungan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05		Kec. Gayungan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	45 Kasus	17 Kasus	37.78 %	Menyesuaikan dengan konflik yang terjadi di lapangan pada tahun 2022	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping POLSEK, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Gayungan				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik	2 topik	100.00 %			
3152		Kec. Gayungan		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	10 Kali	10 Kali	100.00 %			
3153		Kec. Gayungan		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	45 Kasus	17 Kasus	37.78 %	penghambat nya adalah konflik terjadi karena ada permasalahan di dalam masyarakat tidak bisa di rencanakan atau di buat buat kejadiannya begitu saja dan kita selesaikan dengan	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping POLSEK, Koramil dan tokoh masyarakat dalam	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										jajaran samping POLSEK, Koramil dan tokoh tokoh, warga masyarakat	penanganan potensi konflik	
7.01.01		Kec. Jambangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,21 %	94,54 %	96,26 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasaran dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Jambangan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100,00 %			
1098		Kec. Jambangan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100,00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Jambangan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	96,99 %	96,99 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2608		Kec. Jambangan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	96,99 %	96,99 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Jambangan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	85.94 %	85.94 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2610		Kec. Jambangan			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	85.94 %	85.94 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Penyediaan sarana dan prasarana gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Jambangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	97.9788 %	97.98 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Jambangan				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Jambangan				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	24.22 %	50 %	206.44 %			
7.01.02.2.01		Kec. Jambangan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam	6 Lembaga	7 Lembaga	116.67 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan						
2592		Kec. Jambangan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	178 Orang	169 Orang	94,94 %	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan pada tahun berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.02		Kec. Jambangan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	168 Lembaga	168 Lembaga	100.00 %			
2593		Kec. Jambangan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	5 Bidang Urusan	83.33 %	Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat pada tahun berjalan telah dilaksanakan oleh Kecamatan	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan dan PD dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pelimpahan wewenang	
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						dilimpahkan kepada Camat						
7.01.02.2.04		Kec. Jambangan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2594		Kec. Jambangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	340 Berkas	237 Berkas	69.71 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib IMB	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
2595		Kec. Jambangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4277 berkas	3974 berkas	92.92 %	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan belum dapat dilaksanakan dengan optimal	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam peningkatan pelayanan non perizinan	
2596		Kec. Jambangan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Jambangan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Jambangan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Jambangan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %			
2625		Kec. Jambangan		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	8 Kali	100.00 %			
2776		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
2777		Kec. Jambangan		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	12 RW	9 RW	75.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2781		Kec. Jambangan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2782		Kec. Jambangan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
2783		Kec. Jambangan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2784		Kec. Jambangan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	3 RW	42.86 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2786		Kec. Jambangan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	1 RW	33.33 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2787		Kec. Jambangan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.03		Kec. Jambangan		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Lembaga	94 Lembaga	94.00 %	Partisipasi UMKM dalam meningkatkan Potensi Usaha sangat tinggi	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2623		Kec. Jambangan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	50 Kali	104.17 %			
7.01.04		Kec. Jambangan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Jambangan		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	8 Lokasi	8 Lokasi	100.00 %			
2268		Kec. Jambangan		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 kali	355 kali	98.61 %	Belum optimalnya koordinasi dengan 3 pilar dalam upaya penyelenggaraan trantibum	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dalam penanganan pelanggaran Perda	
7.01.05		Kec. Jambangan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Jambangan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	40 Kasus	41 Kasus	102.50 %			
7.01.05.2.01		Kec. Jambangan				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2771		Kec. Jambangan			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			
2772		Kec. Jambangan			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	40 Kasus	47 Kasus	117.50 %			
7.01.01		Kec. Wonocolo			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.18 %	93.0667 %	95.77 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Wonocolo			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1496		Kec. Wonocolo			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Wonocolo			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	84.78 %	84.78 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2819		Kec. Wonocolo			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	84.78 %	84.78 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Wonocolo			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	84.72 %	84.72 %	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan perencanaan e-project	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2806		Kec. Wonocolo			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	84.72 %	84.72 %	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan perencanaan e-project	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Wonocolo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	89.9051 %	89.91 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Wonocolo			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	26.74 %	65.6716 %	245.59 %			
7.01.02.2.01		Kec. Wonocolo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
2791		Kec. Wonocolo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat Kecamatan	110 Orang	130 Orang	118.18 %			
7.01.02.2.02		Kec. Wonocolo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	280 Lembaga	280 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2902		Kec. Wonocolo			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wonocolo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2876		Kec. Wonocolo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	175 Berkas	104 Berkas	59.43 %	Kurang optimalnya sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan IMB	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
2877		Kec. Wonocolo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7350 Berkas	7350 Berkas	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2878		Kec. Wonocolo				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Wonocolo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Wonocolo				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Wonocolo				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100.00 %			
3250		Kec. Wonocolo			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	10 kali	10 kali	100.00 %			
3251		Kec. Wonocolo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
3252		Kec. Wonocolo				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	9 RW	90.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3253		Kec. Wonocolo				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
3254		Kec. Wonocolo				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	7 RW	87.50 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3255		Kec. Wonocolo				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	6 RW	75.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3256		Kec. Wonocolo				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
3257		Kec. Wonocolo				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	8 RW	8 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						prasarananya direalisasikan						
3258		Kec. Wonocolo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	12 RW	12 RW	100.00 %			
3259		Kec. Wonocolo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	10 RW	5 RW	50.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3260		Kec. Wonocolo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Wonocolo			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	156 Lembaga	172 Lembaga	110.26 %			
3261		Kec. Wonocolo			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	48 Kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Wonocolo		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Wonocolo			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan	8 Lokasi	9 Lokasi	112.50 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Ketenteraman dan Ketertiban Umum	ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan						
3262		Kec. Wonocolo			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 Kali	360 Kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Wonocolo			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	141.3793 %	141.38 %			
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	88 Kasus	62 Kasus	70.45 %	situasi dan kondisi wilayah kecamatan wonocolo relatif aman dan kondusif tidak sampai terjadi eskalasi yang membahayakan	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Wonocolo				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3263		Kec. Wonocolo			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3264		Kec. Wonocolo			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	88 Kasus	62 Kasus	70.45 %	Belom terlaksana sampai satu bulan	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.01		Kec. Sawahan			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.48 %	92.1792 %	95.54 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Sawahan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
823		Kec. Sawahan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Sawahan			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	93.79 %	93.79 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2423		Kec. Sawahan				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	93.79 %	93.79 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Sawahan				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
3133		Kec. Sawahan				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Sawahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	99.959 %	99.96 %	Kompleksnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Sawahan					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Sawahan					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.22 %	45.4545 %	166.99 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01		Kec. Sawahan			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %			
1869		Kec. Sawahan			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	91 orang	91 orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Sawahan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	627 lembaga	627 lembaga	100.00 %			
1874		Kec. Sawahan			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sawahan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat						
1882		Kec. Sawahan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	621 berkas	574 berkas	92.43 %	dengan rutinnya petugas di kecamatan dan kelurahan memberikan informasi di bawah meningkatnya antusias warga untuk mengurus IMB dan SKRK	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1883		Kec. Sawahan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	11865 berkas	15245 berkas	128.49 %		
1884		Kec. Sawahan			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	5 Laporan	125.00 %		
7.01.03		Kec. Sawahan		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Sawahan			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03.2.02		Kec. Sawahan			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			
1938		Kec. Sawahan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %		
1941		Kec. Sawahan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	14 RW	15 RW	107.14 %		
1985		Kec. Sawahan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
1986		Kec. Sawahan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %		
1987		Kec. Sawahan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	13 RW	130.00 %		
1988		Kec. Sawahan			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	18 RW	18 RW	100.00 %		
1989		Kec. Sawahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan	9 RW	9 RW	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						masyarakatnya direalisasikan						
1991		Kec. Sawahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
1993		Kec. Sawahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			
1995		Kec. Sawahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	15 RW	15 RW	100.00 %			
1996		Kec. Sawahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	13 RW	130.00 %			
1997		Kec. Sawahan			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	18 RW	18 RW	100.00 %			
2049		Kec. Sawahan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	12 kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Sawahan			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	288 Lembaga	293 Lembaga	101.74 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3139		Kec. Sawahan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	54 Kali	112.50 %			
7.01.04		Kec. Sawahan		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Sawahan			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	28 Lokasi	200.00 %			
3140		Kec. Sawahan			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	361 Kali	100.28 %			
7.01.05		Kec. Sawahan		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	144 Kasus	99 Kasus	68.75 %	Menyesuaikan dengan konflik yang terjadi di lapangan pada tahun 2022	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05.2.01		Kec. Sawahan				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3142		Kec. Sawahan			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			
3143		Kec. Sawahan			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	144 Kasus	100 Kasus	69.44 %	1. Masyarakat lebih memahami terkait aturan hukum 2. Pemukiman padat sehingga masih terdapat gesekan antar warga Kesadaran bertoleransi antar tetangga kurang	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.01		Kec. Wiyung		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.37 %	93.8583 %	95.41 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Wiyung			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
511		Kec. Wiyung			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Wiyung		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	98.65 %	98.65 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2111		Kec. Wiyung		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	98.65 %	98.65 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Wiyung		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
1980		Kec. Wiyung		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Wiyung		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	93.1548 %	93.15 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Wiyung			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Wiyung			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	13.21 %	55.1402 %	417.41 %			
7.01.02.2.01		Kec. Wiyung		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %			
1843		Kec. Wiyung		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	75 orang	75 orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	211 lembaga	211 lembaga	100.00 %			
1846		Kec. Wiyung		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					dilimpahkan kepada Camat						
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Wiyung			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1848		Kec. Wiyung			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	186 berkas	68 berkas	36.56 %	kurangnya masyarakat untuk mengetahui adanya pengurusan imb di kecamatan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1849		Kec. Wiyung			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	4700 berkas	4700 berkas	100.00 %		
1851		Kec. Wiyung			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Wiyung		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Wiyung			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	84.3137 %	84.31 %	Masih terbatasnya antusiasme dari warga dalam mengembangkan potensi perekonomian	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Wiyung			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %			
1879		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
1880		Kec. Wiyung		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	1 RW	25.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1924		Kec. Wiyung			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	5 RW	4 RW	80.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
1926		Kec. Wiyung			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	11 RW	11 RW	100.00 %			
1928		Kec. Wiyung			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
1929		Kec. Wiyung			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
1930		Kec. Wiyung			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	8 RW	88.89 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
1937		Kec. Wiyung			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1952		Kec. Wiyung			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	8 kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Wiyung			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	30 unit usaha	43 unit usaha	143.33 %			
3124		Kec. Wiyung			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 kali	48 kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Wiyung		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Wiyung			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	15 lokasi	100.00 %			
3127		Kec. Wiyung			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Wiyung		PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase penanganan potensi konflik tidak	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan						
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Wiyung			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3129		Kec. Wiyung		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			
3130		Kec. Wiyung		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 kasus	24 kasus	100.00 %			
7.01.01		Kec. Tandes		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	96.39 %	92.7942 %	96.27 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Tandes		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
627		Kec. Tandes		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Tandes		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	94.06 %	94.06 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2731		Kec. Tandes		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	94.06 %	94.06 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Tandes		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	90 %	90.00 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
3125		Kec. Tandes		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Persentase sarana dan prasarana gedung	100 %	90 %	90.00 %	Belum optimalnya perencanaan dan	Evaluasi berkala untuk memonitor	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Tandes		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	93.6149 %	93.61 %	Kurangnya fasilitas yang memadai untuk menunjang kebutuhan dan keterbatasan personil	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Tandes				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Tandes				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50.51 %	45.5285 %	90.14 %	Terdapat kendala dalam pelaksanaan realisasi usulan pekerjaan oleh PD	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.01		Kec. Tandes			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2965		Kec. Tandes			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	200 Orang	200 Orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Tandes			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	371 lembaga	371 lembaga	100.00 %			
2966		Kec. Tandes			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	12 kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tandes			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tandes				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Tandes				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2967		Kec. Tandes				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	114 berkas	82 berkas	71.93 %	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB dan SKRK	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
2968		Kec. Tandes				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3831 berkas	3831 berkas	100.00 %		
2969		Kec. Tandes				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Tandes		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Tandes				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Tandes				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Tandes				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					berdasarkan konsep inovasi						
2533		Kec. Tandes			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %		
2537		Kec. Tandes			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	8 RW	88.89 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan
2539		Kec. Tandes			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	2 RW	28.57 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan
2541		Kec. Tandes			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
2542		Kec. Tandes			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	15 RW	15 RW	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2543		Kec. Tandes			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2548		Kec. Tandes			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
2549		Kec. Tandes			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
2550		Kec. Tandes			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2551		Kec. Tandes			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2552		Kec. Tandes			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	15 RW	15 RW	100.00 %			
2553		Kec. Tandes			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2615		Kec. Tandes			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	12 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Pembangunan di Kelurahan							
7.01.03.2.03		Kec. Tandes			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	93 Pelaku Usaha	93.00 %	jumlah pendata dan waktu melakukan pendataan tercukupi dan tersedianya anggaran	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3043		Kec. Tandes			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	80 Kali	112 Kali	140.00 %			
7.01.04		Kec. Tandes			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Tandes			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 lokasi	16 lokasi	106.67 %			
3071		Kec. Tandes			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 kali	363 kali	100.83 %			
7.01.05		Kec. Tandes			PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase penanganan potensi konflik tidak	100 %	93.1034 %	93.10 %	Minimnya toleransi dan pemahaman masyarakat terhadap	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan,	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan				wawasan kebangsaan sehingga masih menimbulkan konflik sosial yang terkadang sulit untuk dilakukan mediasi	Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Tandes		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	20 Kasus	27 Kasus	135.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Tandes			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3072		Kec. Tandes		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	30 Kasus	29 Kasus	96.67 %	Petugas dari 3 Pilar khususnya Babin Kamtibmas dan babin se wilayah tandes yang selalu kooperatif dan sigap dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat kelurahan dan kecamatan	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
3111		Kec. Tandes		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	4 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98.98 %	93.525 %	94.49 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Asemrowo		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1001		Kec. Asemrowo		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Asemrowo		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	94.43 %	94.43 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
1024		Kec. Asemrowo		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	94.43 %	94.43 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Asemrowo		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	92.31 %	92.31 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										Prasarana Gedung Kantor	sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
3052		Kec. Asemrowo			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	92.31 %	92.31 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	96.1669 %	96.17 %	Luasnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Asemrowo				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Asemrowo				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	27.27 %	53.9326 %	197.77 %			
7.01.02.2.01		Kec. Asemrowo			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2175		Kec. Asemrowo			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	40 Orang	55 Orang	137.50 %			
7.01.02.2.02		Kec. Asemrowo			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	139 Lembaga	139 Lembaga	100.00 %			
2176		Kec. Asemrowo			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Asemrowo				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2180		Kec. Asemrowo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	67 berkas	70 berkas	104.48 %			
2181		Kec. Asemrowo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	7500 berkas	7579 berkas	101.05 %			
2182		Kec. Asemrowo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %			
7.01.03		Kec. Asemrowo		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Asemrowo				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Asemrowo				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	3 kelurahan	3 kelurahan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2489		Kec. Asemrowo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2490		Kec. Asemrowo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
2496		Kec. Asemrowo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2523		Kec. Asemrowo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	8 RW	4 RW	50.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2525		Kec. Asemrowo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
2528		Kec. Asemrowo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	6 RW	2 RW	33.33 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2534		Kec. Asemrowo			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	6 Kali	6 Kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Asemrowo			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	174 Unit Usaha	166 Unit Usaha	95.40 %	Waktu pendataan UMKM kadang ada yang tidak ditemukan di alamat tersebut, pindah, sudah tidak berjualan lagi.	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3280		Kec. Asemrowo			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	49 Kali	102.08 %			
7.01.04		Kec. Asemrowo			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	99.9072 %	99.91 %	Masih diperlukannya sinergitas antara elemen Kecamatan dengan beberapa PD terkait dalam menangani pelanggaran Perda	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dalam penanganan pelanggaran Perda	
7.01.04.2.01		Kec. Asemrowo			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	5 Lokasi	6 Lokasi	120.00 %			
3277		Kec. Asemrowo			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan	360 Kali	360 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum						
7.01.05		Kec. Asemrowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibas	20 Kasus	20 Kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Asemrowo				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3278		Kec. Asemrowo		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	2 Kali	50.00 %	Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan RT	
3279		Kec. Asemrowo		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	20 Kasus	20 Kasus	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.84 %	94,8433 %	96.94 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
590		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Sukomanunggal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	79.54 %	79.54 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
937		Kec. Sukomanunggal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	79.54 %	79.54 %	penghambat : Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Sukomanunggal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	87.5 %	87.50 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilit	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD	
										asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan		
592		Kec. Sukomanunggal				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	87.5 %	87.50 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	86.6471 %	86.65 %	data MBR mengalami penurunan dari data awal MBR , sesuai hasil verifikasi keluarga miskin	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data		
7.01.02		Kec. Sukomanunggal				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %				
7.01.02		Kec. Sukomanunggal				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	50 %	29.7297 %	59.46 %	1. Banyaknya jumlah usulan yang masuk tidak sesuai dengan kapasitas jumlah usulan yg dapat diterima PD terkait. 2. Masih sulitnya melakukan prioritas usulan guna menyaring usulan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									berdasarkan tingkat kepentingan/kebutuhan masyarakat.	pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.01		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
2635		Kec. Sukomanunggal		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	78 orang	78.00 %	Kurangnya koordinasi dan partisipasi warga untuk menghadiri di saat pandemi (hybrid).	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.02		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	323 Lembaga	323 Lembaga	100.00 %			
2638		Kec. Sukomanunggal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sukomanunggal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2641		Kec. Sukomanunggal			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	102 Berkas	64 Berkas	62.75 %	Masih rendahnya pemahaman terhadap prosedur dan ketentuan.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
2642		Kec. Sukomanunggal			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	5921 berkas	5339 berkas	90.17 %	Pelayanan adminduk sesuai permohonan masyarakat serta sudah adanya pengurusan secara online, sehingga tidak perlu di kecamatan/kelurahan.	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam peningkatan pelayanan non perizinan
2644		Kec. Sukomanunggal			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan	4 laporan	4 laporan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan						
7.01.03		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Sukomanunggal				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Sukomanunggal				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			
2664		Kec. Sukomanunggal			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
2679		Kec. Sukomanunggal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2681		Kec. Sukomanunggal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan	3 RW	7 RW	233.33 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						prasarananya direalisasikan						
2684		Kec. Sukomanunggal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	9 RW	10 RW	111.11 %			
2686		Kec. Sukomanunggal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2688		Kec. Sukomanunggal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
2690		Kec. Sukomanunggal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarananya direalisasikan	2 RW	2 RW	100.00 %			
2693		Kec. Sukomanunggal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2694		Kec. Sukomanunggal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2695		Kec. Sukomanunggal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	10 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2696		Kec. Sukomanunggal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2697		Kec. Sukomanunggal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %			
2698		Kec. Sukomanunggal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Sukomanunggal			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 Pelaku Usaha	242 Pelaku Usaha	242.00 %			
3467		Kec. Sukomanunggal			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	68 Kali	141.67 %			
7.01.04		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	86.5705 %	86.57 %	Optimalnya sinergitas antara elemen kecamatan dengan beberapa PD serta elemen keamanan dan ketertiban lainnya dalam menangani pelanggaran Perda	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dalam penanganan pelanggaran Perda	
7.01.04.2.01		Kec. Sukomanunggal			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat	24 Lokasi	24 Lokasi	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					yang dipantau dan ditertibkan						
2702		Kec. Sukomanunggal		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	364 Kali	101.11 %			
7.01.05		Kec. Sukomanunggal		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama babinsa/babinkamtibmas	24 kasus	24 kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Sukomanunggal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2706		Kec. Sukomanunggal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	5 kali	125.00 %			
2707		Kec. Sukomanunggal		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 kasus	24 kasus	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Peraturan Perundang-Undangan							
7.01.01		Kec. Benowo		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.72 %	92.6833 %	94.85 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Benowo			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1459		Kec. Benowo			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Benowo			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	94.61 %	94.61 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2486		Kec. Benowo			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	94.61 %	94.61 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Benowo			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	81.71 %	81.71 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2488		Kec. Benowo			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	81.71 %	81.71 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Benowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	41.9895 %	41.99 %	Kompleksnya data yang dibutuhkan sehingga memerlukan waktu untuk memenuhi	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Benowo				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Benowo				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	30.88 %	47.3333 %	153.28 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01		Kec. Benowo		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 lembaga	6 lembaga	100.00 %			
2307		Kec. Benowo		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	100 orang	100 orang	100.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Benowo		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	188 lembaga	188 lembaga	100.00 %			
2463		Kec. Benowo		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Benowo		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Benowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Benowo			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat						
2352		Kec. Benowo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	126 berkas	92 berkas	73.02 %	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB dan SKRK	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
2367		Kec. Benowo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	10500 berkas	10296 berkas	98.06 %	data sesuai dengan tanggal 10 Desember dikarenakan bulan masih berjalan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam peningkatan pelayanan non perizinan
2370		Kec. Benowo			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 laporan	4 laporan	100.00 %		
7.01.03		Kec. Benowo			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Benowo			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	70.5295 %	70.53 %	Banyaknya potensi usaha mikro dari masyarakat yang belum terdaftar NIB.	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
7.01.03.2.02		Kec. Benowo		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Benowo			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %			
2675		Kec. Benowo		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 kali	8 kali	100.00 %			
2680		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
2682		Kec. Benowo		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	2 RW	66.67 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2683		Kec. Benowo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	10 RW	9 RW	90.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2685		Kec. Benowo			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	1 RW	25.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2687		Kec. Benowo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	9 RW	9 RW	100.00 %			
2689		Kec. Benowo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	2 RW	66.67 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2691		Kec. Benowo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	10 RW	9 RW	90.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	sesuai perencanaan	
2692		Kec. Benowo			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Benowo			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	916 Potensi usaha	919 Potensi usaha	100.33 %			
3284		Kec. Benowo			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	56 Kali	116.67 %			
7.01.04		Kec. Benowo			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	94.6766 %	94.68 %	Masih diperlukannya sinergitas antara elemen Kecamatan dengan beberapa PD serta elemen keamanan dan ketertiban dalam menangani pelanggaran Perda	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dalam penanganan pelanggaran Perda	
7.01.04.2.01		Kec. Benowo			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	14 Lokasi	14 Lokasi	100.00 %			
3434		Kec. Benowo			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	Jumlah upaya penyelenggaraan	360 kali	360 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	ketentraman dan ketertiban umum						
7.01.05		Kec. Benowo		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Benowo			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	23 Kasus	95.83 %	Adanya kendala kurang koordinasi antara perangkat kampung wani dengan jajaran terkait dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.05.2.01		Kec. Benowo				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3435		Kec. Benowo			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			
3436		Kec. Benowo			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 Kasus	23 Kasus	95.83 %	Karena kurang koordinasi antara perangkat kampung dengan jajaran terkait sehingga target kurang terpenuhi	Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan, Jajaran samping Polsek, Koramil dan tokoh	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											masyarakat dalam penanganan potensi konflik	
7.01.01		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.23 %	92.9367 %	95.58 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Lakarsantri			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1498		Kec. Lakarsantri			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Lakarsantri			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	91.91 %	91.91 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2320		Kec. Lakarsantri			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	91.91 %	91.91 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.09		Kec. Lakarsantri		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	83.33 %	83.33 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2321		Kec. Lakarsantri		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	83.33 %	83.33 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	85.896 %	85.90 %	Kompleksnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Lakarsantri			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Lakarsantri			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %	69.3694 %	303.99 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.01		Kec. Lakarsantri			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	12 Lembaga	200.00 %			
1715		Kec. Lakarsantri			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	322 Orang	144 Orang	44.72 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara umum	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.02		Kec. Lakarsantri			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	205 Lembaga	205 Lembaga	100.00 %			
1797		Kec. Lakarsantri			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Lakarsantri			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
1968		Kec. Lakarsantri			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	252 berkas	49 berkas	19.44 %	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB secara tertib	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
1975		Kec. Lakarsantri			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	2923 berkas	2914 berkas	99.69 %	Adanya SOP serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan sehingga pelaksanaan pelayanan non perizinan dapat berjalan dengan lancar.	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam peningkatan pelayanan non perizinan
1976		Kec. Lakarsantri			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.03		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Lakarsantri			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Lakarsantri			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	6 kelurahan	6 kelurahan	100.00 %			
2007		Kec. Lakarsantri		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	12 kali	11 kali	91.67 %	Kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama antar pihak penyelenggara musrenbang, terutama di kelurahan Bangkingan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musbangkel	
2012		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	5 RW	5 RW	100.00 %			
2014		Kec. Lakarsantri		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	2 RW	66.67 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
											Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	lebih optimal sesuai perencanaan	
2019		Kec. Lakarsantri				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	1 RW	25.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2021		Kec. Lakarsantri				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	8 RW	5 RW	62.50 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2023		Kec. Lakarsantri				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	2 RW	28.57 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2024		Kec. Lakarsantri				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	1 RW	33.33 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2031		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	5 RW	4 RW	80.00 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2032		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
2033		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %			
2034		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	9 RW	112.50 %			
2036		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2037		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Lakarsantri			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	124 Lembaga	124 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1982		Kec. Lakarsantri			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	48 Kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Lakarsantri		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Lakarsantri			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	12 Lokasi	12 Lokasi	100.00 %			
2118		Kec. Lakarsantri			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			
7.01.05		Kec. Lakarsantri		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	44 Kasus	44 Kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Lakarsantri				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan	2 Topik	2 Topik	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional						
2123		Kec. Lakarsantri		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 kali	3 kali	75.00 %	Kurang optimalnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wasbang terhadap RT	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan pembinaan RT	
2132		Kec. Lakarsantri		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	44 kasus	44 kasus	100.00 %			
7.01.01		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	98,79 %	95,6475 %	96,82 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	
7.01.01.2.02		Kec. Sambikerep		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1500		Kec. Sambikerep		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.06		Kec. Sambikerep		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	89.46 %	89.46 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
3017		Kec. Sambikerep		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	89.46 %	89.46 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	84.44 %	84.44 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
3018		Kec. Sambikerep		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	84.44 %	84.44 %	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan perencanaan e-project	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase data terverifikasi yang	100 %	89.5511 %	89.55 %	Kompleksnya kebutuhan data yang diperlukan sehingga	Meningkatkan koordinasi antar personil	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	dibutuhkan Perangkat Daerah				masih diperlukan waktu dalam penyediaan data sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pemenuhan validasi data	
7.01.02		Kec. Sambikerep			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Sambikerep			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	23.37 %	56.6667 %	242.48 %			
7.01.02.2.01		Kec. Sambikerep		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
1932		Kec. Sambikerep		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	88 Orang	85 Orang	96.59 %	Terdapat 3 undangan yang tidak hadir pada acara Musrenbang tingkat kecamatan karena yang bersangkutan bertepatan dengan jam kerja yang tidak bisa ditinggalkan.	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.02		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	260 Lembaga	260 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2903		Kec. Sambikerep			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Sambikerep				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2258		Kec. Sambikerep			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	288 Berkas	75 Berkas	26.04 %	Pengurusan SKRK-IMB wilayah kecamatan sambikerep lebih banyak didominasi oleh warga perumahan yang mengajukan langsung ke Dinas melalui PTSP karena penapisan PENGURUSAN IMB OLEH PENGEMBANG DILAYANI DI PTSP. Menyebabkan jumlah pemohon pelayanan	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
										SKRK-IMB di kecamatan menjadi sedikit.		
2260		Kec. Sambikerep				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		
3249		Kec. Sambikerep				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	10916 Berkas	10931 Berkas	100.14 %		
7.01.03		Kec. Sambikerep				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %		
7.01.03		Kec. Sambikerep					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %		
7.01.03.2.02		Kec. Sambikerep					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %		
3001		Kec. Sambikerep				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan	8 Kali	8 Kali	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	berdasarkan konsep inovasi						
3004		Kec. Sambikerep			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	14 RW	16 RW	114.29 %			
3005		Kec. Sambikerep			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	6 RW	4 RW	66.67 %	Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
3006		Kec. Sambikerep			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
3007		Kec. Sambikerep			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
3008		Kec. Sambikerep			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	16 RW	114.29 %			
3009		Kec. Sambikerep			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
3010		Kec. Sambikerep			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
3011		Kec. Sambikerep			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Sambikerep			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	148 Lembaga	151 Lembaga	102.03 %			
3013		Kec. Sambikerep			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	48 Kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Sambikerep			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Sambikerep			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	15 Lokasi	16 Lokasi	106.67 %			
2137		Kec. Sambikerep			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 kali	360 kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.05		Kec. Sambikerep		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	37 Kasus	37 Kasus	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Sambikerep			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2155		Kec. Sambikerep		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	37 Kasus	37 Kasus	100.00 %			
2875		Kec. Sambikerep		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			
7.01.01		Kec. Pakal		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.31 %	91.42 %	93.95 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Pakal		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
681		Kec. Pakal		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Pakal		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	94.12 %	94.12 %	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan pemenuhan barang jasa dengan pelaksanaan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2561		Kec. Pakal		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	94.12 %	94.12 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Pakal		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	92.19 %	92.19 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2578		Kec. Pakal		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Persentase sarana dan prasarana gedung	100 %	92.19 %	92.19 %	Belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					Kantor atau Bangunan Lainnya	kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.02		Kec. Pakal		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Pakal				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Pakal				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	53.19 %	62.2951 %	117.12 %			
7.01.02.2.01		Kec. Pakal			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	6 Lembaga	100.00 %			
2179		Kec. Pakal			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	120 orang	79 orang	65.83 %	belum terpenuhinya jumlah target yg hadir dalam Musrenbang Kecamatan	Meningkatkan koordinasi antar personil Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan musrenbang	
7.01.02.2.02		Kec. Pakal			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung	229 Lembaga	229 Lembaga	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	penyelenggaraan urusan pemerintahan						
2230		Kec. Pakal		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 kali	12 kali	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
7.01.02.2.04		Kec. Pakal			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %			
2254		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	137 berkas	43 berkas	31.39 %	tidak memenuhi target karena kurangnya minat warga dlm kepengurusan IMB	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK	
2963		Kec. Pakal		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah laporan/rekomendasi/su	4 laporan	4 laporan	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
					terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	rat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan						
2964		Kec. Pakal			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	3797 Berkas	3797 Berkas	100.00 %			
7.01.03		Kec. Pakal		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Pakal				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Pakal			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Pakal				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 Kelurahan	4 Kelurahan	100.00 %			
2794		Kec. Pakal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	2 RW	66.67 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2795		Kec. Pakal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	2 RW	2 RW	100.00 %			
2797		Kec. Pakal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	1 RW	1 RW	100.00 %			
2798		Kec. Pakal			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	5 RW	1 RW	20.00 %	penghambat : Belum optimalnya Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan karena kondisi lapangan dan aturan pengadaan barang yang TKDN	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan	
2799		Kec. Pakal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	14 RW	14 RW	100.00 %			
2800		Kec. Pakal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			
2801		Kec. Pakal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	8 RW	8 RW	100.00 %			
2803		Kec. Pakal			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	6 RW	6 RW	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2927		Kec. Pakal			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	8 Kali	100.00 %			
7.01.03.2.03		Kec. Pakal			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	100 pelaku usaha	100 pelaku usaha	100.00 %			
3469		Kec. Pakal			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	100 kali	100 kali	100.00 %			
7.01.04		Kec. Pakal		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Pakal			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 Lokasi	17 Lokasi	100.00 %			
2385		Kec. Pakal			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	360 Kali	361 Kali	100.28 %			
7.01.05		Kec. Pakal		PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase penanganan potensi konflik tidak	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
				URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menjadi konflik di Kecamatan						
7.01.05.2.01		Kec. Pakal		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	24 Kasus	25 Kasus	104.17 %			
7.01.05.2.01		Kec. Pakal			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
2395		Kec. Pakal		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	4 Kali	4 Kali	100.00 %			
2408		Kec. Pakal		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	24 Kasus	25 Kasus	104.17 %			
7.01.01		Kec. Bulak		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97.98 %	93.5675 %	95.50 %	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Melakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana prasarana dan layanan kepegawaian di lingkup kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.01.2.02		Kec. Bulak		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
1499		Kec. Bulak		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.01.2.06		Kec. Bulak		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	96.53 %	96.53 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melakukan monitoring dan evaluasi atas realisasi bulanan dengan lebih teliti sehingga perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan	
2308		Kec. Bulak		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 %	96.53 %	96.53 %	Belum optimalnya Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Evaluasi berkala untuk memonitor kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	
7.01.01.2.09		Kec. Bulak		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	100 %	100.00 %			
2298		Kec. Bulak		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 %	100 %	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02		Kec. Bulak		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Bulak			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.02		Kec. Bulak			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	22.82 %	43.8961 %	192.36 %			
7.01.02.2.01		Kec. Bulak		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	4 Lembaga	4 Lembaga	100.00 %			
2116		Kec. Bulak		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	60 Orang	78 Orang	130.00 %			
7.01.02.2.02		Kec. Bulak		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	158 Lembaga	158 Lembaga	100.00 %			
2120		Kec. Bulak		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Frekuensi pendataan di wilayah kecamatan	12 Kali	12 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
7.01.02.2.04		Kec. Bulak			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	6 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Bulak				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
7.01.02.2.04		Kec. Bulak				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan	1 Bidang Urusan	100.00 %		
2122		Kec. Bulak			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan non usaha yang ditangani	173 Berkas	112 Berkas	64.74 %	Kurangnya pemahaman warga terkait manfaat SKRK/IMB.	Melakukan pendampingan dan sosialisasi terkait urgensi, manfaat dan keuntungan dari membuat IMB dan SKRK
2128		Kec. Bulak			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan non perizinan yang ditangani	1983 Berkas	2392 Berkas	120.63 %		
2131		Kec. Bulak			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan/rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan	4 Laporan	4 Laporan	100.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						kewenangan lain yang dilimpahkan						
7.01.03		Kec. Bulak		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	12.5 %	12.5 %	100.00 %			
7.01.03		Kec. Bulak				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Bulak			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100.00 %			
7.01.03.2.02		Kec. Bulak				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan	4 kelurahan	100.00 %			
2153		Kec. Bulak			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %			
2157		Kec. Bulak			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %			
2514		Kec. Bulak			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musbangkel yang dilaksanakan berdasarkan konsep inovasi	8 Kali	8 Kali	100.00 %			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
2517		Kec. Bulak			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %		
2518		Kec. Bulak			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	4 RW	4 RW	100.00 %		
2519		Kec. Bulak			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah RW yang usulan sarana dan prasarannya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
2520		Kec. Bulak			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	3 RW	3 RW	100.00 %		
2521		Kec. Bulak			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	6 RW	85.71 %	Diprioritaskan di RW yang memiliki penduduk keluarga miskin.	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal sesuai perencanaan
2522		Kec. Bulak			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah RW yang usulan pemberdayaan masyarakatnya direalisasikan	7 RW	7 RW	100.00 %		
7.01.03.2.03		Kec. Bulak			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	400 Lembaga	373 Lembaga	93.25 %	Masih diperlukan sinergi pendataan dan pelaksanaan fasilitasi di wilayah kecamatan yang dilakukan setiap bulan, agar	Mengembangkan metode/cara pelaksanaan kegiatan agar lebih optimal



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
									mengutamakan pelaku usaha baru yang harus difasilitasi.	sesuai perencanaan	
3225		Kec. Bulak			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah frekuensi fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	48 Kali	49 Kali	102.08 %		
7.01.04		Kec. Bulak		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.04.2.01		Kec. Bulak		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	13 Lokasi	14 Lokasi	107.69 %			
3226		Kec. Bulak			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	360 Kali	365 Kali	101.39 %		
7.01.05		Kec. Bulak		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %	100 %	100.00 %			
7.01.05.2.01		Kec. Bulak			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama	12 Kasus	15 Kasus	125.00 %		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
						Babinsa/Babinkamtibmas						
7.01.05.2.01		Kec. Bulak				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik	2 Topik	100.00 %			
3227		Kec. Bulak			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan terhadap RT	2 kali	2 kali	100.00 %			
3228		Kec. Bulak			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah potensi konflik sosial yang ditangani	12 kasus	15 kasus	125.00 %			



3.1.2.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Unsur Pemerintahan Umum mencakup urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum di Kota Surabaya pada tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan. Pencapaian pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum Kota Surabaya tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 3.24
Capaian Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2022

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
08.01.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100%	94.35%	94.35%	Belum optimalnya pelayanan kesekretariatan	Peningkatan terhadap waktu penyelesaian beberapa jenis layanan kesekretariatan	1. Peningkatan karakter kebangsaan untuk kehidupan sosial kota Surabaya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada tokoh masyarakat, pengurus RW/RT serta Karang Taruna di kecamatan, dengan Narasumber dari Akademisi dan Ketua/Anggota FKUB. - melaksanakan sosialisasi pemahaman Ijin Mendirikan Tempat Ibadah dan Toleransi umat beragama - melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan Narasumber dari KPU, Bawaslu dan Akademisi. - melakukan pembinaan terhadap Korps Musik lagu-lagu
8.01.01.2.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
1483		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100.00%			
8.01.01.2.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	100%	100.00%			
1484		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketepatan Waktu Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	100%	95.83%	95.83%	Belum optimalnya pelaksanaan dan perencanaan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	melakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap paket pekerjaan	
8.01.01.2.08		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	94.08%	94.08%	Belum optimalnya pelaksanaan dan perencanaan untuk penyediaan jasa penunjang umum	melakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap paket pekerjaan	
1485		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	94.08%	94.08%	Belum optimalnya pelaksanaan dan perencanaan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor	melakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap paket pekerjaan	
08.01.02		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase partisipan yang karakter kebangsaannya dapat ditingkatkan	90%	87.29%	96.99%	Mayoritas peserta adalah kalangan pekerja, sehingga dalam beberapa kegiatan sosialisasi kurang maksimal.	Penyesuaian jadwal pelaksanaan sosialisasi	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
8.01.02.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	317 Orang	328 Orang	103.47%			kebangsaan yang mengiringi upacara. - diadakannya lomba wawasan kebangsaan bagi pelajar SMP sederajat. 2. Peran Bakesbangpol terkait optimalisasi FKUB antara lain : 1. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; 3. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan; 4. merencanakan dan melaksanakan program FKUB; 5. melakukan survey dan menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah. 6. melaksanakan kegiatan Kemah Pemuda Lintas Agama
810		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Kali	12 Kali	100.00%			
08.01.03		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga politik dan lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	23%	20%	86.96%	Adanya lembaga pendidikan yang belum dapat hadir dalam pendidikan politik yang diselenggarakan Bakesbangpol.	Perlunya sinkronisasi antara jadwal pelaksanaan pendidikan politik dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah	
8.01.03.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah lembaga yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	60 Lembaga	52 Lembaga	86.67%	jumlah lembaga pendidikan menengah difasilitasi pendidikan bidang politik pada tahun berjalan sdh diundang sesuai target namun ada yang berhalangan hadir	Perlunya sinkronisasi antara jadwal pelaksanaan pendidikan politik dan kegiatan belajar mengajar di Sekolah	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
820		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	120 Orang	154 Orang	128.33%			
08.01.04		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	20%	25.96%	129.81%			
8.01.04.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diawasi dan/atau diberdayakan	31 Lembaga	27 Lembaga	87.10%	lembaga ormas telah diundang sesuai target namun ada lembaga yang berhalangan hadir	Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan	
850		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah frekuensi pengawasan dan/atau pemberdayaan organisasi kemasyarakatan	2 kali	2 kali	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
08.01.05		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase potensi konflik umat beragama yang difasilitasi dan lembaga dan/atau wilayah rawan narkoba yang dibina	100%	100%	100.00%			
8.01.05.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lembaga yang Berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	9 Lembaga	9 Lembaga	100.00%			
853		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	42 Kali	42 Kali	100.00%			
08.01.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase hasil pemantauan orang asing/tenaga kerja asing/lembaga asing yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
08.01.06		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti	100%	100%	100.00%			
8.01.06.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	11 Lembaga	11 Lembaga	100.00%			
8.01.06.2.01		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Penanganan Konflik Sosial	10 Lembaga	10 Lembaga	100.00%			
1010		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan.	66 Kali	73 Kali	110.61%			



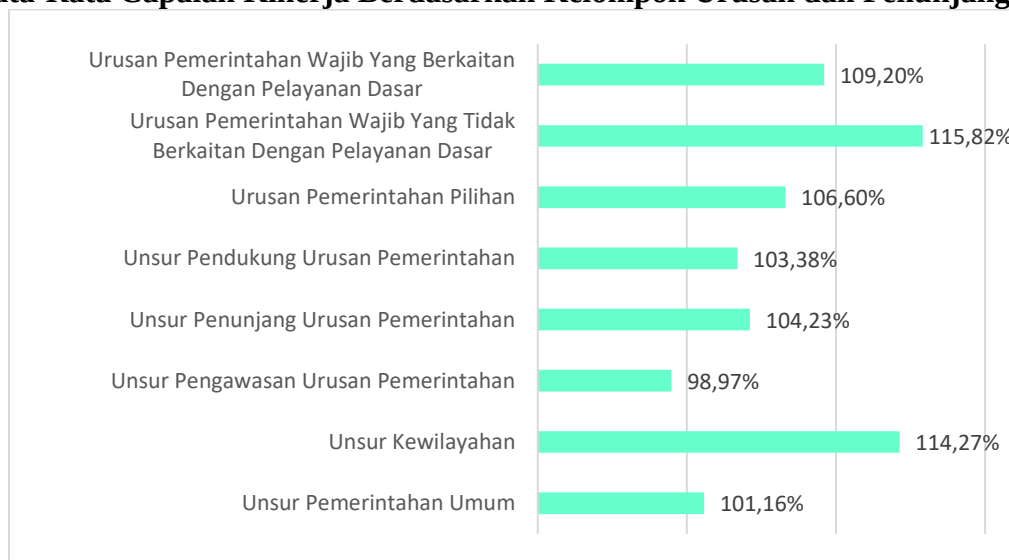
NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1277		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	390 Kali	411 Kali	105.38%			



Berdasarkan data capaian kinerja dapat diketahui Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum rata-rata mampu mencapai yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan fleksibilitas penyelenggara pemerintahan kota cukup tinggi dari semua elemen, dalam menghadapi tantangan yang cukup berat pada masa pandemi tersebut. Fungsi dan peran birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik khususnya pelayanan dasar masih tetap dapat dipertahankan dengan baik.

Sedangkan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan belum memenuhi rata-rata target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena efisiensi belanja sesuai dengan kebutuhan prioritas dan penyesuaian terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Gambar 3.11
Rata-Rata Capaian Kinerja Berdasarkan Kelompok Urusan dan Penunjangnya



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

3.1.3 Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja

3.1.3.1 Kinerja Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

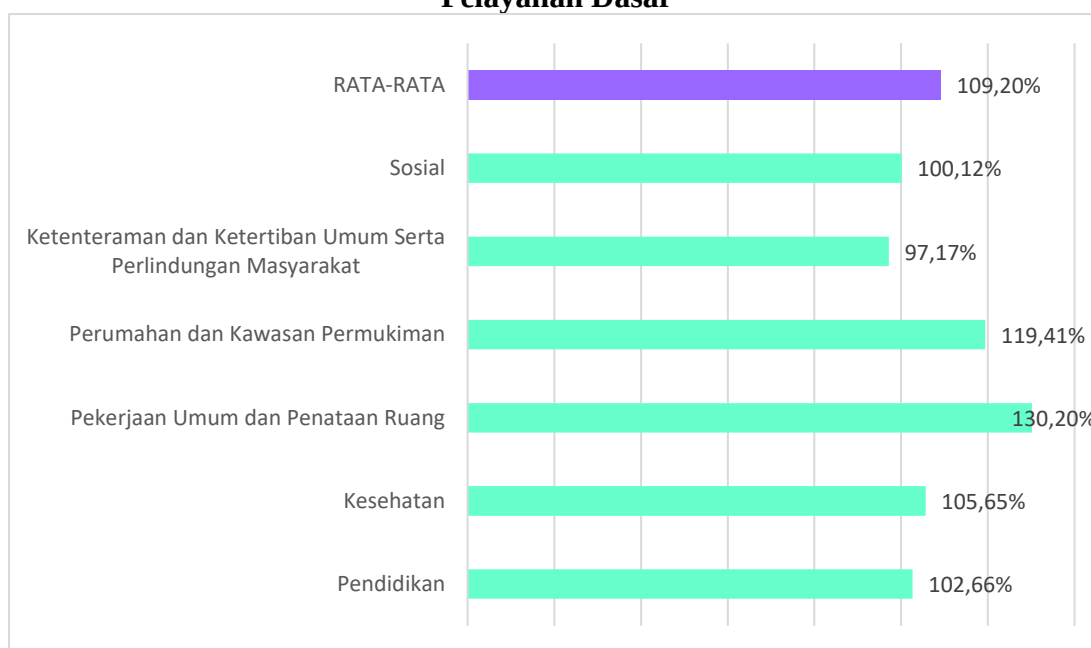
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial mampu mencatat kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja



kelompok urusan wajib pelayanan dasar mencapai 109,20% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Meskipun demikian, pada urusan wajib pelayanan dasar, rata-rata capaian kinerja urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebesar 97,17%. Masih belum optimalnya urusan ini pada program penanggulangan bencana antara lain karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan potensi bahaya dari kejadian bencana yang dapat terjadi setiap saat ini maka untuk mengatasi hal tersebut selain diadakan sosialisasi pencegahan bencana yang sesuai dengan karakteristik sasaran sosialisasi (anak sekolah, masyarakat umum, dsb) juga perlu penambahan pos pantau di lokasi yang sering terjadi kedaruratan untuk meningkatkan optimalisasi respon kedaruratan.

Gambar 3.12
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

3.1.3.2 Kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Secara umum, kinerja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi: urusan Tenaga kerja, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan hidup, Administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil, Pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Penanaman modal,

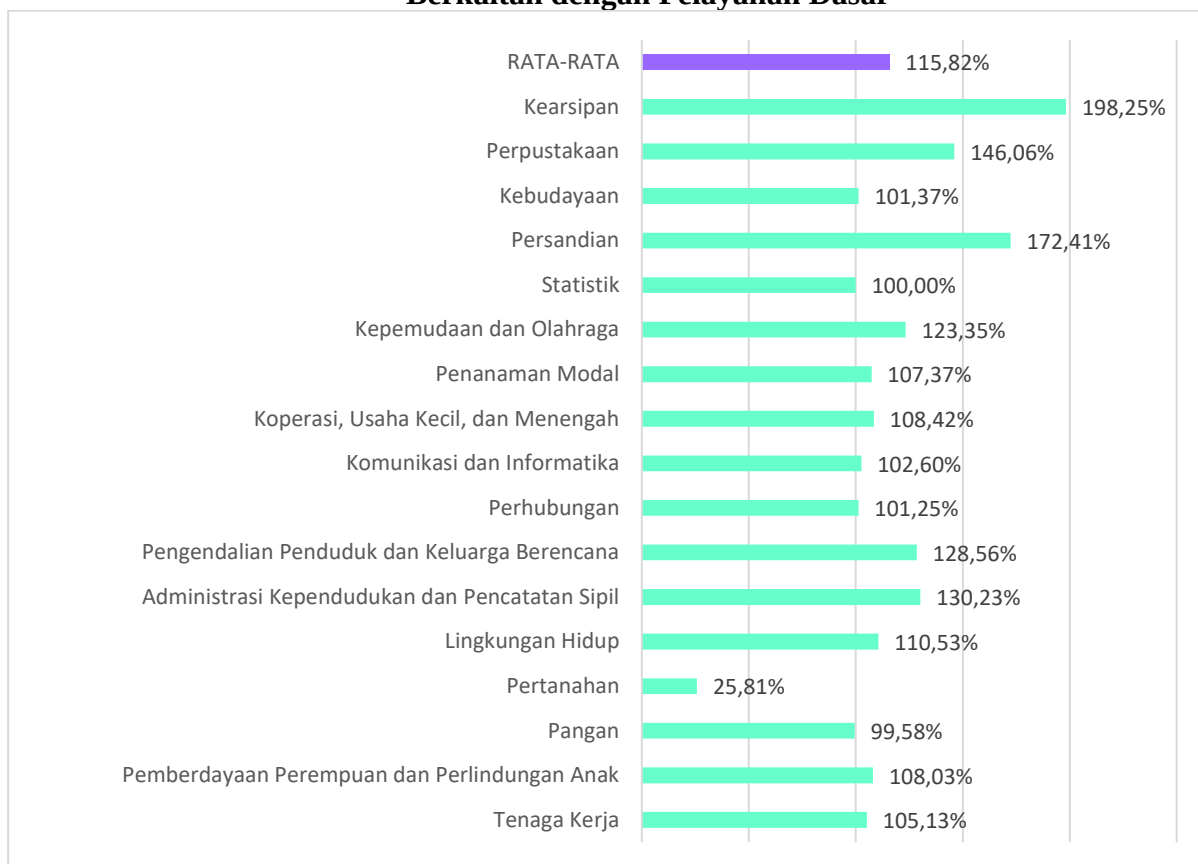


Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan serta Kearsipan mencatat hasil yang sangat baik, dengan angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai 115,82% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Namun demikian, beberapa urusan pemerintahan yang perlu memperoleh perhatian khusus antara lain: 1) urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan rata-rata capaian sebesar 25,81%; 2) urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang mencapai 99,58%. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan antara lain karena penyesuaian kebutuhan luas yang dibebaskan berdasarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dari kantor pertanahan serta penyesuaian program prioritas pembangunan di tingkat kota. Dalam hal mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan monitoring secara rutin dan membuat Sekretariat Bersama (Sekber) di Kantor Pertanahan guna memudahkan koordinasi kemajuan pembebasan tanah untuk pembangunan non infrastruktur. Belum optimalnya capaian urusan Pemerintahan Bidang Pangan khususnya pada pelaksanaan program pengawasan keamanan pangan, disebabkan masih adanya pedagang di pasar tradisional yang kurang memperhatikan sanitasi dan kebersihan lapak penjualan yang dikawatirkan akan menjadi sumber penyakit. Maka dari itu, Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan keamanan bahan pangan melalui sosialisasi dan edukasi serta pembinaan kepada pelaku usaha yang masih belum memenuhi standar.



Gambar 3.13
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar



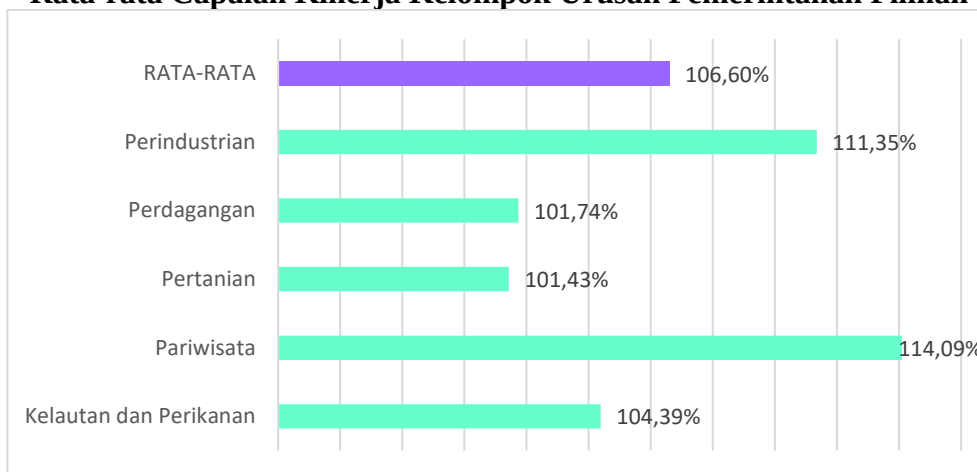
Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

3.1.3.3 Kinerja Urusan Pemerintahan Pilihan

Secara umum, kinerja Urusan Pilihan yang meliputi: Urusan Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok urusan pemerintahan pilihan mencapai 106,60% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.



Gambar 3.14
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan

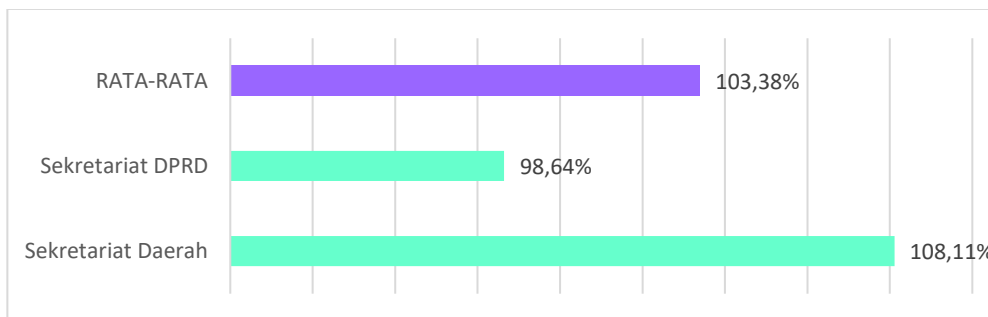


Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

3.1.3.4 Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang meliputi urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD belum terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 103,38% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

Gambar 3.15
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan



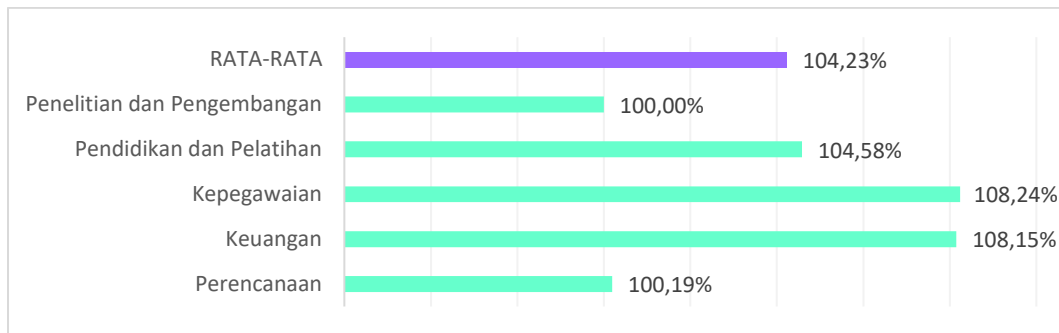
Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

3.1.3.5 Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang meliputi fungsi: Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, dan secara umum menunjukkan kinerja yang baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 104,23% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.



Gambar 3.16
Rata-rata Capaian Kinerja Kelompok Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan



Sumber: Bappedalitbang Kota Surabaya, 2023

3.1.3.6 Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Secara umum, kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang meliputi Urusan Inspektorat Daerah menunjukkan kinerja yang baik, di mana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan mencapai 98,97% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

3.1.3.7 Kinerja Unsur Kewilayahan

Kinerja Unsur Kewilayahan yang meliputi Urusan Kecamatan terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerjanya mencapai 114,27% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja kategori Sangat Tinggi.

3.1.3.8 Kinerja Unsur Pemerintahan Umum

Kinerja Unsur Pemerintahan Umum yang meliputi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah terlaksana dengan baik, dimana angka rata-rata capaian kinerja kelompok Unsur Pemerintahan Umum mencapai 101,16% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Kategori Sangat Tinggi.

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan yang diambil oleh Walikota Surabaya Tahun 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.25
Kebijakan Strategis Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya
2	Penerimaan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Optimalisasi pemanfaatan barang/aset daerah serta untuk menyesuaikan dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah.
3	Kewilayahan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara Dan Kelurahan Perak Timur Pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya	Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
4	Perpustakaan	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Penyelenggaraan perpustakaan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Surabaya.
5	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Perwujudan tertib pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6	Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
7	Penyertaan Modal	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Dan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama	Menciptakan tertib administrasi terhadap penetapan Perusahaan Perseroan Daerah Penguatan, penyertaan modal minimum dan pemulihan ekonomi melalui permodalan pada usaha mikro kecil, ekonomi kreatif dan Badan Usaha Milik Daerah.
8	Penerimaan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
9	Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya
10	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	1 Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 2. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
11	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan	Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah serta untuk menyesuaikan dengan kebijakan terkait Pemanfaatan Barang Milik Negara terhadap besaran faktor penyesuaian sewa dalam kondisi tertentu.
12	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini	Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
13	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya	untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah baik secara sebagian dan/atau seluruhnya menjadi rumah layak huni, sehat dan aman dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, keswadayaan dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat
14	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan efisiensi persyaratan
15	Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat	Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat Di Kota Surabaya	Biaya Jasa Pelayanan/Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya
16	Lingkungan Hidup	Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya	1. Mengurangi timbulan sampah dari Kantong Plastik yang sulit terurai oleh proses alam sebagai upaya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan; dan b. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penanganan penggunaan Kantong Plastik.
17	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Ke Masyarakat Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729	Untuk memberikan keringanan beban masyarakat di Kota Surabaya
18	Pemberian Beasiswa	Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa	untuk menjamin keberlangsungan studi siswa/mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
19	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729	Meringankan beban masyarakat Kota Surabaya serta meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam melakukan pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah
20	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya	Penetapan tarif sewa Rusunawa
21	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya	Memberikan keringanan beban masyarakat karena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya.
22	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Sebesar 2% (Dua Persen) Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/ Persetujuan Bangunan Gedung Yang Terutang Akibat Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Surabaya	Untuk memberikan keringanan beban masyarakat sebagai dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya
23	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni	Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9	Optimalisasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Tahun 2022 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya	
24	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga Serta Pariwisata Kota Surabaya	Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
25	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja Yang Dibiayai Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Pedoman penetapan sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
26	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Hari Jadi Kota Surabaya Ke-729	Meringankan beban masyarakat di Kota Surabaya khususnya penghuni Rumah Susun Sewa Kota Surabaya.
27	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun	Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
28	Pendidikan Inklusif	Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyelenggaraan	1. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Pendidikan Inklusif Di Kota Surabaya	kemampuannya; 2. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.
29	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Terhadap Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kota Surabaya	Memberikan keringanan beban masyarakat atau pengusaha dalam rangka pemulihan ekonomi karena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surabaya.
30	Batas Administrasi Kewilayahan	Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Dan Kecamatan Di Kota Surabaya	Untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
31	Batas Administrasi Kewilayahan	Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Batas Wilayah Kelurahan Di Kecamatan Genteng, Kecamatan Tambaksari, Kecamatan Gubeng, Kecamatan Bubutan, Kecamatan Tegalsari, Kecamatan Simokerto, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Jambangan, Kecamatan Wonokromo Dan Kecamatan Rungkut Di Kota Surabaya	Menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Kecamatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
32	Perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2022	Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 serta adanya perubahan kebijakan dan program prioritas Tahun 2022
33	Jaminan Persalinan	Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan Di Kota Surabaya	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan.
34	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Denda PBB Kepada Masyarakat Dalam Rangka Hari Kesaktian Pancasila Dan Hari Pahlawan	Memberikan keringanan beban masyarakat Daerah.
35	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Surabaya	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
36	Penurunan Stunting	Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya	1. meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terkait peran sertanya dalam percepatan penurunan stunting di Daerah; 2. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait percepatan penurunan stunting secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik; dan 3. meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah perilaku untuk mencegah stunting melalui strategi komunikasi



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
			perubahan perilaku yang komprehensif di Daerah
37	Pengelolaan Arsip	Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	1. agar setiap Perangkat Daerah Pencipta Arsip Terjaga mampu mengelola dan melaporkan Arsip Terjaga secara benar; dan 2. untuk menjamin bahwa arsip negara yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga, aman, selamat dan diperlakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
38	Pelayanan Pemakaian Rumah Susun	Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun	Dalam rangka menjamin kepastian hukum, memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat dan guna meningkatkan pelayanan di bidang rumah susun.
39	Pengadaan Tanah	Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	1. Meningkatkan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Kepentingan Umum di Daerah; dan 2. Mensinergikan pelaksanaan tahapan Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum antar pemangku kepentingan di Daerah
40	Tata Kearsipan Dan Klasifikasi Arsip	Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tata Kearsipan Dan Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya	Terlaksananya pemberkasan dan penataan arsip dinamis secara efektif dan efisien.
41	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Terhadap Bunga Pajak Daerah Kepada	Untuk memberikan keringanan beban masyarakat di Kota Surabaya.



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Masyarakat Dalam Rangka Hari Pahlawan	
42	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Retribusi Izin Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan	Meringankan beban masyarakat di Kota Surabaya khususnya penghuni Rumah Susun Kota Surabaya.
43	Bantuan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengemudi Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi	Memberikan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari Belanja Wajib Perlindungan Sosial.
44	Data Keluarga Miskin	Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan Dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin	Pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data keluarga miskin
45	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Rangka Hari Pahlawan	Memberikan keringanan beban masyarakat di Kota Surabaya.
46	Bantuan Sosial	Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Nelayan Kota Surabaya Dalam Rangka Mendukung Program Penanganan Dampak Inflasi	Memberikan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada Nelayan Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi
47	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Pemakaian Tanah	Untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya serta meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah dalam melakukan



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
		Kepada Masyarakat Pemegang Izin Pemakaian Tanah Dalam Rangka Hari Pahlawan	pembayaran retribusi Izin Pemakaian Tanah
48	Penerimaan Daerah	Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan Atau Pengurangan Denda Pelaksanaan Kemajuan Pembangunan Di Lapangan Pada Saat Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Hari Pahlawan	1. memberikan keringanan beban bagi warga masyarakat; 2. meningkatkan kepatuhan dan antusias warga masyarakat dalam pengajuan IMB/PBG; dan 3. menjadi stimulan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi IMB/PBG
49	Penyelenggaraan Program Padat Karya	Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Padat Karya Pada Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum	1. memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah; 2. mewujudkan peningkatan akses Keluarga Miskin kepada pelayanan dasar dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; 3. penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan Padat Karya; 4. membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; 5. mengurangi jumlah Keluarga Miskin di Daerah; dan 6. meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin di Daerah.
50	Sosial	Peraturan Walikota Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan Di Kota Surabaya	Peningkatan pelaksanaan pemberian permakanan yang lebih tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran.



3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota ATA 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagai berikut.



Tabel 3.26
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2021

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1	Meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemerintah Kota Surabaya sesuai kompetensi dan beban kerja.	Peningkatan kesejahteraan ASN diberikan sesuai dengan kompetensi beban kerja dan kondisi kerja sesuai dengan ketentuan.	Peningkatan kualitas ASN
2	Maksimalkan potensi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan 37,5 jam per-minggu.	Kehadiran ASN telah dipantau melalui aplikasi Tekocak, pengembangan Potensi dilakukan melalui pengembangan Manajemen Talenta di BKPSDM.	Peningkatan kualitas ASN
3	Penyesuaian jenjang pendidikan dengan gaji.	Penggajian dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.	Peningkatan kualitas ASN
4	Evaluasi psikotest yang dilakukan tiap tahun kepada OS atau tenaga kontrak.	Psikotest diadakan sebagai pendukung penentuan talenta pada penerapan manajemen Talenta pada ASN. Psikotest pada tenaga kontrak dilakukan sesuai dengan evaluasi Pembuat Komitmen pada Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.	Peningkatan kualitas ASN
5	BKPSDM perlu menyusun standart kepegawaian dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dengan mempertimbangkan kondisi Pemerintah Kota saat ini.	BKPSDM telah menyusun rencana kebutuhan ASN 5 tahun kedepan sesuai dengan standar kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan turunannya(PP, PermenpanRB, dan Perka BKN) yang meliputi standar penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, standar pola karier, standar penilaian kinerja.	Peningkatan kualitas ASN



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
6	Perlunya pembinaan, pengawasan dan penilaian kepada seluruh ASN dan penguatan data kepegawaian sehingga sistem MERIT dapat dilaksanakan.	Telah dilakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan peningkatan kompetensi kepada seluruh ASN. Kota Surabaya telah mengimplementasikan sistem merit dengan membangun aplikasi sistem merit online (SIMATA SYANAS) (Sistem Informasi Manajemen Talenta Surabaya Naik Kelas). Nilai Sistem Merit Kota Surabaya Tahun 2022 dengan kategori Baik (341,5)	Peningkatan kualitas ASN
7	Lebih menciptakan karakter kebangsaan untuk kehidupan sosial Kota Surabaya.	Peningkatan karakter kebangsaan untuk kehidupan sosial kota Surabaya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan kepada tokoh masyarakat, pengurus RW/RT serta Karang Taruna di kecamatan, dengan Narasumber dari Akademisi dan Ketua/Anggota FKUB. - melaksanakan sosialisasi pemahaman Ijin Mendirikan Tempat Ibadah dan Toleransi umat beragama - melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan Narasumber dari KPU, Bawaslu dan Akademisi. - melakukan pembinaan terhadap Korps Musik lagu-lagu kebangsaan yang mengiringi upacara. - diadakannya lomba wawasan kebangsaan bagi pelajar SMP sederajat.	Peningkatan karakter dan wawasan kebangsaan
8	Perlu optimalisasi FKUB.	Peran Bakesbangpol terkait optimalisasi FKUB antara lain : 1. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; 2. menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; 3. melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan; 4. merencanakan dan melaksanakan program FKUB; 5. melakukan survey dan menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadat. 6. melaksanakan kegiatan Kemah Pemuda Lintas Agama	Penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama serta penghayat kepercayaan
9	Perlu pelatihan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Pada tahun 2022 telah dilakukan Pelatihan Kelurahan tangguh bencana, Pelatihan Sekolah tangguh bencana, Pelatihan Rumah sakit/Puskesmas tangguh bencana, Pelatihan Dasa Wisma tangguh bencana, serta Pelatihan peningkatan satgas/linmas di kelurahan.	Kesiapsiagaan terhadap bencana



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
10	Agar dilakukan perhitungan target berdasarkan data potensi pendapatan yang up to date.	Optimalisasi pendapatan daerah telah dilakukan melalui: 1) Pengendalian dan Penagihan tunggakan wajib pajak serta memonitoring pembayaran wajib pajak; 2) Memberikan kemudahan dalam permohonan pendaftaran data wajib pajak secara online dan mengupayakan tax surveillance secara elektronik dan terintegrasi secara real time; 3) Kebijakan pengurangan pokok pajak, keringanan dengan angsuran dan penghapusan sanksi administratif berupa bunga/denda kepada masyarakat Surabaya untuk mendorong pembayaran pajak; 4) Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak eksternal untuk mengoptimalkan pembayaran pajak; serta 5) Menyusun kajian potensi pendapatan daerah .	Optimalisasi Pendapatan
11	Inventarisasi dan digitalisasi data barang pengadaan atau aset pemerintah Kota Surabaya, yang pengelolaannya ada di masing-masing OPD.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mengembangkan Aplikasi SIMBADA khususnya agar dapat menyajikan informasi aset Pemerintah Kota Surabaya yang komprehensif dan memiliki aksesibilitas yang memadai menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung penyelenggaraan SIMBADA dengan mengatasi kendala jaringan atau konektivitas agar dapat lebih mudah diakses oleh setiap PD sehingga pemutakhiran data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Selain itu, pada tahun 2022, BPKAD telah mengembangkan aplikasi e-RKBMD, yaitu aplikasi terkait rencana kebutuhan barang milik daerah. Dengan adanya aplikasi tersebut, perencanaan kebutuhan barang milik daerah lebih efektif dan tepat peruntukannya karena didukung dengan data yang riil dan relevan. Aplikasi lainnya seperti SIGAD dan SI-IBMD yang akan dipakai untuk identifikasi/inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah masih dalam proses pengembangan.	Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
12	Meningkatkan pengawasan bersama dalam merawat dan menjaga aset daerah.	- Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) terkait dalam rangka pengawasan aset Pemerintah Kota Surabaya. - Melakukan pengawasan dan sosialisasi secara intensif dengan kelurahan dan kecamatan terkait deteksi dini terhadap terjadinya perusakan terhadap sarana pengamanan aset (papan, patok, pagar) dan pemanfaatan/penggunaan tanpa ijin sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan. Kegiatan ini melibatkan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dan diperkuat dengan Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 593/16464/436.8.2/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Hal Pelaksanaan Pengamanan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya	Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota
13	Memetakan aset Pemerintah Kota secara detail berdasarkan penggunaannya, terutama yang belum termanfaatkan dengan baik oleh Pemkot maupun oleh warga Kota Surabaya dan betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga Kota Surabaya sehingga Tahun 2022 tidak ada lagi aset yang tidak termanfaatkan.	Terkait penggunaan dan pemanfaatan aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menyediakan fitur penyusunan SK Penetapan Status Pengguna pada Aplikasi SIMBADA untuk aset tanah yang belum dimanfaatkan oleh PD. Dengan demikian, proses identifikasi bidang tanah yang belum dimanfaatkan akan lebih cepat dan tepat sehingga bisa segera diusulkan terkait penggunaan dan pemanfatannya	Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
14	Perlu penguatan dalam proses penyelesaian sengketa aset pemkot.	Penyelesaian sengketa aset Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan menggandeng kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (narasumber advokat), akademisi melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi melalui upaya konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Terkait proses pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan permohonan bantuan non litigasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,II dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang. Selama tahun 2022 telah dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama/patok batas/pagar kawat berduri dan pengamanan hukum berupa sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.	Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota
15	Dalam penentuan target RPJMD dan RKPD, agar mempertimbangkan data capaian sebelumnya, agar terget lebih rasional dan juga memperhatikan kegiatan dan program prioritas.	Penentuan target RPJMD selalu mempertimbangkan kondisi awal dan pencapaian kinerja sebelumnya. Demikian pula dalam penentuan target kinerja pada RKPD mengacu kepada RPJMD sebagai bentuk konsistensi perencanaan namun tetap memperhatikan capaian tahun sebelumnya. Kedua hal ini telah ditindaklanjuti dalam proses penyusunan RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2022.	Optimalisasi Perencanaan
16	Perlu dilakukan review kembali terkait penentuan kawasan permukiman kumuh.	Telah ditindaklanjuti dengan pendataan baseline peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman prioritas sesuai peraturan berlaku untuk selanjutnya disinkronisasi dengan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Optimalisasi Perencanaan
17	Perlu dilakukan review kembali target indeks infrastruktur kota sehingga antara capaian dan realisasi di lapangan dapat sinkron.	Dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 telah dilakukan penyesuaian pada target dan komponen perhitungan Indeks Infrastruktur Kota	Optimalisasi Perencanaan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
18	Perlu direview kembali indikator penentuan kategori miskin untuk menentukan pemberian intervensi dari Pemerintah Kota.	Penentuan kategori warga miskin berdasarkan Perwali 106 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin bahwa keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan dimana penetapannya melalui proses musyawarah kelurahan.	Penanganan Kemiskinan
19	Peningkatan sumber daya manusia disesuaikan dengan ABK untuk menunjang penyelesaian kasus-kasus hukum yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya.	Pemerintah Kota Surabaya memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) ASN yang berkompeten dalam bidang hukum serta menyusun strategi percepatan penanganan permasalahan hukum dengan melibatkan jajaran sampling (Kejaksaan dan Kepolisian).	Peningkatan kualitas ASN
20	Mengundang Pimpinan dan Anggota DPRD untuk sosialisasi peraturan daerah.	Pemerintah Kota Surabaya melalui Bagian Hukum dan Kerjasama sudah mengundang pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Surabaya.	Kolaborasi DPRD dan Pemerintah Kota
21	Perlu penguatan dalam proses penyelesaian sengketa aset pemkot.	Penyelesaian sengketa aset Pemerintah Kota Surabaya dilakukan dengan menggandeng kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (narasumber advokat), akademisi melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non litigasi melalui upaya konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsolidasi. Terkait proses pensertipikatan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan permohonan bantuan non litigasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara dan koordinasi secara intensif dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I,II dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang. Selama tahun 2022 telah dilakukan pengamanan fisik berupa pemasangan papan nama/patok batas/pagar kawat berduri dan pengamanan hukum berupa sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Surabaya.	Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
22	Menjadi organisasi perangkat daerah yang powerfull, agar mampu menganalisa pegawai pemerintah Kota Surabaya.	Bagian Organisasi telah: 1) Melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Analisa Beban Kerja dan Analisis Jabatan, untuk mendapatkan data dan informasi yang valid terkait kondisi saat ini dibandingkan dengan kebutuhan pegawai ideal; 2) Membangun aplikasi anjab-abk untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menganalisis dan menyampaikan kebutuhan pegawai yang menjadi dasar BKPSDM untuk rekrutmen pegawai 3) Melakukan pendampingan penyusunan standar pelayanan dan SOP untuk menguatkan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4) Melakukan penguatan pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (RB) melalui pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk menunjang peningkatan nilai SAKIP dan membangun aplikasi monitoring dan pelaksanaan RB di Perangkat Daerah	Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi
23	Meningkatkan Kesejahteraan Modin di Kota Surabaya.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah mengupayakan ketepatan sasaran penerima Biaya Jasa Pelayanan Bagi Warga Pelayan Masyarakat (Modin) sejumlah 2.226 Orang dengan besaran biaya jasa pelayanan sesuai ketentuan.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
24	Pemanfaatan aset Pemerintah Kota yang dilakukan oleh kecamatan.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat telah menindaklanjuti permohonan fasilitasi dari kecamatan dan kelurahan melalui rapat koordinasi Perangkat Daerah, jajaran sampling, maupun tenaga ahli apabila diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya	Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
25	Koordinasi dengan BKD terkait pelatihan atau pemantapan terhadap camat dan lurah.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan pembinaan kepada 31 kecamatan dan 154 kelurahan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kompetensi camat dan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Materi yang disampaikan selama pelatihan terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan.	Peningkatan kualitas ASN
26	Penguatan kelembagaan di kelurahan dan kecamatan perlu diintensifkan.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan sosialisasi Peraturan Walikota tentang pembentukan dan pembinaan RT, RW dan LPMK serta memfasilitasi kegiatan pelantikan ketua RT, RW dan LPMK	Penguatan Kelembagaan
27	Perlu pelatihan untuk para camat/lurah yang baru mengingat banyak camat/lurah yang berasal dari Dinas yang belum terbiasa menemui masyarakat langsung.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melakukan pembinaan kepada 31 kecamatan dan 154 kelurahan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam peningkatan kompetensi camat dan lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Materi yang disampaikan selama pelatihan terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan.	Peningkatan Kualitas ASN
28	Belanja langsung pada saat pandemi, agar difokuskan untuk percepatan penanganan pandemi, pemulihan dampak ekonomi dan sosial.	Belanja langsung khususnya terkait pengadaan barang dan jasa memprioritaskan dan terus dioptimalkan pada produk lokal (termasuk UMKM) dan produk nasional yang tersedia melalui katalog elektronik (e-Peken, katalog lokal, katalog nasional dan Toko Daring). Pemerintah Kota Surabaya juga terus mendorong UMKM untuk mendaftarkan di katalog lokal Kota Surabaya. Selain itu, juga Telah dilakukan tagging atau penanda pada komponen-komponen yang dialokasikan khusus untuk intervensi pasca-pandemi agar dapat dimonitor pelaksanaan pekerjaannya.	Pemulihan Ekonomi



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
29	Sosialisasi terkait rokok ilegal terhadap pelaku usaha dengan menggandeng jajaran samping.	Telah dilaksanakan sosialisasi rokok ilegal pada tahun 2021 dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Tanjung Perak. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan dengan pembicara dari Kantor Bea Cukai. Sedangkan pada tahun 2022, telah dilakukan sosialisasi terkait cukai hasil tembakau ilegal terhadap pelaku usaha dan masyarakat pada bulan November dan Desember di 6 kecamatan, dengan menggandeng Dirjen Bea Cukai Kanwil Jatim, kejaksaan, dan jajaran samping lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa.	Optimalisasi Penggunaan BHCHT
30	Melakukan pelatihan terhadap pegawai PD. Pasar Surya yang tidak bisa membaca dan menulis.	PD Pasar Surya telah melakukan penyesuaian jabatan terhadap pegawai sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai, dan pada tahun 2022 PD Pasar Surya telah melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan.	Optimalisasi BUMD
31	Mendorong hubungan kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta agar ada motivasi lebih terkait pengerjaan maupun keuntungan.	Pelaksanaan kerja sama BUMD baik dengan pihak swasta maupun sinergi antar BUMD telah dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik dan keuntungan perusahaan. Sebagai contoh: 1. PD Pasar Surya bekerjasama dengan BNI, BRI dan Bank Jatim dalam hal digitalisasi pembayaran iuran perpasaran; 2. PDTS KBS bekerjasama dengan BRI untuk digitalisasi tiket masuk di Kebun Binatang Surabaya	Optimalisasi BUMD
32	Profesionalitas di lingkungan BUMD agar outputnya menguntungkan Pemerintah Kota dengan membayar konsultan/coach khusus untuk penanganan BUMD Kota Surabaya.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melibatkan tenaga ahli dalam penyelesaian permasalahan BUMD secara berkala. BUMD secara mandiri dan berkala telah menyelenggarakan pelatihan terhadap karyawan internal perusahaan dengan melibatkan konsultan/coach/mentor.	Optimalisasi BUMD



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
33	Harus ada master plan yang jelas terkait pemindahan RPH, agar dikemudian hari tidak terjadi konflik di masyarakat.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama dengan Perangkat Daerah terkait telah melibatkan tenaga ahli dalam penyusunan kajian kelayakan perpindahan Rumah Potong Hewan Pegirian ke Banjarsugihan. Hasil kajian dimaksud menunjukkan bahwa perpindahan Rumah Potong Hewan Pegirian ke Banjarsugihan dinilai layak secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.	Optimalisasi BUMD
34	BUMD sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak swasta agar dapat menghasilkan keuntungan. Kerjasama ini adalah dengan melakukan Investasi bersama sehingga akan ada bagi hasil.	Bahwa pelaksanaan kerja sama BUMD dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kajian kelayakan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Investasi BUMD dapat dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal, pembentukan anak perusahaan maupun penerapan bagi hasil atas pengelolaan/pemanfaatan aset BUMD.	Optimalisasi BUMD
35	Perkembangan PD Pasar harus diperhatikan dengan seksama sehingga dapat memberikan keuntungan pendapatan BUMD.	Pada tahun 2022, telah diselenggarakan seleksi dalam rangka pengisian kekosongan jabatan Direktur Utama serta Direktur Teknik dan Usaha dalam rangka efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan.	Optimalisasi BUMD
36	Memaksimalkan souvenir ikon Kota Surabaya hasil produk UMKM.	Pengadaan souvenir ikon Kota Surabaya telah diarahkan untuk pemberdayaan UMKM. Misalnya, adanya variasi souvenir berupa udeng, patung miniatur Suroboyo, batik tulis, tas dan box souvenir, dan pigura produk-produk UKM. Selain itu makan dan minum produk UKM diberikan kepada tamu saat kunjungan kerja kedinasan atau acara yang melibatkan lembaga luar Pemkot. Tamu kunjungan kerja kedinasan atau acara lain yang berasal dari luar Kota Surabaya juga disarankan mengunjungi Kriya Gallery yang memasarkan produk-produk UKM Kota Surabaya.	Peningkatan kualitas UMKM



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
37	Inventarisasi secara online terkait aduan atau pengajuan masyarakat kepada Walikota Surabaya.	Bentuk upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menginventasiasi terkait aduan dan pengajuan masyarakat kepada Walikota Surabaya sudah tertampung secara daring melalui aplikasi Warga-Ku untuk menampung aspirasi dan aduan warga sekaligus didapati fitur status tindak lanjut yang dilakukan. Selain itu, rekapitulasi pengaduan/saran/masukan warga melalui WargaKu juga disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah melalui e-Surat sehingga memudahkan dan mempercepat penyampaian surat serta proses tindak lanjut dari Perangkat Daerah.	Pelayanan Publik
38	Mempermudah persyaratan administrasi untuk warga Kota Surabaya yang mau melakukan pinjaman modal.	BPD Jatim telah mensosialisasikan persyaratan pengajuan pinjaman kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya dengan persyaratan yang mudah dan suku bunga yang bersaing dengan perbankan lainnya	Pelayanan Publik
39	Memprioritaskan UMKM Kota Surabaya untuk pinjaman modal.	BPD Jatim telah mengalokasikan anggaran CSR kepada UMKM tiap tahun berkolaborasi dengan PT BPR UMKM Jatim, PT BPR Surya Artha Utama dan Perangkat Daerah terkait dalam penyaluran bantuan kepada UMKM berupa barang.	Peningkatan kualitas UMKM
40	Membuka mesin ATM (mesin setor dan tarik tunai) di Kantor DPRD Kota Surabaya.	PT BPD Jatim akan memasang mesin ATM setor dan tarik tunai di kantor DPRD Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) unit pada tahun 2023.	Peningkatan sarana pendukung gedung pemerintahan
41	Sosialisasikan program KUR Bank Jatim agar informasinya diketahui oleh masyarakat luas Kota Surabaya.	BPD Jatim telah mensosialisasikan persyaratan pengajuan pinjaman kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota Surabaya dan warga Kota Surabaya dengan persyaratan yang mudah dan suku bunga yang bersaing dengan perbankan lainnya.	Peningkatan kualitas UMKM
42	Sosialisasi adanya kredit murah untuk warga Kota Surabaya.	PT BPR Surya Artha Utama telah melaksanakan program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (PUSPITA) kepada UMKM dengan suku bunga rendah dalam rangka bantuan modal usaha, dan telah disosialisasikan sampai dengan skala Kelurahan.	Optimalisasi BUMD



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
43	Membuat brosur atau pamflet yang menarik perhatian untuk pemasaran.	PT BPR Surya Artha Utama telah membuat dan menyebarkan brosur program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (PUSPITA) kepada UMKM dengan suku bunga rendah dalam rangka bantuan modal usaha, dan telah disosialisasikan sampai dengan skala Kelurahan.	Optimalisasi BUMD
44	Membuat program TABANAS untuk siswa sekolah di Kota Surabaya dan bisa koordinasi dengan Dinas Pendidikan.	PT BPR Surya Artha Utama telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk pembukaan rekening bagi siswa SD dan SMP di Kota Surabaya melalui program Tabungan Perisai Junior.	Optimalisasi BUMD
45	Memperkenalkan cagar budaya di Kota Surabaya kepada anak-anak muda.	Untuk memperkenalkan bangunan cagar budaya kepada anak-anak muda dilaksanakan melalui sekolah kebangsaan yang diadakan di tempat cagar budaya serta mempublikasikan narasi sejarah melalui website dan media sosial Disbudporapar sehingga anak-anak muda dapat mengetahui, menjaga dan melestarikan bangunan cagar budaya. Selain itu juga mengoptimalkan pemanfaatan bis SSCT (Surabaya Shopping and Culinary Track) untuk mengunjungi tempat-tempat cagar budaya di Kota Surabaya sehingga anak-anak muda mengetahui sejarah dari bangunan cagar budaya yang dikunjungi.	Pelestarian Budaya
46	Realisasikan pembangunan sarana lapangan futsal di Kota Surabaya.	1. Hingga saat ini sudah terdapat 172 lapangan futsal terbangun yang tersebar di berbagai wilayah dan pemanfaatan lapangan olahraga tersebut akan terus dioptimalkan melalui kegiatan event dan lomba di tingkat masyarakat 2. Penambahan pembangunan lapangan futsal di berbagai wilayah untuk pemerataan fasilitas olahraga sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan perlombaan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaraan masyarakat yang menggunakannya dengan baik dan teratur untuk masyarakat Kota Surabaya	Peningkatan akses sarana olahraga



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
47	Menerapkan digitalisasi terkait web pariwisata, agar informasinya bisa mudah diakses.	Web http://tourism.surabaya.go.id/ untuk pengenalan kegiatan/agenda pariwisata di Kota Surabaya telah dilaunching. Dalam website tersebut berisi informasi daftar destinasi wisata, cagar budaya, event-event seni budaya dan sejarah termasuk Peta Wisata yang ada di Kota Surabaya. Selain melalui web, Disbudporapar juga mempunyai akun di beberapa media sosial yaitu Instagram, Tiktok, Facebook, Twitter dan Youtube yang mudah diakses oleh masyarakat.	Peningkatan sektor pariwisata
48	Fokus pembangunan fasilitas terhadap cabang olahraga yang legenda olahraganya warga Kota Surabaya.	Pembangunan Fasilitas olahraga tetap dilakukan sehingga lapangan olahraga yang telah terbangun sampai tahun 2022 di Kota Surabaya sejumlah 603 Lapangan Olahraga yang terdiri dari berbagai jenis lapangan antara lain futsal, bulu tangkis, tenis, softball, hockey, basket, voli, sepak bola, kolam renang, atletik, sirkuit, dan Gedung Olahraga. Dengan adanya Sarana dan prasarana tersebut dapat dimanfaatkan Kegiatan event dan lomba serta dimanfaatkan oleh Cabang Olahraga untuk penjangkaran event bibit atlit berkolaborasi dengan KONI, KORMI dan NPC.	Peningkatan akses sarana olahraga
49	Memperkenalkan napak tilas sejarah, pahlawan dan tokoh-tokoh surabaya yang terkenal kepada generasi muda.	Pada tahun 2022, telah dilaksanakan beberapa event, antara lain Parade Surabaya Juang, Heroic Track (Wisata Kepahlawanan) dan Sekolah Kebangsaan, Perobekan Bendera di Hotel Majapahit Jalan Tunjungan yang termasuk di dalamnya napak tilas. Pengenalan napak tilas sejarah, tokoh dan pahlawan di Kota Surabaya juga dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum, dimana didalamnya terdapat Pameran Museum dan Pameran Keliling.	Pelestarian Budaya
50	Mencairkan dana beasiswa PTN kepada masyarakat Kota Surabaya.	Total penerima beasiswa Mahasiswa sebanyak 2.486 orang telah disalurkan melalui Perguruan Tinggi masing-masing.	Peningkatan Kualitas Pendidikan
51	Menyediakan Fasilitas Kantor Sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).	Sampai dengan saat ini, Disbudporapar telah menyediakan sekretariat bersama yang dapat digunakan semua organisasi pemuda yang belokasi di Gelanggang Remaja.	Peningkatan Peran Kepemudaan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
52	PD diharapkan fokus untuk melakukan pengembangan kemampuan atlet dengan segera melakukan pendataan atau mapping cabang olahraga mana saja yang berpotensi untuk mendapatkan prestasi/medali.	Intervensi Kegiatan Pembinaan atlet telah dilaksanakan Bersama dengan KONI Kota Surabaya dengan pemberian Reward Atlet dan Pelatih di setiap Kejuaraan Propinsi, Kejuaraan Nasional maupun Kejuaraan Internasional selain itu Program Latihan dan perkembangan atlet dipantau oleh DISBUDPORAPAR bersama KONI Kota Surabaya melalui Kegiatan Pusat Latihan cabang Olahraga (PUSLATCAB) Bagi Atlet dan Pelatih PUSLATCAB sehingga KONI Kota Surabaya mempunyai data dasar Perkembangan Atlet Kota Surabaya	Peningkatan prestasi olahraga
53	Perlu dilakukan komunikasi dengan pihak terkait sehingga jalur prestasi pendidikan harusnya Disbudporapar bukan KONI walaupun datanya dari KONI.	Disbudporapar berkoordinasi dengan KONI terkait JAPRES (Jalur Prestasi) berdasarkan surat pengantar dari Cabang Olahraga yang disetujui berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KONI. Sebelum PPDB DISBUDPORAPAR telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Penerimaan JAPRES sehingga DISBUDPORAPAR dan KONI Kota Surabaya menentukan aturan yang akan dilakukan.	Peningkatan prestasi olahraga
54	Perlu optimalisasi upaya beasiswa bagi siswa SMA/SMK.	Total penerima beasiswa SMA/SMK sederajat sebanyak 13.862 orang. Optimalisasi pemberian beasiswa telah dilakukan melalui perluasan jangkauan untuk pendaftaran berbasis online. Selain itu, untuk perluasan penyebaran informasi bahwa ada program pemberian beasiswa melalui media sosial dan sekolah-sekolah lewat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)	Peningkatan Kualitas Pendidikan
55	Terkait Cagar Budaya: Kawasan atau bangunan cagar budaya seharusnya dikembalikan ke fungsi semula atau minimal direvitalisasi agar kondisi bangunannya terjaga.	Pengembalian fungsi cagar budaya ke fungsi semula dan revitalisasi cagar budaya ditindaklanjuti melalui Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, dimana tahun 2022 terdapat 266 cagar budaya yang dilakukan monitoring dan evaluasi.	Pelestarian Budaya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
56	Terkait Pariwisata: Sarana prasarana di THP Kenjeran harusnya lebih dibenahi (seperti penerangan, toilet).	Pembenahan fasilitas di THP Kenjeran telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang dikerjakan oleh Disbudporapar dan DPRKPP, meliputi pekerjaan penataan landscape penataan di THP Kenjeran Utara dan Selatan, pemeliharaan toilet, serta stand-stand UMKM dan pengelolaan masih terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya	Peningkatan sektor pariwisata
57	Terkait Fasilitas Olahraga: Fasilitas atau prasarana olahraga mungkin lebih diperbanyak atau lebih bagus agar pemuda bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dan aktivitasnya lebih terarah atau tidak menjadi anak nakal (Harapannya 5 kolam renang standar internasional).	1. Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga terus dilakukan agar keandalan prasarana dan sarananya selalu laik fungsi dan dilakukan upaya perawatan sarana dan prasarana olahraga berupa memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar sarana prasarana tetap laik fungsi. Untuk Penyediaan Fasilitas Kolam Renang hanya 1 lokasi yaitu di Jambangan, untuk Saat ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berfokus pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas kolam renang tersebut. 2. Dilakukan Perbaikan sarana dan prasarana secara rutin maupun jangka waktu tertentu menyesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang tersebar di kota Surabaya. Untuk Kolam Renang yang terbangun hanya 1 Kolam renang yang terletak di Jambangan, untuk Saat ini Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata berfokus pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas kolam renang tersebut dan melakukan kajian pengembangan fasilitas Kolam renang tersebut.	Peningkatan akses sarana olahraga
58	Meningkatkan koordinasi dengan DPRD ketika ada keluhan atau laporan tentang masyarakat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan asistensi melalui rapat koordinasi secara rutin.	Kolaborasi DPRD dan Pemerintah Kota



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
59	Perlu dilakukan optimalisasi pemenuhan eKTP baik eKTP baru maupun penggantian eKTP yang rusak.	Pelayanan pendaftaran dan pemutakhiran identitas penduduk diwujudkan melalui sub kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk dimana pelaksanaannya telah tersebar diseluruh wilayah Kota Surabaya yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 31 Kantor Kecamatan, 154 Kantor Kelurahan, pemberian pelayanan secara jemput bola secara langsung kepada masyarakat, pengajuan permohonan secara mandiri, serta koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat terkait dengan usulan kebutuhan dan pemenuhan blangko ktp-el.	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
60	Perlu dilakukan Sinkronisasi Pencatatan Sipil misalnya dengan KUA terkait data-data Penduduk. Karena untuk agama non muslim pencatatan melalui Disdukcapil.	Koordinasi dengan Kemenag Surabaya dan Pengadilan Agama telah dilakukan dalam program Lontong Kupang Dispendukcapil. Terkait upaya sinkronisasi pencatatan sipil dilakukan koordinasi dengan beberapa lembaga terkait, antara lain dengan KUA, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri.	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
61	Perlunya optimalisasi dalam upaya sosialisasi program kependudukan utamanya bagaimana masyarakat mengakses pelayanan kependudukan dengan mudah.	Sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dilakukan secara menyeluruh baik melalui media cetak, media elektronik, media online dan secara tatap muka. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menggerakkan kesadaran adminduk melalui program KALIMASADA (Kawasan Lingkungan Masyarakat Sadar Administrasi Kependudukan) sampai dengan level RT.	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
62	Perlu dilakukan integrasi dengan Perangkat Daerah lainnya serta dilakukan pemutakhiran data kependudukan mengingat 2024 sudah akan dilaksanakan Pemilu.	1. Bagi Perangkat Daerah yang membutuhkan data kependudukan untuk melakukan verifikasi dan validasi, difasilitasi oleh Dispendukcapil Surabaya agar mendapatkan akses dan pemanfaatan data ware house Ditjendukcapil Kemendagri 2. Dispendukcapil Surabaya berkomitmen untuk terus melakukan pemutakhiran data melalui Jemput bola ke : - SMA/SMK - Rumah Warga yang memiliki keterbatasan fisik - Liponsos dan Panti Sosial lainnya 3. Mengembangkan program Kalimasada agar setiap RT bisa memberikan pemahaman dan pelayanan administrasi kependudukan kepada warganya secara de facto dan de jure	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
63	Adanya digitalisasi sistem online terkoneksi antara Dispendukcapil, Rumah Sakit dan BPJS, agar proses administrasi pasien cepat selesai.	Dinas Kesehatan telah berkoordinasi dengan BPJS Surabaya terkait sistem aplikasi kepesertaan yang terkoneksi dengan data kependudukan. BPJS melalui aplikasi elektronik data badan usaha (e-dabu) memberikan akses kepada Pemerintah Daerah yang bekerja sama dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Surabaya untuk mendaftar kepesertaan BPJS dan verifikasi kependudukan (KTP Surabaya).	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
64	Pakai NIK untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian administrasi pasien.	Dalam pelaksanaan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS, telah dimanfaatkan NIK untuk mempermudah dan mempercepat proses administrasi pasien.	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
65	Peningkatan kualitas SOP pelayanan sistem rujukan di puskesmas dan rumah sakit.	1. Mekanisme rujukan bagi pasien BPJS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1 Tahun 2012 bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis 2. Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan sistem rujukan, serta review SOP sistem rujukan secara berkala. 3. Fasilitas Kesehatan telah melakukan upaya KIE pada pasien dan masyarakat yang berkunjung mengenai sistem rujukan berjenjang 4. Dinas Kesehatan telah mengembangkan aplikasi sistem rujukan online dari puskesmas ke RSUD Pemerintah Kota Surabaya.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
66	Lebih berperan aktif dalam permasalahan kesehatan.	Dinas Kesehatan bersama Kader Surabaya Hebat (KSH) melakukan pemantauan dan pelaporan atas setiap permasalahan kesehatan di lingkungannya sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tanggap, dan optimal.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
67	Diupayakan seluruh rumah sakit di Kota Surabaya tercover BPJS dan dilayani oleh Dinas Kesehatan.	1. Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti dengan menghimbau ke 17 RS yang belum bekerja sama dengan BPJS untuk segera mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS. 2. Selama tahun 2022 terdapat penambahan 1 Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS dengan total 44 rumah sakit dari 60 rumah sakit di Kota Surabaya 3. Rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan disebabkan antara lain karena tidak lolos verifikasi BPJS.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
68	Kualitas pelayanan di Puskesmas, utamanya rawat inap, layanan rujukan, dan fasilitas penunjang seperti parkir harus diperbaiki dan ditingkatkan.	Dinas Kesehatan telah melaksanakan peningkatan mutu pelayanan melalui peningkatan mutu SDM dan sarana/prasarana, serta alat kesehatan: - Sebanyak 1 puskesmas telah dilakukan peningkatan status menjadi puskesmas rawat inap. - Sebanyak 5 puskesmas telah dilakukan peningkatan kapasitas ruang pelayanan dan 37 puskesmas yang mendapatkan rehabilitasi sarana prasarana untuk peningkatan mutu pelayanan. Terkait fasilitas parkir, dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan, sedangkan untuk penyediaan lahan parkir menyesuaikan dengan ketersediaan lahan.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
69	Pelayanan Kesehatan Universal bagi penduduk yang belum memiliki NIK, harus dikoordinasikan secara sistem dengan pihak terkait, utamanya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beserta BPJS Kesehatan.	Dinas Kesehatan telah mempunyai SOP terkait penanganan penduduk yang belum memiliki NIK agar mendapatkan pelayanan kesehatan. SDM Kesehatan di Puskesmas dan RS telah dilatih untuk memanfaatkan aplikasi e-klampid new generation (Dispendukcapil) dalam pengurusan NIK.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
70	Pelayanan Kesehatan Universal harus disiapkan di setiap fasilitas kesehatan di Kota Surabaya, baik milik Pemerintah Kota maupun tidak.	1. Dinas Kesehatan telah menindaklanjuti dengan menghimbau ke 17 RS yang belum bekerja sama dengan BPJS untuk segera mengajukan permohonan kerjasama dengan BPJS. 2. Selama tahun 2022 terdapat penambahan 1 Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS dengan total 44 rumah sakit dari 60 rumah sakit di Kota Surabaya 3. Rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan disebabkan antara lain karena tidak lolos verifikasi BPJS. Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit yang dimaksud supaya dapat segera melakukan pengurusan kerjasama dengan BPJS.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
71	Perlu perbaikan dalam sistem rujukan yang sebaiknya bisa diselesaikan secara online, tanpa masyarakat yang sakit bolak-balik.	1. Mekanisme rujukan bagi pasien BPJS telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 1 Tahun 2012 bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis 2. Telah dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan sistem rujukan, serta review SOP sistem rujukan secara berkala. 3. Fasilitas Kesehatan telah melakukan upaya KIE pada pasien dan masyarakat yang berkunjung mengenai sistem rujukan berjenjang 4. Dinas Kesehatan telah mengembangkan aplikasi sistem rujukan online dari puskesmas ke RSUD Pemerintah Kota Surabaya.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
72	Dinas Kesehatan Surabaya bertanggung jawab penuh jika ada Warga Surabaya yang berobat di Rumah Sakit Surabaya dan di tolak berobat dengan menunjukkan KK dan/atau KTP Surabaya, rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Dr. Soewandhie, Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada, Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur (Rumah Sakit Dr. Soetomo, Rumah Sakit Asrama Haji, Rumah Sakit Mata Masyarakat dan Rumah Sakit Kelamin, Rumah Sakit Paru-Paru Karang Tembok, Rumah Sakit TNI dan Polri, Rumah Sakit Unair).	Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan RS apabila terjadi penolakan pelayanan terhadap pasien warga Surabaya, dan menghimbau RS untuk tetap memberikan edukasi kepada pasien terkait prosedur pelayanan kesehatan.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
73	Rumah Sakit yang sudah siap berikut ini segera melakukan proses pengajuan JKN ke BPJS, yakni : 1) Rumah Sakit Premier 2) Rumah Sakit Adi Husada 3) Rumah Sakit Darmo 4) RSK St. Vincentius A. Paulo 5) RSIA Lombok 22 Lontar 6) RSIA Cempaka Putih Permata	1. Dinas Kesehatan telah mengirimkan surat (Nomor 440/15334/436.7.2/2022, Tanggal 25 April 2022, Perihal Pemberitahuan) kepada 6 RS tersebut agar segera mengajukan proses kerjasama dengan BPJS. 2. Rumah sakit yang belum bekerjasama dengan BPJS Kesehatan disebabkan antara lain karena tidak lolos verifikasi BPJS. Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Rumah Sakit yang dimaksud supaya dapat segera melakukan pengurusan kerjasama dengan BPJS.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
74	RSIA IBI akan difasilitasi untuk keluarnya akreditasi oleh PKRSI, BPJS dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya.	Pada tahun 2022, RSIA IBI telah melakukan bimbingan akreditasi oleh lembaga akreditasi yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Dan direncanakan di Tahun 2023 untuk penilaian akreditasi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
75	Rumah Sakit Mitra Keluarga dan National Hospital agar segera bergabung dengan program JKN sampai tanggal 13 Mei 2022, jika sampai batas waktu tersebut masih belum bergabung dengan program JKN maka Dinkes Kota Surabaya mengusulkan kepada Provinsi untuk tidak memperpanjang ijin operasional.	1. Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran sudah bekerjasama dengan BPJS. 2. Dinas Kesehatan terus menghimbau kembali kepada RS National Hospital untuk segera bekerja sama dengan BPJS.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
76	Dinas Kesehatan Kota Surabaya menempatkan petugas di rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS untuk mempermudah proses pelayanan sesuai program Wali Kota Surabaya dengan hanya menunjukkan KTP dan KK Surabaya.	Dinas Kesehatan telah melakukan pendampingan kepada petugas RS tentang mekanisme pelayanan JKS bagi warga Kota Surabaya serta menghimbau RS untuk tetap memberikan edukasi kepada pasien terkait prosedur pelayanan kesehatan.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
77	Fakir miskin yang terlantar dan tidak punya identitas berobat tidak dipungut biaya di seluruh Rumah Sakit Surabaya.	Dinas Kesehatan telah dan terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk memberikan pelayanan kepada orang terlantar yang tidak memiliki identitas.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan
78	Memberikan perhatian khusus pada program pelatihan hidroponik dan perikanan.	Intervensi sektor hidroponik dan perikanan telah ditindaklanjuti melalui : 1. kegiatan pelatihan hidroponik kepada masyarakat termasuk MBR. 2. Fasilitasi paket hidroponik kepada kelompok pembudidaya pertanian perkotaan. 3. Pelatihan budidaya perikanan maupun perikanan tangkap dengan sasarannya adalah pembudidaya perikanan dan nelayan.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
78	Memberikan perhatian khusus pada program pelatihan hidroponik dan perikanan.	Intervensi sektor hidroponik dan perikanan telah ditindaklanjuti melalui : 1. kegiatan pelatihan hidroponik kepada masyarakat termasuk MBR. 2. Fasilitasi paket hidroponik kepada kelompok pembudidaya pertanian perkotaan. 3. Pelatihan budidaya perikanan maupun perikanan tangkap dengan sasarannya adalah pembudidaya perikanan dan nelayan.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan
79	Pemanfaatan lahan yang jadi aset Kota Surabaya untuk warga sekitar.	Lahan aset Pemerintah Kota Surabaya telah dimanfaatkan antara lain: 1) Pengembangan budidaya peternakan antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging 2) Penyediaan bibit dan sarana prasarana untuk budidaya melalui sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3) Budidaya tanaman pangan dan sayuran serta sebagai tempat wisata pertanian dengan melibatkan warga sekitar.	Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota
79	Pemanfaatan lahan yang jadi aset Kota Surabaya untuk warga sekitar.	Lahan aset Pemerintah Kota Surabaya telah dimanfaatkan antara lain: 1) Pengembangan budidaya peternakan antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging 2) Penyediaan bibit dan sarana prasarana untuk budidaya melalui sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3) Budidaya tanaman pangan dan sayuran serta sebagai tempat wisata pertanian dengan melibatkan warga sekitar.	Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemerintah Kota
80	Disarankan adanya kampung wisata yang tidak hanya menonjolkan sisi kebudayaan tetapi juga kemampuan menghasilkan produk pertanian.	Telah ditindaklanjuti dengan merintis kampung sayur di 11 kecamatan dan dalam proses pengembangan branding wisata budidaya pertanian perkotaan.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
81	DKPP perlu melakukan inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan.	Intervensi berbasis inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan telah dilakukan melalui: 1) Pengelolaan lahan aset untuk budidaya peternakan yang dikelola oleh masyarakat antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging dengan teknologi kandang semi close house di Tahura Jeruk dan Tahura Lempung 2) Pelatihan inovasi olahan pangan lokal berbasis potensi wilayah 3) Penambahan jenis budidaya ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi 4) Inovasi pengembangan TOGA yang dapat dimanfaatkan sebagai produk minuman kemasan serta pelatihan budidaya pertanian bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan
81	DKPP perlu melakukan inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan.	Intervensi berbasis inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan telah dilakukan melalui: 1) Pengelolaan lahan aset untuk budidaya peternakan yang dikelola oleh masyarakat antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging dengan teknologi kandang semi close house di Tahura Jeruk dan Tahura Lempung 2) Pelatihan inovasi olahan pangan lokal berbasis potensi wilayah 3) Penambahan jenis budidaya ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi 4) Inovasi pengembangan TOGA yang dapat dimanfaatkan sebagai produk minuman kemasan serta pelatihan budidaya pertanian bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
81	DKPP perlu melakukan inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan.	Intervensi berbasis inovasi untuk mengangkat ekonomi kerakyatan telah dilakukan melalui: 1) Pengelolaan lahan aset untuk budidaya peternakan yang dikelola oleh masyarakat antara lain budidaya maggot dan budidaya ayam pedaging dengan teknologi kandang semi close house di Tahura Jeruk dan Tahura Lempung 2) Pelatihan inovasi olahan pangan lokal berbasis potensi wilayah 3) Penambahan jenis budidaya ikan dan udang yang memiliki nilai ekonomis tinggi 4) Inovasi pengembangan TOGA yang dapat dimanfaatkan sebagai produk minuman kemasan serta pelatihan budidaya pertanian bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan
82	Perlu diberikan pelatihan kepada masyarakat serta pemanfaatan lahan karena antusiasme masyarakat untuk melakukan urban farming dan perikanan sangat tinggi baik masyarakat usia produktif hingga usia purna (lansia).	Telah dilaksanakan pelatihan budidaya pertanian sesuai program dan pelatihan bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP, serta pelatihan tepat guna terkait budidaya perikanan maupun perikanan tangkap.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan
82	Perlu diberikan pelatihan kepada masyarakat serta pemanfaatan lahan karena antusiasme masyarakat untuk melakukan urban farming dan perikanan sangat tinggi baik masyarakat usia produktif hingga usia purna (lansia).	Telah dilaksanakan pelatihan budidaya pertanian sesuai program dan pelatihan bagi masyarakat umum yang berminat melalui pendaftaran secara online di website DKPP, serta pelatihan tepat guna terkait budidaya perikanan maupun perikanan tangkap.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
83	Melakukan kerjasama dengan Petani-petani yang ada di Kota Surabaya agar mereka dapat menjual produknya di e-Peken dan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka.	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan Petani-petani yang ada di Kota Surabaya agar mereka dapat menjual produknya di e-Peken dan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan dan perikanan
84	Perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk upaya intervensi bidang peternakan di Kota Surabaya.	Telah ditindaklanjuti dengan penyusunan draft Raperda tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dalam proses penyempurnaan harmonisasi di tingkat Kemenkumham.	Peningkatan pemberdayaan peternakan
85	Perlu optimalisasi kembali keanekaragaman pangan serta upaya untuk membentuk ketahanan pangan di Kota Surabaya.	Pemerintah Kota Surabaya telah menindaklanjuti dengan: 1) Penjajakan kerjasama dengan daerah penghasil bahan pangan, melakukan survey ketersediaan dan harga pangan 2) Pelatihan olahan pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) serta 3) Pengawasan keamanan pangan segar untuk mendukung ketahanan pangan.	Peningkatan ketahanan pangan
86	Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk program kampung zero waste, setiap tahun ada 40 kampung zero waste sehingga DKPP bisa menjadi bagian untuk pengelolaan kampung zero waste. Di bagian pemanfaatan magot maupun hasil pengelolaan sampah organik.	Kampung zero waste binaan Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki budidaya pertanian menjadi bagian dalam pembinaan kampung urban farming binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Selain itu telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan pembentukan kelompok budidaya maggot sebagai media decomposing sampah dan media tanam pertanian yang berlokasi di tanah aset Pemkot antara lain di Tambak Wedi dan Krembangan. Kegiatan ini telah dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup.	Peningkatan pengelolaan persampahan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
87	Memberikan fasilitas dan pembinaan kepada kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas SDM.	Pembinaan telah secara rutin dilakukan kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk peningkatan kapasitas SDM, seperti : Pelatihan penulisan blog, pembuatan vlog, literasi digital, dll dengan narasumber yang kompeten. Selain itu dilaksanakan lomba foto dan video terkait potensi kewilayahan. Kader KIM juga masuk menjadi Kader Surabaya Hebat, sehingga mendapatkan fasilitasi honor untuk semakin memacu kinerja KIM sebagai mitra Pemkot Surabaya dalam diseminasi informasi.	Peningkatan SDM Kelompok Informasi Masyarakat
88	Meningkatkan sinergitas untuk pengelolaan dan pengembangan UMKM Kota Surabaya.	Untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan UMKM Kota Surabaya, Diskominfo bersinergi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam penyediaan aplikasi e-peken dan memasukkan UMKM ke dalam e-peken sehingga mereka mendapatkan market pembeli yang lebih luas untuk meningkatkan penjualan. Saat ini tercatat sebanyak 3.034 UMKM di aplikasi Peken Surabaya. Peken Surabaya juga terdaftar sebagai mitra toko daring LKPP untuk meningkatkan pasar UMKM.	Peningkatan kualitas UMKM
89	Realisasi pemberian jaringan internet pada tiap RW di Kota Surabaya.	penyediaan jaringan internet di RW telah dianggarkan oleh pemerintah kota Surabaya melalui Kecamatan	Pelayanan Publik
90	Aplikasi e-peken sebaiknya tidak hanya melayani ASN saja, tetapi juga untuk anggota DPRD dan masyarakat. Terus melakukan inovasi sehingga tidak kalah dengan aplikasi belanja lainnya seperti Shopee, Tokopedia.	masyarakat sudah bisa mendaftar ke Web peken.surabaya.go.id untuk berbelanja kebutuhan pokok di Toko Kelontong dan Produk UMKM serta SWK.	Peningkatan pemasaran UMKM



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
91	Aplikasi yang dikeluarkan oleh Kominfo harus memberikan informasi secara konkrit dan real sehingga dapat membantu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga harus userfriendly sehingga mudah digunakan oleh masyarakat.	Aplikasi yang dikembangkan oleh Diskominfo memperhatikan kebutuhan user dalam hal ini masyarakat. Kemudahan dan kecepatan penggunaan aplikasi menjadi fokus untuk pengembangan User Interface / User Experience. Untuk membantu optimalisasi pelayanan penggunaan aplikasi oleh masyarakat, Pemkot Surabaya juga telah menyediakan BLC (Boardband Learning Center) yang memberikan pelatihan TIK kepada masyarakat surabaya secara gratis. Disamping memberikan pelatihan TIK, di BLC ini juga memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait semua layanan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya memiliki 53 BLC yang tersebar diseluruh wilayah Surabaya. Sosialisasi juga dilakukan di 31 Kecamatan dan melalui konten di Media sosial milik Pemerintah Kota Surabaya.	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
92	Optimalisasi pelayanan penggunaan aplikasi baik secara online ataupun offline, karena tidak semua masyarakat bisa menggunakan aplikasi.	Untuk membantu optimalisasi pelayanan penggunaan aplikasi oleh masyarakat, Pemkot Surabaya telah menyediakan BLC (Boardband Learning Center) yang memberikan pelatihan TIK kepada masyarakat surabaya secara gratis. Disamping memberikan pelatihan TIK, di BLC ini juga memberikan sosialisasi pada masyarakat terkait semua layanan yang dimiliki Pemkot Surabaya. Saat ini Pemerintah Kota Surabaya memiliki 53 BLC yang tersebar diseluruh wilayah Surabaya.	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
93	Optimalisasi pemanfaatan saluran komunikasi sehingga dapat digunakan dengan baik dan maksimal oleh masyarakat. Capaian kunjungan pemanfaatan saluran komunikasi melebihi target.	Optimalisasi pemanfaatan saluran komunikasi terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi (Instagram, facebook, twitter, tik tok, dan youtube) dalam diseminasi informasi program pembangunan disamping melalui rilis yang dikirim ke media. Tahun 2022 capaian kunjungan pemanfaatan saluran komunikasi melebihi target menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dan kemudahan akses saluran komunikasi yang disediakan oleh Diskominfo.	Optimalisasi Komunikasi dan Publikasi



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
94	Pemkot harus memiliki target yang harus dicapai untuk aplikasi e-peken. Selain itu harus terus melakukan inovasi.	Perhitungan potensi pendapatan pelaku usaha e-peken telah dilakukan. Saat ini Peken Surabaya telah menjadi Mitra Toko Daring LKPP sehingga Perangkat Daerah bisa melakukan belanja kebutuhan kantor melalui Peken. Saat ini juga sedang berproses untuk fasilitasi jasa kirim dengan beberapa perusahaan jasa pengiriman.	Peningkatan kualitas UMKM
95	Sosialisasi informasi yang ada di traffic light perlu dilakukan inovasi lagi.	Diskominfo telah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait perubahan materi sosialisasi informasi di traffic light agar menarik dan sesuai kebutuhan masyarakat.	Optimalisasi Komunikasi dan Publikasi
96	Untuk Informasi Pembangunan Kota Surabaya harus memiliki keunikan yang berbeda dengan daerah lain, memiliki tampilan yang bagus sehingga banyak yang tertarik untuk melihat.	Konten-konten yang dipublikasikan melalui website dan media sosial terus dimutakhirkan dan konsepnya kekinian, sehingga menarik bagi publik untuk mengakses konten tersebut.	Optimalisasi Komunikasi dan Publikasi
97	Untuk memperhatikan pelayanan Call Center agar tetap berjalan dengan baik dan bisa melayani masyarakat dengan maksimal.	Diskominfo memiliki peran/support pada TIK. Upaya perbaikan teknologi pada pelayanan Call Center terus dilakukan, sebagai contoh agar penerimaan telepon masuk ke 112 lebih mudah dan lancar, teknologi SIMbox diganti dengan teknologi SIPTrunk, yang membantu meningkatkan kapasitas penerimaan telepon dan telah dapat menerima panggilan dari seluruh operator.	Optimalisasi saluran pengaduan masyarakat
98	Untuk memperhatikan pemanfaatan CCTV agar dapat menghemat penggunaan anggaran.	Pemanfaatan CCTV telah dilakukan dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini dapat dilihat bahwa pemeliharaan CCTV yang dikelola Diskominfo ditangani langsung oleh tim Diskominfo sehingga dalam maintenance lebih efektif dan efisien. Terkait penyediaan jaringan fiber optik terus dilakukan setiap tahun.	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
99	Untuk mengembangkan aplikasi yang dapat menampung dan mengelola berbagai macam data dari OPD, sehingga data tersebut dapat menciptakan data yang akurat, terupdate kebenaran datanya serta dapat dengan mudah di akses serta dibagipakaikan.	Portal satu data telah dibangun dan terus dikembangkan dengan lebih banyak data yang terintegrasi didalam portal ini, sehingga menghasilkan berbagai macam dashboard sesuai kebutuhan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.	Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
100	Untuk mengembangkan semacam pusat informasi yang nantinya masyarakat bisa mengetahui berbagai macam informasi.	Seluruh informasi terkait Pemerintah Kota dan/atau Kota Surabaya dapat diakses melalui berbagai kanal yang telah disediakan oleh Diskominfo ; - Website resmi Pemerintah Kota - Media Sosial - Majalah virtual (Gapura) - Portal Satu Data terus dilakukan pemutakhiran fitur, interface dan data dari OPD, sehingga portal satu data menjadi portal data yang akurat, mutakhir, dan dapat dibagipakaikan sesuai kebutuhan antar instansi maupun publik.	Optimalisasi Komunikasi dan Publikasi
101	Website Pemerintah Kota harus update terutama dalam penyajian data dan informasi.	Konten dalam website surabaya.go.id terus dimutakhirkan terhadap kegiatan, program, dan layanan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuannya, agar website surabaya.go.id dapat menjadi rujukan dalam mencari informasi seputar Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Surabaya.	Optimalisasi Komunikasi dan Publikasi



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
102	Peningkatan kualitas SDM untuk UMKM agar semakin berkualitas dalam output produknya.	Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) berperan aktif dalam usaha peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam kegiatan UMKM melalui berbagai kegiatan meliputi pendampingan manajemen usaha dan pemberian intervensi untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Kegiatan tersebut dapat diwujudkan berupa bimbingan teknis terkait pengelolaan manajemen usaha serta fasilitasi kemitraan agar pelaku usaha mikro dapat mengakses sumber daya modal usaha yang dibutuhkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dinkopdag berupaya agar pelaku usaha mikro binaan memiliki mindset pengusaha yang tangguh, ulet, kreatif, dan menghasilkan produk yang memiliki daya saing.	Peningkatan Kualitas UMKM
103	Menyebarkan pemasaran produk UMKM di tingkat Provinsi maupun Nasional.	Dalam hal pemasaran produk, Dinkopdag memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui sarana yang dimiliki seperti Surabaya Kriya Gallery (SKG) dan Sentra Wisata Kuliner (SWK) serta mengikutsertakan pelaku usaha mikro binaan dalam berbagai macam pameran. Dinkopdag menilai bahwa pada era digital ini, tren pemasaran produk pun bergeser menjadi pemasaran digital, sehingga berbagai upaya dan kerjasama dilakukan yang berfokus pada kegiatan ecommerce, termasuk pemanfaatan e-peken.	Pemberian kemudahan pemasaran dan perluangan jangkauan pemasaran produk UMKM di Kota Surabaya baik melalui pameran, pemasaran offline hingga pemasaran online melalui e-peken.
104	Pemanfaatan aplikasi e-peken untuk pemasaran produk makanan dari kelompok usaha bersama warga di kampung-kampung Kota Surabaya.	Diskominfo bersinergi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) untuk memfasilitasi pelaku usaha mendaftar ke dalam e-peken sehingga mereka mendapatkan market pembeli yang lebih luas untuk meningkatkan penjualan. Saat ini tercatat sebanyak 3.034 UMKM di aplikasi Peken Surabaya. Peken Surabaya juga terdaftar sebagai mitra toko daring LKPP untuk meningkatkan pasar UMKM.	Peningkatan Kualitas UMKM



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
105	Mengusulkan pembelian batik produk UMKM untuk baju kerja Walikota, DPRD dan pegawai pemerintah Kota Surabaya.	Sampai dengan tahun 2022 terdapat 27 UMKM produksi batik yang tersebar di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinkopdag memastikan agar peluang tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa memperkuat eksistensi UMKM batik di Surabaya.	Peningkatan Kualitas UMKM
106	e-Peken harus dioptimalisasi agar harga dapat bersaing dengan toko komersil lainnya, selain itu perlu pengawasan pada aspek kualitas.	Dinkopdag secara berkelanjutan telah mengupayakan agar produk-produk yang dijual di epeken dapat memiliki harga yang kompetitif serta memiliki kualitas yang baik. Beberapa langkah yang Pemerintah Kota telah lakukan untuk menciptakan kondisi tersebut antara lain: 1. Memfasilitasi akses pembelian barang dalam jumlah besar (kulak) oleh para pengusaha toko kelontong dalam e-Peken ke produsen dan distributor barang pokok 2. Melakukan kurasi terhadap produk-produk yang akan dijual dalam e-Peken.	Peningkatan Kualitas UMKM
107	Melakukan kerjasama dengan Petani-petani yang ada di Kota Surabaya agar mereka dapat menjual produknya di e-Peken dan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka.	Untuk saat ini e-Peken bekerjasama dengan RPH agar masyarakat Surabaya mudah dalam mendapatkan daging segar. Seperti halnya kelompok petani atau kelompok hidroponik yang menghasilkan bahan pangan atau sayur mayur yang segar. Proses kelompok-kelompok tersebut dapat berjualan di E-Peken yang pertama akan dibentuk koperasi guna memudahkan manajemen kelompok tersebut, manajemen yang dimaksud berupa pembagian job desk, mengkoordinir hasil panen, melakukan cek ketersediaan stok, pengiriman atau distribusi hasil panen. Setelah itu perlu adanya pelatihan dalam pengoperasian aplikasi e-Peken serta pemenuhan syarat dan ketentuan yang salah satu contohnya penggunaan rekening Bank Jatim. Selanjutnya sebagai pengembangan perlu adanya pelatihan / fasilitasi pengemasan produk hasil panen agar kualitasnya terjaga.	Peningkatan pemberdayaan pertanian perkotaan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
108	Program kampung zero waste harus bisa mengurangi sampah 300 ton/hari sampai dengan Tahun 2026 dengan secara bertahap menguatkan program/kegiatan kampung zero waste dari Tahun 2022 s/d 2026.	Pencanangan kampung Zero Waste dimulai tahun 2022, dengan jumlah 40 kampung yang akan dijadikan sebagai percontohan dalam hal pengurangan sampah dari sumbernya, dengan target pengurangan timbulan sampah 40 ton/hari. dengan proses yang berkelanjutan, ditargetkan tercapai pada tahun 2026 terbentuk 200 kampung yg mampu mengurangi timbulan sampah menjadi 200 ton/hari	Peningkatan pengelolaan persampahan
109	Penanganan dan pengolahan sampah menggunakan compactor refuse.	Pemerintah Kota Surabaya menggunakan kendaraan Angkutan Sampah jenis Arm roll maupun Truck Compactor untuk pengangkutan sampah. Penggunaan compactor refuse dapat menjadi alternatif penanganan dan pengolahan sampah dan pengadaannya disesuaikan dengan kebutuhan.	Peningkatan pengelolaan persampahan
110	Perlu membuat kajian terkait bak sampah, agar tahan pakai lebih dari satu tahun.	Pengadaan bak sampah dilakukan melalui proses lelang dan dilakukan pemilihan bak sampah yang memiliki kualitas baik sehingga penggunaannya bisa lebih dari 1 (satu) tahun	Peningkatan pengelolaan persampahan
111	Realisasikan pembangunan limbah B3.	Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam hal Pengelolaan Limbah B3, kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota diatur dalam batasan ruang lingkup: a. Penyimpanan sementara limbah B3 yang sudah tersedia di Kota Surabaya b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Pengelolaan limbah B3 di Kota Surabaya.
112	Menghapus retribusi pemakaman untuk masyarakat tidak mampu.	Mengenai Kegiatan pemakaman jenazah di 12 Makam yang dikelola Pemerintah Kota Surabaya selalu memperhatikan berkas persyaratan pemakaman diantaranya : a. Surat Kematian dari Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas, atau Dokter b. Foto Copy KTP Almarhum dan Pelapor c. Surat Pengantar dari RT/RW. Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan verifikasi terutama pada NIK Almarhum yang menunjukkan bahwa NIK tersebut terdaftar sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui website : https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/ dan membebaskan biaya retribusi pemakaman.	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
113	Pemasangan jamban untuk daerah kumuh dan tidak mampu.	Telah dilaksanakan Pembangunan Jamban bagi masyarakat MBR dan di kawasan prioritas yang bersumber dari pendanaan APBD Kota Surabaya, dengan bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat di tiap Kelurahan. Pada tahun 2023 direncanakan Surabaya Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Open Defecation Free/ODF) yang telah didukung dengan percepatan pembangunan jamban sebanyak 300 unit di tahun 2022.	Peningkatan akses sanitasi bersih
114	Antrian jamban yang tidak memiliki alas hak di rekomendasi 2020 untuk segera dilakukan di Tahun 2022.	Untuk pelaksanaan pembangunan jamban bagi pemohon yang tidak memiliki alas hak, telah difasilitasi melalui Perwali No. 115 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Perwali No. 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pembuatan Jamban di Kota Surabaya, bahwa persyaratan penerima jamban antara lain tidak memiliki jamban dan merupakan penduduk Kota Surabaya/berdomisili di Kota Surabaya	Peningkatan akses sanitasi bersih
115	Perlu disusun kajian terkait retribusi makam.	Terkait Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, pemerintah Kota Surabaya dalam proses perubahan menyesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Retribusi	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
116	Perlu disusun kajian untuk alternatif pengangkutan yang bisa menawarkan efisiensi anggaran pemerintah kota sehingga anggaran dapat dialihkan ke anggaran pemeliharaan truck yang usianya lebih dari 10 tahun.	Kajian alternatif pengangkutan sampah yang mendukung efisiensi penggunaan APBD dalam proses penyusunan. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan upaya untuk menekan volume produksi sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai bagian dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.	Peningkatan pengelolaan persampahan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
117	Untuk mengelola sampah menjadi hal yang menguntungkan sehingga dapat menambah pendapatan daerah.	Beberapa upaya pengolahan sampah yang telah dilakukan untuk memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain: 1) Penggajian Bank Sampah dan inovasi pemanfaatan sampah 2) Penjualan sampah plastik hasil kontribusi layanan Surabaya Bus dengan sistem pelelangan. 3) Proses gasifikasi di TPA yaitu pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik untuk dijual kembali kepada PLN.	Peningkatan pengelolaan persampahan
118	Untuk segera menindaklanjuti terkait ijin Limbah B3 ke KLHK/pusat karena sampai saat ini belum ada progress.	1. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam hal Pengelolaan Limbah B3, kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota diatur dalam batasan ruang lingkup: a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota 2. Berdasarkan: • Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan Limbah B3.	Pengelolaan limbah B3 di Kota Surabaya.
119	Penambahan APD petugas kebakaran yang berkualitas untuk didistribusikan ke rayon-rayon yang ada di Kota Surabaya.	Pada tahun 2022 penyediaan alat pelindung diri telah dilaksanakan secara bertahap melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Setiap petugas pemadam kebakaran telah difasilitasi alat pelindung diri dalam melaksanakan tugas.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran
120	Untuk mengatur SOP penanganan kebakaran di bangunan gedung tinggi.	SOP penanganan kebakaran di bangunan gedung tinggi telah disusun dan disosialisasikan kepada perusahaan yang memiliki bangunan tinggi	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
121	Realisasikan penambahan Pos pemadam kebakaran baru, sesuai rekomendasi Panitia Khusus DPRD yang membahas tentang Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	Pada tahun 2022 telah dibangun satu pos pemadam kebakaran di wilayah Balas Klumprik yang kemudian untuk dilengkapi sarana dan prasarana serta aparaturnya. Penyediaan pos pemadam kebakaran dibangun dengan pertimbangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga layanan pos pemadam kebakaran dapat mencakup ke seluruh wilayah Kota Surabaya.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran
122	Sosialisasi penanggulangan kebakaran sejak dini, koordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui kurikulum pendidikan di sekolah.	Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran untuk anak-anak dilaksanakan melalui beberapa kegiatan salah satunya sosialisasi pencegahan dan penanganan awal kebakaran di SD dan SMP serta kegiatan wisata damkar cilik (wisdacil) yang diwujudkan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran
123	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran serta mengatur konsep penyelamatan dan mitigasinya.	1. DPKP telah melaksanakan kesiapsiagaan dalam penanganan kebakaran melalui Peraturan Urusan Dinas Dalam (PUDD) disetiap rayon dan pos 2. DPKP telah memiliki SOP terkait evakuasi dan penyelamatan	Peningkatan Upaya Penanggulangan Bencana
124	Membuat panduan penanganan kebakaran untuk masyarakat yang tinggal di apartemen.	1. Sosialisasi pencegahan dan penanganan terhadap bahaya kebakaran dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dimana salah satu pelaksanaannya difokuskan pada kawasan yang memiliki intensitas bangunan padat yaitu apartemen atau gedung-gedung perkantoran. 2. DPKP telah menghimbau dan mensosialisasikan kepada pengelola bangunan gedung, termasuk rumah susun terkait Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang memuat salah satunya tentang emergency response team dan emergency response plan.	Peningkatan Upaya Penanggulangan Bencana



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
125	Perlu dilakukan pembangunan Pos Kebakaran terbaru sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat optimal.	Pada tahun 2022 telah dibangun satu pos pemadam kebakaran di wilayah Balas Klumprik yang kemudian untuk dilengkapi sarana dan prasarana serta aparaturnya. Penyediaan pos pemadam kebakaran dibangun dengan mempertimbangan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sehingga layanan pos pemadam kebakaran dapat mencakup ke seluruh wilayah Kota Surabaya.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran
126	Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana melakukan pemadaman sementara sehingga luasan area bila terjadi kebakaran dapat diminimalisir.	Dalam rangka meminimalisasi resiko dalam kejadian kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan beberapa upaya yaitu sosialisasi pencegahan dan penanganan awal terhadap bahaya kebakaran sebelum petugas pemadam datang.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran
127	Perlu diperhatikan Alat Pelindung Diri bagi Petugas Pemadam Kebakaran karena menyangkut keselamatan petugas.	Pada tahun 2022 penyediaan alat pelindung diri telah dilaksanakan secara bertahap melalui sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Setiap petugas pemadam kebakaran telah difasilitasi alat pelindung diri dalam melaksanakan tugas.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran
128	Sosialisasi mengenai penyelamatan kebakaran sebaiknya juga dilakukan di Apartemen atau gedung-gedung.	1. Sosialisasi pencegahan dan penanganan terhadap bahaya kebakaran dilaksanakan melalui sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat, dimana salah satu pelaksanaannya difokuskan pada kawasan yang memiliki intensitas bangunan padat yaitu apartemen atau gedung-gedung perkantoran. 2. DPKP telah menghimbau dan mensosialisasikan kepada pengelola bangunan gedung, termasuk rumah susun terkait Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang memuat salah satunya tentang emergency response team dan emergency response plan.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
129	Sosialisasi mengenai penyelamatan kebakaran tidak hanya di lakukan di Kampung-kampung saja, tetapi bisa juga untuk anak sekolah atau menjadi kurikulum baru sehingga mereka dapat mengetahui tata cara penyelamatan semenjak dini.	Sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran untuk anak-anak dilaksanakan melalui beberapa kegiatan salah satunya sosialisasi pencegahan dan penanganan awal kebakaran di SD dan SMP serta kegiatan wisata damkar cilik (wisdacil) yang diwujudkan dalam sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	Optimalisasi Penanggulangan kebakaran
130	Melakukan kolaborasi terkait bimbingan terhadap kenakalan remaja dengan teori pendidikan.	1. Melalui Puspaga Goes To School , DP3APPKB bekerjasama dengan Dinas Pendidikan melakukan Bimbingan kepada Peserta Didik. 2. Berkolaborasi dengan BNN untuk sosialisasi terkait program pencegahan penyalahgunaan narkoba 3. Koordinasi dengan SATPOLPP terkait penjangkauan perempuan dan anak yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum 4. Program kedepan akan dilanjutkan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dispusip, Disporapar	Pencegahan kenakalan remaja
131	Terjunksan psikolog untuk keliling melakukan bimbingan konseling di 31 Kecamatan.	Tim Psikolog DP3APPKB bekerjasama dengan Psikolog Voulenteer / APSI/HIMPSI/Apsilangga/LSM Pemerhati Perempuan dan Anak/Universitas/Mahasiswa Psikologi MBKM melakukan bimbingan konseling secara berkala di 31 Kecamatan dengan sasaran relawan PKBM, Satgas PPA, TP PKK, Bunda PAUD, KS/Guru dan Tenaga Kependidikan, LKMK, Komunitas Orang Tua dan seluruh masyarakat	Pencegahan kenakalan remaja
132	Koordinasi dengan pihak RT, RW terkait bimbingan langsung terhadap kenakalan remaja yang ada di lingkungannya.	Implementasi Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KP KAS), menekan kenakalan anak dan remaja dengan memberlakukan jam pendidikan, dimana pukul 18.00 WIB anak dan remaja sudah masuk rumah dan berada dalam pantauan orang tua, tanpa gadget dan televisi, waktu dioptimalkan untuk keluarga dan belajar. Dengan dikawal dan diawasi oleh RT, RT dan LKMK.	Pencegahan kenakalan remaja



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
133	Perlunya link and match dengan komunitas ketahanan keluarga.	1. DP3APPKB telah bekerjasama dengan BKKBN dan TP PKK Kota untuk membentuk Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) di Kelurahan Tegalsari pada tahun 2022. 2. Pada tahun 2022 kegiatan SOTH yang dilakukan meliputi edukasi kepada orangtua balita tentang pola asuh balita, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.	Pencegahan kenakalan remaja
134	Perlu sosialisasi atau penguatan SDM DP3APPKB agar program-program DP3APPKB di kelurahan kecamatan bisa diperkuat lagi.	Penguatan SDM di tingkat Kecamatan dalam hal pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah dilakukan sebagai berikut: 1) sosialisasi manajemen kasus termasuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada satgas PPA di 31 Kecamatan dan relawan PKBM di 153 kelurahan 2) kegiatan Training of Trainee (ToT) berupa transfer knowledge dari psikolog ke satgas PPA dan relawan PKBM.	Optimalisasi Program DP3APPKB
135	Sinkronisasi dengan PD lain, misal: Dispursip yaitu dengan mengadakan kegiatan ketahanan remaja dan anak di TBM Dispursip.	Akan dilaksanakan Program Sakera (PUSPAGA Keliling Surabaya) DP3APPKB sinergi dengan program di Dispursip dengan Materi Ketahanan Anak dan Remaja serta Pola Asuh Orang Tua	Optimalisasi Program DP3APPKB
136	Perlunya fasilitas bimbingan konseling anak dan remaja secara online.	1. Telah dilaksanakan fasilitas bimbingan konseling anak dan remaja melalui hotline Puspaga dan PPTP2A. Kegiatan dimaksud tertuang dalam program Peningkatan Kualitas Keluarga. 2. Telah dibangun sistem aplikasi perlindungan perempuan dan anak (SIAP PPAK) yang digunakan bersama dengan Perangkat Daerah terkait sehingga memudahkan koordinasi dan penanganan permasalahan	Pencegahan kenakalan remaja



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
137	Sebagai pencegahan keterlibatan anak-anak dengan kelompok intoleran/radikal perlu koordinasi dengan kecamatan untuk dapat dilakukan sosialisasi atau pemberian motivasi.	1. DP3APPKB melalui PUSPAGA, Forum Anak Surabaya, Sekolah Kebangsaan (Dispota) dan Organisasi Pelajar Pelopor Surabaya (Organisasi Para Ketua OSIS Kota Surabaya (ORPES) Dispendik, bekerjasama dengan Psikolog Voulenteer , TP PKK, Relawan PKBM, Satgas PPA melakukan penyuluhan dan penanganan kenakalan remaja di Satuan Pendidikan/Kecamatan/Kelurahan 2. Dilakukan sosialisasi bersama Bakesbangpol terkait pencegahan radikalisasi terhadap anak	Pencegahan kenakalan remaja
138	Diperlukan kolaborasi pendidikan yang dilakukan DP3APPKB dengan PD lain dengan landasan berpikir tentang Pendidikan anak harus sama.	DP3APPKB telah bekerjasama dengan lintas Perangkat Daerah, Akademisi, LSM/Komunitas, Badan Usaha, Media saling berkolaborasi untuk Berani Mencegah Tindakan Kekerasan dalam upaya mewujudkan sekolah ramah anak. DP3APPKB bersama dispendik dan LSM genta bekerjasama untuk giat Konselor Sebaya bersama Puspaga Goes To School untuk Sosialisasi Anti Bullying , Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Klinik Psikologi di Sekolah.	Pencegahan kenakalan remaja



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
139	Beberapa kegiatan yang tidak tercapai seperti kegiatan kelurahan ramah anak, kelurahan responsif gender dan Unmet need KB, perlu dioptimalkan di masa mendatang.	1. Jumlah Kelurahan Ramah Anak pada tahun 2022 bertambah sebanyak 42 Kelurahan sehingga total Kelurahan Ramah Anak di Kota Surabaya sebanyak 95 Kelurahan. Dalam rangka meningkatkan capaian Kelurahan Ramah Anak (KLA) dan Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KPKAS) telah dilaksanakan Rebranding KLA dan KPKAS dengan menambahkan Aspek Indikator Ramah Perempuan dan Anak. 2. Pada Tahun 2022, seluruh Kecamatan merupakan Kecamatan responsif Gender. DP3APPKB telah berhasil mengupayakan seluruh 154 Kelurahan untuk menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk meningkatkan capaian Kelurahan Responsif Gender, dilakukan upaya sosialisasi secara menyeluruh terhadap pemangku kepentingan melalui kegiatan Capacity Building Vocal Point. 3. DP3APPKB telah melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui kader kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menjadi peserta KB. Selain itu, DP3APPKB telah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang siap memberikan pelayanan pelayanan KB menjadi 183 fasilitas kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri bidan).	Optimalisasi Program DP3APPKB



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
139	Beberapa kegiatan yang tidak tercapai seperti kegiatan kelurahan ramah anak, kelurahan responsif gender dan Unmet need KB, perlu dioptimalkan di masa mendatang.	1. Jumlah Kelurahan Ramah Anak pada tahun 2022 bertambah sebanyak 42 Kelurahan sehingga total Kelurahan Ramah Anak di Kota Surabaya sebanyak 95 Kelurahan. Dalam rangka meningkatkan capaian Kelurahan Ramah Anak (KLA) dan Kampung Pendidikan Kampunge Arek Suroboyo (KPKAS) telah dilaksanakan Rebranding KLA dan KPKAS dengan menambahkan Aspek Indikator Ramah Perempuan dan Anak. 2. Pada Tahun 2022, seluruh Kecamatan merupakan Kecamatan responsif Gender. DP3APPKB telah berhasil mengupayakan seluruh 154 Kelurahan untuk menyusun dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Untuk meningkatkan capaian Kelurahan Responsif Gender, dilakukan upaya sosialisasi secara menyeluruh terhadap pemangku kepentingan melalui kegiatan Capacity Building Vocal Point. 3. DP3APPKB telah melakukan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui kader kepada Pasangan Usia Subur (PUS) untuk menjadi peserta KB. Selain itu, DP3APPKB telah meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang siap memberikan pelayanan pelayanan KB menjadi 183 fasilitas kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan praktek mandiri bidan).	Optimalisasi Program DP3APPKB



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
140	Mengoptimalkan sistem online dan prosedur perijinan yang lebih sederhana, mudah dan cepat.	Optimalisasi sistem online dan peningkatan layanan perijinan telah dilakukan melalui: 1. SSW Alfa (Surabaya Single Window) dan OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) 2. Pada tahun 2022, telah disusun draft Perwali yang berhubungan dengan penyederhanaan alur proses perijinan dimulai dari berkas masuk dari Pemohon langsung diteruskan ke PD Teknis untuk verifikasi teknis dan pengesahan dari DPMPTSP 3. Penyesuaian terkait percepatan perijinan dan non perijinan, penyederhanaan alur dan durasi pelayanan perijinan menjadi maksimal 1 hari kerja di lingkup DPMPTSP 4. Memberikan asistensi dan konsultasi terhadap permasalahan proses pengurusan perijinan berusaha di klinik investasi 5. Memberikan pendampingan dan fasilitasi pengurusan perijinan berusaha (NIB) bagi pelaku usaha mikro kecil perorangan di 31 kecamatan Kota Surabaya	Peningkatan Investasi di Kota Surabaya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
141	Diharapkan nilai investasi akan meningkat mengingat kasus Covid-19 mulai menurun.	1. Tingginya minat investasi telah didukung dengan promosi investasi baik berupa virtual maupun offline dan meningkatkan media sosial dan videotron untuk mempromosikan kemudahan investasi di Kota Surabaya 2. Upaya peningkatan nilai realisasi investasi juga dilakukan melalui JEBOL LKPM (Jemput Bola Laporan Kegiatan Penanaman Modal) ke pelaku usaha yang akan melaporkan LKPM setiap semesternya. 3. DPMPTSP menyediakan Peta Potensi dan Peluang Investasi berupa kajian dan website peta potensi untuk ditawarkan kepada calon investor di Kota Surabaya, serta melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan FGD dengan para pelaku usaha menengah besar dalam rangka untuk menjaring kerjasama kemitraan dengan UMK. 4. DPMPTSP juga melakukan bimtek terkait tata cara pengajuan permohonan perijinan berusaha melalui aplikasi OSS serta bimtek tata cara pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 5. Selain itu DPMPTSP melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait perijinan berusaha dan LKPM	Peningkatan Investasi di Kota Surabaya
142	Perlunya koordinasi dan kerjasama sehingga investasi di Kota Surabaya dapat memberikan dampak signifikan pada penyerapan tenaga kerja terutama warga Surabaya.	DPMPTSP bersama dengan Disperinaker telah melakukan penghimbau kepada perusahaan sektor pariwisata untuk menyerap tenaga kerja warga Surabaya diantaranya pada saat desk perijinan dengan pelaku usaha hotel, restoran, dan mall, serta bersama dengan Bakesbangpol melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja di perusahaan PMA/PMDN.	Penyerapan Tenaga Kerja



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
143	Melakukan penyesuaian dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terkait kebijakan zonasi.	Pelaksanaan PPDB tahun 2022 mengacu pada Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021, yang selaras dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Di mana pada tingkat provinsi, zonasi berdasar Kota/Kabupaten, sedangkan pada tingkat kota, zonasi berdasarkan Kelurahan (SD) dan Kecamatan (SMP). Pemerintah Kota Surabaya juga mengajukan permohonan Kepada Kemendikbudristek untuk penyempurnaan sistem PPDB 2023/2024 dengan, diantaranya: 1. Perubahan daya tampung PPDB pada jalur prestasi 2. Perubahan daya tampung PPDB pada jalur zonasi	Pemerataan Pendidikan
144	Mengalokasikan data MBR buat Pendidikan.	Intervensi terhadap MBR telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya melalui pemberian biaya personal (kebutuhan dasar, antara lain: seragam sekolah, sepatu, ikat pinggang, tas, dsb.)	Peningkatan Kualitas Pendidikan
145	Pengadaan seragam sekolah melibatkan konveksi besar dan bisa dipesan melalui UMKM Kota Surabaya.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, bahwa pengadaan dengan anggaran BOS, hibah dll dapat difasilitasi melalui aplikasi SIPLAH. Sehingga, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan agar UMKM binaan dapat terdaftar di aplikasi SIPLAH.	Optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah
146	Dinas Pendidikan perlu membuat pemetaan yang menyeluruh untuk melihat wilayah kelurahan-kelurahan mana yang membutuhkan tambahan sekolah atau rombongan belajar dan membangun utamanya SMP berdasarkan pemetaan yang ada.	Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007, satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Dengan demikian Dinas Pendidikan setiap tahunnya terus berupaya untuk melakukan pemetaan guna memenuhi daya tampung lulusan SD/MI untuk dapat meneruskan ke jenjang SMP/MTs baik negeri maupun swasta.	Pemerataan Pendidikan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
147	Dinas Pendidikan seharusnya menertibkan koperasi sekolah agar dapat meningkatkan manfaatnya bagi sekolah. Dapat berkoordinasi dengan Dinas Koperasi untuk pembinaannya.	Dinas Pendidikan telah berkoordinasi dengan: 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM terkait penyediaan barang peralatan sekolah maupun makanan/minuman di koperasi sekolah. 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penggunaan KaTePay untuk metode pembayaran di koperasi dan kantin sekolah.	Peningkatan Kualitas Pendidikan
148	Kemampuan IT para guru juga harus ditingkatkan.	Pelatihan TIK bagi guru dan tenaga kependidikan telah dilaksanakan selama ini melalui sub kegiatan Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan, antara lain: 1) Pelatihan pemantapan Implementasi Microsoft Office 365 bagi Guru SD-SMP Negeri dan Swasta 2) Pelatihan Penguatan Pemanfaatan Google Workspace bagi guru PAUD 3) Pelatihan Penguatan Pemanfaatan Canva bagi guru PAUD 4) Pelatihan Coding sederhana (bagi pemula) bagi guru PAUD. Permohonan pelatihan tersebut telah difasilitasi Dinas Pendidikan bersama Diskominfo pada aplikasi SIMPAUD dan SIBUNDA.	Peningkatan Kualitas Pendidikan
149	Mekanisme dan dasar hukum pemberian BOPDA harus disiapkan.	Mekanisme pemberian BOPDA telah difasilitasi melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Biaya Pendidikan Daerah.	Peningkatan Kualitas Pendidikan



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
150	Penempatan guru harus dekat dengan domisili.	Secara umum, untuk efektifitas pelaksanaan tugas, serta mengacu kebijakan zonasi, maka penempatan guru diupayakan dekat dengan domisili. Namun demikian, penempatan guru tetap memprioritaskan pemerataan jumlah dan kualitas guru di seluruh sekolah dan seluruh wilayah kota Surabaya. Pengisian formasi guru oleh calon PPPK berdasarkan pilihan calon guru pendaftar serta ketersediaan formasi yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat.	Peningkatan Kualitas Pendidikan
151	Surabaya Mengajar diperlukan untuk meringankan beban guru sekaligus menyegarkan cara belajar anak didik.	Dinas Pendidikan telah memberikan kesempatan pada para mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kota Surabaya untuk berpartisipasi dalam Program Surabaya Mengajar untuk ditempatkan di berbagai sekolah di wilayah Kota Surabaya, terutama sekolah-sekolah yang membutuhkan. Selain mengajar, mahasiswa juga dapat melakukan pendampingan terkait masalah belajar anak, terutama literasi dan numerasi, serta masalah psikososial yang timbul akibat belajar dari rumah.	Peningkatan Kualitas Pendidikan
152	Terkait pengadaan seragam, sebaiknya ditangani Dinas dengan kerjasama UMKM terkait, agar tidak berpotensi kisruh jika diserahkan ke masing-masing sekolah.	Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan, bahwa pengadaan dengan anggaran BOS, hibah dll dapat difasilitasi melalui aplikasi SIPLAH. Sehingga, Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan agar UMKM binaan dapat terdaftar di aplikasi SIPLAH. Pengadaan seragam dilaksanakan di sekolah masing-masing agar dapat mempercepat proses pelaksanaan sehingga anak didik mendapatkan seragam lebih cepat.	Optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
153	Untuk melakukan pembangunan sekolah secara merata di Kota Surabaya. Contoh: di daerah Pakal masih belum terdapat SMA, sehingga masyarakat di sana kalau ingin bersekolah menempuh jarak yang sangat jauh.	Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 22 Tahun 2017 tentang Percepatan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Timur serta hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, disampaikan bahwa dalam rangka percepatan revitalisasi sekolah menengah kejuruan perlu adanya pembatasan pendirian SMA. Selain itu, disarankan untuk mengoptimalkan SMAN 12 yang berada di kecamatan Pakal melalui penambahan ruang kelas/rombel.	Pemerataan Pendidikan
154	Merespon cepat dan menindaklanjuti terkait laporan warga untuk mengurai kemacetan.	Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui SITS (Surabaya Intelligence Traffic System) menggabungkan aplikasi SCATS, CCTV, ETLE, dan Sistem Informasi lainnya (Google Maps, Waze, dll) agar mampu mendeteksi adanya potensi kepadatan / peningkatan lalu lintas baik di suatu ruas jalan maupun persimpangan. Selain itu kondisi lalu lintas di lapangan terpantau melalui laporan masyarakat lewat layanan 112 Command Center maupun aplikasi Wargaku Surabaya dan media lainnya . Dengan dukungan Command Center dan SITS, penguraian pada titik-titik ruas jalan dan persimpangan yang mengalami kepadatan dapat dilakukan dengan efektif sehingga hambatan di lapangan dipastikan selesai.	Penanganan kemacetan di Kota Surabaya
155	Penempatan pegawai yang bertugas dilapangan sesuai domisili tempat tinggal, agar lebih efektif ketika urgent.	Untuk penempatan petugas lapangan, diupayakan mendekati tempat tinggal (domisili) selain itu penempatan petugas lapangan juga diprioritaskan dengan tujuan pemerataan kualitas layanan diseluruh wilayah kota Surabaya	Peningkatan Pelayanan bagi masyarakat
156	Realisasikan pembangunan PJU yang sudah ditentukan titik-titiknya.	Realisasi pembangunan PJU dilakukan secara bertahap baik dg swakelola maupun dengan anggaran pemasangan PJU melalui APBD Kota Surabaya	Optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
157	Perlu optimalisasi atas respon terhadap gangguan PJU.	Optimalisasi dan respon terhadap gangguan PJU sudah terbagi atas beberapa rayon sehingga diharapkan ada percepatan dalam penanganan gangguan PJU	Optimalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
158	Untuk pembayaran Suroboyo Bus dengan botol sebaiknya jangan dihilangkan karena ini merupakan ciri khas Kota Surabaya yang harus dipertahankan. Selama masih ada yang menjual minuman dalam botol plastik maka bisa juga digunakan untuk pembayaran daripada botol plastik itu dibuang sembarangan dan menyebabkan pencemaran lingkungan.	Bahwa pembayaran Surabaya Bus tetap berdasarkan perwali 26 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya dan untuk yang perwali 56 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Bus Surabaya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.	Transportasi Publik
159	Untuk pembayaran Suroboyo Bus sebaiknya menggunakan uang, karena sebentar lagi akan ada Perda yang mengatur larangan penggunaan plastik.	Selain dari pembayaran dengan botol air minum bekas, berdasarkan Peraturan Walikota No. 056 tahun 2021 tentang Tarif Layanan Bus Surabaya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya disebutkan bahwa tarif layanan Suroboyo Bus dikenakan sebesar Rp. 5000 untuk masyarakat umum, Rp. 2500 untuk pelajar dan mahasiswa.	Transportasi Publik
160	Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menangani kemacetan Surabaya mengingat semakin padatnya jumlah penduduk.	1. Dinas Perhubungan telah Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas di lapangan untuk mengurai kemacetan 2. Perlunya dilakukan penyusunan Transport Demand Management (TDM) untuk penataan transportasi secara menyeluruh di Kota Surabaya	Penanganan kemacetan di Kota Surabaya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
161	Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja yang ber-KTP Kota Surabaya.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan sasaran peserta pendidikan dan pelatihan dimaksud dengan kualifikasi yang wajib dipenuhi, salah satunya adalah merupakan warga Kota Surabaya dan ber-KTP Surabaya. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berbasis klaster kompetensi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dari para pencari kerja yang setelahnya di ujikan kompetensinya sebagai pematapan dari pelatihan yang telah diikuti untuk mendapatkan sertifikat BNSP. Selain pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dengan sertifikat BNSP, dilaksanakan beragam bimbingan teknis (bimtek) untuk mendukung Program Padat Karya antara lain : 1. Laundry 2. Cuci motor 3. Membatik 4. Menjahit 5. Olahan masakan 6. Membuat slipper 7. MUA 8. Pembuatan sabun 9. Sablon, dan sebagainya. Untuk jenis pelatihan lainnya Disperinaker masih mengupayakan Lembaga Pelatihan Kerja dengan kesesuaian skema yang ditentukan Pemerintah Kota Surabaya.	Penyerapan Tenaga Kerja



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
162	Menarik investasi dari para investor, untuk lapangan kerja warga ber-KTP Kota Surabaya.	1. Tingginya minat investasi telah didukung dengan promosi investasi baik berupa virtual maupun offline dan meningkatkan media sosial dan videotron untuk mempromosikan kemudahan investasi di Kota Surabaya. 2. Pemerintah Kota Surabaya juga selalu berupaya menjaga kondusivitas iklim investasi melalui penciptaan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. 3. DPMPTSP menyediakan Peta Potensi dan Peluang Investasi berupa kajian dan website peta potensi untuk ditawarkan kepada calon investor di Kota Surabaya; melakukan pembinaan dan sosialisasi berkaitan pelaporan lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja serta mendorong perusahaan untuk memprioritaskan warga Kota Surabaya dalam hal proses rekrutmen tenaga kerjanya; serta melakukan bimbingan teknis (bimtek) dan FGD dengan para pelaku usaha menengah besar dalam rangka untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja seperti kegiatan Job Market Fair (Bursa Kerja) serta program Website Siap Kerjo serta menjaring kerjasama kemitraan dengan UMK.	Peningkatan Investasi di Kota Surabaya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
163	Menjadi mediator atau pencari solusi terkait konflik hubungan industrial antara buruh dengan pengusaha pemilik perusahaan.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya telah memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha atau antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Adapun jenis perselisihan hubungan industrial yang dimediasi untuk diselesaikan diluar pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pelaksanaan mediasi, mediator mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan mediator akan berupaya seoptimal mungkin untuk membantu mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pekerja dengan pengusaha atau antar serikat pekerja/ serikat buruh. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Surabaya juga telah mengembangkan aplikasi PensilBuin (Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial). Selain itu, dilaksanakan bimtek kepada serikat pekerja/serikat buruh untuk memberikan pemahaman terkait peraturan ketenagakerjaan	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
164	Perlu dilakukan link and match investasi di Kota Surabaya dengan penyerapan tenaga kerja.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan upaya agar pencari kerja ber KTP Surabaya dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan baru yang ada di Surabaya. Upaya tersebut diantaranya melakukan link and match kebutuhan kompetensi perusahaan-perusahaan yang ada di Surabaya terhadap pencari kerja. Sehingga dapat dilakukan pelatihan-pelatihan serta sertifikasi berbasis kompetensi yang dapat menunjang pencari kerja ber KTP Surabaya untuk dapat terserap pada kebutuhan pasar kerja. Diharapkan dengan dilakukannya link and match kebutuhan kompetensi tersebut dapat lebih mengoptimalkan penempatan tenaga kerja ber KTP Surabaya.	Penyerapan Tenaga Kerja



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
165	Perlu dilakukan optimalisasi penyerapan tenaga kerja utamanya lulusan SMA/ SMK.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melaksanakan kegiatan yang mengakomodir optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Lulusan SMA/SMK, sebagai berikut : 1. Kegiatan Pendampingan Pemilihan Bidang Kerja bagi Siswa SMK; 2. Melakukan pendataan terhadap lulusan SMA/SMK tahun berjalan sebagai bahan untuk menawarkan berbagai program atau kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, termasuk di antaranya Bimbingan Teknis (Bimtek), Jobfair dan Job matching, dengan cara menghubungi pencari kerja dari data lulusan SMA/SMK untuk dicocokkan dengan data lowongan aktif yang masuk di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. 3. Selain itu juga menginformasikan dan mengarahkan untuk memanfaatkan website Siap Kerjo Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja yang dapat di akses di url. Disnaker.surabaya.go.id sub menu Siap Kerja.	Penyerapan Tenaga Kerja
166	Menambah jumlah e-book agar memudahkan masyarakat membaca dimanapun dan kapanpun.	Pada tahun anggaran 2022, untuk menambah koleksi buku telah dilaksanakan pengadaan e-book pada sub kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.	Peningkatan minat baca masyarakat
167	Menambah TBM hingga seluruh RW di Kota Surabaya, untuk menjangkau kemudahan masyarakat dalam meningkatkan minat baca anak.	Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah TBM yang ada sebanyak 530 TBM.	Peningkatan minat baca masyarakat
168	Optimalisasi layanan baca kepada difabel dengan memberikan layanan voice book.	Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendapat bantuan buku Braille dari Kapolda Jatim dan Kementerian Sosial . Dalam rangka optimalisasi layanan baca yang lebih inklusif, pada tahun 2023 direncanakan fasilitas buku suara (voice book) di Perpustakaan Umum Pemerintah Kota Surabaya untuk melayani pemustaka berkebutuhan khusus (Tuna Netra).	Optimalisasi layanan baca bagi pemustaka berkebutuhan khusus (Tuna Netra)



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
169	Efektivitas satuan tugas untuk pemeliharaan dan beberapa pembangunan sentra-sentra baru.	Pelaksanaan pemeliharaan melalui Satuan tugas (Satgas) Bangunan Gedung Pemerintahan berupaya menangani permasalahan di lapangan terkait bangunan gedung pemerintahan yang dikelola oleh Pemerintah Kota secara efektif dan terus meningkatkan kinerja untuk melayani masyarakat Kota Surabaya.	Pemeliharaan gedung pemerintahan
170	Melibatkan masyarakat untuk pembangunan sentralisasi yang ada di Kota Surabaya.	Pemerintah kota Surabaya memperluas akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain: 1) Perbaikan rumah tidak layak huni dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kelurahan setempat; 2) Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pekerjaan, 3) Penyelenggaraan sayembara desain yang juga terus ditingkatkan sebagai media agar warga dapat turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan kota.	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kota Surabaya
170	Melibatkan masyarakat untuk pembangunan sentralisasi yang ada di Kota Surabaya.	Pemerintah kota Surabaya memperluas akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, antara lain: 1) Perbaikan rumah tidak layak huni dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kelurahan setempat; 2) Keterlibatan perwakilan masyarakat dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pekerjaan, 3) Penyelenggaraan sayembara desain yang juga terus ditingkatkan sebagai media agar warga dapat turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan kota.	Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di Kota Surabaya



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
171	Menyelesaikan masalah tanah Golden City.	1. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan koordinasi dengan melibatkan instansi terkait dan narasumber/tenaga ahli guna mendapatkan pertimbangan/saran dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Disamping itu, Pemerintah Kota Surabaya telah meminta klarifikasi kepada pihak Golden City serta menghadiri beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (Hearing) dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya terakhir pada tanggal 28 November 2022. 2. Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan evaluasi terhadap perizinan Golden City sampai dengan tahapan upaya Banding Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang hasil akhirnya merekomendasikan agar pihak yang bersengketa untuk melakukan gugatan ke pengadilan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk meninjau kembali perizinan Golden City.	Penyelesaian permasalahan tanah Golden City
172	Untuk desain Ampel sebaiknya disesuaikan dengan bentuk jaman dahulu agar ada sejarah yang bisa dikenang.	Terkait desain Ampel karena berada di kawasan yang memiliki nilai sejarah tinggi, maka Pemerintah Kota Surabaya berkoordinasi secara intensif dengan tim Ahli Cagar Budaya dan tokoh masyarakat agar keberadaan bangunan/infrastruktur baru dapat lebih meningkatkan kualitas lingkungan dan kekhasan budaya di kawasan wisata religi Ampel.	Penyesuaian Desain Ampel sebagai kawasan religi untuk tetap mempertahankan nilai sejarah
173	Untuk Pembangunan Kota Surabaya sebaiknya melibatkan seniman dan para ahli sehingga dapat menjadi Kota yang tertata serta hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pembangunan di Kota Surabaya dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur diantaranya Tenaga Ahli, Seniman, dan Masyarakat sehingga Kota Surabaya menjadi Kota yang tertata dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Kolaborasi berbagai unsur untuk pembangunan dan tata ruang kota



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
174	Untuk program rutilahu sebaiknya tidak hanya rumah saja yang dilakukan rehabilitasi, tetapi juga lingkungan yang ada disekitarnya.	Definisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Berdasarkan Perwali Kota Surabaya No. 9 Tahun 2022 merupakan bangunan rumah yang dikuasai secara fisik oleh penerima manfaat dan jelas batas - batasnya dengan kriteria-kriteria yang tercantum dalam aturan tersebut, sehingga rehabilitasi berfokus pada bangunan rumah tinggal agar menjadi hunian yang layak. Terkait rehabilitasi lingkungan sekitar, Pemerintah Kota Surabaya melibatkan seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk menciptakan kondisi hunian dan lingkungan yang layak.	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
175	Untuk warga yang mendapat Rutilahu sebaiknya mempunyai pekerjaan agar mereka mempunyai penghasilan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.	Kegiatan Perbaikan Rutilahu merupakan salah satu kegiatan dalam Program Padat Karya yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Surabaya sebagai upaya pemulihan ekonomi warga Kota Surabaya termasuk intervensi untuk menaikkan taraf hidup penerima manfaat perbaikan Rutilahu.	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
176	Aplikasi e-Rusun harus terus disempurnakan dan bisa menjawab proses seleksi dari antrian rusun secara transparan dan up to date.	Aplikasi e-Rusun telah dikembangkan, terutama untuk fitur pengajuan permohonan dan database penghuni rusun. Telah dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya untuk persiapan integrasi Sistem Informasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (SIMBR), dan akan dikoordinasikan terkait integrasi SSW Alfa	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
177	Untuk melakukan pemetaan di Rusun Pakal sehingga tepat sasaran terutama bagi orang yang membutuhkan.	Terhadap semua pengajuan permohonan ijin pemakaian rusunawa Pakal yang masuk akan dilakukan verifikasi melalui sistem e-Rusun agar tepat sasaran	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
178	Perhatikan peraturan perundang-undangan secara hierarki terkait rutilahu, MBR.	Berdasarkan Perwali No. 35 Tahun 2022 Kriteria Penerima Manfaat Kegiatan Perbaikan Rutilahu adalah penduduk Kota Surabaya yang belum pernah mendapatkan bantuan Perbaikan Rutilahu kecuali untuk Korban Bencana dan Calon Penerima Manfaat diusulkan oleh Kelurahan yang selanjutnya prioritas penanganannya ditetapkan dalam musyawarah Kesepakatan Rencana Perbaikan Rumah (KRPR)	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
179	Intervensi Pemerintah Kota seperti Rutilahu, Rusun agar lebih memprioritaskan MBR.	Berdasarkan Perwali No. 83 Tahun 2022 Pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Setiap penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara. Dan penduduk yang dimaksud merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah.	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
180	Keterbukaan dan ketepatan data survey MBR (by name by address).	Setiap bulan telah dilakukan musyawarah kelurahan atau muskel yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi data MBR by name by address	Pelayanan sosial bagi Masyarakat
181	Penambahan anggaran terkait ambulance di posko pelayanan terpadu yang ada di Kota Surabaya.	Telah dilakukan optimalisasi penggunaan ambulans yang ada untuk pelayanan rutin antar jemput warga untuk pemeriksaan kesehatan dan untuk pelayanan pengantaran jenazah. Dinas Sosial telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin (Pembersihan, Pemeriksaan, Kelengkapan Kendaraan) dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
182	Penguatan data MBR agar intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dapat tepat sasaran.	Komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk validitas data MBR dilakukan dengan: 1. Sinkronisasi data MBR dan DTKS dan Penindaklayakan 2. musyawarah kelurahan atau muskel yang dilakukan oleh Dinas Sosial setiap bulan bersama dengan RT, RW, LPMK, dan Kelurahan untuk validasi data MBR by name by address 3. Pengusulan pengalihan kepesertaan BPJS dari PBPU kota ke PBI.JK	Pemberian intervensi sosial pada masyarakat
183	Pelayanan Ambulance pada Dinas Sosial agar dapat dioptimalkan melalui pemeliharaan secara rutin.	Dinas Sosial telah melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara rutin (Pembersihan, Pemeriksaan, Kelengkapan Kendaraan) dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pelayanan sosial bagi Masyarakat



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
184	Perbaikan jalan atau tambal sulam harus mempunyai standar khusus agar kualitasnya jauh lebih baik.	Untuk penanganan jalan sebagai prasarana transportasi telah dilakukan sesuai dengan standar kualitas teknis pelaksanaan dan material yang digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Pada tahun 2022 pemeliharaan jalan telah menggunakan alat finisher sehingga kualitas pemeliharaan jalan lebih baik	Perbaikan Jalan
185	Menyarankan ganti pompa yang ada di rumah pompa, agar lebih efektif dan efisien ketika hujan lebat.	setelah dilakukan evaluasi terhadap kinerja rumah pompa maka dilaksanakan penambahan kapasitas pompa dengan teknologi terbaru (VSD/inverter) di beberapa rumah pompa di Surabaya	Sistem Drainase Kota Surabaya
186	Pemetaan ulang wilayah hilir yang padat penduduk agar mengurangi dampak banjir di wilayah Surabaya Barat, penertiban dilakukan dengan koordinasi bersama Satpol PP.	Untuk penanganan pengendalian genangan, telah dilaksanakan perencanaan penanganan genangan di setiap sistem drainase secara terpadu dan terintegrasi mulai dari bagian hulu sampai dengan hilir sesuai dengan standar operasional prosedur serta dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.	Sistem Drainase Kota Surabaya
187	Harus ada road map terkait penanganan banjir di Surabaya. Road map ini sudah harus lengkap, baik itu anggaran maupun prioritas penanganan di 5 rayon sehingga benar-benar holistik penanganannya.	Untuk penanganan pengendalian genangan, telah dilaksanakan perencanaan penanganan genangan di setiap sistem drainase secara terpadu dan terintegrasi mulai dari bagian hulu sampai dengan hilir sesuai dengan standar operasional prosedur serta dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.	Sistem Drainase Kota Surabaya
188	Peningkatan output kerja SDM di rumah pompa, yang bertujuan untuk pengendalian banjir yang lebih baik.	Optimalisasi kinerja SDM di rumah pompa telah dilakukan antara lain dengan: - memberikan edukasi rasa tanggungjawab dan leadership terhadap tugas yang sudah diberikan kepada operator atau penjaga rumah pompa - memastikan operator pompa melaporkan secara rutin baik melalui handy talky (HT) maupun melalui grup WhatsApp kepada pengawas, rayon wilayah, command center SDA, dan juga ke pimpinan	Peningkatan Kualitas SDM



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
189	Lebih memperhatikan wilayah dan waktu terhadap level air sehingga tidak terjadi genangan di jalan raya.	Penanganan sistem saluran drainase di Kota Surabaya telah diupayakan dengan: - Peningkatan kapasitas dan diversifikasi dari saluran irigasi menjadi saluran drainase mulai dari saluran tersier, sekunder sampai dengan saluran primer; - Peningkatan prasarana pendukung pengendalian banjir seperti peningkatan kinerja rumah pompa, baik dari peralatan maupun sumber daya operator rumah pompa; - Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam sistem pengendalian banjir dan pemantauan kinerja sarana prasarana pendukung.	Sistem Drainase Kota Surabaya
190	Membuat roadmap penanganan banjir.	Terkait dengan penanganan genangan saat ini sedang disiapkan roadmap pembangunan sistem drainase kota	Sistem Drainase Kota Surabaya
191	Perlu adanya SOP dan Pelatihan sehingga operator Pompa memiliki pemahaman dan penguasaan yang baik.	DSADBM telah: 1) Memberikan bekal SOP kepada operator rumah pompa untuk pengoperasian pompa beserta perangkat pendukungnya, guna mengoptimalkan kinerja perangkat rumah pompa 2) Memberikan pelatihan dari akademisi dan narasumber kepada operator rumah pompa, guna meningkatkan kemampuan operator rumah pompa dalam mengoperasikan perangkat rumah pompa 3) Memberikan pelatihan yang intensif guna menambah pemahaman tentang perencanaan pemasangan troubleshooting dan pemeliharaan pompa submersible dan diharapkan akan meningkatkan pengelolaan di dalam operasi di lapangan. Pemahaman materi yang diperlukan meliputi: 1. teori dasar pompa, 2. jenis-jenis pompa dan aplikasinya	Peningkatan Kualitas SDM



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
192	Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menangani kemacetan Surabaya mengingat semakin padatnya jumlah penduduk.	1. Dinas Perhubungan telah Menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas di lapangan untuk mengurai kemacetan 2. Penyusunan Transport Demand Management (TDM) yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 untuk penataan transportasi secara menyeluruh di Kota Surabaya 3. DSDABM juga telah melakukan peningkatan kemandirian jalan untuk mengoptimalkan kapasitas jalan.	Penanganan kemacetan di Kota Surabaya
193	Peningkatan kualitas melalui program digitalisasi.	Pemerintah Kota Surabaya membangun aplikasi e-audit yang mengakomodir kegiatan-kegiatan pendampingan dan pengawasan pada Perangkat Daerah, serta pembangunan aplikasi penanganan pengaduan masyarakat (Whistleblowing System (WBS)).	Penguatan Pengawasan Internal
194	Transparansi data pegawai yang terkena kasus pelanggaran administrasi.	Terkait data pegawai yang telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan ditindaklanjuti dengan Surat Teguran, telah diakomodir melalui aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Pencatatan Pelanggaran Disiplin Pegawai) yang datanya bersumber dari BKPSDM. Aplikasi SIGAP telah terintegrasi dengan Sistem Merit BKPSDM terkait informasi pelanggaran disiplin pegawai. Namun, data detail terkait kasus pelanggaran administrasi tersebut hanya bisa diakses oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Inspektur, dan Kepala BPKSDM karena untuk menjaga kerahasiaan, etika, dan privasi	Penguatan Pengawasan Internal
195	Perlu dilakukan pendampingan dan pengawasan sehingga dapat meminimalisir adanya temuan.	Pendampingan telah dilakukan secara berkala untuk seluruh Perangkat Daerah dan 2 RSUD terkait penatausahaan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BMD dan permaknaan. Pengawasan dilakukan pada Perangkat Daerah yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisa potensi risiko.	Penguatan Pengawasan Internal



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
196	Memprioritaskan perawatan, perbaikan serta pergantian pipa PDAM, agar kualitas air lebih bersih dan terjaga sampai ke pelanggan.	PDAM Surya Sembada telah melakukan perbaikan pipa di tahun 2022 dan telah mengalokasikan anggaran perbaikan dan investasi pipa sebagai prioritas di tahun 2023 dalam rangka pemenuhan cakupan layanan sebesar 100% dengan tekanan air 2 meter selama 24 jam bagi warga Kota Surabaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan reservoir di wilayah Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Pabean Cantian	Optimalisasi BUMD
197	Mempermudah pendaftaran atau pemasangan baru melalui RT, RW dan LPMK.	PDAM Surya Sembada telah memfasilitasi permohonan pasang baru melalui aplikasi PDAM maupun WargaKu serta berkoordinasi dengan kelurahan setempat untuk melakukan identifikasi bagi warga yang belum mendapatkan air bersih	Optimalisasi BUMD
198	Respon cepat ketika ada keluhan pelanggan terutama warga Kota Surabaya.	PDAM Surya Sembada telah memfasilitasi penanganan keluhan melalui call center 24 jam maupun aplikasi WargaKu yang direspon dalam waktu kurang dari 24 jam	Optimalisasi BUMD
199	Perlu menaikkan retribusi PD. Pasar Surya.	Penyesuaian iuran layanan pasar dan sewa stan di PD Pasar Surya mempertimbangkan hasil studi kelayakan, harga pasar dan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat	Optimalisasi BUMD
200	Penambahan anggaran PD. Pasar Surya secara signifikan untuk meningkatkan kualitas.	Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen untuk melakukan pemenuhan modal dasar dan penambahan penyertaan modal kepada PD Pasar Surya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi BUMD
201	Membuat Rancangan Peraturan Daerah terkait PD. Pasar Surya.	DPRD Kota Surabaya telah mengajukan Peraturan Daerah Prakarsa berkaitan dengan Perubahan Bentuk Hukum PD Pasar Surya. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama dengan PD Pasar Surya juga telah melakukan pembahasan konsep perubahan Peraturan Daerah tentang PD Pasar Surya dan akan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti	Optimalisasi BUMD



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
202	Mempercepat sertifikasi halal agar bisa diperjualbelikan melalui masyarakat luas, khususnya warga Kota Surabaya.	PD Rumah Potong Hewan telah mengajukan sertifikasi halal terhadap produk olahan daging yang dijual kepada masyarakat. Di sisi lain, pemotongan hewan RPH Pegirian telah memperoleh sertifikasi halal dan telah memiliki NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Optimalisasi BUMD
203	Produk olahan daging RPH dipasarkan melalui e-Peken.	Produk olahan daging RPH telah dipasarkan melalui aplikasi e-peken sejak tahun 2022	Optimalisasi BUMD
204	Inisiatif mengadakan Hari Bakso Surabaya yang bertujuan memasarkan hasil produk olahan RPH.	Pemerintah Kota Surabaya telah bekerjasama dengan PD Rumah Potong Hewan dalam hal pendistribusian daging beserta olahannya melalui e-Peken, sehingga meningkatkan minat masyarakat Kota Surabaya untuk mengonsumsi produk dari PD Rumah Potong Hewan baik produk daging beku kemasan dan produk olahan daging lainnya	Optimalisasi BUMD
205	Perlu adanya hari khusus untuk meningkatkan minat masyarakat mengonsumsi bakso atau produk olahan dari Rumah Pemotongan Hewan.	Pemerintah Kota Surabaya telah bekerjasama dengan PD Rumah Potong Hewan dalam hal pendistribusian daging beserta olahannya melalui e-Peken, sehingga meningkatkan minat masyarakat Kota Surabaya untuk mengonsumsi produk dari PD Rumah Potong Hewan baik produk daging beku kemasan dan produk olahan daging lainnya	Optimalisasi BUMD
206	Untuk RPH di Banjar Sugihan sebaiknya ditempatkan yang jauh dari pemukiman supaya tidak menimbulkan permasalahan di lingkungan sekitar masyarakat. Selain itu sistem sanitasinya juga harus baik agar tidak menimbulkan penyakit.	Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun rencana pengembangan usaha PD Rumah Potong Hewan dalam bentuk relokasi ke lokasi aset Pemerintah Kota Surabaya. Relokasi tersebut telah mempertimbangkan dampak sosial (pemberdayaan masyarakat) dan lingkungan (sanitasi dan pengelolaan limbah)	Optimalisasi BUMD



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
207	Untuk RPH di daerah Pegirian sebaiknya ada pembeda antara pemotongan babi dengan pemotongan hewan lainnya.	Pemerintah Kota Surabaya telah menyusun rencana pengembangan usaha PD Rumah Potong Hewan dalam bentuk relokasi ke lokasi aset Pemerintah Kota Surabaya. Relokasi tersebut juga mempertimbangkan pemisahan antara pemotongan babi dengan sapi dan kambing, untuk menjaga mutu daging PD Rumah Potong Hewan sebagai daging yang halal	Optimalisasi BUMD
208	Peningkatan kualitas pelayanan kepada pelajar yang bertujuan untuk edukasi.	KBS telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mempromosikan kepada siswa PAUD hingga SMP berkunjung ke KBS secara fisik maupun virtual. KBS juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan pada sarana pendidikan seperti museum satwa dalam rangka meningkatkan sarana prasarana di bidang edukasi di tahun 2023, yang telah dicantumkan pada RKAP Tahun 2023	Optimalisasi BUMD
209	Memanfaatkan UMKM Kota Surabaya untuk paket lunch box bagi pengunjung pelajar.	Pada tahun 2022, di area KBS sudah terdapat tenant-tenant UMKM yang dapat menyediakan snack/mamin bagi para pengunjung dengan biaya diluar dari harga tiket. KBS akan mempertimbangkan usulan tersebut dan berkoordinasi dengan Dinkopdag dan BPSDA untuk tindak lanjutnya	Optimalisasi BUMD
210	Pemanfaatan aset Pemerintah Kota Surabaya untuk supply pakan hewan.	KBS telah melakukan upaya pakan mandiri di Kebun Binatang Surabaya untuk memenuhi kebutuhan satwa KBS dan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk tindak lanjut usulan tersebut	Optimalisasi BUMD
211	Adanya photo booth atau photo box untuk oleh-oleh dokumentasi pengunjung KBS.	KBS telah menyediakan spot foto di dalam area KBS untuk dimanfaatkan bagi pengunjung, sedangkan fotografer tersedia di depan lobby tiket dengan biaya tersendiri	Optimalisasi BUMD
212	Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi KBS.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam bersama dengan KBS telah melakukan pembahasan konsep perubahan Peraturan Daerah tentang PD TS KBS dan akan disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti	Optimalisasi BUMD



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
213	Perlu upaya peningkatan kunjungan ke Kebun Binatang Surabaya.	PD TS KBS telah memprioritaskan upaya promosi atau pemasaran melalui sosial media dan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan untuk meningkatkan angka kunjungan ke KBS	Optimalisasi BUMD
214	Untuk Deviden agar diberikan setiap tahun ke Pemerintah Kota Surabaya karena distribusi profit kepada para pemilik saham adalah tujuan utama suatu bisnis.	PD TS KBS telah melakukan penyetoran dividen sebesar Rp1.506.203.050,- atas kinerja tahun 2019 kepada Pemerintah Kota Surabaya secara mengangsur	Optimalisasi BUMD
215	Menghimpun dan menyalurkan CSR dibawah koordinasi PT. SIER agar dimaksimalkan untuk masyarakat dan pembangunan Kota Surabaya.	PT SIER telah merealisasikan CSR tiap tahunnya berupa bantuan kepada UMKM binaan PT. SIER dan masyarakat sekitar area industri PT. SIER dan PIER	Optimalisasi BUMD
216	Mempromosikan Perumahan Graha Surya Nata kepada pegawai pemerintah dan warga Kota Surabaya.	PT Surya Karsa Utama telah mempromosikan kepada seluruh karyawan Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan unit rumah di Graha Surya Nata dengan harga yang relatif murah dan promo yang menarik	Optimalisasi BUMD
217	Melibatkan kelurahan dan kecamatan untuk mempromosikan lewat warga Kota Surabaya.	PT Surya Karsa Utama telah mempromosikan kepada warga Kota Surabaya melalui Kecamatan dan Kelurahan berkaitan dengan unit rumah di Graha Surya Nata dengan harga yang relatif murah dan promo yang menarik	Optimalisasi BUMD
218	Melibatkan BPR Surya Artha Utama untuk kredit properti di bawah PT. Surya Karsa Utama.	PT. Surya Karsa Utama telah melibatkan BPR Surya Artha Utama untuk pemberian kredit properti	Optimalisasi BUMD



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
219	Penerapan SOP di rumah sakit milik Pemerintah Kota, agar tidak kalah kualitas terkait pelayanan kesehatan dengan rumah sakit swasta.	Dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Bhakti Dharma Husada telah terakreditasi Paripurna pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan mutu RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada secara berkala melalui Survei Verifikasi setiap tahun dan Survei Akreditasi RS setiap 3 (tiga) tahun. 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap implementasi SOP yang berlaku di Rumah Sakit. 3. Meningkatkan kompetensi petugas dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. 4. Pemenuhan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
220	Efisiensi anggaran agar tidak mengurangi kualitas pelayanan di rumah sakit.	Upaya yang dilakukan RSUD Bhakti Dharma Husada adalah dengan terus menerapkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pelaksanaan pelayanan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
221	Penggunaan aplikasi yang bertujuan mempermudah pelayanan, contohnya seperti e-health.	Dalam mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat, RSUD Bhakti Dharma Husada telah menerapkan sinkronisasi aplikasi sebagai berikut: 1. Antrian online JKN Mobile dengan SIM RS dan E-Health. 2. Pendaftaran JKS penduduk Surabaya melalui E-Dabu. 3. Pendaftaran E-Klampid terkait pencatatan kependudukan. 4. Manajemen Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Wargaku, WA CS RSUD Bhakti Dharma Husada, Media sosial. 5. Rencana pengembangan dan sinkronisasi E-Rekam Medik hingga E-Resep.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
222	Harus ada fasilitas kesehatan untuk penanganan kasus covid-19 yang mempunyai saturasi dibawah 60.	RSUD Bhakti Dharma Husada telah melakukan pengembangan pelayanan Intensive Care Unit (ICU) sebanyak 9 TT dan Intensive Care Cardiac Unit (ICCU) sebanyak 1 TT, ICU Isolasi 2 TT	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
223	Perlu peningkatan kualitas SDM terutama yang melayani masyarakat secara langsung agar dapat lebih santun.	RSUD BDH telah meningkatkan kualitas SDM RSUD Bhakti Dharma Husada secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut: 1. Evaluasi dan monitoring penerapan 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) serta perbaikan Grooming dan Etiket karyawan RS menjadi lebih Humanis dan solutif 2. Evaluasi dan monitoring budaya organisasi (Core Value) RSUD Bhakti Dharma Husada yaitu kesembuhan dan kepuasan anda adalah kebahagiaan kami. 3. Melaksanakan pelatihan terkait service excellence terhadap SDM RSUD Bhakti Dharma Husada dengan mendatangkan tenaga pakar dari akademisi.	Peningkatan kualitas SDM Rumah Sakit.
224	Perlu perbaikan dalam sistem rujukan yang sebaiknya bisa diselesaikan secara online, tanpa masyarakat yang sakit bolak-balik.	Dalam melaksanakan Sistem Rujukan, RSUD Bhakti Dharma Husada telah dan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS melalui komunikasi antar PIC Fasilitas Kesehatan, serta didukung oleh sistem rujukan online yang telah terintegrasi (ehealth)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
225	RSUD Bhakti Dharma Husada sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, terutama dari sisi peralatan kesehatan.	RSUD Bhakti Dharma Husada telah menyusun Rencana Strategis / Business Plan Tahun 2021- 2026 yang mencakup rencana pemenuhan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada secara berkelanjutan sesuai dengan pengembangan pelayanan. Pada Tahun 2022, RSUD Bhakti Dharma Husada telah melakukan pengembangan pelayanan berupa ICU sebanyak 9 TT dan ICCU sebanyak 1 TT, ICU Isolasi 2 TT	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
226	Peningkatan pelayanan SOP, yang selama ini menjadi kendala utama.	RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan review SOP secara berkala setiap 2 tahun sekali. SOP yang sudah direview di tahun 2022 sebanyak 674 dari 1799 SOP.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
227	Meningkatkan koordinasi dengan OPD lain terkait upaya pelayanan kesehatan.	RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan koordinasi secara intensif dengan Perangkat Daerah lain terkait pelayanan kesehatan. Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain Dinas Kesehatan, DP3APPKB, Dinas Sosial, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
228	Penggunaan handy talky (HT) dan CCTV untuk menunjang kapasitas pelayanan administrasi di rumah sakit.	Tahun 2022, RSUD dr. M. Soewandhie telah melengkapi sarana/prasarana untuk menunjang kapasitas pelayanan administrasi RS seperti HT dan CCTV.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
229	Peningkatan kualitas SDM menuju rumah sakit yang profesional dan bertaraf internasional.	RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan, sekolah spesialis, workshop, serta berbagai jenis kursus lainnya. Serta telah dilakukan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar.	Peningkatan kualitas SDM Rumah Sakit.
230	Fasilitas pendukung RSUD dr. Mohamad Soewandhie harus diperhatikan, terutama terkait lahan parkir yang mengganggu lingkungan di sekitar RS.	Pada tahun 2022, RSUD dr. M. Soewandhie telah menyediakan lahan parkir di gedung baru. Koordinasi telah dilakukan dengan Dinas Perhubungan, Kecamatan/Kelurahan, serta dengan RW terkait, untuk mengurangi parkir liar di sekitar lingkungan. Di tahun 2023, akan dilakukan seleksi penyedia yang bersedia untuk menyewa dan mengelola lahan RSUD untuk parkir umum (basement).	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
231	Pelayanan Kesehatan Universal bagi penduduk yang belum memiliki NIK, harus dikoordinasikan secara sistem dengan pihak terkait, utamanya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, beserta BPJS Kesehatan. Diusahakan agar kecepatan pembuatan NIK nya di bawah 3 hari, agar dapat diklaim BPJS.	Tahun 2022, RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil dan BPJS, serta telah menunjuk PIC untuk berkomunikasi jika terdapat masalah dengan NIK pasien, agar pembuatan NIK dapat dipercepat. Selain itu, RSUD telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendaftarkan pasien yang belum punya NIK melalui E-DABU (elektronik data badan usaha) dari BPJS Kesehatan	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
232	Penerimaan pasien di meja depan harusnya lebih ditingkatkan lagi dengan membatasi interaksi petugas dengan gadget pribadi (HP), agar tidak terkesan main HP. Alat komunikasi dapat diganti dengan HT, sedangkan untuk pesan yang berupa gambar atau link, tetap dapat memakai WA yang dapat dilihat melalui layar PC (WA Desktop).	RSUD dr. M. Soewandhie telah melaksanakan rekomendasi terkait penggunaan WA Desktop untuk pelayanan di front office.	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi di rumah sakit melalui penggunaan alat pendukung pelayanan
233	Perlu peningkatan kualitas SDM terutama yang melayani masyarakat secara langsung agar dapat lebih santun.	RSUD dr. M. Soewandhie telah melakukan evaluasi secara rutin terhadap petugas front office untuk melayani dengan lebih baik. Selain itu, RSUD dr. M. Soewandhie juga sudah melakukan pelatihan pelayanan publik secara berkala.	Peningkatan kualitas SDM Rumah Sakit.
234	Sebagai BLUD, RSUD Dr. Mohamad Soewandhie sebaiknya dapat menuju kemandirian.	RSUD dr. M. Soewandhie telah berproses untuk melakukan pengelolaan anggaran RS secara mandiri.	Peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit melalui optimalisasi penggunaan dana untuk pelayanan kesehatan
235	Meningkatkan citra Satpol PP yang humanis.	Telah dilakukan pembinaan hardskill dan softskill secara intensif kepada setiap personel SATPOL PP Kota maupun SATPOL PP Kecamatan Kelurahan, dan dilakukan pertemuan secara rutin dengan mengundang Kasi Trantib dan Kasi Bantib. Sebelum melakukan penertiban, Satpol PP memastikan dilakukan sosialisasi dan pendekatan secara humanis, persuasif dan personal. Pendekatan preventif juga dilakukan, contohnya berupa edukasi dini pada siswa/siswi sekolah melalui Satpol PP Goes to School.	Peningkatan citra Satpol PP yang humanis



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
236	Lebih giat melakukan operasi yustisi selain rumah hiburan umum.	Telah dilakukan operasi yustisi bersama jajaran samping, yang tidak hanya menyasar RHU namun juga menyasar rumah kos, PMKS, PKL, reklame, dan bangunan liar. Khusus pengawasan orang asing pelaksanaannya bekerjasama dengan BAKESBANGPOL.	Ketentraman dan Ketertiban Umum
237	Penambahan personil untuk memenuhi target kinerja.	Telah dilakukan penambahan personil petugas, serta peningkatan kapasitas untuk seluruh personil Satpol PP dalam rangka peningkatan pelayanan trantibum kepada masyarakat.	Kapasitas Personil Satpol PP
238	Perlu dilakukan operasi berkala untuk menjaga ketertiban masyarakat.	Operasi berkala sudah dilakukan melalui sub kegiatan "Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan" dengan realisasi sebesar 10.205 Objek penertiban. Operasional dilakukan dengan patroli rutin yang juga melibatkan SATPOL PP kecamatan dan kelurahan serta kerjasama dengan jajaran samping.	Ketentraman dan Ketertiban Umum
239	Perlu dilakukan review terhadap target rasio pelanggaran yang ditetapkan sehingga di masa mendatang capaian tidak terlalu besar melampaui kewajaran.	Telah dilakukan review indikator tersebut, sehingga di RPJMD 2021-2026 terdapat indikator baru, yakni "Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan", dengan fokus penanganan pelanggaran PERDA/PERKADA sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap pelanggar sehingga dipastikan telah mematuhi ketentuan dan meminimalisir terjadinya perulangan pelanggaran.	Reviu Indikator
240	Petugas Satpol PP harus dibekali pengetahuan tentang dasar hukum saat pelaksanaan penegakan PERDA di lapangan.	Peningkatan kapasitas SDM SATPOL PP telah dilakukan melalui pelatihan softskill yang juga memuat materi dasar hukum saat pelaksanaan penegakan PERDA serta materi terkait pemahaman SOP, bagi Satpol PP pusat, Kecamatan dan Kelurahan.	Kompetensi SDM Satpol PP dalam penegakan PERDA.



No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang diselesaikan
241	Sosialisasi terkait rokok ilegal terhadap pelaku usaha dengan menggandeng jajaran samping.	Pada tahun 2021 telah dilaksanakan sosialisasi rokok ilegal dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Tanjung Perak. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan-Kecamatan dengan pembicara dari Kantor Bea Cukai, dan pada tahun 2022 telah dilakukan sosialisasi terkait cukai hasil tembakau ilegal terhadap pelaku usaha dan masyarakat pada bulan November dan Desember di 6 kecamatan, dengan menggandeng Dirjen Bea Cukai Kanwil Jatim, kejaksaan, dan jajaran samping lainnya. Sosialisasi juga dilakukan melalui media massa.	Sosialisasi dampak rokok ilegal baik untuk kesehatan maupun untuk penerimaan negara dari cukai rokok
242	Anggaran kegiatan atau sub kegiatan lain yang tidak terpakai dialokasikan kepada kegiatan reses.	Anggaran kegiatan lain yang tidak terpakai telah dialokasikan untuk kegiatan reses.	Efektifitas Alokasi Anggaran
243	Digitalisasi berkas untuk dapat diakses oleh Anggota DPRD sesuai dengan tupoksi masing-masing.	Proses digitilisasi berkas telah dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pembuatan aplikasi digitalisasi berkas.	Digitalisasi berkas lingkup Sekretariat DPRD



3.4 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Kerjasama

Kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama dengan pihak luar negeri merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menjalin kerjasama dengan pemerintah kota-kota lain di dalam maupun luar negeri menjadi sesuatu kebutuhan, oleh karena itu diperlukan berbagai upaya agar kerjasama yang telah dilakukan dapat terus berkembang, baik jumlah mitra kerjasama maupun kualitas program dan kegiatan kerjasama dalam mendukung terwujudnya Kota Surabaya sebagai kota jasa dan perdagangan yang cerdas, manusiawi, bermartabat, dan berwawasan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya baik dengan lembaga/instansi di dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
1	Akademi Akupuntur Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
2	Akademi Kuliner dan Patiseri Ottimmo International	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
3	Akademi Refraksi Optisi Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
4	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Surabaya	Pelayanan Perizinan Terpadu Berupa Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Karimunjawa	Pelayanan Perizinan Terpadu Berupa Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya
6	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Kerjasama Pembangunan Daerah
7	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
8	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya
9	Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	Pelayanan Perizinan Terpadu Berupa Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya
10	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II	Pelayanan Publik Terpadu Berupa Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya
11	Mayapada Hospital Surabaya	Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Pemerintah Kota Jambi	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Pengembangan Ekosistem Cerdas, Sektor Ekonomi, dan Data Kelola Lingkungan di Kota Surabaya
14	Politeknik Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
15	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Penyediaan Layanan Pembayaran Non Tunai di Kota Surabaya
16	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Penyediaan Layanan Pembayaran Non Tunai di Kota Surabaya
17	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Surabaya	Penyediaan Layanan Pembayaran Non Tunai di Kota Surabaya
18	PT GoTo Gojek Tokopedia	Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Kota Surabaya Melalui Aplikasi Gojek
19	PT Secondmuse Indonesia International	Pendampingan Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Kota Surabaya
20	PT Sumber Alam Abadi Sempurna	Relokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Semolowaru
21	Pusat Koperasi Angkatan Laut Komando Armada II Surabaya	Pengembangan Pariwisata di Kota Surabaya
22	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
23	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adi Husada	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
24	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Griya Husada Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
25	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
26	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi - Almamater Wartawan Surabaya (AWS)	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
27	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Hikmah Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
28	SMK Kesehatan Nusantara Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
29	Universitas 45 Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
30	Universitas Anwar Medika	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
31	Universitas Bhayangkara	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
32	Universitas Dinamika	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
33	Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
34	Universitas Hang Tuah Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
35	Universitas Katolik Darma Cendika	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
36	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
37	Universitas Kristen Petra	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
38	Universitas Merdeka Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
39	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
40	Universitas Narotama	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
41	Universitas Pelita Harapan Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
42	Universitas Surabaya (UBAYA)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
43	Universitas Teknologi Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
44	Universitas Widya Kartika	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
45	Yayasan Putera Sampoerna	Peningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan di Kota Surabaya
46	Yayasan Dinamika Edukasi Dasar	Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak di Kota Surabaya
47	Yayasan Edukasi dan Akselerasi Ekspor Indonesia Digital	Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal di Kota Surabaya
48	Yayasan Plan Internasional Indonesia	Penguatan Kapasitas Kaum Muda Untuk Kesiapan Kerja dan Pengembangan Kewirausahaan di Kota Surabaya
49	Yayasan Quali International Surabaya	Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak di Kota Surabaya
50	Yayasan Trampil Indonesia	Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak di Kota Surabaya
51	Yayasan Wahana Visi Indonesia	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat DI Kota Surabaya
52	PT Radar Media Surabaya	Penyelenggaraan Publikasi di Kota Surabaya
53	Hotel Oakwood Hotel And Residence	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
54	Hotel Double Tree	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
55	Hotel Mercure Grand Mirama	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
56	Hotel Vasa Surabaya	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
57	Hotel Java Paragon	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
58	Hotel Aria Centra Surabaya	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
59	Hotel Grand Inna Tunjungan	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
60	Hotel Santika Premiere Gubeng	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
61	Hotel Arcadia Surabaya by Horison	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat DI Kota Surabaya
62	Hotel Harris Gubeng	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
63	Hotel Ciputra World	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
64	Hotel Varna	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
65	Hotel Bekizaar	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
66	Hotel Garden Palace	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
67	Hotel Midtown Residence	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
68	Hotel Grand Dafam	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
69	Hotel Midtown	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
70	Hotel Ibis Surabaya City Center	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
71	Ibis Budget Diponegoro	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
72	POP! Hotel Gubeng	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
73	Khas Surabaya Hotel	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
74	Pop Stasiun Kota	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
75	Hotel Pop Diponegoro	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
76	Hotel Gunawangsa Merr	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
77	Hotel 88 Embong Malang	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
78	Hotel Deka	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
79	Hotel Goldvitel Surabaya	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
80	Hotel Fave Mex Tunjungan	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
81	Novotel Surabaya Hotel & Suites	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
82	Platinum Hotel Tunjungan Surabaya	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
83	Hotel JW Marriott Surabaya	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
84	Hotel Sheraton Surabaya Hotel & Towers	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
85	Hotel Majapahit Surabaya Mgallery	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
86	Harris Hotel & Convention Bundaran Satelite	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
87	Hotel Artotel TS Suites	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
88	Hotel Ibis Styles Surabaya Jemursari	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
89	Hotel Regantris Surabaya	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
90	Hotel Swiss-Belinn Tunjungan	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
91	Hotel Great Diponegoro	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
92	Hotel Dafam Pacific Caesar	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
93	Hotel Red Planet	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
94	Hotel Choice City	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
95	Hotel 88 Kedungsari	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
96	Best Hotel	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
97	Hotel 88 Embong Kenongo	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
98	Favehotel Rungkut Surabaya	Penggunaan Produk UMKM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Surabaya
99	PT Jawa Pos Koran	Penyelenggaraan Publikasi di Kota Surabaya
100	PT Mega Ozora Venture	Pengembangan Ekosistem Usaha Rintisan Digital di Kota Surabaya
101	PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama	Sinergi Pembangunan di Kota Surabaya
102	Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri	Rujukan Pelayanan Kesehatan
103	PT Aneka Kimia Inti	Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
104	Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya (Polrestabes)	Pelayanan Publik Terpadu Berupa Mal Pelayanan Publik di Kota Surabaya
105	- PT Home Center Indonesia - PT Foods Beverages Indonesia - PT Kawan Lama Sejahtera - D108PT Ace Hardware Indonesia Tbk	Sinergi Pembangunan di Kota Surabaya
106	PDAM Surya Sembada Kota Surabaya	Kerjasama Sinergi Pembangunan di Kota Surabaya
107	Rumah Sakit Ibu dan Anak Nur Ummi Numbi Surabaya	Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
108	Rumah Sakit Manyar Medical Centre	Sinergi Program Pembangunan di Kota Surabaya
109	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila
110	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur	Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
111	Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA	Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya
112	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga	Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kota Surabaya
113	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga	Sinergitas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dengan Program Padat Karya di Kota Surabaya
114	Fakultas Farmasi Universitas Surabaya (UBAYA)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
115	Fakultas Farmasi Universitas Surabaya (UBAYA)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat DI Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
116	Fakultas Hukum Universitas Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
117	Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya (UC)	Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan Dokter Program Profesi Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya
118	Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Kesehatan
119	Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya (UBAYA)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
120	Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya (UBAYA)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
121	Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya (UBAYA)	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya
122	Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Keperawatan dan Kebidanan
123	Fakultas Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Kota Surabaya
124	Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (UNAIR)	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
125	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
126	Institut Teknologi Telkom Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
127	Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Beasiswa Pendidikan Bagi Warga Kota Surabaya Berprestasi Yang Menempuh Pendidikan Pada Madrasah Aliyah (MA) Dan/Atau Ulya (Pondok Pesantren) Negeri Dan/Atau Swasta
128	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
129	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
130	Politeknik NSC Surabaya	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Kota Surabaya
131	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Penyediaan Layanan Non Tunai Dalam Rangka Penerimaan Tarif Layanan Bus Surabaya, Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir
132	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk	Pelaksanaan Layanan Kartu Identitas Anak (KIA) Untuk Transaksi Pembayaran Secara Tertutup Dengan Aplikasi Katepay
133	PT GoTo Gojek Tokopedia	Revitalisasi, Digital Marketing, dan Pelatihan Usaha Mikro di Kota Surabaya
134	PT Pos Indonesia (Persero)	Penyaluran Bantuan Pulsa/Paket Data
135	PT Secondmuse Indonesia International	Pelatihan dan Pendampingan Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) di Kota Surabaya
136	PT Sumber Alam Abadi Sempurna	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Semolowaru Pengganti
137	PT Win Win Realty Centre	Peningkatan Kualitas Jalan dan Saluran di Jalan Bintang Diponggo di Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan
138	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Rsud Bhakti Dharma Husada
139	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Hang Tuah Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dinas Sosial Kota Surabaya
140	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Dinas Sosial
141	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Dinas Kesehatan



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
142	Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
143	Universitas Airlangga (UNAIR)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
144	Universitas Ciputra Surabaya (UC)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
145	Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Dinas Sosial Kota Surabaya
146	Universitas Dr. Soetomo (Unitomo)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
147	Universitas Hang Tuah Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
148	Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
149	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA)	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
150	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
151	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya	Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
152	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
153	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
154	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN)	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
155	Universitas PGRI Adi Buana Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
156	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Administrasi Kependudukan
157	Universitas Wijaya Putra Surabaya	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Program Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Adminsitration Kependudukan
158	Yayasan Dinamika Edukasi Dasar	Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak di Kota Surabaya
159	Yayasan Plan Internasional Indonesia	Penyelenggaraan Program Work In Tech (Wit) dan Program Youth Excellence For Smart Technology (Yestech) di Kota Surabaya
160	Yayasan Quali International Surabaya	Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak di Kota Surabaya
161	Yayasan Trampil Indonesia	Pelaksanaan Program Organisasi Penggerak di Kota Surabaya
162	Yayasan Putera Sampoerna	Program Beasiswa Pelatihan Daring Guru Binar Untuk Guru-Guru Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
163	- PT Bank Central Asia, Tbk - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Utama Surabaya	Penyediaan Layanan Non Tunai Dalam Rangka Penerimaan Tarif Layanan Bus Surabaya
164	PT Intiland Grande	Hibah Gedung Serba Guna di Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep
165	Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
166	PT Radar Media Surabaya	Dukungan Publikasi Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup
167	PT Bank Central Asia, Tbk	Penyediaan Layanan Non Tunai Dalam Rangka Pembayaran Tarif Retribusi dan Sewa Rumah Susun Sederhana
168	Hotel Royal Regantris Cendana	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Surabaya
169	Hotel Regantris Surabaya	Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Surabaya



No	Mitra Terkait	Bidang/Ruang Lingkup
170	PT Jawa Pos Koran	Dukungan Publikasi Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup
171	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Surabaya
172	PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama	Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
173	PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 8 Surabaya	Pengawasan Keamanan Operasional dan Jalur Kereta Api Pada Perpotongan Tidak Sebidang (Crossing) Dengan Jalur Kereta Api Untuk Penanaman Kabel Fiber Optik di Jalur Kereta Api di Kota Surabaya
174	Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya (UC)	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Mohamad Soewandhie Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya
175	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN)	Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran, Pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya
176	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN)	Dukungan Pendirian Fakultas Kedokteran, Pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kota Surabaya Pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya
177	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Penyediaan Layanan Non Tunai Dalam Rangka Penerimaan Tarif Layanan Bus Surabaya, Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir
178	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Surabaya	Penyediaan Layanan Non Tunai Dalam Rangka Penerimaan Tarif Layanan Bus Surabaya, Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir
179	Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya	Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Program Sinergitas Pembangunan Kota Surabaya
180	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Utama Surabaya	Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan

Sumber: Bagian Hukum dan Kerjasama, Tahun 2023



3.5 PENGHARGAAN TAHUN 2022

Beberapa penghargaan yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28
Penghargaan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2022

NO	TANGGAL	JUDUL PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
1	12 Januari 2022	Penghargaan Gubernur Jawa Timur, Bupati / Walikota Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tingkat Provinsi Jawa Timur	Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	17 Januari 2022	Penganugerahan Baznaz Award 2022 Dalam Rangka HUT BAZNAZ Ke-21	BAZNAZ
3	16 Januari 2022	Penghargaan Atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 Kepada Pemerintah Daerah	KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM
4	11 Maret 2022	Apresiasi Sukses Memimpin Di Tengah Krisis Kategori "Menggerakkan Konsumsi Produk Lokal Dan Sehatkan Ekonomi Rakyat"	JTV
5	31 Maret 2022	Penghargaan Hut Beritajatim Ke 16 Th Sebagai NOMINATOR JATIM RP AWARD 2022	Berita Jatim
6	18 Mei 2022	Penghargaan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Yang Memperoleh Peringkat II Dengan Kategori AA "Sangat Memuaskan" Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2021	Arsip Nasional Indonesia
7	05 Juli 2022	Apresiasi Atas Peran Aktifnya Dalam Membantu Tugas - Tugas Kepolisian Di Segala Bidang Sehingga Dapat Memajukan Organisasi Polri Dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Di Wilayah Jawa Timur	POLDA JATIM
8	06 Juli 2022	Pemimpin Terpopuler di Media Arus Utama 2022 Kategori Wali Kota	SERIKAT PERUSAHAAN PERS (SPS) PUSAT
9	20 Juli 2022	Penganugerahan Penghargaan Nirwasita Tantra Tahun 2021	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



NO	TANGGAL	JUDUL PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
10	22 Juli 2022	Penganugrahan Apresiasi KLA Tahun 2022	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI
11	28 Juli 2022	Penghargaan Dan Apresiasi Kepada Walikota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Atas Terbentuknya "Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental" di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
12	05 Agustus 2022	Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2022, Kategori Terpopuler di Media Online 2021	HUMAS INDONESIA
13	05 September 2022	Penghargaan Rekor Muri Terkait Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih	KEMENTERIAN DALAM NEGERI
14	05 September 2022	Inagurasi Indonesia Visionary Leader 2022 Kategori "Best Leadership In Economic Recovery"	MNC PORTAL INDONESIA
15	12 September 2022	Pembina Proklamasi Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	DLH PROVINSI JAWA TIMUR
16	12 Oktober 2022	Peringkat 1 ASN Achievement Awards Tahun 2022, kategori lembaga pelatihan pengembangan kompetensi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022	PROVINSI JAWA TIMUR
17	19 Oktober 2022	Award Peduli Ketahanan Pangan Tahun 2022 Kategori Bidang Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau	PROVINSI JAWA TIMUR
18	30 Oktober 2022	Pembina Kader Pemuda Pancasila Kota Surabaya	PEMUDA PANCASILA
19	14 November 2022	Keberhasilan Menyusun Dan Menyajikan Laporan Keuangan Th 2021 Dengan Opini WTP	KEMENTERIAN KEUANGAN RI
20	15 November 2022	Kabupaten / Kota Di Jawa Timur Yang Telah Mencapai Universal Health Coverage (UHC)	PROVINSI JAWA TIMUR
		Kota Dengan Inovasi Pergerakan Sasaran Pelaksanaan Imunisasi Tambahan MR (BIAN) Dengan Pelibatan Berbagai Lintas Sektor, Mitra, Akademi (Pentahelix)	
		Telah Lolos Verifikasi Penelian Kabupaten / Kota Sehat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022	



NO	TANGGAL	JUDUL PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN
21	06 Desember 2022	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022	
		Atas Inovasi Dandan Omah : Meningkatkan Kualitas Rumah Tinggal Melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Sebagai Top 15 Kelompok Khusus Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022	
		Atas Inovasi SIAGUS : Sistem Inovasi Guru Surabaya Sebagai Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2022	
22	12 Desember 2022	Sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2021	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
23	14 Desember 2022	Penilaian Pemenuhan Standar Teknis Kawasan atas Pencapaian Kinerja Pemenuhan Standart Teknis Kawasan Peruntukan Industri pada Kawasan Peruntukan Industri Kota Surabaya dengan Predikat Baik	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN
24	16 Desember 2022	Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi	UNAIR
25	16 Desember 2022	Tokoh Penggerak Reformasi Birokrasi Di Kota Surabaya	UNAIR
26	18 Desember 2022	Tari Remo Oleh Pelajar Serentak Disitus Sejarah dan Jembatan Terbanyak	MUSEUM REKOR- DUNIA INDONESIA
27	23 Desember 2022	Innovative Government Award (IGA) 2022 Sebagai Kota Terinovatif	KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2023



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

4.1.1 Identifikasi Tugas Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat Daerah Atasnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, lalu dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota/Kabupaten, serta dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN. Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2022 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.

4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Pemerintahan yang diberikan kepada Tingkat Pemerintahan di bawahnya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwa wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan dan tidak memiliki Desa, sehingga Pemerintah Kota Surabaya tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan dibawahnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan bahwa Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota adalah dana yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, atau Kota kepada Desa.



4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2022 tidak mendapatkan anggaran Tugas Pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi serta tidak melaksanakan tugas pembantuan kepada tingkat Pemerintahan dibawahnya.



BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Surabaya Tahun 2022 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya selama satu tahun anggaran. LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2022 tersebut merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan, baik berupa capaian makro maupun mikro yang diukur berdasarkan capaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Surabaya serta rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026. LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sepanjang Tahun Anggaran 2022 pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya tetap dapat dilaksanakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan kota. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan capaian nilai Indikator Kinerja Utama antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,51%; Indeks Gini sebesar 0,388; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,62%; Persentase Penduduk Miskin sebesar 4,72%; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 82,74; Indeks Harmoni Sosial sebesar 80,08; Indeks Infrastruktur sebesar 0,672; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) sebesar 70,84; Indeks Reformasi Birokrasi menjadi A dengan nilai 80,14; Indeks Penanggulangan Bencana, Ketentraman dan Ketertiban Kota sebesar 0,93.

Cukup optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dapat diraih tidak terlepas dari daya upaya dan kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya, DPRD, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berlandaskan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.



Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama, terutama dalam menghadapi tantangan setelah pandemi Covid-19. Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya pada masa yang akan datang dan membawa Kota Surabaya sebagai Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan. Semoga niat dan langkah baik kita selalu mendapat ridho dari Allah SWT.

Surabaya, Maret 2023

Walikota Surabaya

ERI CAHYADI



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

TAHUN 2023

ALUN-ALUN
SURABAYA